

TURNING THE PAGE FOR A BALANCED AND **SUSTAINABLE GROWTH**

Memasuki Tahap Pertumbuhan yang Seimbang dan Berkelanjutan



2016
Laporan Tahunan
Annual Report

TURNING THE PAGE FOR BALANCED

AND SUSTAINABLE GROWTH

Memasuki Tahap Pertumbuhan yang Seimbang dan Berkelanjutan

Seiring dengan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional serta fokus pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat, IIF senantiasa memaksimalkan perannya sebagai lembaga keuangan yang menjadi pelopor katalisator pembiayaan pengembangan infrastruktur nasional. Intensitas pengembangan infrastruktur dalam negeri yang tinggi tentunya memaksimalkan peran IIF yang bergerak dalam aspek pembiayaan melalui produk-produk investasi maupun jasa *advisory* yang ditawarkan. Seiring meningkatnya kapasitas usaha IIF di tahun ini tentunya membawa Perusahaan memasuki babak baru dalam rencana pengembangan yang berkelanjutan.

Tema "*Turning The Page for Balanced and Sustainable Growth* (Memasuki Tahap Pertumbuhan yang Seimbang dan Berkelanjutan)" dalam Laporan Tahunan IIF 2016, merefleksikan era baru yang dijalani Perusahaan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis yang dicanangkan. Setelah sebelumnya melakukan penguatan pilar-pilar usaha, maka saat ini merupakan saatnya bagi IIF untuk meraih momentum dengan menciptakan peningkatan kinerja bisnis yang signifikan.

In line with positive trend of national economic growth and the government's focus in improving the availability of infrastructure for the public, IIF continues to maximize its role as a financial institution that becomes the pioneer of national infrastructure development financing catalyst. Active development of national infrastructure certainly maximizes IIF's role that is engaged in the financing sector through investment products and advisory services that IIF offers. The increasing business capacity of IIF this year has led the Company to enter the next level of sustainable development.

"Turning the Page for a Balanced and Sustainable Growth" theme of IIF's 2016 Annual Report reflects the new era that the Company is going through in achieving its business goals. After strengthening business pillars in the previous years, it is time for IIF to utilize the momentum to significantly improve business performance.



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis dalam bidang pengembangan dan pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Adakalanya kata "IIF" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

This Annual Report contains financial conditions, operational results, projections, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company does not guarantee that all information presented herein will bring specific results as expected.

This Annual Report also contains the word "Company", hereinafter referred to as PT Indonesia Infrastructure Finance, as the company that runs business in the field of commercially viable infrastructure project development and financing. The word "IIF" is occasionally used to simply refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT

KILAS KINERJA 2016

Flashback Performance of 2016

- 4 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Key Financial Data Highlights
- 5 **Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Key Financial Data Highlights Chart

LAPORAN MANAJEMEN

Management Reports

- 8 **Laporan Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Report
- 16 **Laporan Direksi**
Board of Directors Report

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

- 30 **Data Perusahaan**
Corporate Data
- 31 **Sekilas Perseroan**
Company at a Glance
- 32 **Jejak Langkah**
Milestones
- 34 **Peristiwa Penting 2016**
2016 Event Highlights
- 39 **Visi dan Misi**
Vision and Mission
- 40 **Produk dan Layanan**
Products and Services
- 42 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders' Composition

43	Struktur Organisasi Organization Structure
44	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
53	Profil Direksi Board of Directors Profile
59	Profil Manajemen Eksekutif Executive Management Profile
60	Lokasi Proyek Project Location

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

	Overview on Business Support
66	Manajemen Risiko Risk Management
71	Sumber Daya Manusia Human Resources
77	Teknologi Informasi Information Technology

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

	Management Discussion and Analysis
82	Tinjauan Umum Overview
84	Infrastruktur Untuk Pembangunan Bangsa Infrastructure For National Development
85	Kemajuan Infrastruktur 2016 2016 Infrastructure Development
91	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview Per Business Segment
92	Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis
97	Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Material Fact After Balance Sheet Date
98	Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Rare and Extraordinary Events
98	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, or Capital/Debt Restructuring
98	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Pihak Afiliasi Information on Material Transaction Containing Conflict of Interest with Affiliated Parties
98	Informasi Transaksi Dengan Pihak Berelasi Information On Transaction With Related Parties
98	Transaksi Derivatif dan Lindung Nilai Derivative Transaction And Hedging
98	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes In Laws and Regulations That Have Significant Impact On The Company's Performance
98	Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada Tahun Buku 2016 Changes In Accounting Policy That were Implemented In 2016 Fiscal Year
99	Kebijakan Dividen Dividend Policy
99	Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds From Public Offering
99	Industri Infrastruktur di Indonesia dan Prospek Usaha Perseroan Infrastructure Industry In Indonesia and The Company's Business Outlook
101	Aspek Pemasaran Marketing Aspect

104	Strategi Perseroan Company's Strategy
105	Prospek Usaha Business Outlook

TATA KELOLA PERUSAHAAN

	GOOD CORPORATE GOVERNANCE
110	Dasar Hukum dan Prinsip Penerapan GCG Legal Basis and Principles of GCG Implementation
113	Struktur Tata Kelola Governance Structure
114	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
117	Dewan Komisaris Board of Commissioners
121	Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under Board of Commissioners
134	Direksi Board of Directors
141	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation Between Board of Commissioners and Board of Directors
143	Komite di Bawah Direksi Committees under The Board of Directors
154	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
156	Audit Internal Internal Audit
159	Auditor Eksternal External Auditor
160	Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Conduct and Corporate Culture
164	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
165	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
166	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
167	Perkara Penting 2016 Legal Cases in 2016
167	Sanksi Administratif Administrative Sanction
167	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Employee Stock Option Plan
167	Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedure of Goods and Services Procurement
169	Akses Informasi Perusahaan Access To Company Information

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

	Corporate Social Responsibility
173	Tanggung Jawab Sosial Perseroan Di Bidang Lingkungan Corporate Social Responsibility To The Environment
174	Tanggung Jawab Sosial Perseroan Di Bidang Sosial Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility in Social Community Field
175	Tanggung Jawab Perseroan Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility In Manpower and Occupational Health and Safety
178	Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Klien Corporate Responsibility To Clients

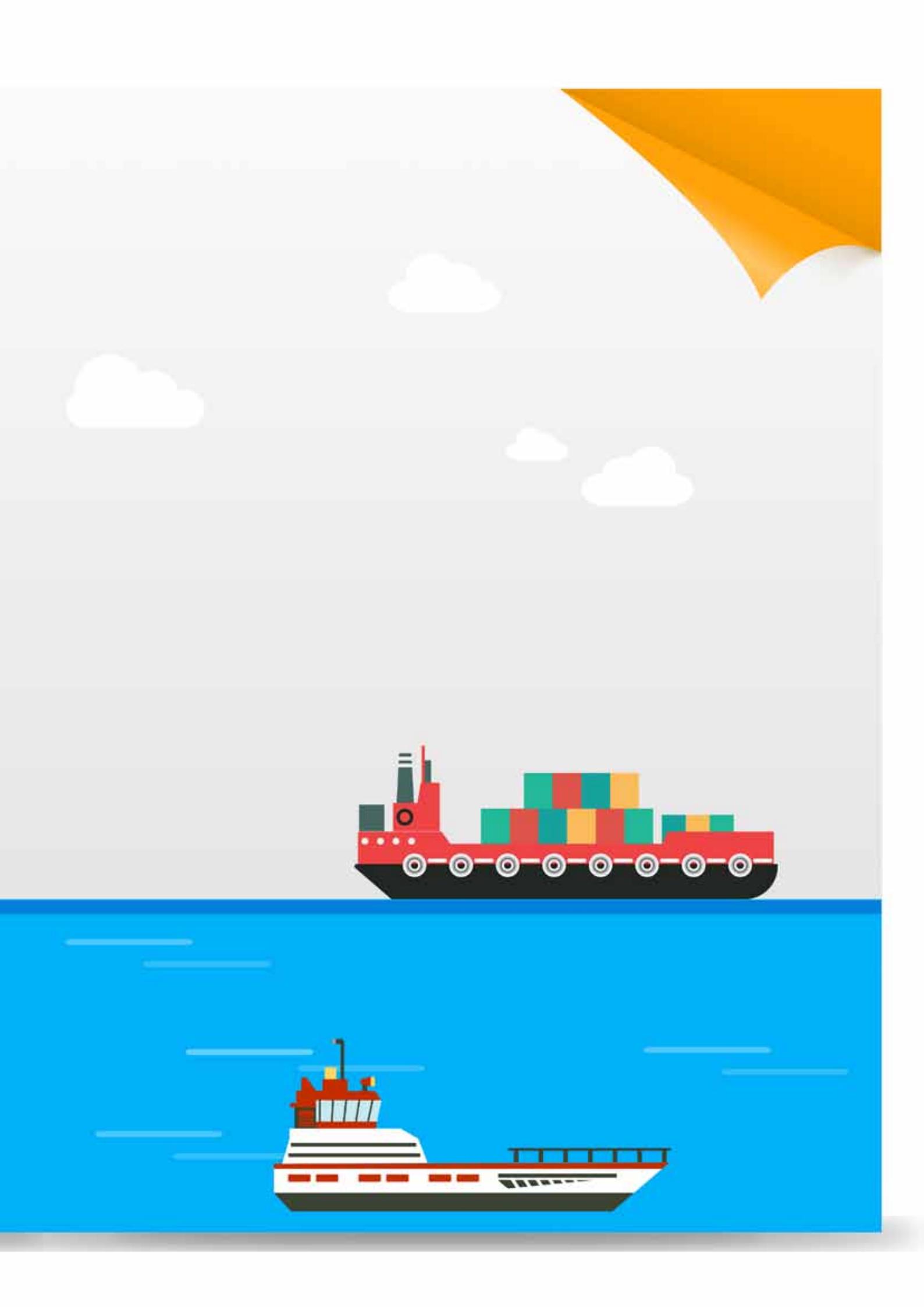
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Indonesia Infrastructure Finance

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kilas Kinerja 2016

Flashback Performance of 2016





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Ringkasan Laporan Keuangan dan Rasio (Rp juta)
Summary of Financial Statements and Ratios (Rp million)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Description
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF						STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan usaha	65.768	124.916	291.833	306.347	543.547	Revenues
Beban usaha	(50.512)	(91.573)	(169.904)	(202.921)	(406.443)	Expenses
Laba sebelum pajak	15.256	33.343	121.929	103.426	137.104	Income before tax
(Beban) manfaat pajak	(930)	(5.807)	(30.105)	(28.786)	(35.311)	Tax (expense) benefit
Laba setelah pajak	14.326	27.536	91.824	74.640	101.793	Income after tax
Pendapatan komprehensif lain	(84)	3.809	2.234	(2.847)	(19.365)	Other comprehensive income
Laba komprehensif	14.242	31.345	94.058	71.793	82.428	Comprehensive income
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Kas dan setara kas	1.783.281	2.461.933	2.645.625	1.025.744	3.538.279	Cash and cash equivalents
Surat berharga dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	152.487	366.332	268.808	905.166	2.428.246	Securities and marketable securities purchased under resale agreement
Investasi saham	-	-	167.925	144.566	114.106	Equity Investments
Pinjaman diberikan	-	993.489	1.610.886	3.371.328	4.569.601	Loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.184)	(19.005)	(28.426)	(60.732)	Allowance for impairment losses
Aset pajak tangguhan	19.435	30.446	31.000	27.589	22.349	Deferred tax assets
Lain-lain	13.839	16.448	44.009	63.022	178.914	Others
Jumlah aset	1.969.042	3.865.463	4.749.248	5.508.989	10.790.763	Total assets
Utang lain-lain dan beban masih harus dibayar	11.835	19.510	50.460	44.576	45.217	Other payables and accrued expenses
Pinjaman diterima	-	-	348.566	528.355	4.281.483	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	778.350	2.031.864	2.441.210	2.720.354	2.628.137	Subordinated loans
Penerbitan obligasi	-	-	-	-	1.519.933	Bond issuance
Lain-lain	5.279	4.419	5.285	7.629	25.491	Others
Jumlah liabilitas	795.464	2.055.793	2.845.521	3.300.914	8.500.261	Total Liabilities
Modal saham	1.175.000	1.175.000	1.770.868	2.000.000	2.000.000	Capital Stock
Tambahan modal disetor	17.500	17.500	26.378	29.800	29.800	Additional paid-in capital
Uang muka modal saham dipesan	-	604.746	-	-	-	Advances for capital stock subscription
Pendapatan komprehensif lain	-	3.123	5.302	2.165	(16.682)	Other comprehensive income
Laba ditahan (akumulasi kerugian)	(18.922)	9.300	101.179	176.110	277.384	Retained earnings (deficit)
Jumlah ekuitas	1.173.578	1.809.669	1.903.727	2.208.075	2.290.502	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	1.969.042	3.865.463	4.749.248	5.508.989	10.790.763	Total liabilities and equity
Pengembalian terhadap ekuitas	1,3%	1,8%	4,9%	3,6%	4,5%	Return on equity
Pengembalian terhadap aset	1,0%	0,9%	2,1%	1,4%	1,3%	Return on assets
Rasio utang terhadap ekuitas	0,66x	1,12x	1,47x	1,47x	3,66x	Debt to equity ratio

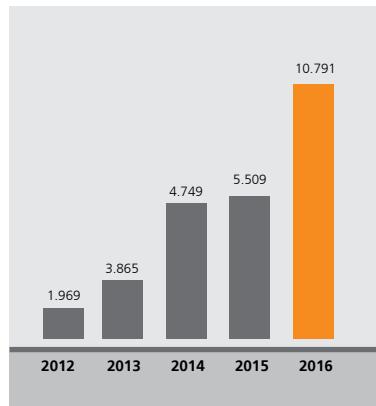
Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights Chart

Total Aset

Total Assets

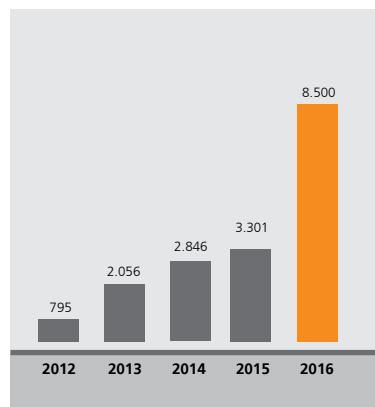
Rp miliar / Rp billion



Liabilitas

Liability

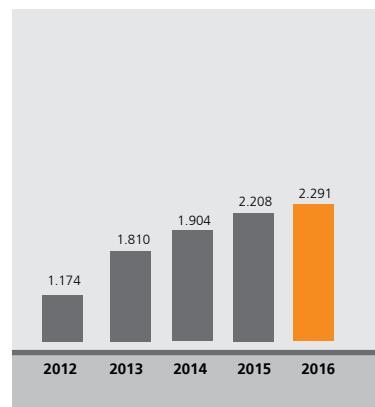
Rp miliar / Rp billion



Total Ekuitas

Total Equity

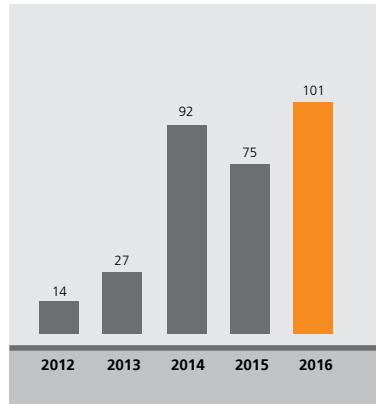
Rp miliar / Rp billion



Laba Bersih Setelah Pajak

Income after tax

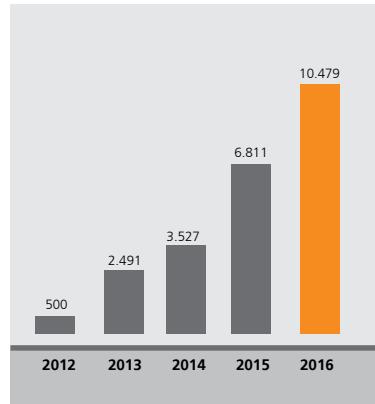
Rp miliar / Rp billion



Total Komitmen Kotor

Total Gross Commitment

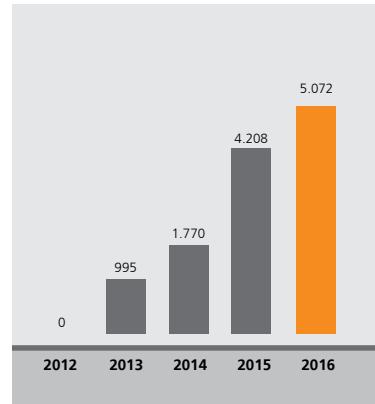
Rp miliar / Rp billion



Total Aset Investasi

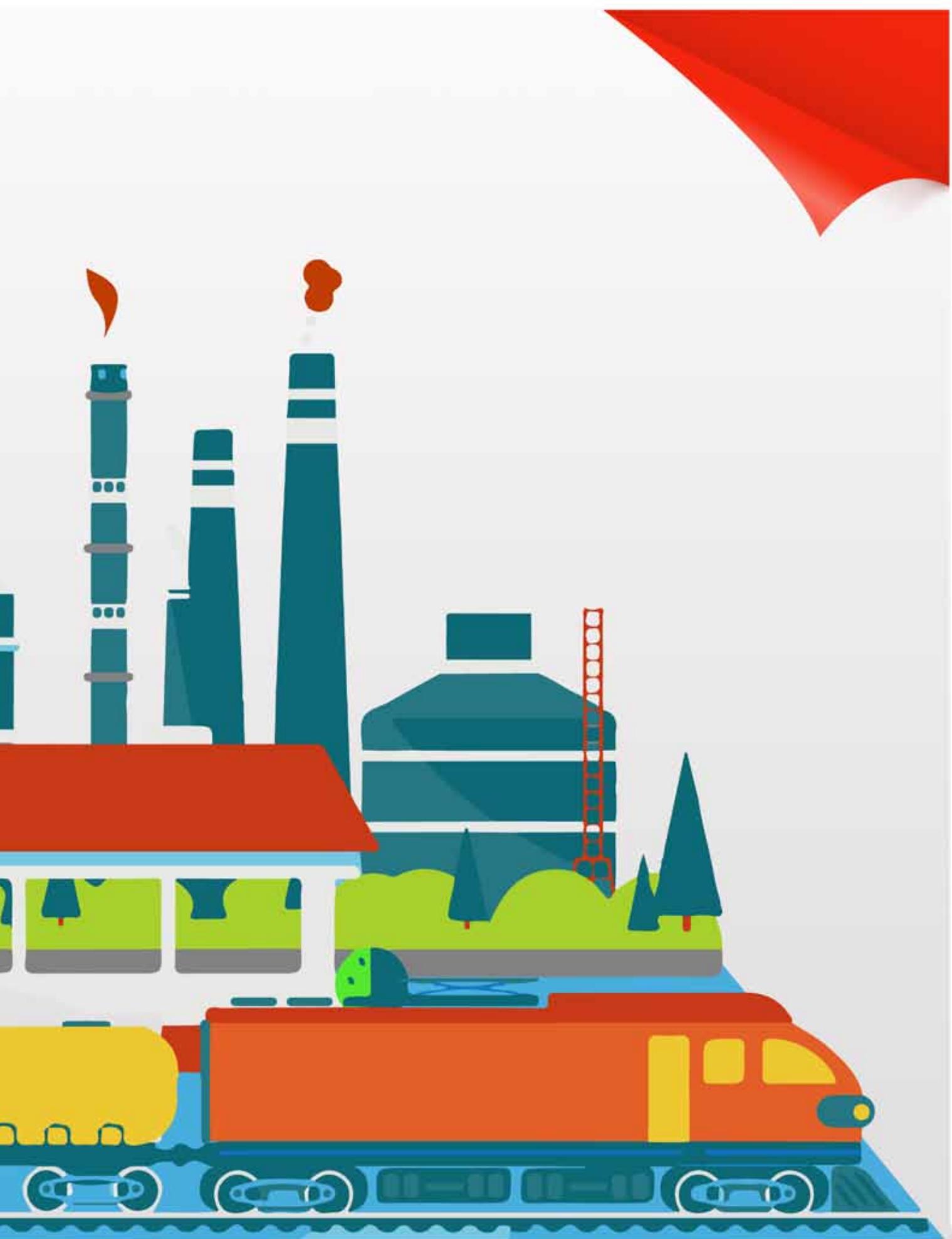
Total Investment Asset

Rp miliar / Rp billion



Laporan Manajemen **Management Report**





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



M. Chatib Basri

Presiden Komisaris - Komisaris Independen
President Commissioner - Independent Commissioner

IIF berhasil memperoleh 10 (sepuluh) kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.781 miliar, sehingga total gross commitment menjadi Rp10.479 miliar pada akhir tahun 2016. Adapun yang menjadi proyek unggulan di tahun ini adalah proyek Gas Alam Cair BP Tangguh Train 3, Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

IIF secured 10 (ten) new commitments with total financing contracts worth of Rp3,781 billion resulting in the total of the gross commitment is Rp 10,479 billion by the end of the 2016. Among key projects this year are BP Tangguh Train 3 Liquefied Natural Gas (LNG), Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package, and Umbulan Bulk Water Supply.

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Dear Valued Shareholders,

Kami mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat melalui tahun 2016 dengan baik. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik, baik global maupun nasional, IIF berhasil mencatatkan kinerja yang positif.

Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan nasional. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan transportasi, telekomunikasi, dan energi sebagai bagian dari prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan sektor-sektor tersebut merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pentingnya infrastruktur yang memadai membuat pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan paling bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur mau tidak mau harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Dalam hal pembiayaan, ketersediaan dana merupakan salah satu kunci sukses optimalisasi pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan efektif. Namun demikian, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri guna memenuhi besarnya anggaran yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini semakin menggalakkan peran pihak swasta untuk terlibat aktif dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah berupaya untuk mendukung pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha. KPBU merupakan sebuah skema yang saling menguntungkan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat karena merupakan salah satu solusi dalam

All praise to God Almighty for His blessings which allowed us to get through the year 2016 with a thriving performance and positive trend despite an array of economic and political challenges in the global and national environments.

As one of the economic growth stimulants, infrastructure has a significant role to accelerate national development. The economic growth and progress of a country are reliant upon the availability of transportation, telecommunications, and energy, which make infrastructure development a priority. Therefore, improving those sectors will create a strong foundation for sustainable economic development.

Adequate infrastructure is extremely crucial. Therefore, the government as the highest authority responsible for ensuring the availability of infrastructure has to allocate a large portion of the state budget for infrastructure development. In the case of financing, the availability of funds is one of the keys to successful, effective, and optimal infrastructure development. However, providing a large amount of funds to finance progressive infrastructure development is a challenging task for the government due to the limited state budget allocated for the purpose.

Currently, the Indonesian government is actively encouraging the private sector to take a larger role in accelerating infrastructure development. In compliance with the Government Regulation Number 38 of 2015 concerning Public-Private Partnerships (PPP) in the Provision of Infrastructure, the government strives to support the implementation of agreements between public and private sectors in providing infrastructure. PPP serves as a mutually beneficial scheme for the government, business entities, and the public in general and is seen as one of the solutions to finance infrastructure

mendanai proyek-proyek infrastruktur. Kami patut berbangga karena IIF secara nyata telah berperan dalam pengembangan skema KPBU di Indonesia untuk sisi penyiapan kebijakan maupun dari sisi pembiayaan proyek-proyek KPBU itu sendiri.

Di tahun 2016, IIF berpartisipasi dengan menjadi pemimpin sindikasi pada dua proyek KPBU, yaitu proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah. Selain itu, IIF juga ditunjuk sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan domestik yang dipilih untuk berpartisipasi dalam sindikasi domestik untuk membiayai perluasan Tangguh LNG. Keterlibatan IIF dalam proyek-proyek tersebut menjadi bukti tanggung jawab dan komitmen Perusahaan dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang 2016, Direksi Perusahaan telah berhasil meletakkan dasar pijakan yang kuat bagi Perusahaan untuk meraih pertumbuhan berkelanjutan. Di tahun 2016, IIF berhasil memperoleh 10 (sepuluh) kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.781 miliar, sehingga total *gross commitment* menjadi Rp10.479 miliar pada akhir tahun 2016. Adapun yang menjadi proyek unggulan di tahun ini adalah proyek Gas Alam Cair BP Tangguh Train 3, Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Serat Optik Nasional (paket tengah), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris menghargai upaya seluruh jajaran Direksi dan manajemen Perusahaan sehingga dapat menjawab berbagai tantangan dengan baik, yang dibuktikan dengan realisasi kinerja yang memuaskan. Keterlibatan IIF dalam skema proyek KPBU di 2016 merupakan cerminan dari upaya perluasan jangkauan bisnis IIF sekaligus menegaskan langkah-langkah perwujudan visi dan misi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur Indonesia.

projects. We are proud that IIF has made a solid contribution to the establishment of the PPP scheme in Indonesia by drawing up PPP policy and financing PPP projects as well.

In 2016, IIF participated as a mandated lead arranger that disbursed syndicated loans for two PPP projects, namely Umbulan Bulk Water Supply and Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package projects. IIF was also appointed as one of four domestic financial institutions to provide a domestic syndicated loan to finance the Tangguh LNG expansion project. IIF's contribution to those projects is a testimony to the Company's commitment and accountability in supporting the accelerated infrastructure improvement for the public.

EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners assesses that throughout 2016, the Company's Board of Directors has successfully laid a solid foundation for the Company to achieve sustainable growth. In 2016, IIF secured 10 new commitments with total financing contracts worth Rp3,781 billion resulting in the total of the gross commitment is Rp10,479 billion by the end of the 2016. Among key projects this year are BP Tangguh Train 3 Liquefied Natural Gas (LNG), Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package, and Umbulan Bulk Water Supply.

Furthermore, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors and all the management for their robust performance in overcoming a wide range of challenges, which was proven by the achievement of various satisfying results. While IIF's engagement in the PPP project scheme in 2016 reflects the Company's business network expansion program, it also underlines IIF's definitive measures towards the accomplishment of its vision and mission as the catalyst of Indonesia's infrastructure development.

Keterlibatan IIF dalam skema proyek KPBU di 2016 merupakan cerminan dari upaya perluasan jangkauan bisnis IIF sekaligus menegaskan langkah-langkah perwujudan visi dan misi IIF sebagai katalisator pembangunan infrastruktur Indonesia.

While IIF's engagement in the PPP project scheme in 2016 reflects the Company's business network expansion program, it also underlines IIF's definitive measures towards the accomplishment of its vision and mission as the catalyst of Indonesia's infrastructure development.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kami percaya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance /GCG*) tidak hanya menjadi tanggung jawab organ-organ tata kelola semata, tetapi juga seluruh karyawan Perusahaan. Selama 2016, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif dan berkala dalam pelaksanaan GCG. Kami menilai bahwa GCG telah dijalankan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pengangkatan Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen baru Perusahaan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 dimana diatur bahwa jumlah anggota Komisaris Independen setidaknya 30% dari jumlah keseluruhan Komisaris.

Di tahun 2016, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan arahan khusus kepada jajaran Direksi untuk menindaklanjuti optimalisasi kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite SDM yang baru dibentuk tahun lalu, sehingga implementasi GCG dapat sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas, Dewan Komisaris selalu menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran Direksi dan secara bersama-sama berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh

OPINION ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

We believe that the responsibility to put in place Good Corporate Governance/GCG should not only be carried by the existing corporate governance organs, but also the entire workforce of the Company. The Board of Commissioners has actively supervised GCG implementation on a periodic basis during 2016. We view that GCG has been applied carefully and responsibly in good faith according to the laws and regulation in force and GCG principles. This opinion is supported by the appointment of Mr. Zulkifli Zaini as the Company's new Independent Commissioner in order to comply with the provision of Article 20 paragraph (3) of POJK 33/2014, which states that the minimum number of Independent Commissioners shall be at least 30% of the total number of Commissioners.

In 2016, the Board of Commissioners also communicated special directives to the Board of Directors to follow up the efforts to optimize the performance of the Information Technology Steering Committee and HR Committee that were set up just a year ago in order to optimally implement GCG.

In carrying out its duties and responsibilities as a Supervisor, the Board of Commissioners always maintains good communication with the Board of Directors and together we are committed to pursuing sustainable growth by implementing GCG principles across the Company's business activities at all levels of the organization. We also continue to

tingkatan organisasi. Tidak lupa, kami mendorong jajaran Direksi untuk terus menerus melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai kebutuhan dengan berbasis risiko, meningkatkan kualitas jasa *advisory*, serta kualitas dan kesejahteraan SDM.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh komite di bawah Dewan Komisaris yang kami pandang telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan penuh dedikasi. Namun, dalam menghadapi tantangan di kemudian hari, maka setiap anggota komite harus terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara konsisten.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Kami telah mempelajari prospek usaha yang disusun oleh Direksi. Meningkatnya jumlah komitmen yang pada 2016 tidak hanya akan berdampak positif bagi posisi keuangan IIF di tahun 2017, tetapi juga menjadi indikator bagi IIF untuk dapat merealisasikan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang.

Secara umum, kami memandang prospek usaha IIF semakin baik, terutama karena Perusahaan telah meletakkan dasar bagi pertumbuhan usaha yang lebih seimbang, dan telah memetakan strategi yang dapat memanfaatkan keunggulan IIF untuk memberikan pertumbuhan usaha yang baik di masa mendatang.

PEMBERIAN ARAHAN KEPADA DIREKSI

Sepanjang 2016, Dewan Komisaris telah memberikan pandangan serta arahan kepada Direksi melalui pertemuan atau rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:

1. 4 kali meeting Dewan Komisaris di kantor Perusahaan
2. 2 kali teleconference
3. 1 kali kunjungan kerja terhadap proyek yang akan dibiayai

encourage the Board of Directors to constantly revamp the existing systems and standard operating procedures based on needs and risks involved while increasing the quality of our advisory services, and the quality of human resources and their welfare.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Investment Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners would like to express its appreciation of all committees that have fulfilled their duties and responsibilities effectively with utmost dedication. However, in anticipating the challenges ahead, each member of the various committees should also consistently enhance their competence and performance.

OVERVIEW ON BUSINESS OUTLOOK

We have reviewed business prospects prepared by the Board of Directors. The increasing number of commitments obtained in 2016 will not only make a positive contribution to IIF's 2017 financial position but also serve as an indicator for IIF to realize more public-private partnerships in the development of infrastructure projects in the future.

In general, we are confident that IIF's business outlook will remain bright over the years ahead, particularly because the Company has secured a strong foothold to achieve balanced business growth and mapped the strategies that can empower IIF's competitive edge to deliver a thriving growth in the long run.

PROVIDING DIRECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2016, the Board of Commissioners has provided insight and direction to the Board of Directors at the meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors as follows :

1. 4 meetings with the Board of Commissioners in the Company's office
2. 2 teleconferences
3. 1 site visit

Secara garis besar, Dewan Komisaris telah melakukan arahan kepada Direksi yang berkaitan dengan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan peran pengawasan dan penasihat dalam mengelola organisasi dan bisnis operasi untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan;
2. Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan pesetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada 2016, IIF mencatat beberapa perubahan pada komposisi anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 24 Maret 2016 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, yaitu mengangkat Bapak Richard Ranken menggantikan Bapak Jemal Ud Din Kassum sebagai Komisaris yang mewakili International Finance Corporation dan Bapak Robert Pakpahan menggantikan Bapak Ekoputro Adijiyanto sebagai Komisaris yang mewakili PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kami berterimakasih atas jasa dan sumbangsih Bapak Jemal Ud Din Kassum dan Bapak Ekoputro Adijayanto kepada Perusahaan sampai masa bakti mereka berakhir. Perseroan juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen. Semoga dengan komposisi Dewan Komisaris yang baru, dapat membawa energi positif bagi pertumbuhan Perusahaan.

In general, the direction from the Board of Commissioners is related to the following matters:

1. Conducting supervisory and advisory functions in managing the organization, business and operations for the interests of shareholders, in line with the Company's vision, mission and goals;
2. Supervising Board of Directors' policies, achievement of the Company and compliance with the prevailing laws and regulations;
3. Periodically evaluating and providing advice regarding risk management implementation and internal control system, and giving approval for the required changes or corrective actions that must be taken regarding the system;
4. Performing duties for the sake of the Company and related business, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

There were several changes in composition of the Board of Commissioners in 2016. Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on March 24th, 2016, the Company appointed Mr.Richard Ranken to replace Mr. Jemal Ud Din Kassum as a Commissioner representing International Finance Corporation and appointed Mr. Robert Pakpahan to replace Mr. Ekoputro Adijiyanto as the Commissioner representing PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). We thank Mr. Jemal Ud Din Kassum and Mr. Ekoputro Adijayanto for their service and contribution to the Company thus far. The Company also welcomes to Mr. Zulkifli Zaini as the new Independent Commissioner. We hope that the new composition will bring a positive dynamic to the Company's growth.

PENUTUP

Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Direksi, manajemen dan karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga berhasil membawa IIF pada kinerja yang positif. Ke depan, kami menaruh harapan besar kepada seluruh pemangku kepentingan IIF agar dapat lebih terbuka dan mempererat hubungan baik yang telah terjalin selama ini khususnya dalam melanjukan pertumbuhan Perusahaan dan membangun bangsa.

CLOSING

On behalf of the Board of Commissioners, I wish to congratulate and extend our gratitude to the Board of Directors, management and employees for their dedication and hard work that paved IIF's way to record positive performance. Going forward, we expect all stakeholders of IIF to be more open, and that we can maintain the existing good relationships, particularly in accelerating the Company's growth and building the nation.

Jakarta, Maret / March 2017

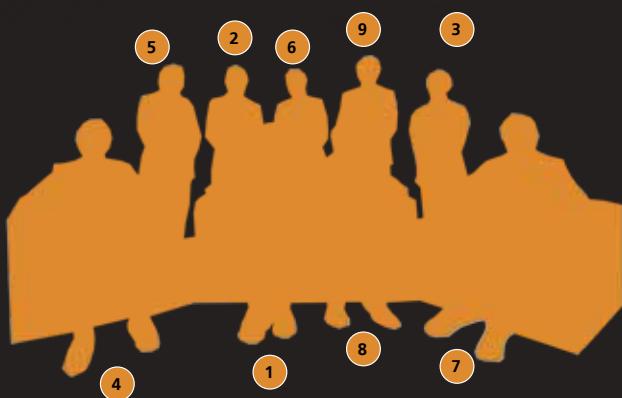
Atas nama Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

M. Chatib Basri

Presiden Komisaris - Komisaris Independen

President Commissioner - Independent Commissioner

BOARD OF COMMISSIONERS



1 M. CHATIB BASRI

Presiden Komisaris - Komisaris Independen /
President Commissioner - Independent Commissioner

2 EDWIN GERUNGAN

Komisaris Independen / Independent Commissioner

3 ZULKIFLI ZAINI

Komisaris Independen / Independent Commissioner

4 MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris / Commissioner

5 ROBERT PAKPAHAN

Komisaris / Commissioner

6 RICHARD RANKEN

Komisaris / Commissioner

7 ROBERT OLIVIER DOLK

Komisaris / Commissioner

8 HANS-JUERGEN HERTEL

Komisaris / Commissioner

9 RAJEEV KANNAN

Komisaris / Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur
President Director

Pencapaian IIF sepanjang tahun 2016 ini juga merupakan langkah Perusahaan dalam membuka lembaran baru untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

The achievements IIF has marked over the course of 2016 have enabled the Company to start a new chapter of balanced and sustainable growth in the long run.

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Dear Valued Shareholders,

Selama lebih dari 6 (enam) tahun dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui jalur pendanaan, IIF telah mengalami perkembangan yang signifikan. Di tahun ini, IIF telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di setiap aspek usaha. Upaya-upaya yang dilakukan IIF meliputi pengembangan produk serta layanan yang koheren dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis di sektor infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten melalui sistem operasional dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan peran swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui proyek proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun ini, IIF meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan didukung kehadiran momentum penting yang menjadi catatan sukses Perusahaan di tahun 2016. Momentum tersebut diantaranya adalah dengan turut berperan serta IIF sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi atas dua proyek KPBU yang sudah dinantikan banyak pihak yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah.

Tidak hanya itu saja, dari sisi sektor infrastruktur Migas, IIF juga telah berhasil ditunjuk sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan yang dipilih dalam sindikasi dalam negeri untuk membiayai perluasan Pabrik LNG di Tangguh, Papua Barat.

During more than 6 (six) years of support for Indonesia's infrastructure development through the provision of finance, IIF has made significant progress in its journey. This year, IIF continued to commit all of its resources to increasing capacity and capability across its various lines of business. The efforts consisted of developing products and services that cater to the needs of businesses in the infrastructure sector, elevating the skills of its human resources by streamlining its operational systems, and enforcing good corporate governance.

As we know, the Indonesian government proactively encourages the private sector to increase its role in domestic infrastructure development through PPP projects. This year a significant milestone was achieved which added to the already great momentum at IIF and further enhanced its role in Indonesia's infrastructure development throughout the year. One such milestone, amongst others, was, the appointment of IIF as a mandated lead arranger of syndicated financing for two highly anticipated PPP projects, namely Umbulan Bulk Water Supply and Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package.

As for IIF's contribution in the oil and gas infrastructure sector, IIF was selected to be one of four financial institutions authorized to grant domestic syndicated loans for the expansion of the LNG Plant in Tangguh, West Papua.

Dengan terealisasinya beberapa proyek ini juga merupakan salah satu bukti bahwa IIF telah berhasil melakukan perluasan jangkauan bisnis dengan menggandeng institusi perbankan regional lainnya di Indonesia dalam membuka akses investasi infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

Pencapaian IIF sepanjang tahun 2016 ini juga merupakan langkah Perusahaan dalam membuka lembaran baru untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Di tahun sebelumnya, pendapatan IIF hanya bertumpu pada treasury dan pembiayaan/investasi. Di tahun 2016, IIF berhasil melakukan beberapa terobosan yang inovatif yang tidak hanya meningkatkan pendapatan di pembiayaan, namun juga meningkatkan pendapatan berbasis biaya (*fee based income*) dan pendapatan dari jasa konsultansi. Keberhasilan ini memberikan nuansa bagi rencana IIF untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang karena Perusahaan tidak hanya mengandalkan *interest income* untuk pendapatan tetapi juga mampu menciptakan *driver* pendapatan lainnya, sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Keberlanjutan pertumbuhan bisnis IIF juga didorong oleh kemampuan Perusahaan untuk secara berkesinambungan meningkatkan dan melakukan otomatisasi proses, yang telah dilakukan sejak awal tahun 2016, serta upaya terus-menerus guna meningkatkan sumber daya manusia.

IIF telah bergerak cepat dan tepat untuk mencapai misinya sebagai pelopor pendanaan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, pasar tidak hanya melihat IIF sebagai institusi pembiayaan infrastruktur semata namun juga sebagai pakar yang diakui dalam memberikan konsultasi terkait perancangan skema pembiayaan yang dibutuhkan. Terkait hal tersebut, IIF senantiasa menghadirkan solusi dalam menjembatani keberagaman kepentingan yang ada melalui mekanisme dan strategi yang akurat.

Meski demikian, IIF menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu segera dibenahi agar IIF dapat mempersiapkan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan kinerjanya di seluruh sektor. Atas nama Direksi IIF, kami akan memaparkan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai upaya manajemen dalam memetakan serta menganalisis perkembangan Perusahaan secara komprehensif sepanjang tahun buku ini.

The realization of these projects proves that IIF has successfully broadened its business network through its close partnership with other regional banks across Indonesia as part of its efforts to open wider access to infrastructure investment throughout the archipelago.

The achievements IIF has marked over the course of 2016 have enabled the Company to start a new chapter of balanced and sustainable growth in the long run.

In the previous year, IIF's revenue was mainly generated from the treasury and financing/investment segments. However, in 2016, IIF managed to record an innovative breakthrough, which resulted in not only an increase in financing income, but also in fee-based income from advisory services. This achievement set the tone for a balanced growth, supported by the Company's ability to create other revenue generating sources aside from interest income, which allows IIF to lay a strong foundation for sustainable growth in the years to come. In addition to the Company's efforts to increase the quality of its human resources, IIF's sustainable business growth will also be driven by the Company's capability to continuously improve and automate its business processes, which was initiated in the early 2016.

IIF is already well on track to accelerate its progress towards its vision of being a pioneer in infrastructure financing in Indonesia. Aside from its exemplary reputation in the infrastructure development, IIF is also widely acknowledged as a recognized expert in providing valuable insights into the development of appropriate financing schemes. IIF continues to provide financial solutions that cater to diverse business interests through its effective mechanism and strategy.

Nonetheless, IIF is well aware of several areas of improvement that require attention to prepare strong fundamentals for the Company to increase its performance in all sectors. On behalf of IIF's Board of Directors, we would like to provide information to the stakeholders regarding the management's efforts in mapping and analyzing the Company's development during the fiscal year.

PANDANGAN EKONOMI 2016

Perekonomian Indonesia sepanjang 2016 tercatat lebih baik dan stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi atas target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% yang didukung peningkatan PDB sebesar 4,97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tingkat inflasi 2016 pun tercatat lebih rendah. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia tahun ini berada pada angka 3,02%.

Perkembangan tersebut merupakan dampak positif dari pelaksanaan program dan kebijakan strategis pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun Bank Dunia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, namun masih terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, prospek kerja sama yang kurang memadai antara negara-negara berkembang, serta penurunan volume perdagangan global.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dengan mendorong inklusi keuangan dengan membentuk program pengampunan pajak. Melalui program tersebut, pemerintah mengalokasikan dana segar yang telah berhasil dikumpulkan untuk keperluan pembangunan dan pengembangan program-program ekonomi yang berkepihakan kepada rakyat. Pengaruh positif dari dampak program tersebut bagi ekonomi nasional pun mulai terasa, di mana hal ini berpengaruh terhadap penguatan terhadap nilai tukar Rupiah sejalan dengan masuknya dana repatriasi dari program ini, yang kemudian berakibat pada rendahnya inflasi kuartal II 2016.

Pembangunan infrastruktur pada sektor publik di sepanjang 2016 juga terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang diiringi dengan langkah pengurangan kesenjangan infrastruktur di seluruh wilayah serta upaya menyeimbangkan pengeluaran masyarakat. Dengan dibenahinya masalah tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi fundamental ekonomi nasional di kemudian hari dapat dikendalikan secara seksama.

2016 ECONOMIC UPDATE

The Indonesian economic condition throughout 2016 was more favorable and stable compared to the previous year as seen from the realization of GDP growth at 5.02% compared with growth in 2015 of 4.97%. Compared to 2015, the inflation rate in 2016 was also lower. Based on the data released by the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's inflation rate in 2016 was recorded at 3.02% yoy.

Such development was attributable to the successful implementation of various strategic programs and policies by the government and related authorities in maintaining national economic growth. However, despite the World Bank's robust economic growth forecast for East Asia and Pacific region in the next 3 (three) years, the growth of many developing countries such as Indonesia, is still prone to several risks such as the weakening economic growth of developed countries, poor prospects for international cooperation in the emerging markets, and the declining global trade volumes.

This year, the government encouraged financial inclusion through the tax amnesty program as part of its initiatives to improve the national economy. This program has allowed the government to allocate fresh funds to infrastructure development and social economic programs. It has made a positive contribution to the overall national economic landscape, which can be seen in the strengthening of the Rupiah exchange rate following the entry of repatriated funds into the country's financial system. The stronger exchange rate of the Rupiah then resulted in the lowering of the inflation rate in the second quarter of 2016.

In order to support national economic growth, the government continued to boost public infrastructure development throughout the year, while reducing infrastructure disparity across regions in Indonesia and balancing public spending. As the government addressed the ongoing challenges systematically, it is expected that it can also manage potential risks that affect the country's economic fundamentals more carefully.

Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian masalah infrastruktur, proyek-proyek KPBU di tahun ini terus ditingkatkan serta direalisasikan secepat mungkin. IIF ikut berperan dalam mendanai proyek-proyek KPBU melalui penyesuaian plafon pendanaan pada produk pembiayaan IIF dengan skema jangka panjang, pengelolaan risiko, serta rekam jejak operasional yang berkualitas. Di tahun ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, IIF menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan dua proyek KPBU.

Dengan pencapaian tersebut, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat, termasuk IIF, berharap di tahun mendatang akan banyak proyek-proyek KPBU yang dapat direalisasikan. Dengan keterlibatan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur publik, diharapkan timbul persaingan yang sehat serta peningkatan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

KINERJA PERUSAHAAN

Di tahun 2016, IIF masih melanjutkan tren positif dalam aspek pertumbuhan kinerja usahanya yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah proyek yang ditangani dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, permintaan jasa *advisory* yang tinggi, serta strategi IIF untuk mengoptimalkan kinerja dari grup sindikasi. Di tahun 2016, IIF berhasil memperoleh 10 (sepuluh) kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.781 miliar, sehingga total gross commitment menjadi Rp10.479 miliar pada akhir tahun 2016. Adapun yang menjadi proyek unggulan di tahun ini adalah proyek Gas Alam Cair BP Tangguh Train 3, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah.

Meskipun IIF berhasil meningkatkan jumlah komitmen, namun nilai laba bersih yang diperoleh dan pencairan target yang ada masih belum tercapai sesuai dengan ekspektasi. Hal ini disebabkan pembentukan tambahan pencadangan yang dilatarbelakangi beberapa nasabah yang kinerjanya belum sesuai harapan. Sedangkan dari sisi pencairan, kendala utama yang dihadapi berupa tertundanya realisasi proyek karena tertundanya penarikan dana sehingga terhadap

As part of the government's program in dealing with infrastructure issues, the government further promoted public-private partnerships and accelerated PPP project implementation. IIF actively contributed to the financing of PPP projects by making adjustments to its offering of financing products with long-term schemes, good risk management, and proven quality of operational track record. As mentioned earlier, IIF also successfully managed to finance 2 (two) PPP projects this year, in which the Company served as the mandated lead arranger for both projects.

With such achievements, the government and all parties involved, including IIF, expect to see further implementation of PPP projects going forward. The private sector's engagement in public infrastructure development is expected to enhance efficiency along the way and create healthy business competition.

PERFORMANCE OF THE COMPANY

In 2016, IIF continued to demonstrate a positive growth trend in its business performance that was proven by the increased number of projects that were arranged effectively to meet financing needs, the high demand for advisory services, and IIF's established strategy to optimize the syndication group performance. In 2016, IIF secured 10 (ten) new commitments with total financing contracts worth of Rp3,781 billion resulting in the total of the gross commitment is Rp10,479 billion by the end of the 2016. Among key projects this year are BP Tangguh Train 3 Liquefied Natural Gas (LNG), Umbulan Bulk Water Supply and Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package.

Although IIF managed to increase the amount of commitments, the Company did not meet its net profit and fund disbursement targets. This was because IIF made additional reserves to anticipate customers' project performance that did not yet meet IIF's expectation. Meanwhile, in terms of loan disbursement, delayed project execution due to the delay of funds withdrawal that resulted in a shortfall in the Company's total financing assets. However, IIF remained attentive to

Di tahun ini, IIF menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan dua proyek KPBU. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat, termasuk IIF, berharap di tahun mendatang akan banyak proyek-proyek KPBU yang dapat direalisasikan. Dengan keterlibatan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur publik, diharapkan timbul persaingan yang sehat serta peningkatan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

IIF also successfully managed to finance 2 (two) PPP projects this year, in which the Company served as the mandatory lead arranger for both projects. With such achievements, the government and all parties involved, including IIF, are excited to see more implementation of PPP projects going forward. The private sector's engagement in public infrastructure development is expected to enhance efficiency along the way and create healthy business competition.

aset pembiayaan berkurang. IIF senantiasa memperhatikan dengan seksama berbagai kendala yang berdampak pada tidak terealisasinya target pencairan pembiayaan. Di masa mendatang, IIF akan melakukan evaluasi serta mencari pendekatan yang lebih memungkinkan dalam meminimalisasi kendala-kendala tersebut.

Sedangkan untuk aspek pendapatan, IIF mencatatkan perolehan sebesar Rp543,55 miliar yang meningkat 77% dari jumlah perolehan tahun 2015 sebesar Rp306,35 miliar. Komposisi pendapatan IIF di tahun ini mayoritas berasal dari pendapatan pembiayaan. Selain itu, jumlah pendapatan dari *fee based income* juga meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini diperoleh dari pendapatan jasa konsultansi yang tinggi serta perolehan pendapatan sindikasi yang meningkat seiring dengan terpilihnya IIF sebagai *lead arranger* pada proyek KPBU Palapa Ring Paket Tengah dan proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Melihat meningkatnya *fee based income* sepanjang tahun 2016, kedepannya IIF berencana untuk lebih mengoptimalkan dua pilar pendapatan lainnya dengan meningkatkan pemasukan dari *advisory* dan sindikasi.

various issues that impacted negatively on the realization of the fund disbursement target. In the future, IIF will evaluate its performance and look for new approaches that will enable it to minimize such challenges.

In terms of revenue, IIF managed to record revenue of Rp543.55 billion a growth of 77% from Rp306.35 billion in the previous year. IIF's revenue in 2016 was mostly contributed by the financing and treasury segments. The Company's fee-based income also significantly rose from the previous year, which was derived from the increase in income from advisory services and syndications as a result of IIF's contribution as mandated lead arranger in the PPP projects of Palapa Ring Paket Tengah (Central Package) and Umbulan Drinking Water Supply and Distribution project. Given satisfactory fee-based income in 2016, IIF plans to further optimize its two other sources of income, namely advisory services and the syndication business going forward.

STRUKTUR MODAL DAN PENDANAAN

Di tahun 2016, untuk pertama kalinya, IIF melakukan kegiatan pencatatan obligasi I dengan nilai Rp1,5 triliun di Bursa Efek Indonesia. Selain memberi tambahan pendanaan bagi IIF dalam menjalankan kegiatan pendanaan proyek infrastruktur, penerbitan obligasi tersebut juga bertujuan membuka pemahaman bagi pelaku pasar bahwa ada alternatif pembiayaan selain dari pinjaman bank untuk merealisasikan program-program infrastruktur.

PENDUKUNG BISNIS

Manajemen Risiko

Tahun ini, kami telah berhasil memperkuat kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) kami melalui pelaksanaan beberapa inisiatif strategis.

Pada proses kredit, Manajemen Risiko bersama-sama dengan Direktorat Investasi telah meninjau dan memperbarui prosedur yang ada untuk meningkatkan proses kredit IIF, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan prosedur Special Assets Management (SAM) Unit sebagai bagian dari Direktorat Manajemen Risiko Kredit untuk memantau peringatan dini dan/atau potensi pinjaman bermasalah dalam portofolio IIF. Pada manajemen risiko operasional, Disaster Recovery Center (DRC) telah dibuat dan saat ini terintegrasi dengan Business Continuity Plan (BCP) untuk melindungi IIF dari potensi risiko yang timbul dalam hal terjadi bencana alam atau situasi darurat lainnya. Untuk meningkatkan pemantauan risiko pasar, IIF juga telah membangun dan menerapkan sistem *Asset Liability Management* (ALM) untuk mengelola lebih baik aset dan kewajiban Perseroan, serta risiko pasar dan likuiditas.

Dalam hal keahlian IIF di bidang sosial & lingkungan (S&E), spesialis kami telah meningkatkan kapasitasnya di bidang energi terbarukan & efisiensi energi melalui serangkaian program pelatihan yang dilakukan oleh Akademi Terbarukan (RENAC). IIF terus mendorong penerapan prinsip-prinsip S&E dalam setiap proyek yang dibiayai IIF. Dengan ini, Perseroan telah diakui secara luas sebagai ahli di bidang S&E, tidak hanya oleh klien, tetapi juga lembaga keuangan lainnya. Di tahun 2016 kami mengadakan beberapa sesi berbagi pengetahuan dengan PT. Bank Central Asia Tbk, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan Bankers Association for Risk Management (BARa).

FUNDING AND CAPITAL STRUCTURE

For the first time in 2016, IIF issued a corporate bond in the amount of Rp1.5 trillion on the Indonesia Stock Exchange. In addition to providing additional funding for IIF to finance its infrastructure projects, IIF conducted its bond issuance to show the market that there were other financing alternatives aside from bank loans to realize infrastructure programs.

BUSINESS SUPPORT

Risk Management

This year, we have managed to further strengthen our Enterprise Risk Management (ERM) framework through implementation of several strategic initiatives.

In credit process, Risk Management together with the Investment Directorate reviewed and updated the existing procedures in order to improve IIF's credit process, including but not limited to the development of procedures of the Special Assets Management (SAM) Unit within the Credit Risk Directorate to monitor early warning and/or potential problem loans within IIF's portfolio. In operational risk management, a Disaster Recovery Center (DRC) has been established and is now integrated with the Business Continuity Plan (BCP) to protect IIF from potential risks arising in case of natural disasters or other emergency situation. To improve market risk monitoring, IIF has also established and implemented an Asset Liability Management (ALM) system to better managing the Company's asset and liability as well as market and liquidity risk.

In terms of IIF's expertise in the area of social and environmental (S&E), our specialists have further improved their capacity on the area of renewable & energy efficiency through a series of training program conducted by Renewable Academy (RENAC). IIF continues to promote the implementation of IIF's S&E principles in projects that IIF is financing. For this, the Company has been widely recognized as experts in the area of S&E, not only by clients, but also other financial institutions. In 2016 we conducted several knowledge sharing sessions with PT. Bank Central Asia Tbk, Regional Banks association (ASBANDA) and Bankers Association for Risk Management (BARa).

Operasi dan Teknologi

Pada tahun ini, Perseroan masuk dalam tahap evaluasi untuk semakin memantapkan penerapan 4 (empat) sistem baru yang telah diselesaikan pada tahun lalu, yaitu *Loan System*, *Treasury & ALM System*, *Budgeting System*, dan *Financial Reporting System* yang telah memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Dengan keandalan sistem baru ini, setiap proses di IIF menjadi lebih akurat, lebih aman dalam hal kerahasiaan, lebih cepat dalam hal penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, serta lebih mumpuni dalam mendukung sistem pelaporan keuangan.

Menuju Optimalisasi Kinerja SDM

Setelah di tahun sebelumnya IIF melakukan penguatan terhadap komposisi dan struktur karyawan, di tahun ini IIF berupaya mengoptimalkan kinerja seluruh SDM Perusahaan sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. IIF juga melakukan beberapa perubahan dan penambahan di jajaran struktural dan fungsional Perusahaan. Sepanjang 2016, IIF melakukan perekutan pegawai sebanyak 21 orang yang tersebar pada berbagai posisi. Penambahan tersebut meliputi 2 orang di level Direksi dan 19 orang profesional di bidang keuangan, legal, manajemen risiko dan investasi. Dengan perubahan tersebut, IIF berharap kinerja pengelolaan Perusahaan di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Pada tanggal 28 September 2016 telah diadakan Shareholders Gathering dimana salah satu keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham adalah menyetujui strategi Perseroan yang meliputi 5 hal pokok, yang dinamakan "IIF's 5 point strategy for growth", yaitu:

- 1) menyediakan produk dan solusi yang menyeluruh bagi seluruh klien;
- 2) memberikan jasa konsultasi kepada publik/swasta mengenai investasi dalam proyek infrastruktur;
- 3) menyeimbangkan beragam sumber pendapatan perusahaan (*revenue mix*);
- 4) membidik proyek-proyek berkualitas tinggi; dan
- 5) melakukan mobilisasi dana dari para investor.

Operations and Technology

This year, the Company entered into the evaluation stage to further strengthen the implementation of 4 (four) new systems that were completed in the previous year, namely the Loan System, Treasury & ALM System, Budgeting System and Financial Reporting System; all of which had a positive impact on the Company's performance. With these reliable systems in place, each business process conducted at IIF became more accurate and secure in terms of confidentiality, faster in terms of provision of information to make decisions, and more reliable in supporting the financial reporting system.

Towards Optimizing HR Performance

After strengthening its employees' composition and structure in 2015, this year, IIF strived to optimize the performance of the Company's human resources to achieve its expected goals. IIF made structural and functional changes to its organization with the recruitment of 21 employees spread across different positions. This includes 2 people at the Board of Directors level and 19 professionals across finance, legal, risk management, and investment departments. With these changes, IIF expects to see an even more dynamic performance in the Company's management.

COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

On September 28, 2016, the Company convened a Shareholders Gathering that resolved, among others, the Company's 5 main strategies known as "IIF's 5 point strategy for growth", namely:

- 1) to provide a complete range of products and solutions to our clients;
- 2) to advise on private investment in infrastructure;
- 3) to balance our revenue mix
- 4) to attract high quality projects; and
- 5) to mobilize funds from fellow investors.

Pelaksanaan strategi ini sekaligus menunjukkan komitmen Perusahaan untuk memberi nilai lebih pada kegiatan usahanya dan memperkuat pondasi untuk terus menjaga keseimbangan kinerjanya dan pertumbuhan berkelanjutan.

PROSPEK USAHA

Direksi menilai prospek usaha IIF di tahun mendatang memiliki peluang yang baik. Meskipun belum dapat dipastikan karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh signifikan, setidaknya dari target volume komitmen yang masuk, IIF telah memiliki gambaran yang jelas terkait jumlah pendapatan yang dapat direalisasikan di tahun 2017 mendatang. Komitmen ini didapat dari proposal pembiayaan yang belum disetujui pada 2016 dan baru dapat diproses pada 2017. Gambaran tersebut diperoleh dari pendekatan yang terus menerus terhadap pelaku usaha di bidang infrastruktur dan memanfaatkan strategi serta keunggulan yang dimiliki oleh IIF.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kualitas tata kelola perusahaan yang baik dengan terpenuhinya seluruh prinsip-prinsip GCG yang ada merupakan bagian rencana pengembangan jangka panjang IIF. Hal tersebut mengindikasikan bahwa IIF senantiasa terus melakukan perbaikan dan pemantapan organ tata kelolanya sesuai dengan perkembangan skala organisasi yang ada. Implementasinya dilakukan dengan mematuhi ketentuan dari regulator maupun memenuhi kebutuhan di internal IIF.

Fokus IIF dalam hal penerapan GCG di lingkungan Perusahaan pada 2016 lebih menekankan pada optimalisasi organ-organ yang telah dibentuk dalam menunjang kegiatan operasional disamping mempersiapkan kehadiran infrastruktur GCG lainnya yang diperlukan. Pada 2015, IIF telah membentuk organ-organ pendukung tata kelola antara lain Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Sumber Daya Manusia yang harus terus ditingkatkan perannya terutama dalam memberi rekomendasi kepada Direksi dalam pengambilan keputusan. Di tahun ini, IIF berupaya sebaik mungkin agar kedua organ tersebut dapat menjalankan fungsinya serta memiliki akses yang terbuka terkait kondisi aktual operasional yang ada di Perusahaan.

The implementation of this strategy at the same time underlines the Company's commitment to giving added value in its business activities while strengthening the Company's foundation to further maintain its balanced performance and sustainable growth.

BUSINESS OUTLOOK

The Board of Directors remain optimistic on the prospects for future business. Despite the uncertainties and several factors that may significantly impact its business, IIF has already set a realistic revenue target for 2017 based on the commitments obtained during the fiscal year. These commitments came from the financing proposals that were not yet approved in 2016 or could only be processed by 2017. Our confidence in IIF's business prospects ahead is supported by our continuous approach to engage infrastructure-related business players and make the most of IIF's strategy and competitive advantage.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The increased quality of IIF's good corporate governance through the fulfillment of the tenets of GCG principles is a part of IIF's long-term development plan. This indicates that the Company continuously improves and strengthens its corporate governance as the organization's scale increases. The Company will continue to comply with the regulations while fulfilling IIF's internal needs.

In terms of GCG implementation, the Company focused more on optimizing the established organs to support operational activities in 2016 aside from preparing other required GCG infrastructures. In 2015, the Company established corporate governance supporting organs, among others, the Information Technology Steering Committee and Human Resource Committee whose roles were continuously improved, especially in providing recommendations to the Board of Directors for robust decision-making. This year, the Company strived to create an effective platform for both organs to run their functions well and to facilitate open access to information about the Company's actual operations.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi menilai bahwa komite-komite yang berada di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan efisien. Komite-komite tersebut telah banyak memberikan masukan bagi Direksi dalam hal pengambilan keputusan yang berorientasi pada pemecahan masalah di lapangan dalam mendukung kinerja operasional dan keuangan yang lebih baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN KOMITE EKSEKUTIF

Berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2016 yang diselenggarakan pada 24 Maret 2016, ditetapkan beberapa perubahan dalam struktur Direksi IIF. Perubahan tersebut meliputi posisi Presiden Direktur yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sukatmo Padmosukarso digantikan oleh Bapak Arisudono Soerono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana & CFO. Untuk posisi Direktur Pelaksana & CFO, Perusahaan mengangkat Ibu Indrawati Darmawan untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Pada jabatan Direktur Pelaksana & CIO-International Client yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Haruhiko Takamoto digantikan oleh Ibu Hilda Savitri dan untuk pembagian International Client maupun Domestic Client periode ini ditiadakan. Perubahan juga dilaksanakan di jajaran Komite Eksekutif dimana posisi Executive Vice President-Head of Private Client Advisory yang dijabat oleh Bapak Richard Michael, untuk saat ini ditetapkan hanya terdapat satu penanggung jawab Executive Vice President-Head of Advisory yang membawahi Public Sector maupun Private Client yang dijabat oleh Bapak Irman Boyle, dimana tahun sebelumnya menangani Executive Vice President-Head of Advisory untuk Public Sector. Dengan demikian susunan Direksi dan Komite Eksekutif IIF pada tahun 2016 terdiri atas:

Presiden Direktur & CEO : Arisudono Soerono
Direktur Pelaksana & CFO : Indrawati Darmawan
Direktur Pelaksana & CRO : Wito Krisnahadi
Direktur Pelaksana & CIO : Harold Tjiptadjaja
Direktur Pelaksana & CIO : Hilda Savitri
Executive Vice President-Head of Advisory : Irman Boyle

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors assesses that the committees it supervises have performed their duties and responsibilities well and efficiently. Our committees have provided constructive inputs to the Board of Directors in making decisions that are oriented to problem-solving on the ground in order to assist the Board in improving financial and operational performances.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE COMMITTEE

Pursuant to the Resolutions of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on March 24th, 2016, the Board of Directors' composition changed with the appointment of Mr. Arisudono Soerono, previously serving as Managing Director & CFO, to replace Mr. Sukatmo Padmosukarso as the President Director. IIF then appointed Mrs. Indrawati Darmawan to be the successor of Mr. Arisudono Soerono. Mr. Haruhiko Takamoto who previously acted as Managing Director & CIO-International Client was then replaced by Mrs. Hilda Savitri. Starting from this year, the terms "international or domestic clients" were no longer used, thus leaving only "CIO". Another change in the Executive Committee is made to Executive Vice President-Head of Private Client Advisory position which was previously held by Mr. Richard Michael. Currently, there is only one person in charge as Executive Vice President-Head of Advisory who supervises both the Public Sector and Private Clients. The position is held by Mr. Irman Boyle who previously served as Executive Vice President-Head of Advisory for Public Sector. Therefore, the composition of the Board of Directors and Executive Committee of IIF in the year 2016, as follows:

President Director & CEO : Arisudono Soerono
Managing Director & CFO : Indrawati Darmawan
Managing Director & CRO : Wito Krisnahadi
Managing Director & CIO : Harold Tjiptadjaja
Managing Director & CIO : Hilda Savitri
Executive Vice President-Head of Advisory: Irman Boyle

Perusahaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sukatmo Padmosukarso, Bapak Richard Michael dan Bapak Haruhiko Takamoto atas integritas dan dedikasinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi pencapaian kinerja bisnis IIF selama ini. Ucapan selamat saya sampaikan kepada Ibu Indrawati Darmawan dan Ibu Hilda Savitri atas pengangkatannya dalam jajaran Direksi Perusahaan. Semoga dengan adanya perubahan ini, kinerja IIF menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Tekad tersebut juga ditanamkan kepada diri saya sendiri selaku Presiden Direktur Perusahaan yang baru agar dapat membawa keberhasilan usaha IIF ke arah yang dicita-citakan.

APRESIASI

Dengan berakhirnya laporan Direksi ini, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan Dewan Komisaris IIF atas peran-perannya dalam memberikan masukan, arahan serta pengawasan terhadap kinerja usaha yang dijalankan Direksi agar sesuai dengan koridor dan marwah IIF sebagai lembaga yang berperan untuk menjadi katalisator pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Direksi dan segenap karyawan IIF atas dedikasi yang diberikan dalam merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap seluruh lini di berbagai level harus semakin ditingkatkan dalam menguatkan performa usaha IIF di masa mendatang.

The Company would like to extend its heartfelt gratitude to Mr. Sukatmo Padmosukarso, Mr. Richard Michael, and Mr. Haruhiko Takamoto for their integrity and dedication during their service and for their contribution to IIF's business achievement during their tenure. I also would like to congratulate Mrs. Indrawati Darmawan and Mrs. Hilda Savitri for their promotion to the Board of Directors level. We hope that with this change, IIF will record an even more encouraging performance in the future. As the new President Director, I also wish to embrace such determination so that we all can set the tone for IIF's further success in realizing its vision.

WORDS OF APPRECIATION

To conclude, I would like to thank the Shareholders, Stakeholders, and Board of Commissioners of IIF for their role in providing advice, direction, and oversight to the business performance performed by the Board of Directors, so that IIF can deliver performance that is in accordance with its vision and role as the catalyst of Indonesia's infrastructure development financing. Our appreciation also goes to all members of the Board of Directors and employees of IIF for their dedication in implementing the established work programs. We hope to strengthen the cooperation and coordination across all lines of business at all levels of the organization to further strengthen IIF's performance in the future.

Jakarta, Maret / March 2017

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur & CEO
President Director and CEO

THE EXECUTIVE COMMITTEE



1 ARISUDONO SOERONO

Presiden Direktur & CEO / President Director and CEO

2 INDRAWATI DARMAWAN

Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO

3 HAROLD TJIPTADJAJA

Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO

4 HILDA SAVITRI

Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO

5 WITO KRISNAHADI

Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO

6 IRMAN BOYLE

Executive Vice President-Head of Advisory

Profil Perusahaan

Company Profile





Data Perusahaan

Corporate Data

Nama Perusahaan Company Name	PT Indonesia Infrastructure Finance
Bidang Usaha Line of Business	Pembiayaan proyek infrastruktur Infrastructure project financing
Produk Products	Produk Investasi (<i>Fund-based</i> dan <i>Non Fund-based</i>) dan Jasa Konsultansi Investment Products (Fund-based and Non Fund-based) and Advisory Services
Status Perusahaan Company Status	Perusahaan Swasta Private Company
Kepemilikan Saham Share Ownership	<ul style="list-style-type: none"> • PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero): 30% • International Finance Corporation (IFC): 19,99% • Asian Development Bank (ADB): 19,99% • DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG): 15,12% • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): 14,90%
Tanggal Berdiri Date of Establishment	15 Januari 2010 January 15, 2010
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010, dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009</p> <p>Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated 6 August 2010, and was regulated in Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009</p> <p>Akta Nomor: 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123</p> <p>Deed Number: 34 dated 15 January 2010 drawn up before Aulia Taufani, SH, as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree Number: AHU-21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123</p>
Kantor Pusat Head Office	<p>The Energy Building, Lt.30 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 11A Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190</p> <p>Telepon/Telephone : 021 – 2991 5060 Faksimili/Fax : 021 – 2991 5061 <i>Email</i> : info@iif.co.id Situs/Website : www.iif.co.id</p>

Sekilas Perusahaan

Company at a Glance

PT Indonesia Infrastructure Finance berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009. Sebagai institusi yang menawarkan solusi jangka panjang bagi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan menjawab adanya kesenjangan dalam peranan institusi bagi pengembangan infrastruktur dan pembiayaan di Indonesia, IIF hadir untuk turut meningkatkan peran aktif sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur negeri melalui beragam layanan keuangan dan non-keuangan. Guna mendukung tujuan tersebut, IIF menyediakan berbagai produk pendanaan jangka panjang seperti pinjaman senior dan *mezzanine* serta produk non-pinjaman seperti penjaminan dan layanan berbasis *fee*.

Kehadiran Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia serta pinjaman dari beberapa institusi keuangan global dalam struktur modal IIF menjadi kekuatan bagi IIF dalam mendukung kelancaran kegiatan usahanya. IIF telah memasuki tahapan *lending and growth* pada tahun 2015 dan berhasil menunjukkan kinerja yang kuat baik di sisi operasional maupun finansial. Keberhasilan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi IIF sebagai katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Selain sebagai institusi pembiayaan infrastruktur, IIF juga dikenal sebagai pusat keahlian dan keterampilan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Pencapaian tersebut tentunya tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan solid.

PT Indonesia Infrastructure Finance was established on January 15, 2010 a decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated on 6 August 2010 to conform to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009. As a specialized institution that offers long-term solutions to cater to significant infrastructure financing needs in Indonesia and to fill the gap of the contribution of institutions in spurring the growth of Indonesia's infrastructure and financing, IIF has emerged to enhance private sector's active contribution to infrastructure development of the country by providing a wide range of financial and non-financial services. To help us achieve this goal, IIF provides long-term fund-based products that include senior loans, mezzanine finance and equity participations, as well as non-fund-based products such as guarantees and fee-based services.

The participation of World Bank, Asian Development Bank, and other institutions in the global banking community in IIF's capital structure further forms a solid foundation for IIF to support its business activities. Entering into 2015, IIF has reached the lending and growth phase, with its thriving performance in both operational and financial sectors. Such achievement is the key factor to realizing IIF's vision of becoming the leading catalyst for infrastructure financing development in Indonesia.

In addition to its role as an infrastructure financing institution, IIF is known for its experience, respected repository of knowledge, and skills in the field of commercially viable infrastructure project development and financing. Certainly, we could not earn this recognition without the support of our superlative, professional, and substantial human capital.

Jejak Langkah

Milestones



2010

Pendirian Perusahaan pada 15 Januari 2010 dengan pemegang saham pendiri PT SMI (Persero), IFC, ADB, dan DEG
The Company's establishment on 15 January 2010 with founder shareholders PT SMI (Persero), IFC, ADB, and DEG

2011

- Memperoleh pendanaan dari Bank Dunia-Subordinated Loan sebesar USD 100 juta
- Memperoleh pendanaan dari ADB-Subordinated Loan sebesar USD 100 juta
- Funding from the World Bank Subordinated Loan Agreement at the amount of USD 100 million
- Funding from the ADB Subordinated Loan Agreement at the amount of USD 100 million

2014

- Penyelesaian pengembangan organisasi & kelembagaan (*Human Capital*, Manajemen Risiko & Operasional Teknologi Informasi)
- Meningkatkan kerangka & platform manajemen risiko
- Pendanaan dari pinjaman IFC A/B sebesar USD 250 juta
- Pengembangan aset & perbaikan *yield*
- Penyaluran dana ekuitas & SLA yang masih tersedia untuk proyek-proyek yang layak
- Mencapai total aset sebesar Rp4,7 triliun, dan komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun
- Completing institutional & organizational development (Human Capital, Risk Management & Information Technology Operations)
- Enhancing the risk management platform & framework
- Funding from an IFC A/B loan at the amount of USD 250 million
- Asset building & yield improvement
- Channeling the remaining equity & SLA funds to viable projects
- Reaching total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion

2012 - 2013

- Membangun kapabilitas organisasi
- Membangun kesadaran pasar/potensi pasar & pengenalan terhadap produk
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation masuk menjadi salah satu Pemegang Saham IIF
- Pendanaan dari ekuitas mencapai Rp1.777.868.000.000
- Pengembangan aset
- Penandatanganan pinjaman komersial pertama senilai Rp500 miliar untuk proyek Jalan Tol Cipali
- Building organizational capability
- Building market awareness & brand recognition
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation became one of IIF's Shareholders
- Funding from equity up to Rp1,777,868,000,000
- Asset building
- Signed the 1st commercial loan with commitment of Rp500 billion for Cipali Toll Road project



2015

- Meraih peringkat AAAidn dari Fitch Indonesia
- Mengembangkan kemampuan/kapasitas
- Peningkatan modal disetor menjadi Rp2 triliun dalam rangka untuk mematuhi peraturan
- Merampungkan instalasi sistem baru
- Penguatan *brand equity* IIF melalui partisipasi dalam konferensi Euromoney
- Berhasil membentuk tim sindikasi
- Menetapkan risiko kredit berdasarkan parameter IIF
- Penyesuaian model pemeringkatan risiko IIF
- Pelaksanaan *stress test* portofolio
- Meningkatkan kepatuhan SEMS IIF dengan IFC PS 2012

- Rated AAAidn by Fitch Indonesia
- Capacity building
- Additional paid-up capital to reach Rp2 trillion in order to comply with applicable regulations
- Completion of new installation systems
- Strengthening of IIF's brand equity through top-level sponsorship of the Euromoney conference
- Establishing syndication team
- Developing credit risk appetite statement based on IIF's parameters
- Adjusting IIF's risk rating model
- Conducting portfolio stress test
- Augmenting IIF's SEMS compliance with IFC PS 2012

2016

- Meraih peringkat idAAA dari Pefindo
- Penerbitan obligasi perusahaan pertama senilai Rp1,5 triliun
- Menjadi *Mandated Lead Arranger* untuk pertama kalinya dalam proyek KPBU IIF yang pertama
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai USD150 juta

- Rated idAAA by Pefindo Rating
- Issuance of the 1st company's bonds of Rp1.5 trillion
- Obtained the 1st Mandated Lead Arranger role for IIF's 1st of two PPP projects
- Obtained syndicated funding from regional banks with the amount of USD150 million



Peristiwa Penting 2016

2016 Event Highlights

Februari / February

22

- Penandatangan kontrak senilai USD 150 juta untuk memberikan fasilitas pinjaman sindikasi bagi IFC A & B
 - Senilai USD 15 juta untuk pinjaman A dengan IFC ditunjuk sebagai lead arranger
 - Senilai USD 135 juta untuk pinjaman B dengan ANZ berperan sebagai penjamin emisi, serta ANZ dan IFC sebagai lead arranger dan joint bookrunners.

Signing ceremony of USD 150 million for syndicated IFC A & B Loan Facilities,

- USD 15 million for A loan, mandated lead arranger : IFC
- USD 135 million for B loan, underwriter : ANZ, mandated lead arranger and joint bookrunners : ANZ and IFC

Maret / March

24

- Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB Perseroan Perubahan susunan BoC:
 - Bapak Robert Pakpahan diangkat menjadi Komisaris menggantikan Bapak Ekoputro Adijayanto.
 - Menerima pengunduran diri Bapak Jemal Ud-Din Al Kassum dan mengangkat Bapak Richard Ranken sebagai penggantinya.

The Convening of AGM & EGM
Restructuring of BoC composition

- Mr. Robert Pakpahan was appointed as a Commissioner to replace Mr. Ekoputro Adijayanto.
- Accepted the resignation of Mr. Jemal Ud Din Al Kassum and appointed Mr. Richard Ranken to replace him.

Perubahan susunan BoD:

- Berakhirnya masa jabatan Bapak Sukatmo Padmosukarso sebagai CEO Perseroan.
- Penunjukan Bapak Arisudono Soerono sebagai CEO Perseroan sekaligus sebagai CFO interim Perseroan.

Restructuring of BoD composition

- The tenure of Mr. Sukatmo Padmosukarso as the Company's CEO ended.
- The appointment of Mr. Arisudono Soerono as the Company's CEO cum interim CFO.



April / April



Coffee morning with Pak Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan RI saat itu.

Coffee Morning with Mr. Bambang Brodjonegoro, then the Minister of Finance of the RI.

- 21** Workshop Pembiayaan Proyek Infrastruktur antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Perseroan dengan tema Meningkatkan Kompetensi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia.

Workshop of Infrastructure Project Financing between the Association of Regional Development Banks (Asbanda) and the Company with the theme of Improving the Competency of Infrastructure Project Financing of Regional Banks in Indonesia.

Mei / May

- 13** IIF dan Banker Association for Risk Management (BARa) mengadakan BARa Bi-monthly Sharing Session dengan topik Risks and Mitigations for Infrastructure Financing in Indonesia.
- 24** Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Perseroan dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) tentang Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Proyek Infrastruktur oleh Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.
- 24** Penunjukan Perseroan sebagai Mandated Lead Arranger oleh PT Len Telekomunikasi Indonesia untuk Pembiayaan Proyek KPBU Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah.
- 24 - 25** Sponsor Platinum dalam Euromoney Conference

IIF and Banker Association for Risk Management (BARa) held BARa Bi-monthly Sharing Session with the topic of Risks and Mitigations for Infrastructure Financing in Indonesia.

The signing of Joint Agreement between the Company and the Association of Regional Development Banks (Asbanda) on the Increase of Disbursement Capacity of Infrastructure Project Financing by Regional Banks across Indonesia.

The Company's appointment as Mandated Lead Arranger by PT Len Telekomunikasi Indonesia for the Financing PPP project of Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package.

Platinum sponsor in Euromoney Conference

Juni / June

3

- Penandatanganan Perjanjian antara PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia dengan Perseroan tentang Kerja Sama Pembiayaan (Co-Financing) untuk proyek infrastruktur di Indonesia.

8

- Due Dilligence Meeting dan Public Expose
- Penawaran Umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 dengan Joint Lead Underwriters : Danareksa Sekuritas, DBS, Indopremier, Mandiri Sekuritas.

23

- Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Kementerian Keuangan bersama Lembaga dan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dengan tema "Jalin Silaturahmi dan Sinergi, Menuju Indonesia yang Lebih Baik".

The signing of Agreement between PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia and the Company on Co-Financing of infrastructure projects in Indonesia.

- Due Diligence Meeting and Public Expose
- Bond Offering I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 with Joint Lead Underwriters consisting of Danareksa Sekuritas, DBS, Indopremier, Mandiri Sekuritas.

Mass Break Fasting and Silaturahmi (Short Gathering) of the Ministry of Finance with Institutions and Business Entities under the Ministry of Finance under the theme of "Build Relationship and Synergy towards a Better Indonesia".

Agustus / August

3

- Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk LNG Tangguh - Papua
- Salah satu dari empat insitusi keuangan domestik (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan IIF) yang dipilih dalam sindikasi domestik untuk membiayai pengembangan pabrik Tangguh LNG.

Signing of syndication loan agreement for LNG Tangguh – Papua

One of only four domestic financial institutions (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI and IIF) selected in the domestic syndication to finance the expansion of Tangguh LNG plant.

9



Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia oleh PT Indonesia Infrastructure Finance.

Pre Opening at Indonesia Stock Exchange by PT Indonesia Infrastructure Finance.

18

- Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mengembangkan 5 bandara.
 - Perluasan bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin.
 - Perluasan bandara Ahmad Yani, Semarang.
 - Perluasan bandara New Kulon Progo, Yogyakarta.
 - Perluasan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
 - Perluasan bandara Juanda, Surabaya.

Signing of loan syndication to develop/expand 5 airports.

- Expansion of Syamsuddin Noor airport, Banjarmasin.
- Expansion of Ahmad Yani airport, Semarang.
- Expansion of New Kulon Progo airport, Yogyakarta.
- Expansion of Sultan Hasanuddin airport, Makassar.
- Expansion of Juanda airport, Surabaya.

29

- Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mendukung pengembangan Palapa Ring – Paket Tengah. Proyek ini merupakan proyek KPBU ketiga yang berhasil mendapatkan penyaluran pembiayaan.

Signing of loan syndication to support the development of Palapa Ring – Central Package. This project is the third PPP project that reached financial close.

September / September

28



Shareholders Gathering yang dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan

Shareholders Gathering attended by all of the Company's Shareholders.

Oktober / October

19 •
-21



Perseroan menggelar acara Outing dengan karyawan ke Yogyakarta dengan mengusung tema "Dream Big, Set Goals, Take Actions".

The Company held outing to Yogyakarta that was participated by its employees under the theme "Dream Big, Set Goals, Take Actions."

Desember / December

30

- Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mendukung pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama pada sektor air minum yang baru mendapatkan penyaluran pembiayaan setelah tertunda pelaksanaannya selama lebih dari 40 tahun.

Signing of loan syndication agreement to support the development of Umbulan Bulk Water Supply System Project. This project is the first PPP project in water sector that reached financial close after delayed for more than 40 years.

Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia

To become the catalyst pioneer for financing infrastructure development in Indonesia.

Misi Mission

- **Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan koncesi;**
 - **Mempelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat untuk kebutuhan proyek infrastruktur; dan**
 - **Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pengembangan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.**
-
- Ensuring investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
 - Pioneering the availability of various financing instruments for the needs of infrastructure projects; and
 - Becoming a partner to financial institutions and other national investment entities to channel public funds into long term infrastructure development in Indonesia.

Produk dan Layanan

Products and Services

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan nomor 2, kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan jasa pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Produk Investasi

1. Fund-based

- Menyediakan pinjaman dalam bentuk antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/mezzanine finance, pembiayaan talangan, *take out financing* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan, dan;
- Investasi ekuitas.

2. Non Fund-based

- Menyediakan jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan tanggung jawab keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau jaminan pelaksanaan; dan

Jasa Konsultansi

A. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Layanan Konsultan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan transaksi kepada klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, dimana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi dapat mencakup:

- a. Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b. Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau or proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Based on the Company's Articles of Association, one of the Company's business activities is to provide financing services for the infrastructure development in Indonesia.

Investment Product

1. Fund-based

- Providing loans in the form of senior loans, subordinated loan/mezzanine financing, bridge financing, take out financing, and/or refinancing;
- Financing other activities related to infrastructure projects as permitted by laws, and;
- Providing equity investment.

2. Non Fund-based

- Providing guarantees in the form of guarantee, standby-financing, credit enhancement, and/or performance bonds; and

Advisory Services

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Providing specialized transaction advisory services to government clients that may include ministries, regional governments and state-owned/regional-owned enterprises with regards to infrastructure projects that involve a contract between the public sector authority and a private party, in which the private party provides a public service and assumes substantial financial, technical and operational risks in the project.

The type of infrastructure projects can be either:

- a. Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b. Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM B2B projects in the water sector.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable* disamping juga meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

The scope of the transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility analysis, government support analysis, commercial structuring, negotiation, procurement implementation process and institutionalization with the objective to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as to improve the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Providing services to government clients that may include ministries and regional governments in formulating infrastructure-related policies and/or building government capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure delivery.

B. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

Layanan Konsultan Keuangan dan Transaksi

Menyediakan layanan konsultan keuangan dan/atau transaksi kepada klien sektor swasta pada setiap tahapan siklus proyek infrastruktur. Lingkup layanan konsultan keuangan antara lain adalah pelaksanaan uji tuntas proyek, penyiapan proyek, penyiapan struktur komersial, studi kelayakan, penyiapan penawaran lelang untuk memenangkan tender konsesi, negosiasi perjanjian konsesi, penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman proyek, valuasi, transaksi *joint venture* dan merger & akuisisi.

B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

Financial and Transaction Advisory Services

Providing financial and/or transaction advisory services to the private sector throughout the entire life cycle of an infrastructure project. The scope of financial advisory services may include project due diligence, project preparation and structuring, feasibility analysis, concession bid preparation, concession negotiation, loan and/or equity fundraising, valuation, joint venture transaction advisory and merger & acquisition transaction advisory.

Komposisi Pemegang Saham

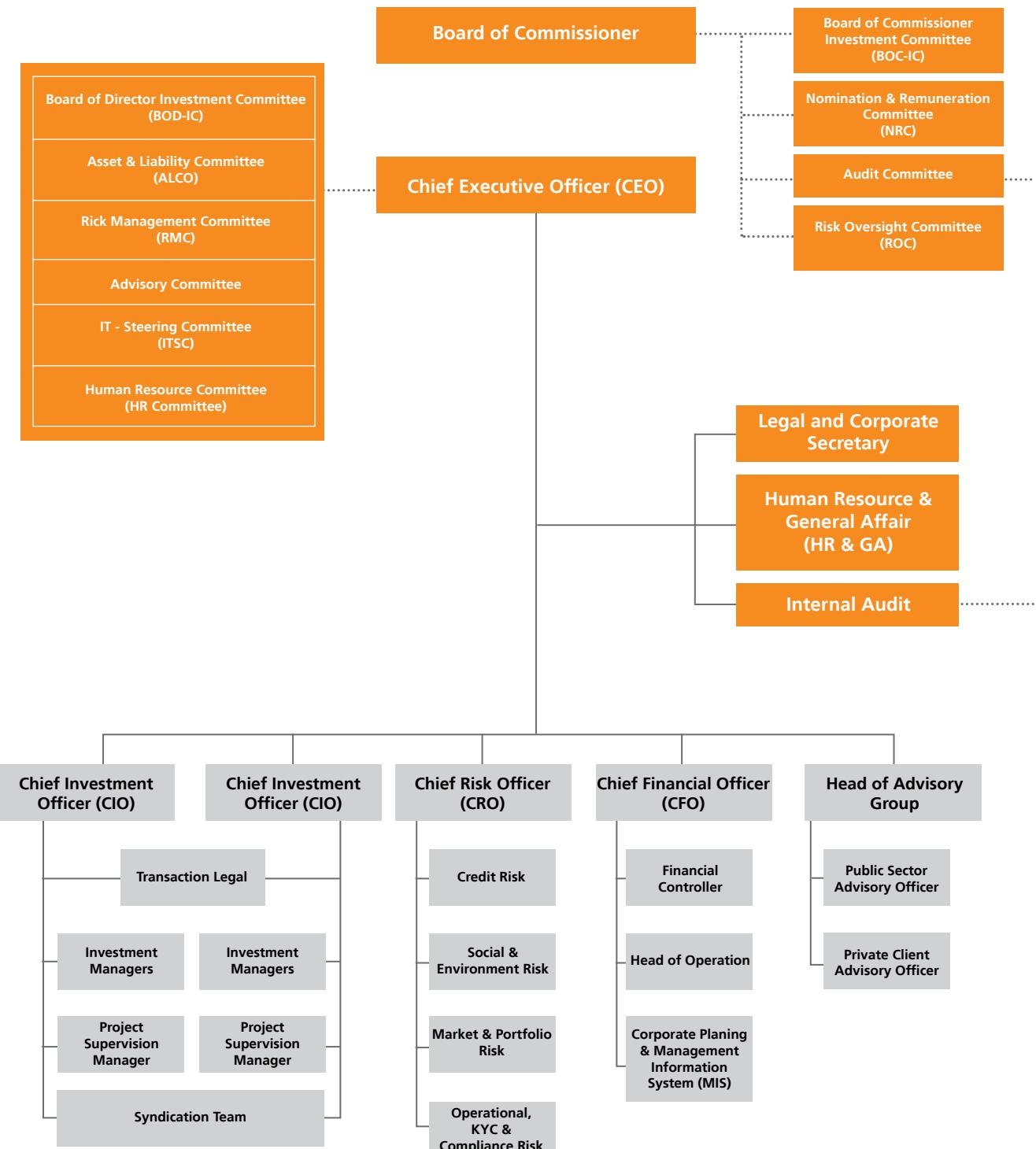
Shareholders' Composition



Pemegang Saham / Shareholders	Saham / Shares	Nilai Nominal (IDR) / Nominal Value (IDR)	Percentase / Percentage
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero)	600.000	600.000.000.000	30,00%
International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99%
Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99%
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)	302.400	302.400.000.000	15,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90%
Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00%

Struktur Organisasi

Organizational Structure



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



M. CHATIB BASRI

Presiden Komisaris- Komisaris Independen

President Commissioner-
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Bapak M. Chatib Basri saat ini juga menjabat sebagai Senior Partner dan pendiri Creco Research, serta menjadi salah satu Dosen Senior di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Beliau memiliki keahlian dalam bidang Perdagangan Internasional, Ekonomi Makro dan Politik. Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris & Komisaris Independen di IIF, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di beberapa perusahaan swasta seperti PT Astra International Tbk dan PT Semen Gresik Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia hingga Oktober 2014.

Bapak Basri meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan Gelar Master dan Phd. Jurusan Pembangunan Ekonomi dari Australian National University. Beliau memberikan sumbangsihnya dalam sejumlah karya ilmiah dan menjadi anggota organisasi internasional termasuk di High Level Trade Expert Group dan Independent Regional Advisory Group untuk Asia Pasifik, Dana Moneter Internasional (IMF). Di sepanjang perjalanan karirnya, beliau telah menulis banyak buku dan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian di tingkat global. Beliau juga aktif dalam menulis buku dan menulis artikel untuk beberapa media internasional.

Indonesian Citizen, 51 years old. Mr. Chatib Basri is concurrently a Senior Partner and Founder of Creco Research, and a Senior Lecturer at the Department of Economics, University of Indonesia. Mr. Basri has expertise in International Trade, Macroeconomic and Political economy. Prior to serving as President Commissioner & Independent Commissioner at IIF, he served as Independent Commissioner at private companies, such as in PT Astra International Tbk and PT Semen Gresik Tbk. He also served as Minister of Finance of the Republic of Indonesia until October 2014.

He earned his Bachelor Degree in Economics from the University of Indonesia, and his Master Degree and Ph. D in Economic Development from Australian National University. Mr. Basri has been an active participant in scholarly works and international organizations including in High Level Trade Expert Group and Independent Regional Advisory Group for Asia Pacific, International Monetary Fund (IMF), of which he was also a member. During the long course of his career, Mr. Basri has authorized numerous books and been involved in research activities at the global level and written articles for the global press.



EDWIN GERUNGAN

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF, Bapak Edwin Gerungan telah memegang sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan swasta terkemuka, di antaranya sebagai Direktur Utama PT BHP Billiton dan sebagai Senior Advisor di Atlantic Richfield. Beliau mulai meniti karirnya semenjak bergabung dengan Citibank NA hingga mencapai posisi Vice President, Head of Treasury. Beliau juga pernah menempati berbagai posisi kunci di BUMN termasuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk dan juga sebagai Komisaris Independen di Bank Danamon dan Bank Central Asia. Beliau meraih Sarjana di bidang Filsafat dari Principia College, Elsah, Illinois, USA.

Indonesian Citizen, 68 years old. Prior to joining IIF, Mr. Edwin Gerungan held several key positions at private companies, including as President Director of PT BHP Billiton and as Senior Advisor at Atlantic Richfield. He began his career at Citibank NA and left his last position at the bank as Vice President, Head of Treasury. His roles in state-owned enterprises include as President Commissioner of PT Bank Mandiri Tbk and as Independent Commissioner at Bank Danamon and Bank Central Asia. He earned his Bachelor Degree in Philosophy from Principia College, Elsah, Illinois, USA.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



ZULKIFLI ZAINI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Saat ini Bapak Zulkifli Zaini sebagai Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Komisaris Independen di Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan Komisaris Independen PT Triputra Agro Persada.

Mr. Zulkifli Zaini is a Chairman of Indonesian Bankers Association (IBI), Independent Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (IIF), and Independent Commissioner of PT Triputra Agro Persada.

Bapak Zulkifli Zaini adalah Komisaris PLN pada Juli 2013 s.d. Maret 2015, Komisaris Bank BNI pada Maret 2015 s.d. Maret 2016. Sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 di Bank Mandiri berturut-turut sebagai Direktur Distribution Network, Direktur Commercial & Business Banking, dan Direktur Technology & Operations.

Mr. Zulkifli Zaini serves as a Commissioner of PLN from July 2013 until March 2015 and Commissioner of Bank BNI from March 2015 until March 2016. He previously serves as a President Director of Bank Mandiri from 2010 until 2013. From 2003 until 2010, he held the position in Bank Mandiri as Distribution Network Director, Commercial & Business Banking Director, and Technology & Operations Director.

Bapak Zulkifli Zaini memiliki pengalaman menyeluruh di bidang perbankan, termasuk bidang *branch network, operations, IT infrastructures, manajemen risiko, dan wholesale product management*. Dia juga pernah berinteraksi langsung dengan nasabah dari berbagai segmen, diantaranya retail, *Small and Medium Enterprise (SMEs)*, *mid-corporates* atau *Commercial Segment* dan juga institusi pemerintahan.

Mr. Zulkifli Zaini has an extensive experience in banking sector, including in branch network, operations, IT infrastructure, risk management, and wholesale product management. He also directly interacts with the customers from various segments, among others retail, Small and Medium Enterprises (SMEs), mid-corporates or Commercial Segment, and government institutions.

Bapak Zulkifli Zaini memperoleh gelar MBA dari Washington University, St Louis USA dan gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung.

Mr. Zulkifli Zaini earned his MBA degree from Washington University, St. Louis, USA, and Doctoral degree from Bandung Institute of Technology.



MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris

Commissioner

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Sebelum menjabat sebagai Komisaris di IIF, Bapak Marwanto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Eksekutif di Asian Development Bank (ADB) pada 2009-2011 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Anggota Komite Anggaran ADB. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan gelar Master dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, serta gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada. Bapak Marwanto adalah perwakilan dari Pemerintah Indonesia.

Indonesian Citizen, 57 years old. Prior to serving as Commissioner at IIF, Mr. Marwanto served as Director General of Fiscal Balance after serving as Executive Director of Asian Development Bank (ADB) from 2009-2011 and also as Chairman of the Ethics Committee and Member of the Budget Review Committee of ADB. Currently, he also serves as Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. He obtained Bachelor degree in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Master Degree from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA as well as Doctoral Degree from Gadjah Mada University. Mr. Marwanto is a representative of the Government of Indonesia.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



RICHARD RANKEN

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Australia, 68 tahun. Saat ini, Bapak Richard Ranken menjabat sebagai Direktur dan membawahi Komite Audit di Xac Bank, Mongolia. Beliau juga menjadi Direktur di sebuah perusahaan reksadana swasta di Kepulauan Pasifik. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur pada sebuah perusahaan ternama di Australia yang bergerak dalam penyediaan infrastruktur dan air untuk keperluan irigasi agrobisnis, dimana beliau juga memimpin Komite Risiko dan Kepatuhan selama bertugas. Beliau juga menjadi Direktur pada International Finance Corporation of Global Manufacturing, Direktur untuk kawasan Sub-Sahara Afrika, dan Direktur kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Pertanian dan Magister Administrasi Negara dari Australian National University. Beliau telah menyelesaikan studi di World Bank/Harvard Business School Executive Program dan merupakan lulusan dari Australian Institute of Company Directors. Bapak Ranken bertugas sebagai perwakilan dari IFC.

Australian Citizen, 68 years old. Currently, Mr. Richard Ranken is a Director of Xac Bank in Mongolia where he chairs the Audit Committee, and of a private equity fund for the Pacific islands. Previously, He was a Director at a major Australian provider of infrastructure and water for irrigated agribusiness where he chaired the Risk and Compliance Committee. He had also served as the International Finance Corporation's Director of Global Manufacturing, Director of Sub-Saharan Africa, and Director of East Asia and Pacific including for Indonesia. He holds a Bachelor degree in Agricultural Economics and a Master degree in Public Administration from the Australian National University. He had completed the World Bank/Harvard Business School Executive Program, and is a graduate member of the Australian Institute of Company Directors. Mr. Ranken is the representative of IFC.



HANS-JUERGEN HERTEL

Komisaris

Commissioner

Warga Negara Jerman, 69 tahun. Hans-Juergen Hertel memulai karirnya di DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) pada tahun 1990 dan menjabat sebagai Direktur di kantor DEG Jakarta dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Di awal tahun 2012, Beliau menjadi pensiunan. Pengalaman kerja sebelumnya termasuk sebagai Vice President di DEG Cologne / Jerman, Project Team Leader di Friedrich Ebert Foundation, Jakarta serta Kepala Audit di Treuarbeit, sebuah perusahaan auditor Jerman yang saat ini merupakan mitra dari Pricewaterhouse Cooper. Selain itu, beliau juga pernah bekerja sebagai relawan Jerman di Uganda, Afrika Timur. Bapak Hans-Juergen Hertel memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bisnis di Indonesia di mana ia memiliki jaringan yang baik untuk bisnis dan komunitas sosial di Indonesia. Beliau fasih berbahasa Indonesia. Sejak 2009 sampai dengan 2014, beliau adalah Komisaris dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia PT Avrist Assurance. Beliau lulus dari Free University of Berlin, di mana beliau memperoleh gelar master di Ekonomi Politik dan Administrasi Bisnis.

German Citizen, 69 years old. Hans-Juergen Hertel began his career in DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) in 1990 and has served as Director of DEG Office Jakarta from January 2007 until December 2011 before retiring from work and becoming a pensioner in early 2012. His previous working experience includes holding positions as Vice President of DEG in Cologne/Germany, Project Team Leader of the Friedrich Ebert Foundation, Jakarta as well as Head of Audit in Treuarbeit, a German based auditing company that as of today is a partner of Pricewaterhouse Cooper. Among others, he has also been working for the German Volunteer Service in Uganda, East Africa. Hans-Juergen Hertel has more than 20 years of business experience in Indonesia where he has a good network to the Indonesian business and social community. He speaks fluent Bahasa Indonesia. From 2009 until 2014 he was a Commissioner of the Indonesian life insurance company PT Avrist Assurance. He graduated from Free University of Berlin, where he obtained a master degree in Political Economy and Business Administration.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



ROBERT OLIVIER DOLK

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Belanda, 61 tahun. Bapak Robert Dolk telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang jasa keuangan, dengan bekerja di Australia, Eropa dan Asia untuk organisasi seperti BNP Paribas dan Deutsche Bank. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance pada tanggal 15 Agustus 2012, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited (sejak Desember 2008), Direktur Lawcover Insurance Pty Limited (April 2010 - April 2016), dan di Amber Holdings (sejak Maret 2011). Beliau adalah Australian Chartered Accountant. Bapak Robert Dolk adalah perwakilan dari ADB.

Dutch Citizen, 61 years old. Mr. Robert Dolk has an extensive experience for over 30 years in financial services, working in Australia, Europe and Asia for organizations such as BNP Paribas and Deutsche Bank. He was appointed as Commissioner of IIF on August 15, 2012, and has been also serving as Independent Non-Executive Director of Zurich Financial Services Australia Limited (since December 2008), Director of Lawcover Insurance Pty Limited (April 2010 - April 2016), and Amber Holdings (since March 2011). He is an Australian Chartered Accountant. Mr. Robert Dolk is the representative of ADB.



ROBERT PAKPAHAN

Komisaris

Commissioner

Warga negara Indonesia, 57 tahun. Setelah meraih gelar Sarjana Akuntansi di Stage College of Accountancy Indonesia dan PhD dari University of North Carolina di Chapel Hill, AS, di bidang Ekonomi jurusan Public Finance, Bapak Robert Pakpahan mengembangkan karirnya dan telah bekerja selama lebih dari 11 tahun di Kementerian Keuangan Indonesia. Saat ini, Bapak Robert Pakpahan menduduki beberapa posisi di beberapa perusahaan, termasuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan Indonesia, sebagai anggota Majelis Wali Amanat di Millenium Challenge Account (MCA), dan sebagai anggota Direksi serta Ketua Komite Audit, Penjaminan Kredit, dan Fasilitas Investasi di Asian Development Bank (mewakili negara-negara ASEAN).

Indonesian Citizen, 57 years old. Graduated with a Bachelor in Accounting at the Stage College of Accountancy Indonesia and a PhD from the University of North Carolina at Chapel Hill, USA in Economics majoring in Public Finance, Mr. Robert Pakpahan has over 11 years of experience working with the Ministry of Finance in Indonesia. Currently Mr. Robert Pakpahan has several major positions in different companies including at Indonesia's Ministry of Finance as the General Director of Budget Financing and Risk Management, at the Millennium Challenge Account (MCA) as the Board of Trustee member, and lastly at Asian Development Bank as the Board of Directors (representing ASEAN countries) and Chairman of Audit Committee, Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



RAJEEV V. KANNAN

Komisaris

Commissioner

Warga negara Singapura, berusia 44 tahun. Saat ini, beliau adalah Direktur & General Manager dan *Head of Investment Banking*, Asia di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Sebelumnya, beliau adalah Direktur & General Manager, Structured Finance Department (SFD) dari SMBC di Tokyo. Dalam perannya saat ini, beliau bertanggung jawab untuk semua tim produk dan solusi investor di Asia dan Australia termasuk *infrastructure & project finance*, *M&A finance*, *real estate finance*, *asset finance*, *securitisation*, *syndication & distribution* dan *derivatives business*. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di Asia Pasifik dan Timur Tengah dalam hal memberikan saran kepada klien pada berbagai infrastruktur, PPP, dan transaksi energi. Beliau memperoleh Sarjana Manajemen dan Rekayasa dari Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani. Rajeev adalah perwakilan dari SMBC.

Singapore Citizen, 44 years old. Currently, he is the Director & General Manager and Head of Investment Banking, Asia in Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Previously, he was the Director & General Manager, Structured Finance Department (SFD) of SMBC in Tokyo. In his current role, he is responsible for all the products and investor solutions teams in Asia and Australia including infrastructure & project finance, M&A finance, real estate finance, asset finance, securitisation, syndication & distribution as well as derivatives business. He has over 20 years of experience in Asia Pacific and Middle East region, advising clients on various infrastructure, PPPs, and energy transactions. He earned his Management and Engineering degrees from Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani. Rajeev is a the representative of SMBC.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

ARISUDONO SOERONO

**Presiden Direktur & Chief
Executive Officer**

President Director & Chief
Executive Officer



Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Bapak Arisudono Soerono berpengalaman 20 tahun lebih di bidang corporate finance, merger dan akuisisi, pengembangan strategi, dan pengelolaan sehari-hari perusahaan di industri transportasi, logistik dan jasa keuangan. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Blue Bird (2012-2013). Sebelumnya, beliau bekerja di Credit Suisse London, Accenture Jakarta dan Seoul, dan Citibank Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur di KADIN. Beliau meraih gelar MBA dari London Business School pada 2000, dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada 1994.

Hingga tahun 2016, beliau telah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya program eksekutif dalam Manajemen Resiko Perbankan di INSEAD, Perancis, dan pelatihan kepemimpinan dari the Kennedy School of Government - Harvard University.

Indonesian Citizen, 46 years old. Mr. Arisudono Soerono has more than 20 years of experience in corporate finance, mergers & acquisitions, strategy development, and day-to-day management of companies, with industry experience in transportation, logistics, and financial services. Prior to joining IIF, he served as Chief Financial Officer in PT Blue Bird (2012-2013). Prior to that, he worked in Credit Suisse London, Accenture Jakarta and Seoul, and Citibank Jakarta. He was Deputy Head of the Standing Committee for Infrastructure Development at the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN). He obtained an MBA from London Business School in 2000, and Chemical Engineering degree from the Bandung Institute of Technology in 1994.

Mr. Soerono has participated in a number of training programs over the years, including the executive program in Risk Management in Banking in INSEAD France and an executive course on Leadership from the Kennedy School of Government - Harvard University.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

INDRAWATI DARMAWAN

Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer

Managing Director & Chief
Financial Officer



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF sebagai Chief Financial Officer, Ibu Indrawati Darmawan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Standard Chartered Securities Indonesia selama 6 tahun sejak 2010. Sebelumnya, beliau merupakan Senior Vice President di Barclays Capital Indonesia (2008) dan UBS Indonesia (2007). Beliau juga pernah mengemban posisi penting di beberapa perusahaan, diantaranya: Direktur Pelaksana di Mandiri Sekuritas (2004-2007), Wakil Presiden Direktur di Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2003), dan Associate Director di Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Di masa-masa awal karirnya, beliau menjabat sebagai Project Manager pada PT Makindo Securities selama satu tahun sejak 1993 dan juga sebagai Auditor Senior di KPMG Peat Marwick sejak 1991. Ibu Darmawan meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Texas Christian University, AS, pada 1989 serta meraih gelar Master bidang Bisnis Internasional dari West Coast University, AS, pada 1991.

Ibu Darmawan telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya The Capital Market for Infrastructure Investment yang diadakan di Manila dan diselenggarakan oleh Capital Market.

Indonesian Citizen, 50 years old. Prior to joining IIF as the Chief Financial Officer, Ms. Indrawati Darmawan served as the President Director at Standard Chartered Securities Indonesia for 6 years since 2010. Previously she was the Senior Vice President at Barclays Capital Indonesia (2008) and at UBS Indonesia (2007). She had also held key positions at several companies including: Managing Director at Mandiri Sekuritas (2004-2007), Vice President at Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2003), and Associate Director at Deutsche Morgan Grenfell (1994-1997). Earlier to her career, she served at PT Makindo Securities for a year since 1993 as the Project Manager, and also served as a Senior Auditor at KPMG Peat Marwick starting in 1991. Ms. Darmawan obtained her Bachelor Degree in Business Administration from Texas Christian University, USA in 1989, and graduated with a Master in International Business from West Coast University, USA in 1991.

Ms. Darmawan was involved in the following training, The Capital Market for Infrastructure Investment held in Manila, hosted by the Capital Market.

HAROLD TJIPTADJAJA

**Direktur Pelaksana &
Chief Investment Officer**
Managing Director & Chief
Investment Officer



Warga Negara Indonesia berusia 45 tahun. Bapak Harold Tjiptadjaja diangkat sebagai Managing Director dan Chief Investment Officer IIF pada Desember 2011. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau memegang jabatan sebagai Vice President di Earth Investment Group (2010 – 2011), Corporate Finance Partner di Indoconsult Prima (2009 – 2011), Vice President di Sinar Mas Group (2007 – 2008) dan Vice President di Northstar Equity Partners (2006). Setelah menamatkan studinya di Erasmus University Rotterdam, Belanda pada 1997 dengan gelar Master of Science bidang Ekonomi Keuangan, beliau bekerja selama lebih dari 10 tahun di Belanda sebelum kembali ke Indonesia pada 2006.

Beliau pernah berpartisipasi dalam pelatihan 10 hari Executive Education on Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, pelatihan 5 hari Executive Education on Global Challenges in Transport yang diselenggarakan oleh Oxford University, Inggris, dan sesi pelatihan mengenai High Performance Communication dari IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Indonesian Citizen, 45 years old. Mr. Harold Tjiptadjaja was appointed as Managing Director and Chief Investment Officer of IIF in December 2011. Prior to joining IIF, he acted as Vice President of Earth Investment Group (2010 – 2011), Corporate Finance Partner of Indoconsult Prima (2009 – 2011), Vice President at Sinar Mas Group (2007 – 2008) and Vice President at Northstar Equity Partners (2006). Upon obtaining his Master of Science degree in Financial Economics from Erasmus University Rotterdam, the Netherlands in 1997, he has spent more than 10 years working experience in the Netherlands prior to returning to Indonesia in 2006.

For the period up to 2016, he has attended a 10-days Executive Education on Infrastructure in a Market Economy from Harvard Kennedy School, a 5-days Executive Education on Global Challenges in Transport from Oxford University, U.K. and a session on High Performance Communication from IMD Business School/Mandiri Leadership Insights.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

HILDA SAVITRI

**Direktur Pelaksana &
Chief Investment Officer**

Managing Director & Chief
Investment Officer



Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Ibu Hilda Savitri telah bekerja di bidang perbankan investasi dan korporat serta di perusahaan swasta di bidang audit dan ekuitas selama 20 tahun. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau merupakan Direktur Investasi di Tael Management (2007-2015) dan manajer pendanaan regional yang telah mengelola dana sebesar lebih dari AS\$550 juta dari banyak investor badan usaha luar negeri. Sebelumnya, beliau bekerja di UOB Asia Ltd dari 2004 hingga 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Associate Director dan bertanggung jawab atas penataan, pelaksanaan, dan pendistribusian berbagai transaksi merger dan akuisisi, kredit sindikasi, pembiayaan proyek, penyertaan saham, dan transaksi pembiayaan terstruktur lainnya untuk klien-klien yang berasal dari Indonesia. Sebelumnya, beliau mengembangkan karir di PT Danareksa (Persero) (1995-1999 dan 2001-2002) dan PT Nusantara Securities (2002-2004) di divisi perbankan investasi. Beliau juga pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Harsono (anggota Coopers & Lybrand International) (1994-1995). Beliau meraih gelar MBA dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2011) melalui studi Masternya dengan beasiswa penuh dari New Zealand Overseas Development Award dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1994).

Ibu Savitri telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya: The Renewable Energy Workshop yang diselenggarakan oleh SEAS di Singapura.

Indonesian Citizen, 45 years old. Ms. Hilda Savitri has 20 years of experience in investment banking, corporate banking, private equity and auditing firms. Prior to joining IIF, she was an Investment Director at Tael Management (2007-2015), a regional fund manager managing of more than US\$550 million fund from offshore institutional investors. Prior to that, she worked for UOB Asia Ltd from 2004 to 2007 with latest position as an Associate Director, responsible for structuring, execution and distribution of various merger and acquisition transactions, loan syndications, project financing, shares placement and other structured financing transactions for Indonesia clients. Previously she worked for PT Danareksa (Persero) (1995-1999 and 2001-2002) and PT Nusantara Securities (2002-2004) in the investment banking division. She also has a working experience at an accounting firm, Siddharta Siddharta & Harsono (member of Coopers & Lybrand International) (1994-1995). She has an MBA degree from Victoria University of Wellington, New Zealand (2001) with full scholarship from New Zealand Overseas Development Award, and Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia (1994).

Ms. Savitri has participated in numerous trainings such as: The Renewable Energy Workshop that was held in Singapore hosted by SEAS.

WITO KRISNAHADI

Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer

Managing Director & Chief
Risk Officer



Sebelum bergabung dengan IIF pada 2012 sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer, Bapak Wito Krisnahadi menjabat sebagai Kepala Credit Risk di PT Rabobank International Indonesia sejak 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Credit Manager pada PT Bank DBS Indonesia dari 2008 hingga 2010, Investment Officer pada International Finance Corporation sejak 1998 hingga 2008, serta Senior Analyst di PT Astra International sejak 1996 hingga 1998. Beliau merupakan seorang profesional yang ahli di bidang keuangan dan risiko kredit dengan pengalaman kerja yang luas di perbankan domestik dan internasional, *corporate finance*, *project finance*, dan *loan workouts*. Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce Degree dari Curtin University of Technology, Perth, pada 1996, dan MBA dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, dan Rotterdam, Belanda, pada 2004.

Pelatihan terbaru yang diikuti oleh Bapak Krisnahadi adalah Chief Risk Officer Academy yang diselenggarakan oleh Euromoney di London, Inggris, pada 15-19 September 2014, pelatihan Leadership on High Performance Communication di Jakarta, pada 26 Oktober 2016, serta The Essentials of Business Valuation yang diselenggarakan oleh RSM di Rotterdam, Belanda, pada 6-7 Oktober 2016. Beliau juga meraih beasiswa sebagian dari Renac Academy sebagai Delegasi Green Banking di Jerman pada 10-14 Oktober 2016 serta menghadiri konferensi dan seminar lainnya baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di kawasan Asia Pasifik Timur.

Prior to joining IIF in 2012 as a Managing Director and Chief Risk Officer, Mr. Wito Krisnahadi served as the Head of Credit Risk in PT Rabobank International Indonesia from 2010. Previously, he was a Senior Credit Manager at PT Bank DBS Indonesia from 2008 to 2010, an Investment Officer at International Finance Corporation from 1998 to 2008 and a Senior Analyst at PT Astra International during 1996 to 1998. He is a dedicated finance and credit risk professional with extensive local and international experience in banking, corporate finance, project finance and loan workouts. He obtained a Bachelor of Commerce Degree from Curtin University of Technology, Perth in 1996, and MBA from the Rotterdam School of Management, Erasmus University, and Rotterdam, Netherlands in 2004.

Recently Mr. Krisnahadi also participated in the Chief Risk Officer Academy from Euromoney in London, UK on 15-19 September 2014, Leadership training on High Performance Communication in Jakarta on 26 October 2016, The Essentials of Business Valuation in Rotterdam hosted by RSM in Rotterdam, Netherlands during 6-7 October 2016. He also received a partial scholarship from the Renac Academy to join the Green Banking Delegation in Germany during 10-14 October 2016 and participated in other conferences and seminars both locally and in the East Asia Pacific region.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Affiliation of Board of Commissioners

Nama / Name	Direksi / Board of Directors	Pemegang Saham / Shareholders
M. Chatib Basri	x	
Zulkifli Zaini	x	
Edwin Gerungan	x	
Marwanto Harjowiryo	x	SMI
Richard Ranken	x	IFC
Hans-Juergen Hertel	x	DEG
Robert Pakpahan	x	SMI
Robert Olivier Dolk	x	ADB
Rajeev Kannan	x	SMBC

Hubungan Afiliasi Direksi

Jajaran Direksi IIF tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham. Seluruh Direksi Perseroan memiliki latar belakang profesional dan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengambilan keputusan.

Affiliation of Board of Directors

IIF's Board of Directors has no financial and family relationships with the Board of Commissioners and Shareholders. All members of the Board of Directors are professionally hired and independent in carrying out its duties and functions related to decision-making.

Profil Manajemen Eksekutif

Executive Management Profile



IRMAN BOYLE

Executive Vice President – Head of Advisory Group

Executive Vice President –
Head of Advisory Group

Bapak Irman Boyle bergabung dengan IIF pada April 2012. Beliau memiliki pengalaman selama 15 tahun di berbagai institusi multilateral dan firma konsultan (IFC, APB, IIE/Energy Group, dan PA Consulting), bekerja di bidang layanan *advisory* dan *public sector lending* untuk proyek-proyek di bidang energi dan infrastruktur. Bersama IFC, beliau bekerja di Departemen *Transaction Advisory* di IFC Jakarta, memberikan saran kepada klien pemerintahan pada proyek batubara IPP dan proyek pengelolaan persediaan air. Hingga Agustus 2011, beliau juga merupakan perwakilan Indonesia untuk Private Finance Advisory Network (PFAN) dimana beliau memberikan saran untuk proyek-proyek dan dalam hal keuangan untuk memperoleh perjanjian pada beberapa proyek energi yang dapat diperbarui untuk IPP. Irman memperoleh gelar MBA dari Cass Business School at City University, London, Inggris (1999), dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1993).

Bapak Boyle terlibat dalam *workshop* eksekutif tentang Ports Financing an Investing in Singapore yang diselenggarakan oleh Global Ports Forum. Beliau juga berpartisipasi dalam Green Banking Online Training, the Green Banking In Energy Efficiency and Renewable Energy yang dikelola oleh Renac.

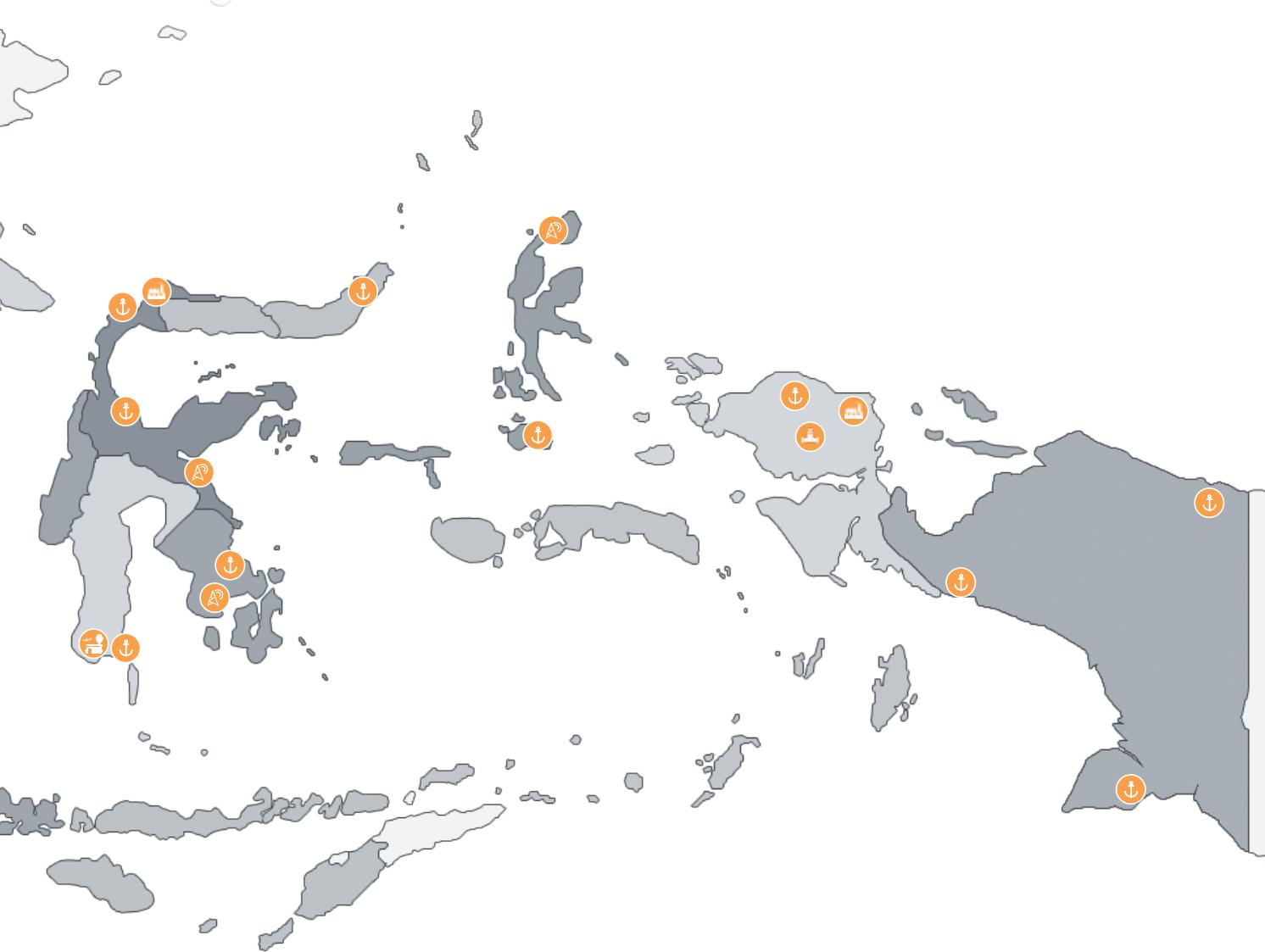
Mr. Irman Boyle joined IIF in April 2012. He has about 15 years of experience in multilateral institutions and consulting Firms (IFC, APB, IIE/Energy Group, and PA consulting), working in advisory service and public sector lending for energy and infrastructure project. With IFC, he worked in the PPPs Transaction Advisory Department at its Jakarta office, advising government clients on a coal-fired IPP project and a water supply project. Until August 2011, he was also Indonesia country representative for the Private Finance Advisory Network (PFAN) where he provided project and finance advice for successful finance closings of several renewable energy IPP projects. Irman holds an MBA from Cass Business School at City University London, UK (1999), and an undergraduate degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1993).

Mr. Boyle was involved in the executive Workshop on Ports Financing an Investing in Singapore hosted by Global Ports Forum, he also participated in a Green Banking Online Training, the Green Banking In Energy Efficiency and Renewable Energy hosted by Renac.

Lokasi Proyek

Project Location





No	Sektor / Sector	Lokasi / Location
5	Ketenagalistrikan Power Generation	<p>Sumatera: D.I. Aceh, Asahan - Sumatera Utara; Sangir - Sumatera Barat / West Sumatera; Pekanbaru - Riau, Dumai - Riau; Jambi; Batam - Kepulauan Riau; Palembang - Sumatera Selatan / South Sumatera; Lampung</p> <p>Kalimantan: Bontang - Kalimantan Timur / East Kalimantan; Balikpapan - Kalimantan Timur / East Kalimantan Pontianak - Kalimantan Barat / West Kalimantan</p> <p>Jawa: DKI Jakarta, Bekasi - Jawa Barat / West Java</p> <p>Sulawesi: Gorontalo</p> <p>Papua Barat / West Papua: Sorong</p>
6	Air Water	Pasuruan - Jawa Timur / East Java
7	Minyak Burni & Gas Oil & Gas	Batam - Kepulauan Riau; Gresik - Jawa Timur / East Java; Semarang - Jawa Tengah / Central Java D.I. Yogyakarta; Tangguh - Papua Barat / West Papua

Portofolio IIF diantaranya:

JALAN TOL

Membangun ruas jalan tol dengan total panjang 116,75 km.

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Membangun pengembangan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang memiliki lebih dari 7.500 menara telekomunikasi tersebar diseluruh Indonesia.

Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional sepanjang 1.676 km dan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

KETENAGALISTRIKAN

Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik dan *temporary power*, dengan total kapasitas mencapai 1.900 MW:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 180 MW;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH): 10 MW;
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG): 633 MW;
- Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS): 2 MW; and
- *Temporary Power*: 1.075 MW

MINYAK BUMI DAN GAS

- Perbiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD dengan output 440 ton LPG per hari dan Train LNG dengan kapasitas 3.8 juta ton per tahun.
- Perbiayaan pembangunan pipa gas sepanjang 13.5 KM yang akan digunakan untuk menyalurkan gas sebesar 40 MMSCFD.
- Sistem Automatisasi Terminal BBM

AIR MINUM

Proyek penyediaan air minum Umbulan dengan panjang 92,3 km berkapasitas 4.000 liter/detik, dengan target untuk dapat memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga.

IIF portfolio includes:

TOLL ROAD

Financing toll road with total length 116.75 km.

TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS

Financing telecommunication providers that have in total of more than 7,500 telecommunication towers spread all around Indonesia.

Development of national fiber optic networks with total length of 1,676 km across 17 cities/municipalities in East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South East Sulawesi and North Maluku.

ELECTRICITY

The construction and development of power generations and temporary power business which collectively reaches 1,900 MW:

- Hydroelectric Power Plant (HEPP): 180 MW
- Mini Hydro Power Plant (MHPP): 10 MW;
- Gas Fired Power Plant: 633 MW;
- Solar Energy Power Plant: 2 MW; and
- Temporary Power: 1,075 MW.

OIL AND GAS

- Financing LPG Plant with total capacity of 40 MMSCFD with LPG output reaches 440 ton/day and LNG Train with capacity of 3.8 million ton per year.
- Financing development of 13.5 km gas pipeline system for gas distribution up to 40 MMSCFD.
- Terminal Automation System

DRINKING WATER

Drinking water supply projects with total length of 92.3 km with total capacity of 4,000 liters/second. The drinking water is targeted to meet the water needs of 1.3 million residents.

BANDAR UDARA

Pembangunan Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta yang meningkatkan kapasitas tampung menjadi 45 juta penumpang per tahun dan pengembangan 5 bandara dengan total peningkatan kapasitas tampung dari 25,4 juta penumpang per tahun menjadi 71,6 juta penumpang per tahun.

PELABUHAN LAUT

- Operator Terminal Pelabuhan

Pengembangan operator terminal pelabuhan yang meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 600 ribu TEUs per tahun.

- Pengembangan Pelabuhan Laut

Pembangunan pelabuhan yang meningkatkan kapasitas tampung container menjadi 2.4 juta TEUs per tahun, vessel mencapai 560.5 juta GT per tahun, non-container menjadi 187.4 juta ton/m³ dan kapasitas tampung terminal penumpang sampai dengan 6.0 juta penumpang setiap tahun.

AIRPORT

The development of Terminal 3 Soekarno-Hatta airport increasing total passengers' capacity to 45 million passengers per year and development of five airports to increase the total passengers capacity from 25.4 million passengers per year to 71.6 million passengers per year.

SEAPORT

- Port Terminal Operator

Development of port terminal operator by increasing container's capacity to 600 thousand TEUs per year.

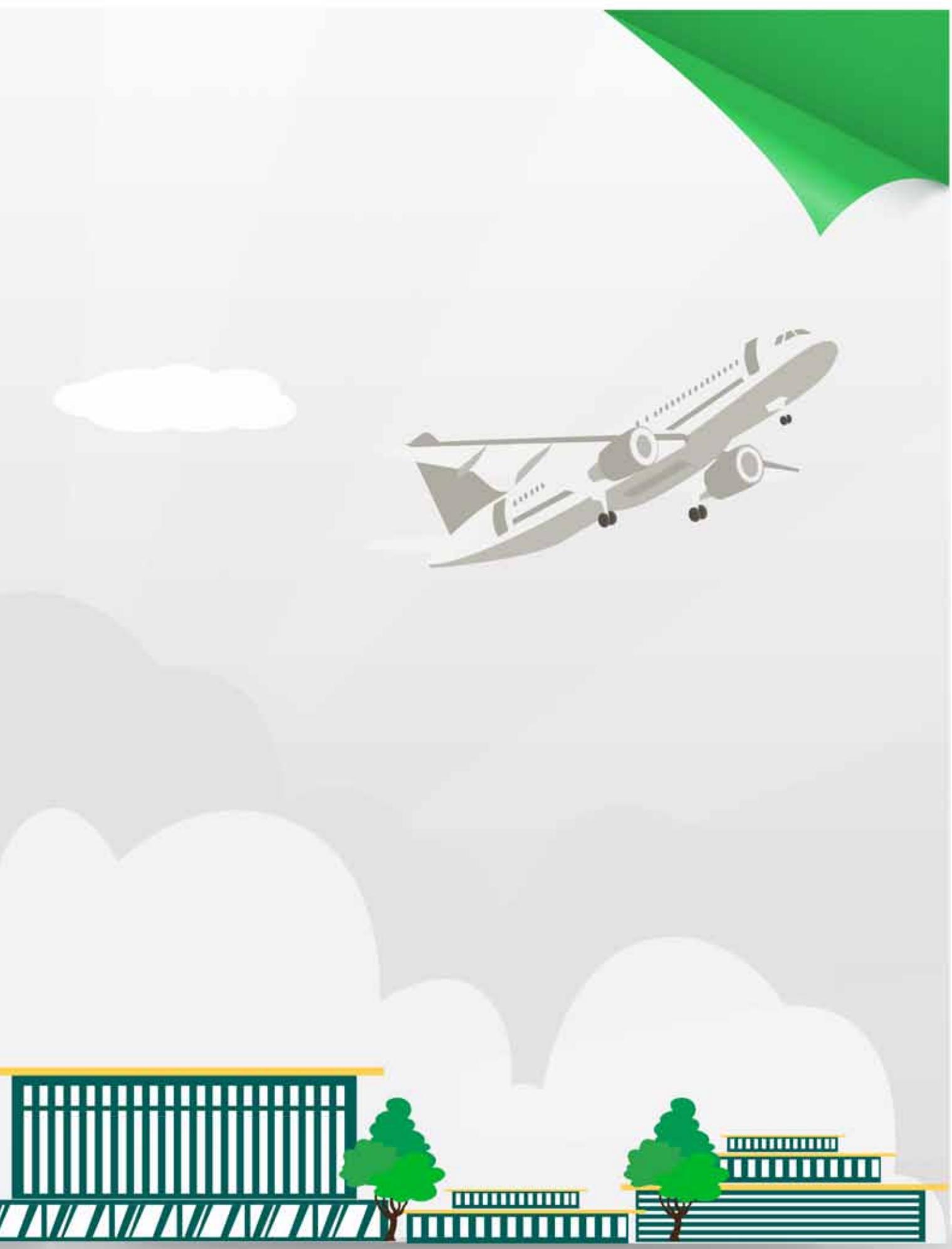
- Seaport Development

Development of seaports to increase total containers' capacity to 2.4 million TEUs per year, vessels' capacity reaches 560.5 million GT, capacity for non-container to 187.4 million ton/m³ and increase in capacity for passengers terminal to serve 6.0 million passengers per year.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Overview on Business Support





Manajemen Risiko

Risk Management



Sebagai institusi keuangan dengan core bisnis yang bergerak pada sektor pembiayaan infrastruktur, sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha yang dilakukan. IIF mengembangkan pengelolaan risikonya secara holistic, yang tidak hanya meliputi pengelolaan risiko utama seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, tetapi juga risiko sosial dan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Hal ini membuat IIF unik dan berbeda dari perusahaan pembiayaan lainnya di Indonesia.

Perseroan mengelola eksposurnya terhadap berbagai macam potensi risiko melalui Direktorat Manajemen Risiko yang dikepalai oleh seorang *Chief Risk Officer* (CRO). Dalam hal proses pengambilan keputusan bisnis, unit usaha menjadi lini pertahanan terdepan, sedangkan unit manajemen risiko menjadi lini kedua. Proses ini selanjutnya juga diperkuat oleh adanya fungsi audit yang merupakan lini pertahanan ketiga. Terdapat beberapa komite pada tingkatan dewan direksi dan komisaris yang terlibat dalam pengawasan proses mulai dari awal hingga pengambilan keputusan. Konsep

As a financial institution with its core business in financing the infrastructure sector, an effective and efficient risk management system is a key element in supporting the Company's robust business activities. IIF has developed a holistic risk management approach, which not only covers major risks such as credit risk, operational risk, market risk and liquidity risk, but also social and environmental risk to ensure sustainable business growth. This makes IIF unique and different from other financing companies in Indonesia.

The Company manages its exposures to various potential risks through the Risk Management Directorate that is led by a Chief Risk Officer (CRO). During the business decision-making process, the business unit will be the first line of defense, while risk management is the second line. The process is further strengthened by the audit function as the third line of defense. There are several committees at the level of the Board of Directors and Commissioners involved in overseeing the process from the initiation of a business opportunity until final approval is made. The concept of the four eyes principle

Untuk menjaga kualitas pengelolaan risiko yang baik di Perseroan, IIF senantiasa melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memantau sejauh mana relevansi manajemen risiko dapat dijalankan.

To maintain the quality of risk management in the Company, IIF carries out evaluation periodically to monitor how far the relevance of risk management can be implemented.

four eyes principle pun selalu diterapkan dalam setiap proses bisnis, sehingga dengan demikian, Perseroan senantiasa mengedepankan proteksi berlapis dalam mengelola berbagai macam risiko yang dihadapinya.

Selain risiko yang terkait langsung dengan aktivitas pembiayaan (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional) serta aspek sosial dan lingkungan, IIF juga melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko lain yang mungkin memiliki potensi dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Keseluruhan risiko dipantau secara komprehensif agar dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan Perusahaan secara umum.

TANTANGAN PENGELOLAAN RISIKO 2016

Kondisi perekonomian baik global maupun nasional sepanjang 2016 cenderung stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi pembangunan infrastruktur yang sempat terganjal pun berangsur-angsur kembali menggeliat di tahun ini dengan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas perekonomian domestik meskipun gejolak pada tataran global masih berlangsung. Kondisi semakin baik dengan munculnya program-program baru pemerintah yang mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur.

Perseroan tentunya telah mengambil catatan dari situasi yang terjadi di tahun 2015 yang memberikan tantangan tersendiri bagi pengelolaan risiko Perseroan di masa mendatang. Untuk itu, Perseroan senantiasa merumuskan strategi pengelolaan

is consistently implemented in any business process and thus the Company always has in place multiple lines of defense in managing various risk exposures.

In addition to direct risks associated with its financing activities (including credit, market, liquidity and operational risks) as well as social and environmental aspects, IIF also monitors other risks that may have a potential adverse impact on the Company's business activities. Those risks are, among others, legal risk, compliance risk and reputational risk. These risks are thoroughly monitored to provide a valid reference that helps the Company in its overall decision-making process.

CHALLENGES OF 2016 RISK MANAGEMENT

Economic conditions at both the global and national levels during 2016 were quite stable relative to the previous year. Infrastructure development, that had been hindered for a while, gradually showed an improvement this year due to the government's success in stabilizing the domestic economic condition despite the fluctuating global economy. Conditions have been getting better with the government's new programs in support of infrastructure development.

The Company has certainly taken note of the situation in 2015 that provides its own challenge for the Company in managing risks going forward. To that end, the Company continues to formulate an optimal risk management strategy to anticipate

risiko yang optimal dalam mengantisipasi segala kemungkinan, diantaranya dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan di tahun 2016 sebagai berikut:

1. Menjaga portofolio aset yang baik

Perseroan telah menyusun kebijakan dan prosedur terkait Pengelolaan Aset Khusus (SAM) yang digunakan sebagai *early warning system* dan panduan dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang berpotensi bermasalah.

Selain itu, Perseroan secara berkesinambungan terus melakukan proses pemantauan terhadap portofolio pembiayaan melalui kajian-kajian *stress-test* yang berkala untuk mengukur dampak merugikan yang mungkin dapat terjadi pada saat kondisi ekstrim seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga secara ekstrim; dimana hasilnya portofolio IIF secara keseluruhan masih dinilai mampu bertahan.

2. Memperbaiki proses kredit

Baik Direktorat Investasi maupun Direktorat Manajemen Risiko telah mengkaji ulang dan memperbarui SOP untuk membuat prosedur tetap diperbarui sesuai dengan kondisi aktual.

3. Pusat Keunggulan dan Infrastruktur

Di tahun 2016, IIF telah berhasil menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan mengenai pembiayaan dan manajemen risiko dalam proyek infrastruktur termasuk aspek sosial dan infrastruktur pada April 2016 kepada anggota Asosiasi Bank Regional ("ASBANDA"), serta Banker Association for Risk Management ("BARa") pada Mei 2016. Berbagi Pengetahuan lainnya terkait prinsip Sosial dan Lingkungan juga diselenggarakan pada April 2016 bersama PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA").

4. Parameter risiko

IIF terus memperkuat kerangka kerja Manajemen Risiko dengan memperbarui parameter risiko (daftar risiko) agar bisa sejajar dengan perkembangan dan situasi bisnis. *Risk Dashboard* dibentuk agar mempermudah manajemen dalam proses pemantauan risiko-risiko melekat Perusahaan.

all possibilities, with the following initiatives, among others, conducted in 2016:

1. Maintaining a good asset portfolio

The Company has formalized the policy and procedure related to Special Asset Management (SAM) to be used as an early warning system and guideline in identifying and managing assets with potential problems.

Moreover, the Company has continued to conduct a monitoring process on its lending portfolio through regular stress-test exercises in order to measure any potential adverse impact that might occur during extreme conditions such as a slowdown in economic growth, extreme changes in foreign exchange rates and interest rates. The results of such tests indicate that IIF's overall portfolio is still deemed to be sustainable.

2. Improving the credit process

Both the Directorates of Investment and Risk Management have also reviewed and updated the existing SOP to ensure that the procedure is up-to-date to adjust to the actual condition.

3. Center of Excellence and Infrastructure

In 2016, IIF has successfully organized knowledge sharing sessions on financing and risk management in infrastructure projects including social & environmental aspects in April 2016 to members of the Association of Regional Development Banks ("ASBANDA"), and the Bankers Association for Risk Management ("BARa") in May 2016. Another knowledge sharing session in relation to Social and Environmental principles was also convened in April 2016 in partnership with PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA").

4. Risk Parameters

IIF has continuously strengthened its Risk Management framework by improving risk parameters (list of risks) to be in line with the most recent business development and conditions. A Risk Dashboard has been established to facilitate the management in monitoring the Company's inherent risks.

5. Social and Environment ("S&E")

Unit S&E (SEU) dibawah Direktorat Manajemen Risiko terus berupaya menjangkau peminjam proyek dengan melakukan pendampingan dalam penerapan prinsip S&E, agar memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola risiko S&E secara efektif, serta memenuhi persyaratan Prinsip-Prinsip S&E melalui pemantauan Rancang Tindak Perbaikan (CAP).

6. Memperkuat pengelolaan risiko operasional

Perseroan terus memperkuat upaya mitigasi risiko operasional diantaranya dengan hal-hal berikut:

- a. membangun Disaster Recovery Center (DRC) untuk melindungi IIF dan meminimalisasi risiko operasional dari potensi bencana alam;
- b. terus memelihara dan memperbarui cakupan asuransi untuk mengurangi setiap risiko operasional;
- c. finalisasi *call tree* sebagai saluran komunikasi utama milik IIF selama insiden bencana.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO IIF

Perseroan selalu mengedepankan pembentukan kerangka manajemen risiko yang memadai serta mampu beradaptasi dengan perkembangan segala jenis risiko usaha yang ada. Di tahun 2016, IIF telah menerapkan kerangka manajemen risiko yang terbukti telah berjalan cukup efektif dengan keberadaan komite-komite yang relevan di organ Dewan Komisaris dan Direksi. Pembahasan terkait risiko usaha telah dilaksanakan dengan baik sepanjang 2016 melalui agenda-agenda pertemuan yang melibatkan seluruh organ terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. 12 kali pertemuan ALCO;
2. 4 kali pertemuan RMC;
3. 4 kali pertemuan ROC;
4. 58 kali pertemuan BoD-IC;
5. 11 kali pertemuan BoC-IC; dan
6. 5 kali pertemuan Komite Audit.

JENIS RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Risk Appetite

Unit-unit pengelola risiko IIF senantiasa menjalankan komunikasi yang baik dan terbuka dalam merumuskan *risk appetite* Perseroan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis. Perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka kerja manajemen risiko serta faktor-faktor lainnya seperti peluang investasi, regulasi,

5. Social and Environmental ("S&E")

The S&E Unit (SEU) under the Risk Management Directorate has continued the effort to embrace more project borrowers by providing them with assistance related to the implementation of S&E principles, in order to strengthen their capability to effectively manage S&E risks and comply with the S&E-related requirements through the monitoring of Corrective Action Plans (CAPs).

6. Strenghtened operational risk management

The Company has continued to strengthen its operational risk mitigation, among others, with the following:

- a. establishing a Disaster Recovery Center (DRC) to protect IIF and to minimize operational risks arising from natural disasters;
- b. continuously maintaining and renewing insurance coverage to mitigate operational risks;
- c. finalizing a call tree as the main communication channel operated by IIF during disaster occurrences.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK IN IIF

The Company always prioritizes the formation of an appropriate risk management framework that is adaptable to any potential business risks. In 2016, IIF implemented a risk management framework that has been proven effective along with the supervision of relevant committees under the Board of Commissioners and Board of Directors. Discussions on business risks were properly held during 2016 through meeting agendas that involved all related organs, with the following details:

1. 12 times ALCO meetings;
2. 4 times RMC meetings;
3. 4 times ROC meetings;
4. 58 times BoD-IC meetings;
5. 11 times BoC-IC meetings; and
6. 5 times Audit Committee meetings.

TYPES OF RISK AND THEIR MANAGEMENT

Risk Appetite

Risk management units in IIF continuously uphold transparent and open communication in formulating the Company's risk appetite, especially relating to strategic issues. The risk appetite is developed by taking into account the risk management framework as well as other factors such as investment opportunities, regulations, and financial and

keuangan dan operasional. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko dalam upaya optimalisasi performa usaha yang dilakukan.

Dalam proses penilaian risiko, Perseroan telah menetapkan beberapa parameter terkait, yang telah diukur dan diperhitungkan secara rutin untuk memberikan informasi tentang tingkat eksposur risiko IIF dalam periode waktu dan kategori tertentu. Parameter tersebut dikategorikan dalam risiko-risiko terukur (kuantitatif) seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya (seperti risiko bisnis dan risiko reputasi); maupun risiko-risiko tidak terukur (kualitatif) seperti risiko bisnis, risiko regulasi & hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi, tingkat temuan audit, serta kondisi makroekonomi dan politik. Evaluasi terhadap pengukuran risiko dilaksanakan Perseroan secara periodik untuk selanjutnya dilaporkan setiap triwulan ke Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi dan Komite Pengawasan Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk dibahas secara mendalam di dalam meeting. Hasil akhir dari proses tersebut akan didistribusikan dalam bentuk laporan berkala kepada pemegang saham Perseroan.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Untuk menjaga kualitas pengelolaan risiko yang baik di Perseroan, IIF senantiasa melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memantau sejauh mana relevansi manajemen risiko dapat dijalankan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menganalisis kekurangan maupun kelemahan yang ada dari sistem yang digunakan yang bertujuan untuk lebih menguatkan peran pengelolaan risiko Perseroan dan meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Perseroan menilai tingkat risiko keseluruhan masih baik dan sesuai dengan tingkat *risk appetite* Perseroan, dan dengan kualitas pengelolaan risiko yang memadai.

operational conditions. This approach is instrumental in the Company's risk management as part of its efforts to optimize business performance.

For the risk assessment process, the Company has determined various parameters, which have been measured and calculated regularly in order to provide information on what level of risk exposure IIF has within certain periods and categories of measurement. These parameters are categorized into measurable risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and other risks (among others, business risk and reputation risk); as well as non-measurable risks such as regulatory & legal risk, compliance risk, insurance risk, severity of audit findings, and macroeconomic and political conditions. Evaluation on risk measurement is conducted periodically by the Company, which is then reported on a quarterly basis to the Risk Management Committee of the Board of Directors and the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners and to be discussed thoroughly in the meetings. The end results of the process will be distributed in the form of a periodic report to the Company's shareholders.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT

To maintain the quality of risk management in the Company, IIF carries out evaluation periodically to monitor how far the relevance of risk management can be implemented. In addition, the evaluation is conducted to analyze the weakness of the existing system in order to strengthen the role of Company's risk management and to minimize error in the decision making process.

Based on the evaluation performed, the Company concludes the overall level of risk is still well within the Company's risk appetite, and with adequate risk management quality.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

IIF senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas bagi seluruh karyawan dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan kepegawaian serta tata hubungan antara pegawai dan Perusahaan dengan mengadakan forum-forum yang dilaksanakan secara berkala.

IIF is committed to providing open communication platform that facilitates all employees to raise their aspirations on any employment issues or hierarchy between the employees and the Company through forums that the Company routinely holds

Sebagai elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha IIF, sumber daya manusia senantiasa menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Pembentukan Sumber Daya Manusia Perseroan yang matang dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban dilakukan melalui perancangan kerangka pengembangan yang secara komprehensif telah dirumuskan oleh Divisi *Human Resources*. Hal tersebut diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dan andal dalam pasar industri pembiayaan infrastruktur yang masih terbatas di Indonesia.

Di awal berdirinya Perseroan, Divisi Sumber Daya Manusia ("SDM") menetapkan fokus pengembangan SDM dengan menitikberatkan pada *center of excellence* untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan kapabilitas SDM yang mumpuni dalam mendukung percepatan rencana bisnis Perseroan. Pada tahap selanjutnya, Perseroan melakukan penguatan dari segi infrastruktur organisasi dengan menghadirkan sistem tata kelola SDM yang lebih terukur. Hasil akhir yang ingin dicapai atas upaya tersebut adalah ketersediaan sistem pengelolaan SDM yang mapan serta mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan usaha di masa mendatang.

Dalam merumuskan kebijakan SDM, Perseroan senantiasa bersandar pada nilai-nilai inti IIF yaitu:

- Kolaborasi**

IIF memiliki komitmen terhadap kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

As a key element in the implementation of IIF's business activity, human resources is the main focus of the Company to improve its performance. The Company has prepared a human capital development framework that has been comprehensively formulated by the Company's Human Resources Division in order to create human resources that are agile and competent in carrying out their duties. This is important to prepare professional and reliable manpower resources in the infrastructure financing industry, which are quite limited in Indonesia.

Since its founding, the establishment of a center of excellence has been the Company's focus of Human Resource ("HR") development in order to enhance the Company's performance. This is done by empowering HR capability to expedite the implementation of IIF's business plan. In the following stages, the Company has solidified its organization infrastructure by establishing a more measurable HR governance system, which is expected to ultimately create a reliable HR management system that can cater well to the business development needs in the years to come.

With regard to its HR policy, the Company will continuously formulate this, based on its core values, namely:

- Collaboration**

IIF is committed to collaborate with trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational goals and collaboration to achieve them.



- **Keunggulan**

IIF memiliki komitmen terhadap keunggulan, seperti ketelitian hingga ke hal-hal yang mendetil, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam pekerjaan, dan mampu memecahkan masalah.

- **Komitmen terhadap bisnis infrastruktur**

IIF memiliki komitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia.

Nilai-nilai ini diharapkan dapat dihayati oleh tiap individu Perseroan dalam bekerja sebagai tim dan berinteraksi dengan para mitra bisnis. Selaras dengan komitmen IIF dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan, penerapan nilai-nilai tersebut juga diharapkan dapat menjembatani kebutuhan berbagai pemangku kepentingan secara harmonis. Penerapan prinsip kesetaraan tersebut juga tercermin dari komposisi karyawan IIF, dimana Perseroan tidak membatasi peran pekerja wanita dalam ikut membangun Perseroan. Hingga tahun 2016, sebesar 46% dari jumlah karyawan IIF terdiri dari karyawan wanita. Beberapa pekerja wanita bahkan menempati posisi kunci, seperti manajer, manajer senior, serta direktur.

- **Excellence**

IIF is committed to excellence with an approach that is detail-oriented, intolerant of mistakes, and emphasizes accuracy, meeting expectations, with an emphasis on professionalism, quality in our work and the ability to solve problems.

- **Commitment to infrastructure business**

IIF is committed to be an expert in infrastructure business in Indonesia.

Each individual in the Company is expected to internalize these values, particularly in working together as a team and in interacting with all business partners. In line with IIF's commitment to upholding the equality principle in its treatment of all employees, the application of these values is expected to harmoniously bridge the needs of many stakeholders. IIF holds true to this commitment, as evidenced in its employee composition development whereby the Company does not limit the role of women in building the Company. As of 2016, women accounted for 46% of IIF's total workforce, some of whom hold key positions, such as managers, senior managers and directors.

Selain itu, IIF juga aktif mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan peningkatan kompetensi sebagai bentuk profesionalitas IIF dalam meningkatkan kinerja. Sepanjang tahun 2016, IIF telah mengikutsertakan 56 karyawan (tidak termasuk BOD) di berbagai pelatihan, workshop, dan seminar dengan rata-rata hari pelatihan per karyawan per tahun di atas 9 hari kerja setiap tahunnya. Program pengembangan karyawan Perseroan selama tahun 2016 telah menghabiskan biaya sebesar Rp1.471.703.561,02.

Komposisi Karyawan

Selama 2016, IIF merekrut 21 karyawan baru termasuk di dalamnya 6 karyawan pengganti karyawan yang mengundurkan diri guna mengisi posisi yang kosong serta dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan. Berikut komposisi karyawan:

Komposisi Karyawan berdasarkan Pendidikan

Pendidikan / Education	2015	%	2016	%
Diploma	6	9	5	6
Strata 1 / Bachelor	30	47	37	47
Strata 2 / Master	28	44	37	47
Jumlah / Total	64	100	79	100

Employee Composition

Throughout 2016, IIF recruited 21 new employees, 6 of whom were recruited to fill the position of the resigning employees, in order to improve the Company's business performance.

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Karyawan

Status Karyawan / Employee Status	2015	%	2016	%
Tetap / Permanent	62	97	73	94
Kontrak / Contract	2	3	6	6
Jumlah / Total	64	100	79	100

Employee Composition based on Employee Status

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin / Gender	2015	%	2016	%
Laki-Laki / Male	39	61	43	54
Wanita / Female	25	39	36	46
Jumlah / Total	64	100	79	100

Employee Composition based on Gender

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan / Position	2015	%	2016	%
Eksekutif / Executive	22	34	23	29
Manajer Madya / Middle Managers	27	42	32	40
Pelaksana / Staff	15	24	24	31
Jumlah / Total	64	100	79	100

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia / Base on Age	2015	%	2016	%
22-30	13	20	21	27
31-40	28	44	32	40
41-50	19	30	23	29
51-54	4	6	3	4
Jumlah / Total	64	100	79	100

Employee Composition based on Age

Manajemen Kinerja

Dalam memantau kinerja segenap karyawan IIF serta melakukan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja masing-masing individu, Divisi SDM telah mengembangkan program menajemen kinerja dengan menggunakan modul penilaian yang berbasis Indikator Kinerja Utama.

Program Retensi

IIF senantiasa memberikan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan proporsional bagi seluruh karyawan. Selain sebagai bentuk komitmen IIF bagi pemenuhan kesejahteraan karyawan, program ini juga berperan dalam menciptakan loyalitas dan integritas karyawan terhadap Perseroan.

Komunikasi Karyawan

IIF senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas bagi seluruh karyawan dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan kepegawaian serta tata hubungan antara pegawai dan Perseroan dengan mengadakan forum-forum yang dilaksanakan secara berkala. Sepanjang 2016, IIF telah mengadakan pertemuan sebanyak 5 kali dengan seluruh pegawai dengan agenda pembahasan yang beragam.

Turnover Karyawan

Sepanjang 2016, tidak terdapat *turnover* pada posisi karyawan kunci karena IIF mampu mengelola SDM dengan baik dan mengantisipasi hal tersebut dengan penyiapan jalur karir bagi karyawan untuk mengisi posisi yang kosong serta melalui proses rekrutmen baru.

Performance Management

In monitoring the performance of each employee of IIF and taking necessary corrective actions to improve their performance, the HR Division has developed a performance management program by using an assessment module based on Key Performance Indicators.

Retention Program

IIF continues to provide a competitive compensation and benefits package for all of its employees. As part of its commitment to improving employees' welfare, this program also helps create loyalty and integrity among the employees in respect of the Company.

Employee Communication

IIF is committed to providing an open communications platform that allows all employees to raise their concerns on any employment issue and facilitates communications between the employees and the Company through forums that the Company routinely holds. In 2016, IIF held 5 forums, which were attended by all employees to discuss diverse issues.

Employee Turnover

There was no key person turnover in 2016 since IIF was able to properly manage its human capital. Employee turnover was anticipated by preparing a career path for employees to occupy vacant positions and through the recruitment process.

Remunerasi Karyawan

Dalam menjaga kinerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan sebagai aset utama dalam mencapai target yang lebih baik di masa mendatang, IIF menyediakan program kesejahteraan karyawan, diantaranya:

1. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja bagi karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan ditambah dengan prestasi yang telah dicapai dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.

2. Fasilitas dan Tunjangan

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi, Perseroan juga memberikan fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

- Badan Penyelangara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan.
- Badan Penyelangara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan.
- Tunjangan Hari Raya yang diberikan setahun sekali.
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya.
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

Employee Remuneration

In maintaining performance, loyalty, and productivity of employees as the main asset in achieving a better target in the future, IIF provides employee welfare programs, among others:

1. Salary and Performance Bonus

The structure of salary and performance bonus for employees is based on the level or rank of each employee plus the achievements that have been made as well as contributions to the Company.

2. Facilities and Allowances

In addition to basic salary and allowances for transportation, the Company also provides other facilities and allowances, namely:

- Badan Penyelangara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan (Workers Social Security Program).
- Employee insurance, consisting of work accident security, retirement security, and death security.
- Annual Religious Holiday Allowance (THR).
- Reimbursement for outpatient and inpatient medication for employees and their family members.
- Sport Membership Allowance.



IIF berupaya untuk meningkatkan kinerja fungsi operasionalnya sehingga dapat terus menerapkan praktik terbaik dalam industri pembiayaan dan mencapai keunggulan operasional di setiap aspek bisnis

IIF improve the performance of its operations function so that it can continuously implement best practices in the financing industry and achieve operational excellence in every aspect of business.

Teknologi Informasi

Information Technology

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi aktivitas usaha Perseroan guna mencapai kinerja yang optimal. Perkembangan dunia Teknologi Informasi ("TI") yang semakin pesat menuntut Perseroan untuk terus berupaya mengembangkan TI guna menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif dengan mengintegrasikan seluruh lini bisnis yang ada. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat posisi dan keunggulan Perseroan dalam bidang usaha pembiayaan yang dijalankan.

Fokus operasional TI di Perseroan menekankan pada dua objek utama yang meliputi aspek inti (*core*) dan aspek pendukung (*support*). Terkait aspek inti, IIF senantiasa melakukan pengembangan dan pemutakhiran pada sistem kegiatan usaha yang meliputi mekanisme Sistem Informasi Keuangan dan *mandatory system* terkait kegiatan bisnis yang dijalankan sehari-hari. Untuk aspek pendukung, departemen TI juga berupaya menyediakan infrastruktur serta sistem yang meliputi tugas-tugas pengarsipan serta penyediaan *database* atas berbagai dokumen penting Perseroan. Hal ini menjadi penting mengingat kegiatan usaha Perseroan di bidang pembiayaan membutuhkan dokumentasi terkait rekam jejak klien dalam rangka pengambilan keputusan pendanaan.

Pada tahun ini, Perseroan masuk dalam tahap evaluasi untuk semakin memantapkan penerapan 4 (empat) sistem baru yang telah diselesaikan pada tahun lalu, yaitu *Loan System*, *Treasury & Asset and Liability Management ("ALM") System*, *Budgeting System*, dan *Financial Reporting System* yang cukup memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Dengan keandalan sistem baru ini, setiap proses di IIF menjadi lebih akurat, lebih aman dalam hal kerahasiaan, dan lebih cepat dalam hal penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, serta lebih mumpuni dalam mendukung sistem pelaporan keuangan.

Sementara itu, pengembangan dari sisi aplikasi terus dilakukan secara berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, penambahan fitur bisnis, dan penyesuaian dengan aturan dari pihak otoritas. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan dari sisi sistem informasi manajemen juga terus dilakukan secara intensif, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif berlandaskan data aktual.

The use of information technology has been of vital necessity for the Company's business activity to reach optimum performance. The rapid developments in the Information Technology ("IT") world requires the Company to continuously improve its IT to face the increasingly aggressive business competition by integrating the existing lines of business. Such efforts are made to strengthen the Company's position and competitive edge in the field of finance business.

The Company's IT focuses its operations on two major aspects, namely core aspect and supporting aspect. Regarding the core aspect, IIF continues to perform development of and upgrades to its business systems covering the Financial Information System and mandatory systems relevant to routine business activities. For the supporting aspect, the IT department strives to provide infrastructure and systems that include archiving as well as providing a database for the Company's important documents. This is quite significant considering the Company's business activities in the financing field that requires proper documentation system in relation to clients' records and accounts for the sake of making decisions on the financing process.

This year, the Company entered into the evaluation stage to further strengthen the implementation of 4 (four) new systems that had been completed in the previous year, namely the *Loan System*, *Treasury & Asset and Liability Management ("ALM") System*, *Budgeting System*, and *Financial Reporting System*, which have contributed positively to the Company's performance. With these new systems in place, each process in IIF has become more accurate, more secure in terms of confidentiality, faster in terms of provision of information to make decisions, and more reliable in supporting the financial reporting system.

Meanwhile, the development of applications is continuously conducted to spur the Company's business growth, improve business features, and make adjustments to conform to the regulations issued by the authorities. In line with this, the development of a management information system is also conducted intensively so that the decision-making process can be carried out objectively based on actual data.

Disaster Recovery Plan (Rencana Pemulihan Bencana)

Dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen risiko, terutama risiko yang berhubungan dengan bencana, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun faktor alam, Perseroan telah menyusun program *Disaster Recovery Plan* ("DRP") untuk memitigasi terjadinya bencana dan memulihkan gangguan pada infrastruktur teknologi informasi Perseroan dan telah mengimplementasikan DRP on cloud.

Pengembangan Teknologi Informasi ke Depan

IIF berupaya melakukan optimalisasi proses bisnis Perseroan agar berjalan efektif, efisien dan *real time*. Untuk mendukung hal tersebut, aspek pengelolaan TI menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan rencana pengembangan operasional IIF. Tata kelola dan pengembangan TI pun dituntut untuk sejalan dengan tujuan-tujuan strategis Perseroan yang ingin dicapai. Di tahun 2017 mendatang, Divisi TI Perusahaan melakukan beberapa rencana pengembangan yaitu:

1. Melakukan peninjauan ulang terhadap Standard Operation Procedure ("SOP") TI yang terdiri dari manajemen operasi, manajemen masalah dan insiden, manajemen permintaan, manajemen keamanan, manajemen aset, manajemen perubahan serta manajemen proyek.
2. Melaksanakan *Deep Security Monitoring*.
3. Melakukan perancangan database SDM.
4. Menyiapkan konsep untuk sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
5. Melakukan beberapa pengembangan aplikasi internal untuk mendukung rencana kerja tim *Risk, Investment, Operation* maupun yang lainnya.

Operasional Excellence

IIF berupaya untuk meningkatkan kinerja fungsi operasionalnya sehingga dapat terus menerapkan praktik terbaik dalam industri pembiayaan dan mencapai keunggulan operasional di setiap aspek bisnis.

Pada tahun 2016, IIF telah berhasil menerapkan beberapa proyek untuk mendukung operasionalnya, misalnya : *Disaster Recovery, Timesheet, Workflow for ExPense, Klaim dan Pengadaan*; menstabilkan sistem inti, misalnya sistem Kredit, sistem Treasury & ALM dan sistem Akuntansi Keuangan; dan memperkuat infrastruktur TI & jaringan untuk mendukung

Disaster Recovery Plan

In carrying out the risk management system, particularly for disaster-related risks due to human error or force majeure, the Company has developed a Disaster Recovery Plan ("DRP") to mitigate such disasters and recover the Company's information technology infrastructure when disaster strikes. At the end of December 2016, the Company has also deployed DRP on cloud.

Future Information Technology Development

IIF strives to optimize its business process to run effectively, efficiently, and on a real-time basis. As such, Information Technology management should be integrated with IIF's operational development plan. IT governance and development is also encouraged to reflect the Company's strategic goals. IT Division will perform several development programs in 2017, namely:

1. Review the IT Standard Operation Procedure ("SOP") that consists of management practices on operations, conflicts and incidents, requests, security, assets, changes, and project.
2. Conduct Deep Security Monitoring.
3. Develop HR database.
4. Preparing an integrated management information system concept.
5. Conduct some development of internal application to support the working plans of Risk team, Investment team, Operation team and others.

Operational Excellence

IIF improve the performance of its operations function so that it can continuously implement best practices in the financing industry and achieve operational excellence in every aspect of business.

In 2016, IIF has successfully implemented several projects to support its operations, i.e Disaster Recovery, Timesheet, Workflow for Expense, Claim and Procurement; stabilized the core systems, i.e Loan system, Treasury & ALM system and Financial Accounting system; and strengthened the IT Infrastructure & Network to support new core systems and

sistem inti baru dan pengguna yang semakin meningkat. Selanjutnya, kemampuan tim operasional IIF juga telah ditingkatkan melalui pelatihan, seminar dan juga telah menempatkan Service Level Agreement dengan pelanggan internal dalam memberikan kualitas layanan terbaik. Sejalan dengan memberikan kualitas layanan terbaik, tim operasional telah secara proaktif memberikan nasihat kepada pelanggan internal dengan cara melakukan diskusi Front Office Back Office, dan memulai informasi manajemen yang lebih efisien dan sistematis dengan mengotomatisasi laporan dari sistem inti untuk pengambilan keputusan dan tindak lanjutnya.

Perencanaan Korporasi

Divisi ini bertanggung jawab untuk membuat perencanaan bisnis di IIF dan memantau pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai setiap bulan, triwulan, dan tahun.

IIF terus meningkatkan sistem manajemen kinerja yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pencapaian kinerja Perseroan. Secara keseluruhan, proses siklus manajemen strategis di IIF meliputi: perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta penilaian terhadap kinerja manajemen. Perumusan strategi dilakukan melalui rapat kerja yang diikuti oleh seluruh manajemen senior di mana mereka memutuskan untuk menyepakati asumsi dan inisiatif serta memastikan apakah manajemen IIF memiliki arah dan tujuan yang sama. Asumsi dan inisiatif kemudian tercermin dalam Rencana dan Anggaran Bisnis IIF yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Selain itu, Divisi ini menggunakan *Key Performance Indicator* ("KPI") Perusahaan sebagai perangkat yang digunakan untuk menilai kinerja IIF.

Sepanjang tahun 2016, berikut ini hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh Divisi Perencanaan Korporasi :

1. Perseroan telah melakukan perbaikan sistem/modifikasi untuk mengakomodasi perubahan struktur organisasi (Sindikasi) dan memenuhi kebutuhan manajemen.
2. Meningkatkan dan menstandardisasikan kualitas laporan manajemen.
3. Memperkuat dan mengembangkan kemampuan Tim Corporate Planning agar menjadi tim yang solid.

increased users. Furthermore, IIF's operations team has also been enhanced through training, seminars and the team has put Service Level Agreement with internal customers in providing best quality of services. In line with providing best quality of services, the team has been proactively giving advices to internal customer by way of conducting Front Office Back Office discussion, and initiating more efficient and systematic management information by automating reports from the core systems for decision making and follow up.

Corporate Planning

This Division is responsible for drawing up IIFs' business plan and monitoring the plan's implementation and progress on a monthly, quarterly, and annual basis.

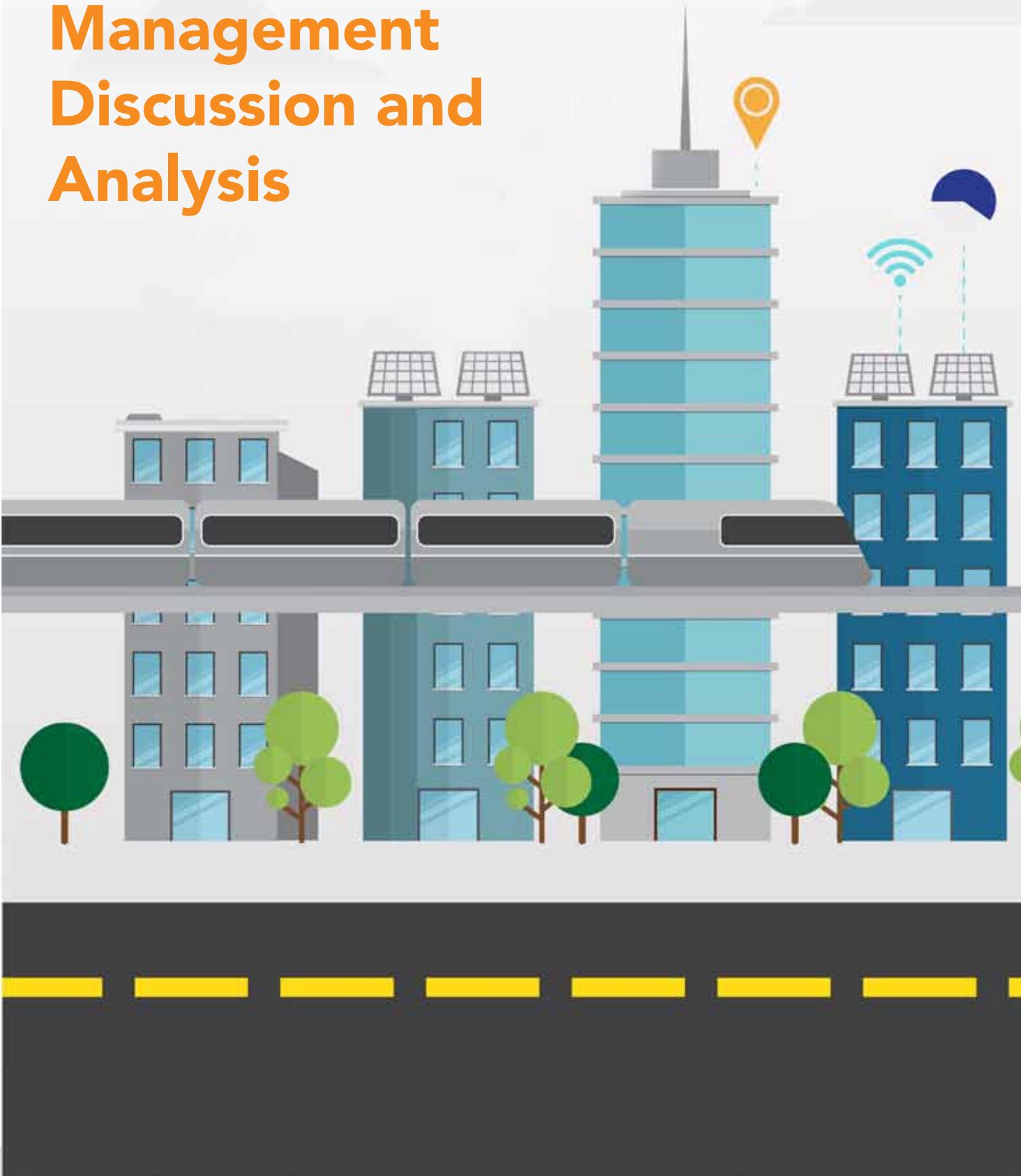
IIF continues to improve its performance management system so as to be systematic in order to ensure the Company's performance achievement. The overall strategic management cycle in IIF consists of: strategy formulation, strategy implementation, and evalution of management performance. The strategy is formulated at the work meeting attended by all senior management where they decide to approve assumptions and initiatives undertaken and to ensure that IIF has already set common directions and goals. The assumptions and initiatives are then incorporated in IIF's Business Plan and Budget to be realized for the year. In addition, this Division uses the Company's Key Performance Indicator ("KPI") as the tool to measure IIF's performance.

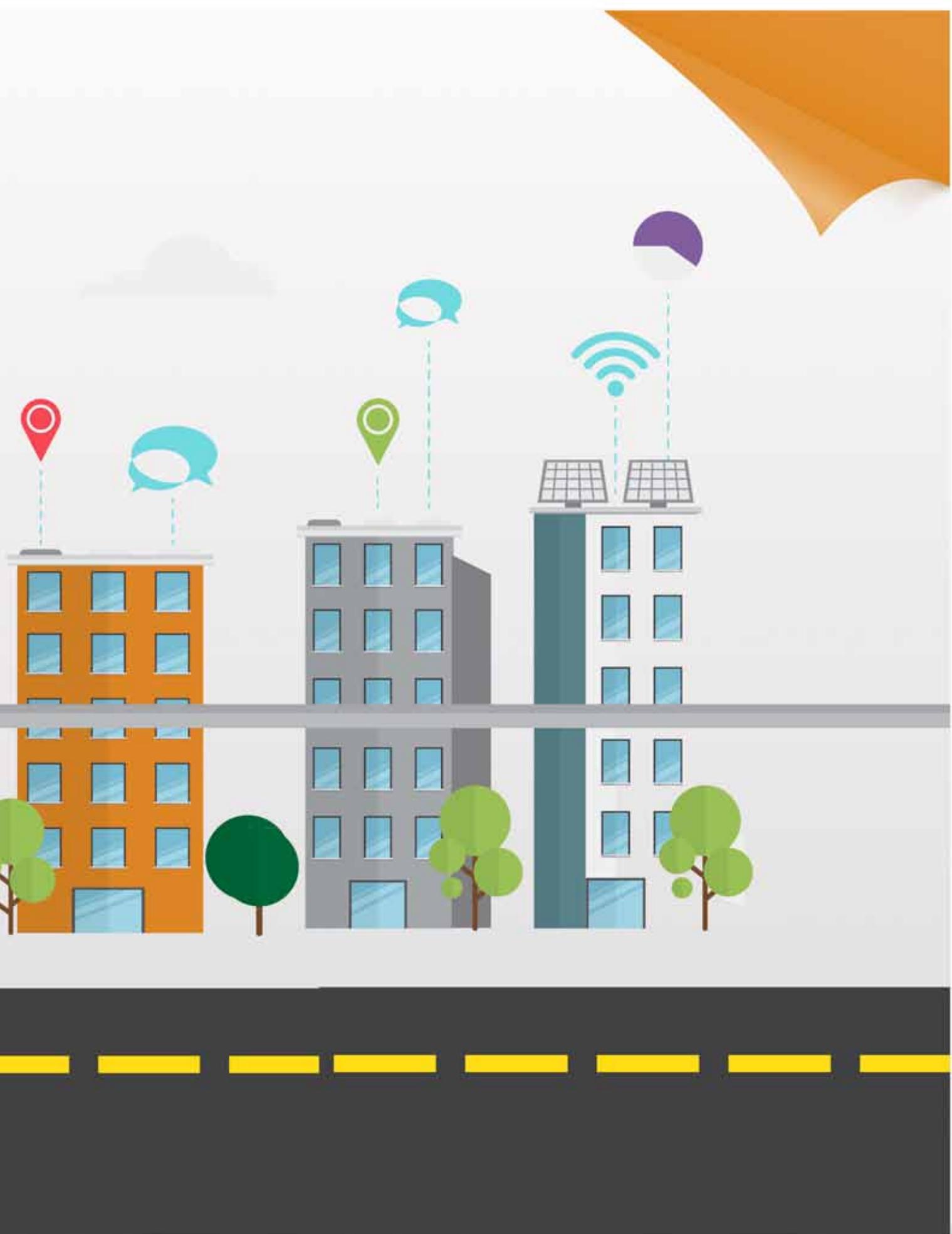
Throughout 2016, the Corporate Planning Division has achieved the following:

1. The Company has made system improvements/modification to accommodate organization restructuring (Syndication) and the management's needs.
2. Improving and standardizing management's report quality.
3. Strengthening and developing Corporate Planning Team to create a solid team.

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

Management Discussion and Analysis





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Di tahun 2016, IIF berhasil melakukan beberapa terobosan yang inovatif yang tidak hanya meningkatkan pendapatan di pemberian, namun juga meningkatkan pendapatan berbasis biaya (*fee based income*) dan pendapatan dari jasa konsultansi.

In 2016, IIF managed to record an innovative breakthrough, which resulted in not only an increase in financing income, but also in fee-based income segment and advisory services.

TINJAUAN UMUM

Berdasarkan kondisi perekonomian global, perlambatan ekonomi dunia masih menjadi isu penting sepanjang tahun 2016. Hal tersebut masih dilatarbelakangi oleh penurunan harga minyak dunia dan fluktuasi harga komoditas. Di tengah kondisi tersebut, pada kuartal II 2016, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) memberi pengaruh besar pada situasi perekonomian dunia terutama pada negara-negara yang menjadi mitra dagangnya. Mendekati akhir tahun, hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat serta kenaikan suku bunga *The Fed* sebesar 25bps, menjadi pelengkap dinamika perekonomian global di tahun 2016.

OVERVIEW

Global economic slowdown continued to become a major concern over the course of 2016, which was contributed among others by the declining global oil prices and fluctuating commodity prices. The United Kingdom's decision to withdraw from the European Union in the second quarter of 2016, commonly known as Brexit, further added to global concerns, especially to their trading partners. Approaching the year's end, the result of the United States' presidential election and an increase of 25 bps of the Fed rate further contributed to the dynamics of the global economy in 2016.

Berbagai peristiwa politik dan ekonomi global yang berlangsung sepanjang tahun 2016 tentu berpengaruh pada situasi ekonomi domestik dan regional di Indonesia. Salah satu contoh adalah penurunan harga minyak yang berimplikasi pada rendahnya kontribusi pendapatan sektor migas pada PDB Indonesia, yang berakibat kurangnya penerimaan devisa negara. Pada sektor komoditas, meskipun mulai menampakkan perbaikan, imbas pelemahan harga yang terjadi di 2015 hingga saat ini masih cukup terasa. Performa ekspor-impor belum dapat diandalkan secara optimal terutama dari sektor pertambangan seperti batu bara. Cina sebagai negara tujuan ekspor batu bara terbesar bagi Indonesia telah melakukan pengurangan impor batu bara sejak tahun lalu guna menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, prospek penurunan volume perdagangan di Amerika Serikat akibat wacana ekonomi proteksi dalam negerinya juga menjadi penyumbang besar ketidakpastian akan masa depan tingkat perdagangan antara Indonesia dan AS. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pola perdagangan global dan kinerja perdagangan Indonesia.

Meskipun kondisi perekonomian global sepanjang tahun 2016 masih terbilang labil, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia nampak semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi yang cukup rendah yaitu sebesar 3,02%. Rendahnya inflasi di tahun ini disebabkan oleh kinerja pemerintah dan otoritas terkait yang telah melakukan koordinasi simultan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter. Situasi ekonomi 2015 yang kurang stabil telah menjadi pelajaran bermakna bagi seluruh pihak termasuk pemerintah untuk menguatkan fundamental ekonomi dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Pembenahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya mampu mendorong penguatan ekonomi nasional. Meskipun secara keseluruhan program-program yang ada belum dilaksanakan sepenuhnya, namun dampak positif mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi nasional didorong perolehan PDB nasional sebesar 5,01%. Berdasarkan perolehan tersebut, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan nampaknya telah menemukan formula yang tepat dalam meningkatkan penerimaan negara baik dalam kerangka aktivitas ekspor-impor maupun aktivitas lainnya. Volume impor bahan kebutuhan pokok seperti beras yang cukup besar, di tahun ini dapat ditekan secara signifikan sebagai efek surplus beras nasional sebesar 43,69 juta ton dari

Several global economic and political events in 2016 certainly had impacted both domestic and regional economic climates in Indonesia. One of which was the falling oil prices that led to lower income contribution of oil and gas sector to Indonesia's GDP, which resulted in a decrease in foreign exchange earnings. Despite signs of recovery in the commodity sector, the impact of weakening commodity prices in 2015 still prevailed. Export-import performance remained unstable, particularly in the mining sector such as coal. China, as Indonesia's largest coal export destination, had cut down its coal import volume since a year ago as a part of its efforts to maintain domestic economic growth. Moreover, the possibility of trading volume reduction that might be enforced in the United States created further uncertainties about the future of trade between Indonesia and the US. This would certainly affect global trade landscape and Indonesia's trading performance.

Despite uncertain global economic condition, Indonesia remained optimistic on its economic growth. Inflation rate was recorded relatively low at 3.02%, which was contributed by positive impacts from simultaneous collaboration of the government and related authorities in maintaining economic growth and monetary stability. The economic situation in 2015 certainly gave a valuable lesson to all parties, including the government, to strengthen economic fundamentals and maintain Financial System Stability (SSK).

Considerable improvements that the government had implemented were able to ultimately boost national economic growth. Even though the overall governmental programs had not been fully operational yet, the generated positive results were already felt by the public; one of which was the accomplishment of economic growth target of 5.02%, which was driven by GDP of 5.01%. The excellent GDP rate is a convincing proof that the government and all the stakeholders have properly identified the right formula to increase state revenue from the export-import sector and other activities. Significant import volume of staple foods such as rice this year was successfully reduced on the back of national rice surplus of 43.69 million tons out of national consumption of 32.30 million tons. The government also continued to seek other

kebutuhan nasional sebesar 32,30 juta ton. Pemerintah juga mencari jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara menggalakkan industri pariwisata.

Di tahun ini, salah satu program pemerintah yang wajib diapresiasi adalah pelaksanaan program pengampunan pajak dalam rangka menghimpun dana tebusan, deklarasi harta, dan repatriasi. Salah satu tujuan program pengampunan pajak tersebut adalah penyaluran dana untuk pembiayaan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha terkait. Melalui program ini, pemerintah diharapkan mampu membenahi sistem pajak negara guna meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Dengan kemapanan investasi di bidang infrastruktur, iklim investasi nasional diharapkan mampu meningkatkan gairah para investor agar kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGUNAN BANGSA

Pada dasarnya, infrastruktur nasional ditujukan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seperti distribusi barang dan jasa. Karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau serta banyaknya daerah yang aksesnya belum sepenuhnya terbuka menyebabkan tingginya kesenjangan pembangunan dan biaya logistik di berbagai wilayah. Konsentrasi masyarakat pada daerah-daerah perkotaan yang lebih dahulu memiliki kecukupan infrastruktur juga menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tidak merata.

Pembangunan infrastruktur adalah solusi yang tepat untuk membenahi masalah-masalah tersebut. Pemerintah menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur menjadi tantangan bagi pembangunan dan terealisasinya kepentingan nasional. Ketersediaan infrastruktur juga mendorong penguatan bagi indeks pembangunan sumber daya manusia dalam menciptakan daya saing masyarakat di era globalisasi saat ini. Tuntutan bagi pembangunan infrastruktur juga tidak berdasar pada aspek kecukupan di salah satu sektor semata, namun juga harus menyangkai pada seluruh sektor-sektor yang membutuhkan. Salah satunya adalah kebutuhan bagi pembangunan infrastruktur penunjang di sektor telekomunikasi dan informasi sebagai konsekuensi perkembangan zaman dan tidak terbendungnya arus informasi yang ada.

solutions to increase state revenue, among others, through extensive promotion of tourism sector.

In 2016, the government implemented a noteworthy program called tax amnesty that allowed the government to collect redemption money and encourage asset declaration and repatriation. Funds collected from tax amnesty will be used for infrastructure investment that will be realized through public-private partnership. The tax amnesty program is also expected to assist the government in improving the tax collection system in the future. With proper investment in the infrastructure segment, national investment climate is expected to encourage investors' participation for the betterment of the nation's welfare.

INFRASTRUCTURE FOR NATIONAL DEVELOPMENT

National infrastructure essentially facilitates the people to run their economic activities, such as distribution of goods and services. Indonesia's geographical landscape that consists of many small islands and remote areas has caused infrastructure disparity and increasing cost of logistics in many regions. The cumulative people concentration in urban areas with more advanced infrastructure also contributed to the uneven growth and activities of economy.

Therefore, infrastructure development is necessary to solve such problems. The government is aware of the importance of infrastructure, which has become a challenge for the development and national goal. The availability of proper infrastructure will also positively encourage the rising human resources index that further allows the creation of competitive manpower in the globalization era like today. The realization of infrastructure development should not only be based on the demand in one sector where necessary requirements for the development has been fulfilled. The infrastructure development should also be implemented for all sectors where such development are crucial, such as in telecommunications and information industry as we have already entered the advanced era where flow of information is staggering.

Dengan diterbitkannya 6 paket kebijakan ekonomi pada tahun 2016 melengkapi 8 paket kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah di tahun sebelumnya, merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk percepatan pembangunan nasional. Ruang lingkup dari 14 paket kebijakan ekonomi yang ada meliputi kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, dan meningkatkan produktivitas. Pemerintah telah mendelegasikan berbagai aktivitas ke perusahaan-perusahaan konstruksi milik negara untuk mengerjakan proyek-proyek yang telah direncanakan. Pemerintah memberi dukungan melalui penyertaan modal negara yang berasal dari penerimaan pajak nasional serta dana-dana yang terhimpun dari program pengampunan pajak. Pemerintah juga membuka ruang kerja sama pembangunan infrastruktur bagi swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang regulasinya telah disahkan melalui Perpres No. 38 tahun 2015.

KEMAJUAN INFRASTRUKTUR 2016

Melalui upaya menstabilkan ekonomi nasional yang berlangsung sepanjang 2016, pembangunan infrastruktur dalam negeri yang sempat tersendat pada 2015 dapat kembali dilanjutkan. Pemerintah telah menerapkan regulasi yang tepat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi di masa mendatang maupun antisipasi terhadap regulasi yang rumit. Hal ini menjadi penting, mengingat rentang waktu yang panjang dalam pembangunannya. Selama berlangsungnya proses tersebut, kendala-kendala seperti fluktuasi harga bahan baku produksi dan transisi kepemimpinan nasional menjadi isu penting bagi kelangsungan proyek-proyek yang sedang berlangsung dan akan dikerjakan.

Sepanjang 2016, kemajuan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari realisasi dan dimulainya beberapa proyek-proyek strategis. Pemerintah mengumumkan, terdapat 30 proyek infrastruktur yang prosesnya telah berjalan. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan ruas jalan tol yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatra. Selain itu, pemerintah juga menjalankan proyek di bidang transportasi dan perhubungan, seperti Kereta Api Soekarno-Hatta International Airport (SHIA), MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara, Kereta Api Makassar-Parepare, Kereta Api Kalimantan Timur, *Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)*, *Light Rail Transit (LRT)* di Sumatra Selatan, LRT terintegrasi di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)* Fase A, Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung,

The issuance of 6 economic policy packages by the government in 2016 to complement the previous 8 economic policy packages was the commitment of the government to accelerate national development. The 14 economic policy packages covered fast service, regulation certainty, synchronization, easy investment, and improved productivity. In terms of financing needs for infrastructure development, the government has already appointed construction state-owned enterprises to execute current infrastructure projects. As part of the government's support, the government provides capital investment from national tax income and funds collected from tax amnesty program. The government also encourages infrastructure development partnership opportunities for private sectors through public-private partnership (PPP), which has been ratified by virtue of Presidential Regulation No. 38 of 2015.

2016 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Through meaningful programs conducted in 2016 to maintain national economic stability, the infrastructure development that was once hindered in 2015 can be continued. The government has developed the right regulation to support the acceleration of infrastructure development despite the uncertain economic condition in the future and anticipation of complex regulations. This is important considering that infrastructure development is a long term project. During the completion process, any issues such as fluctuating prices of construction materials and the national leadership transition would greatly affect the continuity of the projects underway.

Infrastructure development in 2016 can be seen from the realization and commencement of several strategic infrastructure projects. The government has announced 30 strategic infrastructure projects that are in progress. These projects are, among others, the development of toll road spread in Kalimantan, Sulawesi, Java and Sumatra. Another project executed by the government is the infrastructure project in transportation sector, namely Soekarno-Hatta International Airport (SHIA) Express Traing, Jakarta MRT for South-North route, Makassar-Parepare Train route, East Kalimantan Train route, Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Light Rail Transit (LRT) in South Sumatra, integrated LRT in Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Phase A for Ports located in northern part of West Java, Kuala Tanjung International Port Hub,

dan Pelabuhan Hub International Bitung NCICD. Dari sektor ketenagalistrikan, proyek-proyek yang sudah berjalan, antara lain PLTA Karangkates IV & V (2x50 MW), PLTA Kesamben (37 MW), PLTA Lodoyo (10 MW), *High Voltage Direct Current (HVDC)*, Transmisi Sumatra 500 KV, *Central-West Java Transmission Line 500 KV*, *Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang*, *PLTU Indramayu*, dan *PLTU Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, 9, 10*. Untuk sektor pengelolaan sumber daya air, proyek-proyek yang berjalan di tahun ini, antara lain Sistem Pengolahan Limbah Jakarta. Untuk telekomunikasi dan informasi, proyek di tahun 2016 adalah *Palapa Ring Broadband* dengan skema KPBU yang meliputi Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur. Sedangkan dari sektor migas, proyek infrastruktur meliputi RDMP/Revitalisasi kilang *existing* (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju), Kilang Minyak Bontang, dan Kilang Minyak Tuban.

Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, upaya pemerintah dalam menyediakan sarana infrastruktur bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Pencapaian Korporasi

Seiring dengan keinginan Pemerintah Indonesia meningkatkan peran swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui proyek proyek KPBU, pada tahun ini, IIF meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan didukung kehadiran momentum penting yang menjadi catatan sukses Perusahaan di tahun 2016. Momentum tersebut diantaranya adalah dengan turut berperan serta IIF sebagai lembaga pembiayaan sindikasi atas beberapa proyek Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sudah dinantikan banyak pihak yaitu:

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan
IIF menjadi *Lead Arranger* atas proyek ini yang merupakan proyek KPBU ke empat atau proyek KPBU pertama di sektor air yang mencapai *financial close*;
2. Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah
IIF menjadi *Lead Arranger* atas proyek ini yang merupakan proyek KPBU ke tiga yang mencapai *financial close*.

Tidak hanya itu saja, dari sisi sektor infrastruktur Migas, IIF juga telah berhasil ditunjuk sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan yang dipilih untuk berpartisipasi dalam sindikasi dalam negeri untuk membiayai perluasan Pabrik LNG di Tangguh, Papua Barat.

and Bitung NCICD International Port Hub. Some of the on-progress projects in power plant are PLTA Karangkates IV & V (2x50 MW), PLTA Kesamben (37 MW), PLTA Lodoyo (10 MW), *High Voltage Direct Current (HVDC)*, Transmission of 500 KV in Sumatra, Central-West Java Transmission Line of 500 KV, Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang, PLTU Indramayu, and PLTU Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, 9, 10. One of the ongoing projects in water resource management this year is the Jakarta Waste Management System. In the information and telecommunications sector, the project of 2016 includes Palapa Ring Broadband for West, Central and East Packages under PPP scheme. In the oil and gas industry, infrastructure project include RDMP/Revitalizing of existing oil refinery (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju), as well as Bontang and Tuban Refineries.

With those projects in progress, the government's objective in providing infrastructure to create better welfare for the people will be realized in the near future.

Corporate Achievement

The Indonesian government proactively encourages private sectors to increase their roles in the domestic infrastructure development through PPP projects. The year 2016 also presented a great momentum for IIF to add another success story to its milestone, which further enhanced IIF's role in Indonesia's infrastructure development along the year. Such momentum was, among others, the appointment of IIF as the mandated lead arranger that provides syndicated financing for several highly anticipated PPP projects:

1. Umbulan Bulk Water Supply
IIF serves as the Lead Arranger for this project, which is the fourth PPP project or the first PPP project in water sector that reached financial close;
2. Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package
IIF serves as the Lead Arranger for this project, which is the third PPP project that reached financial close.

Pertaining to IIF's contribution in the oil and gas infrastructure sector, IIF was selected to be one of four financial institutions authorized to participate in domestic syndicated loans for the expansion of LNG Plant in Tangguh, West Papua.

Dengan terealisasinya beberapa proyek ini juga merupakan salah satu bukti bahwa IIF telah berhasil melakukan perluasan jangkauan bisnis dengan menggandeng institusi perbankan lainnya di Indonesia dalam membuka akses investasi infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

Pencapaian IIF sepanjang tahun 2016 ini juga merupakan langkah menuju halaman baru bagi Perusahaan untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan atas pertumbuhan Perusahaan kedepannya.

Di tahun sebelumnya, pendapatan IIF hanya bertumpu pada treasury dan pembiayaan/investasi. Di tahun 2016, IIF berhasil melakukan beberapa terobosan yang inovatif yang tidak hanya meningkatkan pendapatan di pembiayaan, namun juga meningkatkan pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) dan pendapatan dari jasa konsultansi. Keseimbangan atas berbagai faktor tersebut juga datang karena IIF tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga tetapi juga menciptakan *driver* pendapatan lainnya, sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Keberlanjutan juga didorong oleh kemampuan IIF untuk secara berkesinambungan meningkatkan dan melakukan otomatisasi proses internalnya, yang telah dilakukan sejak awal tahun 2016, serta upaya terus-menerus guna meningkatkan sumber daya manusianya.

IIF telah bergerak cepat dan tepat untuk mencapai misinya sebagai pelopor pendanaan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, pasar tidak hanya melihat IIF sebagai institusi pembiayaan infrastruktur semata namun juga sebagai *recognized expert* dalam memberikan konsultasi terkait perancangan skema pembiayaan yang dibutuhkan. Terkait hal tersebut, IIF senantiasa menghadirkan solusi dalam menjembatani keberagaman kepentingan yang ada melalui mekanisme dan struktur pembiayaan yang akurat.

Direktorat Investasi

Dengan mengacu pada peran IIF sebagai lembaga pembiayaan dan investasi bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki Direktorat Investasi yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengembangan bisnis dengan mendapatkan kesepakatan pembiayaan maupun investasi dari sisi kuantitas klien, volume komitmen pembiayaan hingga pemantauan jalannya proses bisnis.

The realization of these projects proves that IIF has successfully broadened its business network through its close partnership with other banking institutions across Indonesia as part of its efforts to open wider access to infrastructure investment throughout the archipelago.

The achievements IIF had earned over the course of 2016 marked the Company's step to turn the page for a balanced and sustainable growth in the long run.

In the previous year, IIF's revenue was mainly generated from the treasury and financing/investment segments. In 2016, IIF managed to record an innovative breakthrough, which resulted in not only an increase in financing income, but also in fee-based income segment and advisory services. This achievement set the tone for a balanced growth, supported by the Company's ability to create other revenue generating sources aside from interest income, which allows IIF to lay a strong foundation for sustainable growth in the years to come. In addition to the Company's efforts to increase the quality of its human resources, IIF's sustainable business growth will also be driven by the Company's capability to continuously improve and automate its business processes, which was initiated in the early 2016.

IIF is already well on track in accelerating its performance towards its vision as a pioneer in infrastructure financing in Indonesia. Aside from its exemplary reputation in the infrastructure development, IIF is also widely acknowledged as a recognized expert in providing valuable insights on financing scheme. IIF continues to provide financial solutions that cater to diverse business interests through its accurate financing mechanism and strategy.

Investment Directorate

Given IIF's role as the institution that provides financing and investment for infrastructure projects in Indonesia, IIF has already established an Investment Directorate that is in charge of business development through securing financing or investment deals by acquiring more clients, increasing total financing commitment volumes, and monitoring business practices.

Dukungan atas tugas-tugas tanggung jawab Direktorat Investasi diimplementasikan dengan ketercukupan sumber daya direktorat yang kini memiliki 27 orang profesional dengan latar belakang profesi yang relevan serta dibutuhkan dalam menghadapi dinamika usaha di masa mendatang seperti perbankan korporasi, investasi ekuitas, legal dan konsultan manajemen.

Struktur organisasi Direktorat Investasi saat ini terdiri dari 3 (tiga) departemen berdasarkan fungsi yaitu Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Pengawasan Proyek dan Departemen Transaksi Hukum.

Departemen Pengembangan Bisnis memiliki peran untuk mendapatkan kesepakatan pembiayaan dan investasi mulai dari perolehan klien sampai kesepakatan finansial serta memantau jalannya proyek-proyek hingga mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD).

Untuk tanggung jawab Departemen Pengawasan Proyek, tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh IIF memenuhi persyaratan yang telah disepakati, termasuk juga memantau tahap pelaksanaan dari proyek pasca COD.

Sedangkan Departemen Transaksi Hukum berperan dalam memberikan dukungan dalam hal legalitas dan hukum terhadap proyek-proyek yang didanai oleh IIF yang diawasi baik oleh Departemen Pengembangan Bisnis maupun Departemen Pengawasan Proyek.

Di tahun 2016, IIF berhasil memperoleh 10 (sepuluh) kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp3.781 miliar, sehingga total *gross commitment* menjadi Rp10.479 miliar pada akhir tahun 2016. Adapun yang menjadi proyek unggulan di tahun ini adalah proyek Gas Alam Cair BP Tangguh Train 3, Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Pencapaian 2016

Dari segi tipe proyek, IIF senantiasa melakukan penguatan pada pasar pembiayaan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor konstruksi. Di tahun 2016 portofolio proyek *greenfield* berkontribusi sebesar 21% dari komitmen portofolio proyek. Selanjutnya 61% berasal dari *Balance Sheet Financing*, 14% dari pembiayaan pengoperasian aset, dan 4% dari pembiayaan ekuitas. Perlu dicatat bahwa pembiayaan secara

IIF supports the duties and responsibilities of the Investment Directorate by ensuring the sufficient number of employees working in the directorate. Currently, there are 27 professionals having relevant professional backgrounds who are qualified to address the business dynamics of corporate banking, equity investment, legal, and management consulting.

According to its function, the Investment Directorate is divided into 3 (three) departments, namely Business Development Department, Project Supervision Department, and Legal Transaction Department.

The main responsibility of the Business Development Department is to secure financing and investment deals, starting from client acquisition until the financial deals are concluded, as well as to monitor the ongoing projects until they reach Commercial Operation Date (COD).

The main responsibility of the Project Supervision Department is to ensure that the projects that IIF finances are in compliance with all the agreed terms, which also includes monitoring the projects' progress post-COD.

The main responsibility of the Transaction Legal Department is to provide legal support to the projects financed by IIF and supervised by both the Business Development Department and the Project Supervision Department.

In 2016, IIF secured 10 (ten) new commitments with total financing contracts worth of Rp3,781 billion resulting in the total of the gross commitment is Rp 10,479 billion by the end of the 2016. Among key projects this year are BP Tangguh Train 3 Liquefied Natural Gas (LNG), Palapa Ring II Fiber Optic Network Central Package, and Umbulan Bulk Water Supply.

Achievements in 2016

In terms of project types, IIF continues to strengthen its presence in the financing of construction sector. In 2016, greenfield project portfolio contributed 21% of the project portfolio commitments. The remaining 61% came from Balance Sheet Financing, 14% from asset operations financing, and 4% from equity financing. Note that the balance sheet financing is also used to build infrastructure assets.

balance sheet diatas, juga digunakan untuk membangun aset-aset infrastruktur.

Jika dilihat berdasarkan sektor, portofolio pembiayaan terhadap proyek infrastruktur didominasi oleh transportasi sebesar 31%, telekomunikasi 25%, ketenagalistrikan 24%, Migas 9%, pembangunan jalan tol sebesar 6%, dan air minum 5%.

Berdasarkan persentase tersebut, dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, sektor telekomunikasi tercatat mendominasi portofolio proyek. Kecenderungan pada proyek telekomunikasi masih disebabkan oleh risiko pembiayaan yang rendah dan adanya peningkatan dalam kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di dalam negeri.

Rencana 2017

Terkait kegiatan investasi dan sindikasi, Perusahaan telah menetapkan 9 (sembilan) target pencapaian selama tahun 2017. Target tersebut adalah:

1. Secara selektif membangun aset pinjaman
2. Menjaga kualitas portofolio aset
3. Meningkatkan fee-based income
4. Memperkuat keberadaan Perusahaan di pasar
5. Fokus mendapatkan klien baru
6. Kolaborasi
7. Memperkaya pengalaman dan keahlian sumber daya manusia
8. Meningkatkan efektivitas proses internal
9. Meningkatkan efisiensi proses

Perusahaan berupaya meraih target tersebut dalam rangka mengembangkan asetnya melalui produk-produk bernilai tambah secara terus menerus. IIF telah mengembangkan beberapa program inisiatif untuk mendukung pencapaian target ini, diantaranya meningkatkan jumlah komitmen dan aset, mendiversifikasi portofolio proyek dan produk, mengembangkan kemampuan anggota tim, memperkuat keberadaan IIF di pasar, fokus terhadap 2 hal, yaitu klien dan produk/pasar yang memiliki nilai lebih, memperkuat kolaborasi, melaksanakan kegiatan terkait SDM, menerapkan *time sheet management* dan proses bisnis lainnya, serta mengembangkan *client management system* dan *knowledge database system* untuk kontrak-kontrak yang diterima.

From sectoral point of view , infrastructure project financing portfolio was mostly dominated by transportation at 31%, telecommunication sector at 25%, electricity at 24%, oil and gas at 9%, toll road development at 6%, and drinking water at 5%.

Observing the above percentages, telecommunication sector largely contributed to project portfolio in these last 2 (two) years. Higher growth of telecommunication projects, as compared to the other sectors, is contributed to its low financing risk and domestic growing demand for telecommunication infrastructure.

2017 Plan

In relation with investment and syndication activities, the Company has set 9 (nine) goals to be achieved throughout 2017. These goals are:

1. Build loan asset on selective basis
2. Maintain portfolio asset quality
3. Increase fee-based income
4. Increase market profile
5. Focused client acquisition
6. Collaboration
7. Develop experience and expertise of human resource
8. Improve internal processes
9. Increase process efficiency

The Company strives to achieve these objectives as part of its efforts to continue building its assets through value-added products. IIF has already developed several initiatives to support this goal accomplishment, which includes increasing total commitments and assets, diversifying project and product portfolio, developing team members' capabilities, enhancing IIF's market presence, focusing on value-added clients and value-added product/market, strengthening collaboration, conducting HR-related activities, implementing time sheet management and other supporting business processes, and developing client management system and knowledge database system for closed deals.

Jasa Advisory (Konsultansi)

Grup Advisory (Konsultansi) dibentuk sebagai divisi usaha untuk menyediakan asistensi dan konsultansi kepada klien-klien Pemerintah dan sektor swasta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Group ini dijalankan oleh dua orang EVP yang secara terpisah melayani klien-klien sektor publik dan swasta. Mulai tahun 2016 ini, keduanya digabung menjadi satu Grup untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya dan lebih sesuai dengan strategi Perusahaan.

Tahun ini, Grup Advisory melakukan layanan proyek sebagian kepada klien-klien sektor swasta, dengan tugas-tugas di sektor energi terbarukan, penyediaan air minum, dan investasi proyek infrastruktur. Proyek-proyek yang ditangani oleh Advisory, setelah memperoleh kontrak kerjasama resmi, dapat menjadi proyek potensial yang dapat dibiayai oleh IIF. Strategi usaha ini dilakukan agar IIF menjadi solusi satu pintu bagi pengembangan proyek infrastruktur.

Di sektor publik, IIF telah menyediakan jasa konsultansi atas suksesnya pembiayaan Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera, sebuah program Pemerintah yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya. IIF bekerjasama dengan PT Hutama Karya dan Kementerian Keuangan untuk menyusun struktur penjaminan pemerintah dan pembiayaan untuk memobilisasi investasi pasar modal untuk Proyek ini.

Pencapaian Tahun 2016

Selama tahun 2016, Tim Advisory telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan Perusahaan, antara lain:

1. Pengembangan usaha, aliansi, dan jaringan; memperoleh 5 mandat baru yang terdiri dari 2 konsultasi pembiayaan proyek, 2 konsultasi bisnis, dan 1 konsultasi keuangan;
2. Pelaksanaan mandat; penyelesaian dua proyek konsultansi;
3. Dukungan dan fasilitasi Pemerintah;
 - Melaksanaan training untuk ASBANDA dan BARA;
 - Partisipasi acara Indonesia PPP Day yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan workshop kebijakan/regulasi yang diselenggarakan BAPPENAS;
4. Pengembangan organisasi;
 - Pencapaian target pelatihan staff;
 - Penyelesaian program pelatihan untuk staff IIF terkait PPA proyek energi terbarukan dan reksa dana penyediaan terbatas (RDPT) untuk infrastruktur

Advisory Services

The Advisory Group has been established as a business arm to provide assistance and advice to both Government and private sector clients. In the previous years, the Group was run by two EVPs separately catering to public and private sector clients. Starting in 2016, the two segments were merged into one Group to improve the use of resources and better fit with the Company's strategic plans.

This year, the Advisory Group has been extending services mostly to private sector clients, providing project advisory in renewable energy and water supply projects, and business advisory in infrastructure investment. Projects advised by the Advisory Group, once awarded, may be able to contribute to the potential project pipeline for IIF investment. This business strategy is implemented as to establish IIF as one-stop solution for private sector infrastructure development.

In public sector, IIF has also provided advisory services for the successful financing of the Trans-Sumatra Toll Road Project, a Government Program that is implemented by PT Hutama Karya. IIF worked with PT Hutama Karya and the Ministry of Finance to develop government guarantee and financing structure to mobilize capital market financing into the Project.

Achievements in 2016

Throughout 2016, the Advisory team has managed to provide contribution to the Company's growth, among others:

1. Business Development, Alliance and Networking; successfully acquired 5 new mandates, consisting of 2 financial advisory projects, 2 business advisory Projects and 1 corporate finance advisory project;
2. Mandate Execution; successful completion of a couple of mandates;
3. Government Support and Facilities;
 - Conducted capacity building for Indonesian Regional Development Banks and BARA;
 - Participated in Indonesia PPP Day hosted by the Ministry of Finance and policy/regulatory workshops conducted by the National Development Planning Agency;
4. Internal/Organizational Development;
 - Fulfilled targeted training quota for each advisory staff;
 - Completed training programs for internal IIF staff on the topics of renewable energy PPA and infrastructure fund (RDPT Infrastructure)

Rencana 2017

Jasa Advisory akan meningkatkan pendapatan dan tingkat keuntungan melalui perolehan proyek yang menghasilkan fee konsultansi. Tugas-tugas terkait kebijakan/peraturan akan dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah atau mitra lembaga multilateral/bilateral. Pengembangan usaha dari sektor swasta akan dilaksanakan berkoordinasi dengan Tim Investment IIF, guna memanfaatkan jaringan dan kemampuan IIF dalam bidang pembiayaan, sedemikian sehingga tawaran advisory/investment dari IIF menjadi menarik bagi calon klien.

IIF akan terus mendukung investor asing yang mencari kesempatan investasi proyek di Indonesia. Selain itu, IIF juga akan mempromosikan lebih banyak partisipasi investor domestik dalam pembangunan proyek infrastruktur. Grup Advisory telah menyiapkan skema konsultasi untuk membantu investor swasta merencanakan, menyiapkan, dan memperoleh kontrak konsesi proyek, yang pada akhirnya akan cocok untuk menerima pembiayaan dari IIF. Dengan membantu investor mengembangkan dan melaksanakan portofolio proyeknya, IIF akan dapat tumbuh bersama-sama dengan klien-kliennya.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

IIF memiliki tiga segmen usaha, yaitu produk investasi yang terdiri dari *fund based* dan *non-fund based*, produk treasury serta jasa *advisory*. Pada 2016, pendapatan dari divisi investasi berkontribusi sebesar 74,0% pada jumlah pendapatan Perusahaan. Sedangkan produk treasury dan jasa *advisory* memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,3% dan 1,4% pada jumlah pendapatan Perusahaan.

Produk Investasi

• *Fund Based*

IIF menyediakan produk investasi dalam dua jenis, yaitu *Fund based* dan *Non-Fund Based*. Produk yang ditawarkan dalam jenis ini, antara lain utang senior, surat berharga, utang subordinasi/mezzanine financing, pembiayaan talangan, *take-out financing* dan/atau pembiayaan ulang.

Pada tahun 2016, IIF membukukan tambahan komitmen pembiayaan sebesar Rp3.781 miliar sehingga total komitmen pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp10.479 miliar.

2017 Plans

The Advisory Group is to increase its revenues and profitability by obtaining more fee-generating assignments. Policy/regulatory work for Government ministries/local government, to the extent possible, will be sought and implemented with funding support from either the Government or multilateral/bilateral partners. Business development from private clients will be coordinated with IIF investment, leveraging both the network and IIF knowledge in infrastructure financing and increasing the attractiveness of engaging with IIF.

IIF will continue to target foreign investors looking for investment opportunities in Indonesian infrastructure projects. In addition to this, IIF will also seek to promote domestic investors participation in infrastructure project development. The Advisory Group has prepared an advisory offering to help private sector client plan, prepare, and obtain concession award for infrastructure project, which eventually may also eligible for IIF financing. By helping private investors to develop and implement their project portfolio, IIF will be able to grow together with the clients.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

IIF's three business segments consist of investment products comprising fund based and non-fund based products, treasury products, and advisory services. In 2016, income from investment segment represented 74.0% of the Company's total consolidated income. While treasury product and advisory service respectively contributed 24.3% and 1.4% to the Company's total income.

Investment Product

• *Fund Based*

IIF provides two types of investment products, namely Fund Based product and Non-Fund Based product. The fund-based products include senior debt, securities, subordinated debt/mezzanine financing, bridge financing, *take-out financing*, and/or refinancing.

At 2016, IIF managed to book additional financing commitment amounting to Rp3,781 billion, making the total commitments by the end of 2016 at Rp10,479 billion.

Dari total komitmen di atas, jumlah saldo pembiayaan yang telah disalurkan setelah dikurangi pembayaran adalah sebesar Rp5.126 miliar yang terdiri dari pembiayaan dalam bentuk pinjaman senior sebesar Rp4.574 miliar, surat berharga sebesar Rp384 miliar dan sisanya dalam bentuk investasi pada ekuitas. Sehingga jumlah komitmen yang belum disalurkan oleh IIF pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp2.843 miliar.

Dengan pertumbuhan komitmen serta pembiayaan yang disalurkan, pendapatan *fund-based* yang dibukukan IIF pada tahun 2016 sebesar Rp354,0 miliar, tumbuh signifikan sebesar 105,3% dibandingkan pendapatan fund-based tahun 2015 sebesar Rp144,2 miliar.

- *Non-Fund Based*

Pendapatan yang berasal dari *non-fund based* pada tahun 2016 sebesar Rp51,4 miliar dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp17,8 miliar atau tumbuh sebesar 188,2%. Pertumbuhan ini selain dari pendapatan provisi dan komisi pembiayaan, juga berasal dari fees pembiayaan sindikasi yang memberikan kontribusi sebesar Rp24,9 miliar di tahun 2016.

Produk Treasury

Produk *treasury* dilakukan oleh IIF dalam rangka mengoptimalkan dana *idle* yang belum digunakan oleh Direktorat Investasi. Produk *treasury* terdiri dari deposito berjangka, giro, dan obligasi. Pada tahun 2016, produk *treasury* menghasilkan pendapatan sebesar Rp133,0 miliar atau mengalami penurunan sebesar 1,1% dibandingkan pendapatan tahun 2015 sebesar Rp134,5 miliar yang disebabkan oleh penurunan imbal balik dari produk-produk *treasury* di pasar.

Jasa Advisory

Jenis layanan *advisory* yang dimiliki IIF, antara lain *financial advisory* dan *transaction advisory*. Jasa *advisory* di tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencatatkan perolehan sebesar Rp7,4 miliar dibandingkan pendapatan sebesar Rp419 juta pada 2015.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan informasi dari laporan keuangan *audited* IIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young) yang ditunjuk IIF. Laporan Keuangan

Of the above total commitments, the full amount of financing disbursed after repayment amounted to Rp5,126 billion, consisting of senior loans amounting to Rp4,574 billion, securities of Rp384 billion, and the remaining amount is used for investment in equities. Thus, total commitments not yet disbursed by IIF at the end of 2016 reached Rp2,843 billion.

With the growing number of commitments and financing disbursed, the fund-based income for 2016 fiscal year amounted to Rp354.0 billion, significantly grew by 105.3% compared to 2015 fund-based income of Rp144.2 billion.

- *Non-Fund Based*

Non-fund based income in 2016 amounted to Rp51.4 billion relative to 2015 at Rp17.8 billion or grew by 188.2%. This growth was contributed by provision and commission income and fees from syndicated loans that accounted for Rp24.9 billion in 2016.

Treasury Products

IIF provides treasury products to optimize idle fund that is not used by the Investment Directorate. Treasury product consists of time deposit, demand deposit, and bonds. In 2016, treasury products generated Rp133.0 billion of revenue or decreased by 1.1% compared to that of 2015 at Rp134.5 billion. The decline was caused by lower return of treasury products in the financial markets.

Advisory Services

IIF's advisory services comprise of financial and transaction advisory services. The Company recorded a significant increase of advisory income at Rp7.4 billion from that of Rp419 million recorded in 2015.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

The following financial performance analysis and description is made based on data from IIF's audited financial statements as of 31 December 2016 by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young), as appointed by the Company. IIF's Financial Statements have obtained fair

IIF telah memperoleh pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Analisis terkait kinerja keuangan IIF juga mengacu pada kinerja keuangan di tahun-tahun sebelumnya sebagai data pembanding sehingga analisis yang disampaikan lebih komprehensif.

Laporan Posisi Keuangan

ASET

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Pada 2016, aset Perusahaan mengalami kenaikan 96% atau sebesar Rp5.282 miliar. Aset 2016 tercatat sebesar Rp10.791 miliar dari Rp5.509 miliar pada 2015. Faktor kenaikan aset IIF dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas senilai Rp2.512 miliar, pembelian efek-efek sebesar Rp1.523 miliar dan penyaluran pinjaman diberikan sebesar Rp1.166 miliar.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Percentase / Percentage
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalent	3.538	1.026	2.512	245%
Efek-efek / Securities	2.428	905	1.523	168%
Investasi saham / Share investment	114	144	(30)	-21%
Pinjaman diberikan / Loans	4.509	3.343	1.166	35%
Piutang bunga / Accrued interest receivable	27	9	18	214%
Beban dibayar dimuka / Prepaid expenses	6	5	1	18%
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	13	9	4	36%
Aset tetap / Fixed assets	7	9	(2)	-22%
Tagihan derivatif / Derivative receivables	1	-	-	100%
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	22	28	(6)	-19%
Beban tangguhan / Deferred expenses	45	0	45	16.338%
Aset lain-lain / Other assets	81	31	50	162%
Jumlah Aset / Total Assets	10.791	5.509	5.282	96%

Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan di masa datang pada pihak lain.

Pada 2016, liabilitas mengalami peningkatan 158% atau Rp5.199 miliar menjadi Rp8.500 miliar dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp3.301 miliar. Peningkatan liabilitas ini disebabkan oleh pencairan pinjaman IFC sebesar USD215

opinion in all material respects. The analysis of IIF's financial performance is also compared to the financial performance data of the previous year to produce a more comprehensive analysis.

Financial Position Statements

ASSETS

Asset is a resource owned by the company as a result of past events and where economic benefit in the future is expected to be gained by the company.

In 2016, the Company's assets increased by 96% or Rp5,282 billion. Assets in 2016 were recorded at Rp10,791 billion from Rp5,509 billion in 2015. IIF's asset increase was influenced by the increase in Cash and Cash Equivalents amounting to Rp2,512 billion, the purchase of securities of Rp1,523 billion and loan disbursement of Rp1,166 billion.

Liabilities

Liability is a debt that must be paid or a service that must be performed to another party in the future.

In 2016, the Company's liabilities increased by 158% or Rp5,199 billion, from Rp3,301 billion in 2015 to Rp8,500 billion. The increase in the liabilities was caused by IFC loan disbursement of USD215 million and loans from PT Bank

juta dan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp850 miliar, dan penerbitan surat utang IIF sebesar Rp1.500 miliar. Kenaikan tersebut ter-net-off dengan pembayaran pinjaman subordinasi sebesar Rp26,1 miliar dan selisih kurs.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Percentase / Percentage
Utang lain-lain / Other payables	12	9	3	35%
Utang pajak / Taxes payable	7	1	6	692%
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain / Accrued expenses and other liabilities	33	36	(3)	-7%
Liabilitas imbalan kerja / Employment benefits obligation	11	8	5	70%
Surat utang yang diterbitkan / Issued securities	1.520	-	1.520	100%
Pendapatan diterima dimuka / Unearned revenue	7	-	7	100%
Pinjaman diterima / Fund Borrowing	4.281	528	3.753	710%
Pinjaman subordinasi / Subordinated Loans	2.628	2.720	(92)	-3%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	8.500	3.301	5.199	158%

EKUITAS

Ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Pada 2016, jumlah ekuitas IIF tercatat sebesar Rp2.290 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4% atau sebesar Rp82,43 miliar, dibandingkan pada 2015 sebesar Rp2.208 miliar. Hal ini disebabkan oleh penambahan laba bersih selama tahun berjalan sebesar Rp101,27 miliar yang ter-net-off dengan penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp18,85 miliar.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Percentase / Percentage
Modal Saham / Share Capital	2.000	2.000	-	0%
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	30	30	-	0%
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	(17)	2	(19)	(871%)
Saldo Laba / Retained Earnings	277	176	101	58%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.290	2.208	82	4%

Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp850 billion, as well as the issuance of IIF's debt securities of Rp1,500 billion. The increase was offset by subordinated loan payments of Rp26.1 billion (net off) and foreign exchange difference.

Kolektibilitas Pinjaman Diberikan

Per 31 Desember 2016, jumlah pinjaman diberikan yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp228 miliar dari total pinjaman diberikan Rp4.574 miliar.

Laporan Laba Rugi**Pendapatan Usaha**

IIF mencatatkan pendapatan usaha pada 2016 sebesar Rp543,55 miliar, naik 77% atau sebesar Rp237,2 miliar dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp306,35 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar Rp175,32 miliar, pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp33,6 miliar, keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif sebesar Rp15,4 miliar, keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek sebesar Rp2,4 miliar, perolehan pendapatan jasa advisory sebesar Rp6,96 miliar dan penurunan kerugian dari investasi saham sebesar Rp14,6 miliar. Kenaikan pendapatan-pendapatan tersebut dikompensasikan dengan kerugian selisih kurs sebesar Rp12,74 miliar.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Percentase / Percentage
Pendapatan bunga / Interest income	495,07	319,75	175,32	55%
Pendapatan provisi dan komisi / Provision and commission income	51,41	17,84	33,57	188%
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif / Profit realized from derivative transactions	15,41	-	15,41	100%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek / Profit realized from sale of securities	2,61	0,2	2,42	1.227%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif / Profit not yet realized from changes in fair value of derivative transactions.	0,58	-	0,58	100%
Kerugian dari investasi saham / Loss from share investment	(26,69)	(41,29)	14,60	-35%
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs /	(3,93)	8,81	(12,74)	-145%
Pendapatan jasa advisory / Advisory income	7,38	0,42	6,96	1.662%
Pendapatan lainnya / Other income	1,70	0,62	1,08	174%
Jumlah Pendapatan / Total Revenue	543,55	306,35	237,20	77%

Biaya Operasional

Pada 2016, biaya operasional mengalami peningkatan menjadi Rp406,44 miliar, naik 100% atau sebesar Rp203,52 miliar dibandingkan biaya operasional pada 2015 sebesar Rp202,92 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban bunga sebesar Rp163,69 miliar dan beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp24,36 miliar.

Loan Collectibility

As of December 31, 2016, total loans disbursed decreased by Rp228 billion from total loans of Rp4,574 billion.

Income Statements**Revenue**

IIF recorded revenue of Rp543.55 billion, which increased by 77% or Rp237.2 billion compared to Rp306.35 billion. This was attributable to the increase in interest income of Rp175.32 billion, provision and commission income of Rp33.6 billion, profit realized from derivative transactions of Rp15.4 billion, profit realized by securities sale of Rp2.4 billion, advisory income of Rp6.96 billion, and lower loss from share investment of Rp14.6 billion. The increase from these income was compensated by loss on foreign exchange of Rp12.74 billion.

Operational Cost

In 2016, operational cost increased to Rp406.44 billion, grew by 100% or Rp203.52 billion compared to that of 2015 at Rp202.92 billion. This was caused by the increase in interest expense of Rp163.69 billion and allowance for impairment losses of Rp24.36 billion.

Beban Umum dan Administrasi

Jumlah beban umum dan administrasi pada 2016 meningkat sebesar 14% atau sebesar Rp15,47 miliar menjadi Rp122,87 miliar dibandingkan pada 2015 sebesar Rp107,4 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada beban gaji dan tunjangan sebesar 21,4% atau Rp14,34 miliar, seiring dengan penambahan jumlah karyawan perusahaan dari 64 orang pada tahun 2015 menjadi 79 orang pada tahun 2016.

Beban Bunga

Beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp163,69 miliar, naik 187% atau sebesar Rp251,02 miliar dibandingkan dengan 2015 yang tercatat sebesar Rp87,33 miliar. Peningkatan beban bunga ini seiring dengan peningkatan saldo pinjaman diterima dan Surat utang yang diterbitkan.

Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai mengalami peningkatan sebesar Rp24,36 miliar, naik 297% menjadi Rp32,55 miliar dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp8,19 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena kinerja beberapa pinjaman yang belum sesuai harapan disamping peningkatan karena pertumbuhan jumlah pinjaman baru yang disalurkan selama tahun 2016.

Laba Bersih

Pada 2016, laba bersih IIF tercatat sebesar Rp101,79 miliar, mengalami kenaikan 16% atau sebesar Rp18,73 miliar, dibandingkan pada 2015 yang tercatat sebesar Rp74,64 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan operasional sebesar Rp237,2 miliar yang dikompensasikan dengan kenaikan beban operasional sebesar Rp203,5 miliar dan kenaikan beban pajak sebesar Rp6,5 miliar.

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada 2016, arus kas dari aktivitas operasi minus sebesar Rp1.112 miliar, turun 26% atau sebesar Rp392,6 miliar dibandingkan pada 2015 sebesar minus Rp1.504 miliar. Penurunan pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pinjaman diberikan ke nasabah dari Rp2.332 miliar di tahun 2015 menjadi Rp2.094 miliar di tahun 2016 yang ditambah dengan peningkatan jumlah penerimaan pembayaran pinjaman diberikan dari Rp729 miliar di tahun 2015 menjadi Rp846 miliar di tahun 2016.

General and Administrative Expenses

Total general and administrative expenses in 2016 increased by 14% or Rp15.47 billion to Rp122.87 billion compared to 2015 recorded at Rp107.4 billion. The increase was due to the growth of salary and allowance expenses of 21.4% or Rp14.34 billion as a result of the increase in number of employees of the company from 64 people in 2015 to 79 people in 2016.

Interest Expenses

Interest expenses increased by Rp163.69 billion, which grew by 187% or Rp251.02 billion compared to Rp87.33 billion in 2015. The increase in this interest income was in line with the increase in total fund borrowings and issued debt securities.

Impairment Losses

Allowance for impairment losses increased by Rp24.36 billion, which increased by 297% to Rp32.55 billion compared to Rp8.19 billion in 2015. This increase was due to the performance of some loans which was below our expectations, in addition to the increase of the total of the new loan disbursements in 2016.

Net Profit

In 2016, IIF's net profit was recorded at Rp101.79 billion, which rose by 16% or Rp18.73 billion relative to Rp74.64 billion in 2015. This increase was contributed by the increase in operating income of Rp237.2 billion which was compensated by the increase in operational expense of Rp203.5 billion and in tax expenses of Rp6.5 billion.

Cash Flow Statements

Cash Flow from Operating Activities

In 2016, cash flow from operating activities was minus Rp1,112 billion, which was down by 26% or Rp392.6 billion compared to minus Rp1,504 billion in 2015. The decline of cash flow from operating activities was attributable to the decrease in loans disbursed to the customers, from Rp2,332 billion in 2015 to Rp2,094 billion in 2016, plus the increase in income from loan payments from Rp729 billion in 2015 to Rp846 billion in 2016.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi tercatat sebesar minus Rp1.619 miliar, mengalami kenaikan 150% atau sebesar Rp970 miliar dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar minus Rp648,8 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian efek-efek dan perolehan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali selama tahun 2016 sebesar Rp2.244 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.597 miliar. Selain itu, terdapat penurunan angka penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dari Rp972 miliar di tahun 2015 menjadi Rp636 miliar di tahun 2016.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada 2016, arus kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp5.154 miliar, naik 1.206% atau Rp4.759 miliar dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp394,8 miliar. Kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh penarikan seluruh sisa pinjaman dari International Finance Corporation sebesar USD215 juta dan seluruh sisa pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp850 miliar, serta penerimaan surat utang yang diterbitkan sebesar Rp1.500 miliar di tahun 2016.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Hasil Perbandingan / Results of Comparison	
			Perubahan / Change	Persentase / Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities	(1.112)	(1.504)	392	(26%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities	(1.619)	(649)	(970)	150%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities	5.154	395	4.759	1206%
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas / Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalent	2.423	(1.759)	4.182	(238%)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas / Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents	89	139	(50)	(36%)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.026	2.646	(1.620)	(61%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.538	1.026	2.512	245%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sepanjang 2016, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Cash Flow from Investing Activities

Cash flow from investing activities was recorded at minus Rp1,619 billion, which rose by 150% or Rp970 billion relative to minus Rp648.8 billion in the previous year. This increase was due to the purchase of securities and acquisition of purchased securities under resale agreement at Rp2,244 billion for 2016, which increased from Rp1,597 billion in 2015. In addition, there was a decrease in the sale of securities and receipt of securities purchased under resale agreement from Rp972 billion in 2015 to Rp636 billion in 2016.

Cash Flow from Financing Activities

In 2016, cash flow from financing activities amounted to Rp5,154 billion, which increased by 1,206% or Rp4,759 billion compared to Rp394.8 billion in 2015. The increase in cash flows from financing activities was due to the drawdown of all remaining loans from the International Finance Corporation at USD215 million and from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at Rp850 billion as well as receipt from debt securities issued at Rp1,500 billion in 2016.

INFORMATION AND MATERIAL FACT AFTER BALANCE SHEET DATE

There was no material information and fact acquired after balance sheet date of 2016.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang 2016, Perseroan tidak mencatatkan informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RETRUKTURISASI UTANG/ MODAL

Pada 2016, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai investasi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi utang/modal.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada 2016, Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

INFORMASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perseroan tahun 2016.

TRANSAKSI DERIVATIF DAN LINDUNG NILAI

Perusahaan melakukan transaksi *swap* dan *forward* selama tahun 2016 untuk melindungi Perusahaan dari efek fluktuasi mata uang.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Sepanjang 2016, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU 2016

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan standar akuntansi baru selama tahun 2016.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING RARE AND EXTRAORDINARY EVENTS

In 2016, the Company did not record any financial information containing extraordinary and rare event which may affected the Company's performance.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

The Company did not conduct any material transaction regarding investment, divestment, business merger/consolidation, acquisition, or capital/debt restructuring.

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In 2016, The Company did not conduct any material transactions involving conflict of interest.

INFORMATION ON TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The information of this matter can be seen in the Audited Financial Statement of the Company for the year 2016.

DERIVATIVE TRANSACTION AND HEDGING

The Company conducted swap and forward transaction during 2016 to protect the Company from the impact of fluctuating currencies.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

Throughout 2016, there were no changes in regulations that have significant impacts on the Company's performance.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY THAT WERE IMPLEMENTED IN 2016 FISCAL YEAR

There were no significant impacts on the implementation of new accounting standards during 2016.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada dasarnya dividen yang diberikan oleh Perseroan dilakukan dengan memperhitungkan:

1. Laba bersih setelah pajak yang diperoleh di tahun buku yang bersangkutan
2. Besaran yang perlu disisihkan untuk dana cadangan sesuai dengan amanat Undang-undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 71 ayat 2
3. Tingkat dividen yang layak untuk pemegang saham
4. Prospek usaha perseroan dan konsistensi besaran dividen per lembar saham setiap tahunnya
5. Pemupukan modal Perseroan guna meningkatkan ketahanan Perseroan terhadap kualitas aset Perseroan serta guna meningkatkan daya saing Perseroan

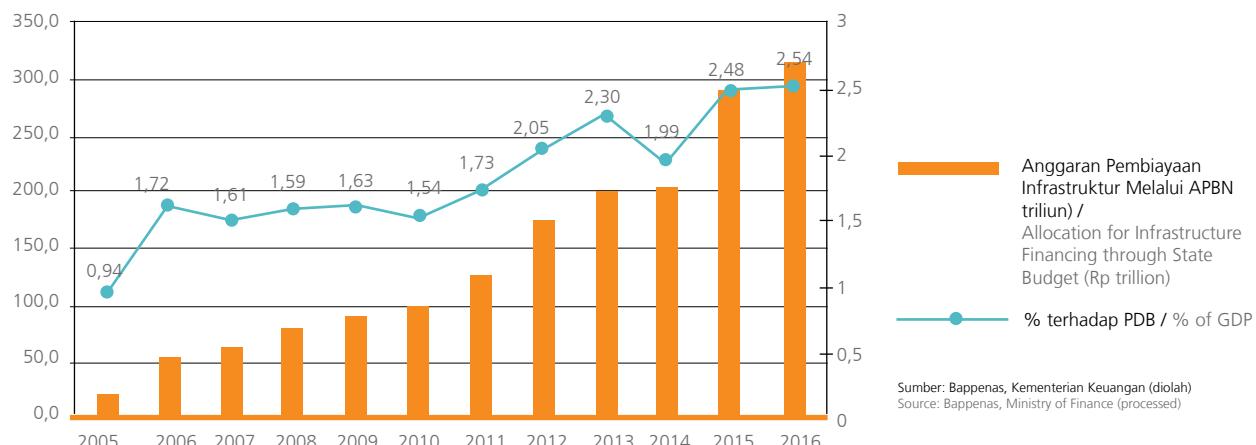
REALISASI DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2016, Perusahaan menerbitkan obligasi PT Indonesia Infrastructure Finance I Tahun 2016 sebesar Rp1.500 miliar yang semuanya sudah disalurkan pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

INDUSTRI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai negara berkembang yang juga merupakan negara kepulauan, Indonesia memahami pentingnya pembangunan infrastruktur dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Pesan ini telah didengungkan secara konsisten oleh Pemerintah.

Pada tahun 2016, total alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia yang akan dibiayai melalui APBN mencapai Rp313,5 triliun atau meningkat sebesar 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp290,3 triliun. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan anggaran pembiayaan infrastruktur melalui APBN dari tahun 2005 hingga tahun 2016:



DIVIDEND POLICY

The distribution of dividend by the Company take into account:

1. Net profit after tax obtained in the related fiscal year.
2. Allowance to be determined for reserve fund to conform to Indonesian Company Law no. 40 year 2007 article 71 paragraph 2
3. Sufficient dividend for shareholders.
4. The Company's business outlook and consistency of dividend per share every year.
5. The Company's capital formation to enhance its asset quality and improve competitiveness.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

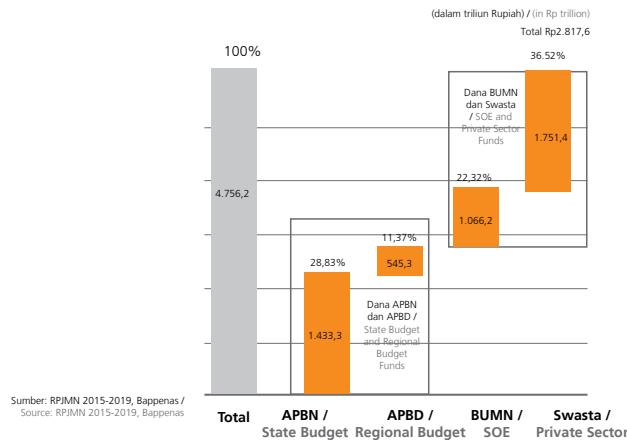
In 2016, the Company issued PT Indonesia Infrastructure Finance Bonds I Year 2016 at the amount of Rp1,500 billion. All of which have been disbursed to infrastructure project finance.

INFRASTRUCTURE INDUSTRY IN INDONESIA AND THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK

As a developing and an archipelagic country, Indonesia is aware of the importance of infrastructure development, thus putting it as its main priority. This message has been consistently exerted by the Government.

In 2016, the budget allocation for financing Indonesia's infrastructure reached Rp313.5 trillion in the State Budget or increased by 8% compared to Rp290.3 trillion in the previous year. This chart below shows the development of infrastructure financing budget through State Budget from 2005 to 2016:

Grafik berikut menunjukkan estimasi dari rincian dana infrastruktur yang dibutuhkan untuk periode 2015-2019 sebagaimana dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019:



Grafik di atas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp4.796 triliun untuk periode 2015-2019, di mana hanya sebesar Rp1.978 triliun, atau 41% dari total kebutuhan tersebut dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi Pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi APBN-P tahun 2015 meningkat menjadi Rp290,3 triliun dari sebelumnya Rp177,9 triliun pada tahun 2014, atau meningkat 63%. Namun angka ini masih dianggap belum memadai karena masih berkisar 2,75%, dari PDB Indonesia, yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Pemerintah Indonesia saat ini mendorong serta memimpin upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung program-program kesejahteraan sosial agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah berhasil dicapai hingga saat ini. Dalam melaksanakan hal ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik sektor swasta ke dalam bidang infrastruktur melalui bermacam peraturan, termasuk regulasi tentang KPBU, regulasi tentang pembebasan lahan, dukungan Pemerintah, skema insentif pajak dan mempersingkat seluruh proses perizinan melalui *one-stop-process*.

Di saat yang sama, Pemerintah juga mendorong BUMN untuk berperan lebih aktif dalam membangun infrastruktur. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting, namun sepertinya masih belum cukup untuk menutupi kesenjangan

This chart shows the estimated amount of required infrastructure fund for the period of 2015-2019 as released by the Ministry of National Development Planning and RPJMN (National Mid-Term Development Plan) for 2015-2019:

The above chart shows that Indonesia requires an infrastructure fund of Rp4,796 trillion for the period of 2015-2019, or 41% of the total amount can be covered by the central and local government budget, also accounting the initiatives taken by the Government to increase the allocation for infrastructure development. The Government's allocation for infrastructure as stated in the revised APBN-P of 2015 increased to Rp290.3 trillion from Rp177.9 trillion in 2014 or grew by 63%. However, this figure is still deemed not sufficient, for it is only around 2.75% of Indonesia's GDP, which was relatively small compared to other developing nations.

Indonesia's government is currently encouraging and leading the infrastructure development acceleration as well as supporting social welfare programs to maintain or even increase economic growth thus far. In connection with this effort, the Government has taken various initiatives to attract private sectors to participate in the infrastructure project through the enforcement of various regulations on PPP, land clearing, Government support, tax incentive schemes, as well as to streamline permit procedures through one-step process.

At the same time, the Government also encouraged many SOEs to participate more actively in the infrastructure development. Despite the significant result of this approach, it seems that the implementation of this measure still cannot

pembangunan infrastruktur karena pembangunan yang mudah diakses dan tersedia di pasar untuk proyek-proyek *greenfield* umumnya merupakan pembangunan jangka pendek dari bank yang sumber dana dananya adalah dana deposito. Untuk itu tetap diperlukan katalis sebagai ujung tombak dalam penyediaan pembangunan proyek yang mampu menyediakan pembangunan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Tantangan terasa semakin berat apabila juga dilihat dari sisi lainnya, di mana pasokan proyek-proyek infrastruktur yang layak, dan siap dibayai oleh sektor swasta masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan masih sangat terbatasnya jumlah proyek yang siap dan telah berhasil ditawarkan dalam skema KPBU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.38/2015. Saat ini, pasar infrastruktur didominasi oleh *Independent Power Producer* (IPP), telekomunikasi dan jalan tol proyek, selain infrastruktur yang dikelola oleh BUMN seperti bandara, pelabuhan laut dan kereta api. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk membuka lebih banyak sektor infrastruktur bagi sektor swasta. Dengan demikian Perseroan berharap bahwa ke depannya akan terdapat lebih banyak lagi proyek yang siap untuk didanai oleh sektor swasta, baik melalui penyelesaian modal, maupun melalui pembangunan.

Dengan latar belakang tersebut Perseroan hadir di sektor ini dan memberikan kontribusi tidak hanya dalam hal mengisi kesenjangan pendanaan dengan dana jangka panjang dan struktur pembangunan proyek yang *state-of-the-art*, tetapi juga dalam membantu sektor publik dalam menata kebijakan KPBU yang kondusif dan mempersiapkan proyek KPBU yang bertujuan menjadikan proyek yang ada *bankable* dengan harga yang kompetitif. Dengan cara ini, Perseroan tetap berkomitmen untuk selalu menjunjung visinya menjadi menjadi pelopor katalisator untuk pembangunan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Perseroan senantiasa akan mempertahankan kapasitas modalnya secara kompetitif sebagai upaya untuk menyediakan pembangunan infrastruktur dan tetap terbuka untuk setiap bentuk kerja sama dengan lembaga keuangan lain, baik itu lokal ataupun asing, untuk membantu Indonesia membangun pondasi perekonomian yang lebih baik ke depannya dan untuk mengisi kesenjangan pembangunan.

ASPEK PEMASARAN

Perseroan memiliki misi sebagai katalisator dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pembangunan di Indonesia maupun asing dan para investor untuk dapat berpartisipasi

sufficiently overcome infrastructure financing disparity. This is because most accessible and available financing schemes in the market for greenfield projects use a short-term bank loan whose source of funds comes from fund owners. Therefore, infrastructure development still requires a catalyst that can provide long-term financing schemes.

Another main challenge is the limited number of adequate infrastructure projects which is commercially viable, well-prepared, and ready to be financed by the private sectors. This is proven from the limited number of infrastructure projects that is ready and successfully tendered using PPP scheme as regulated in the Presidential Regulation No.38/2015. Currently, the infrastructure market is dominated by the Independent Power Producer (IPP), telecommunication and toll road projects, in addition to infrastructure managed by the SOEs, such as airports, seaports, and railroads. Therefore, Indonesia has a big potential to open up more infrastructure project financing opportunities for the private sectors. The Company expects that in the near future, there will be more projects that are ready to be financed by the private sector, be it through capital investment or financing.

Given such background, the Company emerges in the infrastructure industry to contribute to help minimize financing disparity with its long-term financing scheme offering and state-of-the-art project financing while continuously assisting public sector in managing an effective and favorable PPP project and preparing a bankable PPP project that has a competitive price. By doing so, the Company remains committed to always strive towards its vision of becoming the pioneer catalyst of Indonesia's infrastructure development financing. The Company continues to maintain its capital structure to remain competitive as part of its efforts to provide infrastructure financing while keeping open to every partnership with other financial institutions, both local and foreign, in order to help Indonesia build a stronger foundation for its economic growth going forward and to close the financing gap.

MARKETING ASPECTS

The Company has a mission to become a catalyst of infrastructure development financing in Indonesia by building cooperation with local financing institutions and investors to participate in the financing and investment of infrastructure

dalam pembiayaan dan investasi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, strategi pemasaran Perseroan bukanlah untuk bersaing dengan para kreditur atau investor lainnya, melainkan dengan menjalin sinergi yang baik. Hal ini juga dikarenakan sektor infrastruktur selalu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga membutuhkan sinergi yang tepat antara lembaga pembiayaan baik domestik maupun internasional.

Perseroan selalu berusaha mengembangkan aset portfolio pembiayaannya dengan memberikan pendanaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Untuk mencari proyek-proyek yang layak dibiayai, Perseroan menggunakan jaringan-jaringan sebagai berikut:

- Penetrasi kepada pelaku infrastruktur, dimana Perseroan mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang layak untuk didukung dengan cara membangun jaringan dengan para pelaku di industri infrastruktur;
- Jaringan perbankan lokal maupun asing, dimana Perseroan bekerja sama dengan bank-bank komersial maupun kreditur-kreditur non-bank untuk melakukan penjajakan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur yang layak dibiayai; dan
- Agen pembangunan, dimana Perseroan melakukan dialog secara aktif dengan para agen pembangunan (termasuk dengan para pemegang saham Perseroan) untuk mengetahui perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang diperkirakan akan mulai dibangun.

Sejalan dengan peran utama Perseroan sebagai katalisator bagi sektor pembiayaan infrastruktur, Perseroan tidak didesain untuk mendominasi pasar pembiayaan proyek infrastruktur. Perseroan dirancang untuk menjadi pendorong bagi bank-bank komersial atau lembaga pembiayaan lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, dengan memberikan solusi-solusi inovatif yang dapat membuat pembiayaan proyek tersebut menjadi menarik bagi para kreditur / investor lain, untuk bersama dengan Perseroan mendanai proyek tersebut.

Perseroan menyadari bahwa setiap proyek infrastruktur adalah unik, tergantung pada banyak faktor seperti kebijakan Pemerintah, situasi ekonomi dan politik, lokasi, skala dan teknologi yang digunakan, skema pembayaran dari pengguna dan lain sebagainya. Hal ini berpengaruh terhadap aspek keuangan proyek tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jenis fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan, termasuk skema pembiayaannya.

developments in the country. Therefore, the Company's marketing strategy is not geared towards outperforming other creditors or investors, but building good synergy with them. We do this because we are aware that the infrastructure sector always requires large funding, thus it is important to develop an appropriate synergy between financing institutions, be it domestic or international.

The Company always strives to expand its financing portfolio asset by providing funds to commercially viable infrastructure projects. In order to seek such projects, the Company utilizes the following networks:

- Penetration to infrastructure players, in which the Company identifies commercially viable infrastructure projects to be financed by building networks with the infrastructure business community;
- Local or foreign banking network, in which the Company cooperates with commercial banks or non-bank creditors to identify financing potential from commercially viable infrastructure projects; and
- Agent of development, in which the Company makes active dialogue with the agents of development (including the Company's shareholders) to know the progress of infrastructure projects that are predicted to start the kick off.

In line with the Company's main role as a catalyst for infrastructure financing sector, the Company does not aim to dominate the infrastructure project financing market. The Company is designed to serve as a stimulant for commercial banks or other financing institutions to take part in the infrastructure project financing by providing innovative solutions that can attract other creditors/investors to finance the project along with the Company.

The Company is aware that every infrastructure project is unique and depends on many factors, such as the Government's policy, economic and political situations, location, scale, and technology used, payment scheme from user, and other factors. This will impact project financial aspects, which will ultimately influence types of facilities required, including the financing scheme.

Dalam memberikan pembiayaan proyek, Perseroan mengedepankan uji tuntas yang menyeluruh untuk dapat menawarkan struktur pembiayaan yang dapat diterima dan sesuai dengan proyeksi keuangan dari proyek tersebut. Struktur pembiayaan tersebut juga dipadankan dengan kemampuan dan/atau kondisi keuangan dari pemilik proyek, untuk menghasilkan struktur pembiayaan yang dapat diterima oleh semua *stakeholders* di dalam proyek tersebut. Dengan menawarkan struktur pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dari proyek yang dibiayai, Perseroan berharap dapat mempercepat dimulainya pembangunan proyek infrastruktur tersebut.

Pemberian solusi yang *tailor-made* kepada suatu situasi pembiayaan tertentu memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk memasuki ceruk pasar yang khas, yang menjadi dasar dari strategi pemasaran Perseroan. Selain upaya pemasaran dengan memberikan jasa yang *customized* sebagai fokus upaya pemasaran, Perseroan juga membangun brand awareness pengenalan terhadap visi dan misi Perseroan, serta kemampuan Perseroan dalam mendorong pembiayaan proyek infrastruktur. Di antara upaya-upaya tersebut, Perseroan mengikuti pameran atau konferensi infrastruktur berskala internasional, menjadi pembicara di seminar-seminar infrastruktur, baik dalam skala nasional maupun dunia dan memasuki asosiasi-asosiasi industri yang relevan.

Di samping mengembangkan nama dan jaringan di pasar domestik, Perseroan juga mengembangkan dialog dengan pemain-pemain infrastruktur skala internasional dan kreditur-kreditur internasional. Hal ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman dan juga mencari perkembangan terbaru pada industri infrastruktur di negara-negara lain. Selain itu, dialog yang rutin juga diharapkan dapat menarik minat pihak swasta asing dan lembaga pembiayaan asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Selain membina hubungan dengan sektor swasta dan BUMN, Perseroan juga melakukan dialog secara regular dengan sisi pemerintahan, seperti kementerian terkait, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menjaga hubungan baik, Perseroan dapat melakukan dialog dengan pihak pemerintah apabila memiliki masukan-masukan untuk membangun industri infrastruktur. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemerintah juga memberikan nilai tambah bagi Perseroan untuk mengetahui perkembangan terkini dari sisi regulator, maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan.

In providing project financing, the Company puts forward due diligence before offering financing structure that is reasonable and suitable with the financial projection of the project. The financing structure is also adjusted with financial capacity and/or condition of the project owner to produce proper financing structure that can satisfy the diverse interests of all stakeholders in the project. By offering a financing scheme that is adjustable to the characteristics of the financed project, the Company expects to expedite the infrastructure project development process.

Among the Company's competitive edge and marketing strategy is the solution tailored to the financing situation which enables the Company to penetrate into unique market share. In addition to delivering customized service as its marketing focus, the Company also builds brand awareness to introduce the Company's vision and mission and promote its capability in encouraging infrastructure project financing, among others, by attending international-scale exhibition and conferences, being the keynote speaker in infrastructure seminars, be it in the national and/or global level, and penetrating into relevant industrial associations.

Other than enhancing reputation and networks in domestic market, the Company also intensively communicates with international infrastructure communities and creditors to share knowledge and insights as well as keep up to date with the latest development of the infrastructure industry in other countries. In addition, the routine dialogue is also expected to attract foreign private sectors and financing institutions to take part in Indonesia's infrastructure project developments.

Aside from developing relationship with private sectors and SOEs, the Company also regularly makes dialogue with the government, such as related ministry, the Capital Investment Coordination Board (BKPM) and the Financial Services Authority (OJK). By maintaining good relationship, the Company is able to discuss with the government to share its insights in building infrastructure industry. In addition, good relationship with the government also provides added value for the Company to understand the latest regulatory update and the overall economic conditions.

Pada akhirnya, mengingat pelanggan Perseroan adalah korporat, maka strategi pemasaran Perseroan bertumpu pada kinerja yang baik, solusi yang tepat dan bermanfaat, jaringan kerjasama yang luas, dan pengakuan pasar terhadap kemampuan Perseroan dalam memberikan solusi tersebut.

STRATEGI PERSEROAN

Strategi Perseroan dalam mengembangkan usahanya bertumpu kepada keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan.

Keunggulan-keunggulan kompetitif tersebut, yang timbul karena sifat Perseroan yang unik, antara lain adalah kemampuan untuk memberikan pembiayaan dalam jangka panjang, kemampuan untuk memberikan pembiayaan yang lebih junior dari pinjaman bank, kemampuan pembiayaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berkat dukungan pemegang saham internasional, proses kerja dan standar pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang berskala internasional dan kemampuan Perseroan memberikan jasa *advisory* bagi pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan keunggulan kompetitif tersebut, maka strategi Perseroan, yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan pada 28 September 2016 meliputi 5 hal pokok, yang dinamakan "IIF's 5 point strategy for growth", seperti pada bagan berikut:

At the end, considering that the Company's clients are mostly corporate customers, the Company's marketing strategy relies on good performance, accurate and beneficial solution, extensive cooperation network, and its reputation as the recognized expert in providing such solutions.

COMPANY'S STRATEGY

The Company's strategy in developing its business relies on the Company's competitive advantage.

These competitive advantage, which arise from the Company's unique nature of business is its ability to provide long-term financing, more junior loans than bank loans' financing capability in the USD currency due to the support from international shareholders, international standard work process and social and environmental management, and the Company's capability to provide advisory services to the party in need.

Based on the above competitive advantage, the shareholders of the Company have approved the Company's strategy on September 28, 2016, which consists of 5 main strategies known as "IIF's 5 point strategy for growth", among others:



Pelaksanaan strategi ini sekaligus menunjukkan komitmen Perusahaan untuk memberi nilai lebih pada kegiatan usahanya dan memperkuat pondasi untuk terus menjaga keseimbangan kinerjanya dan pertumbuhan berkelanjutan.

PROSPEK USAHA

Sektor infrastruktur Indonesia ke depan diyakini akan tetap bergairah meskipun berada di tengah kondisi perekonomian yang kurang stabil. Komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan di dalam negeri, dan dukungan dari para pemegang saham untuk IIF dalam menerapkan standar tata kelola perusahaan yang berbasis internasional, akan dapat memberikan keunggulan bagi IIF. Kombinasi antara keunggulan kompetitif dan strategi perusahaan yang didasarkan pada kondisi pasar diyakini akan memberikan kesempatan pertumbuhan komitmen dan aset investasi IIF yang stabil dan signifikan dalam beberapa tahun ke depannya.

Perolehan *fee based income* yang cukup signifikan dari kegiatan *advisory* dan grup sindikasi di bawah Direktorat Investasi di tahun ini melatarbelakangi rencana strategis IIF di masa mendatang untuk menguatkan fondasi pemasukan yang berasal dari sektor tersebut. Dengan portofolio IIF sebagai *lead arranger* dalam proyek KPBU, peningkatan sumber pendapatan dari biaya *underwriting* dan *structuring* dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya proyek-proyek KPBU baru yang realisasinya ditunggu banyak kalangan.

The implementation of this strategy at the same time underlines the Company's commitment to giving added value in its business activities while strengthening the Company's foundation to further maintain its balanced performance and sustainable growth.

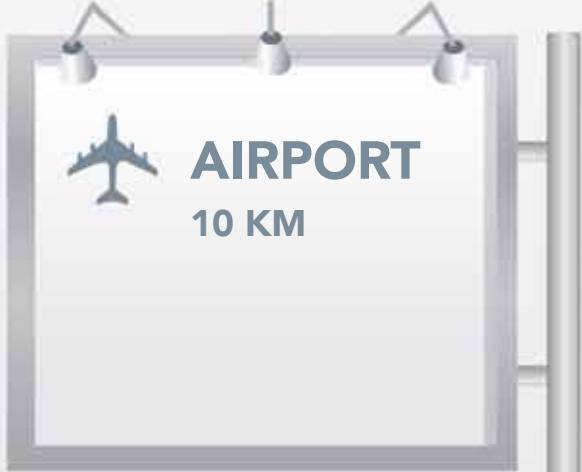
BUSINESS OUTLOOK

Indonesia's infrastructure sector in the future will remain bright despite unstable economic conditions. The government's commitment in developing infrastructure, limited resources from domestic financing institution to support infrastructure development programs, and the support from all shareholders for IIF to implement an international corporate governance standard; all combined will provide an advantage for IIF. The combination between competitive edge and the company's strategy that is based on market condition is believed to be able to increase the number of commitment growth and IIF's stable and significant investment asset in the years to come.

The significant amount of receipt from fee based income, which is from advisory and group syndication activities under the Investment Directory this year, was one of IIF's strategic plans to strengthen its foundation to have a source of income from that sector. With IIF's portfolio as the lead arranger in PPP projects, source of income from underwriting and structuring can be continuously increased in the future. This strategy is expected to be able to encourage the growth of the highly anticipated PPP projects.

Tata Kelola Perusahaan
**Good Corporate
Governance**





AIRPORT
10 KM



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Setiap perusahaan tentunya memiliki harapan untuk dapat terus mengembangkan performa usahanya secara baik serta dapat memberi dampak positif yang cukup luas kepada seluruh pihak tidak hanya di internal, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada. Paradigma tata kelola yang diyakini oleh setiap perusahaan memainkan peranan penting dalam mewujudkan harapan tersebut. Setiap perusahaan membutuhkan arahan bagaimana tata kelola yang baik seharusnya dijalankan serta dapat mendukung tujuan-tujuan strategis terkait kinerja keuangan, kegiatan operasional maupun rencana dalam melaksanakan pembangunan usaha yang berkelanjutan.

IIF memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak hanya untuk memenuhi aspek kepatuhan namun juga dilatarbelakangi dengan kesadaran pentingnya GCG bagi keberlangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan meyakini bahwa terjaminnya kerangka tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab, transparansi dalam setiap kegiatan pengelolaan usaha serta kepastian atas terpenuhinya hak-hak pemegang saham mampu membawa IIF ke arah yang lebih baik dan kuat secara fundamental.

Every company expects to be able to continuously develop its business performance and have a positive impact on all parties, not only on the company itself, but also on all stakeholders. The corporate governance paradigm ingrained in the heart of each individual of the company plays a crucial role in realizing this aspiration. Every company requires direction as to how corporate governance should be implemented to support all strategies and policies and to achieve goals pertaining to financial performance, operations as well as the plan to create a sustainable business.

IIF is committed to implementing all tenets of Good Corporate Governance (GCG) beyond its responsibility to comply with regulations. Such commitment is driven by the Company's awareness of the significance of GCG in sustaining its business in the long term. The Company believes that by ensuring an effective and responsible governance framework, transparency in each area of business management activities and the fulfillment of shareholders' rights, IIF will fundamentally become stronger and show improved performance. IIF translates its commitment to the fulfillment of the principles

Perusahaan meyakini bahwa terjaminnya kerangka tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab, transparansi dalam setiap kegiatan pengelolaan usaha serta kepastian atas terpenuhinya hak-hak pemegang saham mampu membawa Perseroan ke arah yang lebih baik dan kuat secara fundamental

The Company believes that by ensuring an effective and responsible governance framework, the transparency in each business management activities and the fulfillment of shareholders' rights, the Company will fundamentally become stronger and show improved performance.

Pemenuhan atas prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan oleh IIF ke dalam penerapan pedoman GCG yang meliputi ketersediaan sistem, infrastruktur serta adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala dalam menjamin efektivitas serta terpenuhinya seluruh aturan yang dipersyaratkan. Dengan langkah tersebut, IIF berharap di masa mendatang nilai-nilai yang terkandung di dalam GCG dapat menjadi budaya bagi Perusahaan serta individu-individu di dalamnya.

Penguatan penerapan GCG senantiasa terus ditingkatkan serta disempurnakan melalui pembentukan organ-organ yang diperlukan beserta sistem pendukungnya. Pada 2016, IIF melakukan penambahan organ Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee – ITSC) dan Komite Sumber Daya Manusia.

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) IIF memiliki peran dalam melaksanakan pengembangan terkait kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan.

Selanjutnya di tahun ini, IIF juga melakukan penambahan Komite Sumber Daya Manusia, yang memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDM serta memberikan arahan terkait rencana pengembangan SDM IIF di tahun buku dan di tahun-tahun mendatang

IIF menyadari bahwa masih perlu dilakukan pemberian secara simultan terkait implementasi GCG di lingkungan Perusahaan. Hal ini mengingat bahwa usia Perusahaan yang masih tergolong muda dan masih terus melakukan penyempurnaan terhadap formula tata kelola yang proporsional. Cita-cita atas terpenuhinya seluruh elemen pendukung kegiatan tata kelola tentunya menjadi perhatian utama IIF selama ini. Untuk

and the implementation of the Code of GCG that includes providing an effective system and infrastructure for GCG enforcement and scheduling periodical evaluation to ensure the effectiveness and fulfillment of all required regulations. By taking these measures, IIF expects that all GCG values can be internalized by the Company and each of its personnel to ultimately create a GCG culture within the organization in the future.

Implementation of GCG in the Company is constantly strengthened and improved by establishing organs and their supporting system. In 2016, IIF set up more organs, namely Information Technology Steering Committee – ITSC) and Human Resources Committee.

The Information Technology Steering Committee (ITSC) of IIF is responsible for developing the capacity and capability of information technology system to support the Company's business activities.

In addition, IIF now has Human Resources Committee that is responsible for monitoring HR management and providing advice related to IIF's HR development plan for the fiscal year and beyond.

IIF realizes that a simultaneous revamp of GCG implementation in its environment is necessary, given that the Company's recent establishment requires the organization to continuously redefine and set a proportionate corporate governance system. To date, IIF remains firm in its goal of adding more GCG supporting organs to its corporate governance infrastructure as a priority. Therefore, with the support of professional and

itu, dengan kehadiran profesional yang berpengalaman dapat memberikan stimulus bagi IIF secara bertahap dalam melakukan penyempurnaan GCG baik organ, sistem maupun sumber daya manusianya.

ORGAN UTAMA GCG

Organ utama IIF terdiri atas:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

DASAR HUKUM DAN PRINSIP PENERAPAN GCG

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Peraturan Bapepam-LK atau Otoritas Jasa Keuangan

- POJK no. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi Afliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- POJK no. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- POJK no. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;

experienced individuals, it is expected that IIF can accelerate and gradually improve its GCG implementation, the organs, the systems and the human resources.

GCG PRIMARY ORGANS

IIF's primary organs consist of:

- General Meeting of Shareholders
- Board of Commissioners
- Board of Directors

LEGAL BASIS AND PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

Legal Basis

Laws of the Republic of Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure;
- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Ministerial Regulation

- Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Company.

Ministerial Decision

- Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 on Provision of Business License of Infrastructure Financing Company to PT Indonesia Infrastructure Finance.

Regulations of Bapepam-LK or Financial Services Authority

- POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
- Decision of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-413/BL/2009 dated November 25, 2009, Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 on Material Transaction and Changes in Main Business Activity;
- Decision of Chairman of Bapepam and LK No. Kep-412/BL/2009 dated November 25, 2009, Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Certain Transaction;
- POJK no. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines on the Drawing Up of Internal Audit Unit Charter;
- POJK no. 33/POJK/04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;

- POJK no. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam Nomor: VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan Nomor: X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam Nomor: VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- POJK no. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Publik atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- POJK no. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK no. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK no. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK no. 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang batas waktunya Jatuh pada Hari Libur;
- SEOJK no. 06/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Presiden no. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Ketua Bapepam LK no. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- POJK no. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan non Bank.
- POJK no. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines on the Performance of Audit Committee's Work;
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Bapepam Regulation No: VII.G.11 on Responsibilities of Board of Directors on Financial Statements;
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-36/PM/2003 dated September 30, 2003, Regulation No. X.K.2 on the Obligation to Submit Periodical Financial Statements;
- Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-554/BL/2010 dated December 30, 2010 on Amendment to Decision of Chairman of Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000 on Amendment to Bapepam Regulation No. VII.G.7 on Guidelines on the Presentation of Financial Statement;
- POJK no. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information on Material Fact by Issuers or Public Companies;
- POJK no. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
- POJK no. 29/POJK.05/2014 on Implementation of Financing Business;
- POJK no. 8/POJK.04/2014 on Website of Issuers or Public Companies;
- POJK no. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- SEOJK no. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Annual Report of Issuers or Public Companies;
- SEOJK no. 11/SEOJK.04/2014 on Obligation to Submit Report to the Financial Services Authority and Announcement to the Public by Capital Market Community of which deadline Falls on Holiday;
- SEOJK no. 06/SEOJK.04/2014 on Procedure to Electronically Submit Report by Issuers or Public Companies;
- Presidential Regulation no. 9 of 2009 on Financing Institutions;
- Regulation of Bapepam LK Chairman no. PER-03/BL/2010 on Form, Composition, and Submission of Quarterly Financial Statements and Report of Business Activities per Semester of Infrastructure Financing Company;
- POJK no. 3/POJK.05/2013 on Monthly Report of non Bank Financial Service Institutions.

Prinsip Penerapan GCG

IIF sebagai warga korporasi yang baik akan senantiasa menerapkan secara konsisten sehingga berimplikasi positif bagi Perusahaan demi memberikan nilai lebih. Nilai lebih tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan; memberikan pelayanan prima, inovatif, efisien, dan efektif; menyelenggarakan riset dan pengembangan bisnis yang tepat; menyediakan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin akuntabilitas; menciptakan iklim usaha yang sehat; serta senantiasa memelihara keberlanjutan bisnis IIF.

Implementasi dan praktik tata kelola di IIF berdasarkan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

1. Transparansi

IIF memberikan informasi secara transparan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan kegiatan usaha Perusahaan. IIF memiliki keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di Perusahaan sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, pelaporan dan hasil kinerja yang diraih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tanggung Jawab

Kesesuaian rencana, strategi dan hasil yang dicapai IIF berada dalam garis kebijakan manajemen dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaporan terkait kegiatan usaha Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini yang senantiasa dilakukan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan memberi dampak positif bagi citra Perusahaan.

4. Independensi

Pengelolaan Perusahaan dilakukan secara mandiri, pengurus Perusahaan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Perusahaan. Tersirat

GC Implementation Principles

As a good corporate citizen, IIF consistently implements GCG best practices in order to have a positive impact on the Company's ability to provide added value. Such values are created by showing conduct that reflects the Company's culture; providing premium, innovative, efficient and effective service; conducting proper business research and development; putting forward an internal control system that can ensure accountability; creating a healthy business climate; and continuously sustaining IIF's business processes.

Governance practice and implementation in IIF are based on GCG principles as follows:

1. Transparency

IIF transparently provides information related to the Company's business performance and activities to the shareholders and all stakeholders. The Company establishes a transparent information system in its decision-making process and discloses information deemed significant and relevant to the Company's activities.

2. Accountability

The clarity of function, structure, system and responsibility in the Company in order to effectively and efficiently manage its business. The Management sets out clear job descriptions for all employees and affirms the basic functions of each division. Thus, the reporting process and performance result can be made accountable.

3. Responsibility

The conformity of plans, strategies and results attained by IIF is always set to be within the Management's policy and implemented based on the Company's Articles of Association by taking into account the prevailing laws and regulations to further ensure the accountability of its report. This principle is constantly upheld in order to provide added value to the shareholders and create a positive image for the Company.

4. Independency

The Company is managed independently in which the management has their own duties and responsibilities and carries them out without any pressure from outside parties that is not in accordance with the Company's operations systems. This principle implicitly states that the Company's

dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan Perusahaan.

5. Kewajaran

Kesetaraan dan perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IIF senantiasa membuat sistem yang solid untuk melaksanakan dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas seperti yang diharapkan. IIF menjalankan kinerja secara serta menaati seluruh peraturan yang ada guna melindungi pemangku kepentingan dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan.

IIF berkomitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

STRUKTUR TATA KELOLA

Dalam membangun struktur tata kelola, IIF memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha dengan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme dapat bekerja secara efektif. Struktur tata kelola di lingkungan Perusahaan meliputi struktur organ dan kebijakan Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan menurut Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi saran kepada Direksi.
- Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud

management must always acknowledge the rights of stakeholders as declared in the laws and Company regulations.

5. Fairness

Equality and fair treatment in meeting the rights and obligations to all stakeholders that arise from agreements and prevailing laws and regulations. IIF always ensures a solid system to conduct and create quality products and services to meet clients' expectations. The Company gives fair treatment and complies with all applicable regulations to protect stakeholders within its responsibility to sustain its business.

IIF commits to giving fair treatment to all employees without prejudice to their ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that are not relevant to their performance.

GOVERNANCE STRUCTURE

In developing its governance structure, IIF takes into account function mapping and business activities that are based in business ethics, and ensures that the checks-and-balances mechanism works effectively. The governance structure within the Company's environment covers its organisational structure and policies, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other supporting organs such as Corporate Secretary, internal control, risk management and compliance with prevailing regulations.

Pursuant to Law No. 40 of 2007, Chapter I regarding General Provisions Article 1, Company Organs consist of General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

- General Meeting of Shareholders ("GMS") is an organ of the Company with authorities that are not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within a limit that is decided by the Laws and/or Articles of Association.
- Board of Commissioners is an organ of the Company with a duty to supervise, generally and/or specifically, the Company according to the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors.
- Board of Directors is an organ of the Company that has an authority and is fully responsible for the Company's management. This is done for the sake of the Company

dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ tertinggi GCG yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Kewenangan RUPS antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyetujui laporan keuangan Perusahaan;
- Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). Pada 2016, pemegang saham IIF telah mengadakan RUPS Tahunan yang berlangsung pada 24 Maret 2016 bertempat di Kantor Pusat IIF, Energy Building Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190 dan dihadiri oleh 100% saham.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

in line with its aims and purposes, both inside and outside the court, according to the Articles of Association.

The Company's organs implement their functions pursuant to the laws and regulations, Articles of Association of the Company and other provisions on the principle that each organ is independent in carrying out their duties, functions and responsibilities for the interests of the Company. The GMS, Board of Commissioners and Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authority, pursuant to the laws and regulations and Articles of Association.

In conducting their supervisory duty, the Board of Commissioners may establish committees composed of one or more members of the Board of Commissioners. The committees report directly to the Board of Commissioners.

In conducting their management duty, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit Unit, as well as other units that carry out the management function of the Company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest organ of GCG whose authority is regulated by the laws and Company's Articles of Association.

GMS authority are, among others:

- Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Approving the Company's financial statements;
- Determining the remuneration amount for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

GMS consists of Annual GMS ("AGMS") and Extraordinary GMS ("EGMS"). In 2016, IIF convened an Annual GMS on 24 March 2016 at IIF's head office located at the Energy Building on 30th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190, which was attended by shareholders representing 100% of shares.

Rights and Responsibilities of Shareholders in GMS

As stated in Article 75 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, Shareholders have the

Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan tentang Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan melalui media RUPS. Berdasarkan kewenangan RUPS yang memiliki peran dalam menyetujui laporan tanggung jawab pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait hasil rencana-rencana Perusahaan, maka Pemegang Saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan turut serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

Agenda dan Hasil RUPST 2016

Berikut adalah agenda pembahasan RUPS 2016 beserta hasil keputusan yang disepakati:

Agenda	Hasil RUPS	Resolutions
Agenda 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. b. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 oleh Direksi Perusahaan yang mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 17 dalam pembahasan Asosiasi Perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Resolved to approve the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2015. b. Resolved to approve the 2015 Annual Report that the Board of Directors prepared according to the provisions of Article 66 of the Indonesian Company Law and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda 2	Menyetujui pengalokasian laba bersih setelah pajak sebesar 15% untuk dana cadangan Perusahaan dan mengalokasikan sisa laba bersih setelah pajak untuk laba ditahan, dimana termasuk dana cadangan dan laba ditahan yang berasal dari laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan penggunaan lainnya ditahan sebelumnya.	Resolved to approve the allocations of 15% of 2015 net profit after tax for the Company's reserves fund and allocating the remaining of 2015 net profit after tax for retained earnings, which includes the Company's reserve fund and retained earnings from net profit for reserved fund, dividend and other purposes of the previous years.
Agenda 3	Menyetujui rencana dan anggaran Perusahaan untuk tahun buku 2016 terhitung sejak 1 Januari 2016 dan berakhir pada 31 Desember 2016.	Resolved to approve the Company's annual business plan and budget for the financial year commencing from 1 January 2016 and ending on the 31 December 2016.
Agenda 4	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui pembebasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dari kewajiban terkait dengan pengawasan sebagai Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. b. Menyetujui pembebasan tugas dan tanggung jawab Direksi dari kewajiban terkait manajerial Perusahaan sebagai Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Resolved to approve the full release and discharge of the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities for the financial year ended on 31 December 2016. b. Resolved to approve the full release and discharge of the Board of Directors from their managerial responsibilities for the financial year ended on 31 December 2015.
Agenda 5	Menyetujui rekomendasi dan penunjukan anggota Dewan Komisaris yang baru untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST 2019 kecuali Bapak Robert Dolk untuk periode 1 tahun sampai dengan penutupan RUPST 2017 sebagaimana yang disebutkan.	Resolved to approve the recommendation and appointment of the new members of the Board of Commissioners for a further period until the closing of the 2019 AGMS, except for Mr. Robert Dolk for the period of 1 year up until the closing of 2017 AGMS as mentioned by the Chairman.

right to obtain information about the Company from the Board of Commissioners and Board of Directors at the GMS. Based on its authority, GMS shall approval for the report on the responsibility of the management as well as decisions related to the Company's plans. Moreover, Shareholders also have the obligation to attend the GMS and to participate in the voting process.

2016 AGMS Agenda and Resolutions

The following are the agenda and resolutions of the 2016 GMS.

Agenda	Hasil RUPS	Resolutions
Agenda 6	<p>1. Menyetujui penunjukan Bapak Arisudono Soerono sebagai Presiden Direktur/CEO berlaku efektif sejak penutupan RUPS tahun 2015 sampai dengan penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif.</p> <p>2. Menyetujui syarat dan ketentuan Bapak Arisudono Soerono sebagai Presiden Direktur/CEO berlaku efektif sejak penutupan RUPS tahun 2015 sampai dengan penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif.</p> <p>3. Menyetujui penunjukan Bapak Arisudono Soerono sebagai Direktur Interim CFO sampai dengan proses penunjukan Direktur Keuangan yang baru selesai.</p> <p>Untuk itu, komposisi Direksi Perusahaan saat ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arisudono Soerono: Presiden Direktur dan CEO sekaligus Direktur Pelaksana dan <i>Chief Finance Officer</i> • Harold Jonathan Darma Tjiptadjaja: Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment officer</i> • Hilda Savitri: Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment</i> • Wito Krisnahadi: Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> 	<p>1. Resolved to approve the appointment of Mr. Arisudono Soerono as the President Director/CEO effective from the closing of 2015 GMS until the closing of the third AGMS from the effective date.</p> <p>2. Resolved to approve the requirements and provisions of Mr. Arisudono Soerono as the President Director/CEO effective from the closing of 2015 GMS until the closing of the third AGMS from the effective date.</p> <p>3. Approving the appointment of Mr. Arisudono Soerono as Interim CFO until the appointment of a new Finance Director has been completed.</p> <p>Therefore, the current composition of the Company's Board of Directors is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arisudono Soerono: President Director and CEO as well as Managing Director and Chief Finance Officer • Harold Jonathan Darma Tjiptadjaja: Managing Director and Chief Investment Officer • Hilda Savitri: Managing Director and Chief Investment Officer • Wito Krisnahadi: Managing Director and Chief Risk Officer
Agenda 7	Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2016.	Unanimously approve the remuneration for the Board of Commissioner and the Board of Directors of the Company for 2016.
Agenda 8	Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member Ernst & Young) sebagai Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2016 dan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk memutuskan <i>professional fee</i> yang akan dibayarkan kepada Auditor Independen berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.	Resolved to approve the reappointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member Ernst & Young) as the Company's Independent Auditor for the financial year ending on the 31 of December 2016 and to authorized the Board of Commissioner and the Board of Director of the Company to determine professional fee that will be awarded to the Independent Auditor based on prevailin market conditions.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

IIF juga telah menyelenggarakan RUPSLB pada 24 Maret 2016 bertempat di Kantor Pusat IIF, Energy Building Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190 Pada RUPSLB dihadiri oleh 100% saham.

Agenda RUPSLB

1. Membahas dan memutuskan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Perjanjian Para Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

IIF also convened an EGMS on 24 March 2016 at IIF's Head Office, Energy Building 30th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta 12190, which was attended by shareholders representing 100% of shares.

EGMS Agenda

1. Discussed and resolved the delegation of authority regulated in the Shareholders Agreement and Articles of Association of the Company.

2. Membahas dan memutuskan Rencana Incentif Jangka Panjang Tahap II.
3. Membahas dan memutuskan agenda lain yang diusulkan dan disetujui untuk dibahas oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat.

Hasil RUPSLB 2016 ini adalah:

1. Ketua mengajukan penyelesaian agenda pertama kepada RUPS dengan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dengan para Pemegang Saham dan pihak penasihat yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham untuk mendiskusikan pelimpahan wewenang yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian agenda tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2016.
2. Pemegang Saham menyetujui Rencana Incentif Jangka Panjang Tahap II untuk tahun 2015 dan selanjutnya dengan syarat penerapannya berdasarkan persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Kerja Jangka Menengah Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi kebijakan dan pengurusan Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi. Peran ini juga mencakup pengawasan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran IIF, peraturan di dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan hukum serta regulasi yang berlaku sesuai dengan kepentingan IIF.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris di IIF, antara lain meliputi:

- Melaksanakan peran pengawasan dan penasihat dalam mengelola organisasi dan bisnis operasi untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan;
- Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan pesetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

2. Discussing and resolving the Long Term Incentive Plan Phase II;
3. Discussed and resolved to approve any other matters as may be proposed and approved by the Shareholders in the Meeting.

2016 EGMS Resolutions:

1. The Chairman proposed to the Meeting to resolve the First Agenda by agreeing to continue the discussion with the Shareholders and the respective counsels on the delegation of authority with the target to finalize this by 30 May 2016.
2. The Shareholders approved the Long Term Incentive Plan Phase II for 2015 and beyond, where the implementation of the payments is conditional to the Shareholders approving a Mid-Term Business Plan.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a governance organ that has a responsibility to supervise the policy as well as the management of the Company that fall under the Board of Directors' duties, and provide advice as well as recommendation to the Board of Directors. The Board of Commissioners also has a duty to monitor the implementation of the Work Plan and Budget, regulations in the Articles of Association, GMS resolutions, and the applicable laws and regulations in line with IIF's interests.

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

The main duties of IIF's Board of Commissioners are, among others:

- Conducting supervisory and advisory functions in managing the organization, business and operations for the interests of shareholders, in line with the Company's vision, mission and goals;
- Supervising Board of Directors' policies, achievement of the Company's targets and compliance with the prevailing laws and regulations;
- Periodically evaluating and providing advice regarding risk management implementation and internal control system, and giving approval for the required changes or corrective actions that must be taken regarding the systems;
- Performing duties for the sake of the Company and related business, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara otonom guna menghindari benturan kepentingan atau intervensi. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan satu sama lainnya atau dengan anggota Dewan Direksi IIF hingga derajat ketiga kekerabatan, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan.

Piagam Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris IIF memiliki piagam kerja (*charter*) yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya serta memberikan informasi terkait tata hubungan dengan organ-organ terkait di Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 24 Maret 2016 terdiri dari:

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
M. Chatib Basri	Ketua Dewan Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner	Akta no 50 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no 50 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Edwin Gerungan	Anggota Dewan Komisaris – Komisaris Independen / Members of Board –of Commissioners – Independent Commissioner	Akta no 19 tanggal 29 Desember 2014 / Deed no. 19 dated 29 December 2014	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Zulkifli Zaini	Anggota Dewan Komisaris – Komisaris Independen / Members of Board –of Commissioners – Independent Commissioner	Akta no 6 tanggal 9 Juni 2016 / Deed no 6 dated 9 June 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Marwanto Harjowiryo	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no 50 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no 50 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Robert Pakpahan	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no 50 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no 50 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Robert Olivier Dolk	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no 50 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no 50 dated 24 March 2016	1 tahun sejak tanggal penutupan RUPST 2016 / A year from the closing date of the 2016 AGMS
Juergen Hertel	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no 50 tanggal 24 Maret 2016 / Deed no 50 dated 24 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Independency of Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its role and duties independently to avoid any conflict of interest with and intervention from other parties. Moreover, each member of the Board of Commissioners has no relation up to the third degree, both vertically and horizontally, or relationship arising from marriage with each other or with the Board of Directors.

Board of Commissioners Charter

IIF's Board of Commissioners has a charter that serve as a reference for the Board of Commissioners to conduct their duties and as a source of information regarding the relationship with other related organs in the Company.

Composition of the Company's Board of Commissioners

The following is the composition of the Company's Board of Commissioners based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders convened on 24 March 2016.

Nama / Name	Jabatan / Position	Keputusan Pengangkatan / Appointment Basis	Periode jabatan / Term of office
Rajeev Kannan	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no 26 tanggal 26 Maret 2015 / Deed no 26 dated 26 March 2015	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date
Richard Ranken	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	Akta no. 1 tanggal 2 Maret 2016 / Deed no. 1 dated 2 March 2016	Penutupan RUPST tahun ketiga sejak tanggal efektif / The closing of the third AGMS from the effective date

Kebijakan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Terkait pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Komisaris, IIF mengacu pada kebijakan Perusahaan :

1. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga terhadap Perjanjian Pemegang Saham pasal III tentang Dewan Komisaris.
2. Akta Nomor: 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 pasal 15 tentang Rapat Dewan Komisaris

Kegiatan Dewan Komisaris 2016

Sepanjang 2016, Dewan Komisaris IIF telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. 4 kali meeting Dewan Komisaris di kantor Perusahaan
2. 2 kali teleconference
3. 1 kali kunjungan kerja terhadap proyek yang akan dibiayai

Tingkat Kehadiran

Policies and Attendance Rate of Board of Commissioners in Meetings

IIF holds Board of Commissioners meetings in accordance with the following policy of the Company:

1. Third Amendment and Restatement Agreement to Shareholders Agreement article III – Board of Commissioners.
2. Deed Number: 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree Number: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123 article 15 on Board of Commissioners Meeting.

Activities of Board of Commissioners in 2016

During 2016, the Board of Commissioners has carried out the following activities:

1. 4 meetings with the Board of Commissioners in the Company's office.
2. 2 teleconferences
3. 1 Site visit

Attendance Rate

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Meeting / Total Meeting	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
M. Chatib Basri	Ketua Dewan Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner	6	6	100%
Edwin Gerungan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	6	6	100%
Zulkifli Zaini***	Anggota Dewan Komisaris – Komisaris Independen / Members of Board –of Commissioners – Independent Commissioner	6	3	50%

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Meeting / Total Meeting	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Marwanto Harjowiryono	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	6	100%
Robert Pakpahan**	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	4	67%
Robert Olivier Dolk	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	6	100%
Hans Juergen Hertel	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	6	100%
Rajeev Kannan	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	5	83%
Richard Ranken*	Anggota Dewan Komisaris / Members of Board of Commissioners	6	5	83%

* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2 Maret 2016

** Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 24 Maret 2016

*** Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 9 Juni 2016

* Serving as the Company's Commissioner from 2 March 2016

* Serving as the Company's Commissioner from 24 March 2016

* Serving as the independent Commissioner from 9 June 2016

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Investasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik terutama dalam mendukung tugas-tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi IIF. Ketentuan mengenai pemberian remunerasi bagi keduanya dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Adapun besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perseroan tahun 2016.

Performance Evaluation of Committee under Board of Commissioners

The Board of Commissioners assesses that the Committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Oversight Committee, and Investment Committee, have performed their duties and responsibilities well, especially in supporting the supervisory role of the Board of Commissioners.

Remuneration Policy of Board of Commissioners

The Company has already established a remuneration policy for IIF's Board of Commissioners and Board of Directors, the provision of which are discussed and determined at the Annual General Meeting of Shareholders. The amount of remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the 2016 Audited Financial Statements of the Company.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung fungsi pengawasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Dalam pembentukannya, IIF telah mengacu pada Peraturan OJK No. 55/2015.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mengacu pada piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur, dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, dan masa jabatan. Muatan yang terkandung dalam Piagam Komite Audit meliputi:

Tanggung Jawab Komite Audit

1. Menelaah laporan yang mengidentifikasi isu-isu pengendalian yang signifikan yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkum tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
2. Menelaah cara dan kerangka kerja manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan dari sifat, tingkat, dan efektivitas internal sistem kontrol, termasuk pengendalian sistem akuntansi, dan mengelola sistem efektif dari pengendalian secara internal, termasuk tinjauan tahunan dari kecukupan pengawasan pengendalian dan proses eskalasi atas suatu permasalahan;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan dalam Laporan Tahunan terhadap pengawasan internal, maka komite harus menelaah pernyataan-pernyataan tersebut sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Meminta keterangan dari Presiden Direktur dan Direktur Keuangan untuk keberadaan setiap kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi Perseroan dan setiap potensi untuk penipuan yang teridentifikasi;
5. Menelaah laporan dari auditor internal dan eksternal dan memantau status remediasi yang diperlukan;
6. Menelaah masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk mengeskalasi masalah kepada Dewan Komisaris atau memberitahukan kepada regulator;

COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners to support the supervisory function, primarily in dealing with internal controls, accounting policy, financial reporting and the internal and external auditors. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and are reported to the GMS. IIF established its Audit Committee based on OJK Regulation No. 55/2015.

Audit Committee Charter

In conducting its duties, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter that governs matters related to authority, structure, qualifications and responsibilities, meetings, reporting and term of office. The Audit Committee Charter covers:

Responsibilities of Audit Committee

1. Reviewing reports to identify significant controlling issues requiring attention or correction and summarizing actions taken to solve the problems;
2. Reviewing methods and framework of the management in ensuring and monitoring the adequacy of nature, level, and effectiveness of internal control systems, including accounting system controls, and internally managing an effective controlling system, including annual review on the adequacy of controlling supervision and escalation process of a problem;
3. As the Company is required to transparently disclose information in its Annual Report regarding internal supervision by laws and regulations, the committee must evaluate the statements before submitting it to the Board of Commissioners for approval;
4. Asking for feedback from the President Director and Finance Director for any significant weakness in the internal control system that may affect the Company and for any identified fraud potential;
5. Reviewing reports for internal and external auditors and monitoring the remedial status required;
6. Reviewing issues discussed and deciding whether there is a need to escalate the problems to the Board of Commissioners or to notify the regulator;

7. Secara khusus, komite bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas laporan keuangan, melalui tugas-tugas berikut:
 - a. Memastikan adanya kajian yang layak pada laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Mendiskusikan dengan auditor setiap aspek penilaian yang signifikan dan/atau kebijakan akuntansi dalam penyediaan informasi dalam akun-akun;
 - c. Memastikan bahwa laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
 - d. Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
8. Dalam kaitannya dengan Internal Auditor, komite akan melakukan tugas tugas berikut:
 - a. Mengevaluasi Piagam Internal Audit yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mengevaluasi rencana audit tahunan internal auditor sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan tidak ada pembatasan yang dibuat oleh manajemen terhadap proses audit yang dilakukan oleh Internal Auditor;
 - d. Mengevaluasi efektivitas fungsi internal audit;
 - e. Memastikan bahwa setiap temuan yang signifikan dari proses internal audit telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - f. Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Internal Auditor telah ditindaklanjuti oleh manajemen;
 - g. Menugaskan internal auditor untuk melakukan audit khusus apabila terdapat adanya indikasi penipuan atau penyimpangan manajemen; dan
 - h. Mengevaluasi penujukan dan penggantian dari ketua Internal Auditor dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam kaitannya dengan Akuntan Publik, komite akan melakukan tugas-tugas berikut:
 - a. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan akuntan publik untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. Menelaah independensi dan obyektivitas akuntan publik;
 - c. Menelaah cakupan audit untuk memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dipertimbangkan
 - d. Memastikan bahwa temuan akuntan publik telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
7. The committee is specifically responsible for improving the transparency and quality of financial statements through the following duties:
 - a. Ensuring proper review of the financial statements issued by the Company;
 - b. Discussing every significant assessment aspect and/or accounting policy in the provision of information on the financial accounts with the auditor;
 - c. Ensuring that the financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and related regulations;
 - d. Ensuring that all reports sent to the regulator and other related institutions have been submitted accurately and punctually.
8. In connection with the Internal Auditor, the committee will conduct the following duties:
 - a. Evaluating Internal Audit Charter to be approved by the Board of Commissioners;
 - b. Evaluating the annual audit plan of the internal auditor as a feedback for the Board of Commissioners;
 - c. Ensuring there is no limitation made by the management on the audit process conducted by the Internal Auditor;
 - d. Evaluating the effectiveness of the internal audit function;
 - e. Ensuring that every significant finding obtained from the internal audit process is immediately reported and discussed;
 - f. Ensuring that the recommendations given by the Internal Auditor have been followed-up by the management;
 - g. Assigning the internal auditor to conduct a special audit in the event of fraud indication or deviation by the management; and
 - h. Evaluating the appointment and replacement of the Head of Internal Auditor and submitting the recommendation to the Board of Commissioners.
9. In connection with the Public Accountant, the committee will conduct the following duties:
 - a. Giving recommendation to the Board of Commissioners in the appointment of public accountant to be approved at the Annual General Meeting of Shareholders;
 - b. Reviewing the independency and objectivity of the public accountant;
 - c. Reviewing the audit scope to ensure that all significant risks have been considered;
 - d. Ensuring that the findings of the public accountant have been immediately reported and discussed;

- e. Memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh akuntan publik;
 - f. Mengamati konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar auditing yang berlaku
 - g. Menelaah kinerja akuntan publik di untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik.
10. Dalam kaitannya dengan Kepatuhan, Komite akan melakukan tugas-tugas berikut:
- a. Menelaah efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. Menelaah informasi dari manajemen, auditor dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
 - c. Menelaah temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan dan tindak lanjut manajemen.

Komposisi Komite Audit

Komposisi Komite Audit tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

Komite Audit periode 1 Januari 2016 - 20 April 2016

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Edwin Gerungan	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Ekoputro Adijayanto	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Komite Audit periode 21 April 2016 - 16 Juni 2016

Susunan Komite Audit Perseroan yang baru diangkat berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

- e. Ensuring that the management has followed up the recommendations given by the public accountant;
 - f. Observing the consistency of the audit performance conducted by the Public Accountant based on the applicable audit standards.
 - g. Reviewing the performance of the public accountant as a basis for recommendation of reappointment/replacement of the public accountant to the Board of Commissioners.
10. In connection with Compliance, the Committee will conduct the following duties:
- a. Reviewing the effectiveness of supervisory systems in the preparation of financial statements;
 - b. Reviewing information from the management, auditor, and other external consultants relating to compliance issues;
 - c. Reviewing audit findings from the authorized institutions and effectiveness of the feedback and follow-up from the management.

Composition of Audit Committee

The Company's Audit Committee for the financial year 2016 is composed of:

Audit Committee period of 1 January 2016 – 20 April 2016

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Edwin Gerungan	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Ekoputro Adijayanto	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Audit Committee period of 21 April 2016 - 16 Juni 2016

The new member of Company's Audit Committee was appointed based on Circular Decision of the Company's Board of Commissioners ref. No. 001/IIF/BOC-RES/IV/2016 dated 21 April 2016.

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Edwin Gerungan	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Robert Pakpahan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Komite Audit Periode 16 Juni 2016 -Sekarang**Audit Committee as of 16 Juni 2016 - Now**

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Zulkifli Zaini	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Mohamad Chatib Basri	Anggota / Member	Komisaris Utama - Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Edwin Gerungan	Anggota / Member	Komisaris - Komisaris Independen / Commissioner - Independent Commissioner
Agus Kretarto	Anggota / Member	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Profil Komite Audit**Zulkifli Zaini**

*Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Mohamad Chatib Basri

*Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Edwin Gerungan

*Profil sudah ditampilkan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Agus Kretarto

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Agus Kretarto memperoleh gelar Master of Management untuk Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia. Beliau juga telah mengikuti berbagai kursus dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang auditing, akuntansi, perbankan, pasar modal, manajemen risiko, peraturan ekonomi infrastruktur dan Kerjasama Publik-Swasta. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Departemen Keuangan (1981-1983) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1987-1992). Beliau pernah bekerja di Bank Rama dari tahun 1993-2000 dengan posisi sebagai Kepala Internal Audit, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Sekretaris Perusahaan, dan Koordinator merger untuk Keuangan, Pajak & Accounting. Pada tahun 2001, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Mustika Ratu, kemudian sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Anggota Komite Audit Bank Internasional Indonesia (2003-2008), dan Anggota Dewan Eksekutif Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum jakarta (2005-2012).

Audit Committee Profile**Zulkifli Zaini**

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

Mohamad Chatib Basri

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

Edwin Gerungan

*His profile has been presented in the section of Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

Agus Kretarto

An Indonesian citizen of 57 years old. Agus Kretarto earned a Master of Management degree majoring Accounting from the University of Indonesia. He has attended various courses and seminars at home and abroad in auditing, accounting, banking, capital markets, risk management, economic regulation of infrastructure and Public-Private Partnerships. He began his career as an auditor at the Ministry of Finance (1981-1983) and Financial and Development Supervisory Board (1987-1992). He worked at Bank Rama from 1993 to 2000 holding several positions: Head of Internal Audit, Head of Planning and Development Division, Corporate Secretary, and Merger Coordinator for Finance, Tax & Accounting. In 2001, he served as Corporate Secretary of Mustika Ratu, then as Compliance Director of Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Member of the Audit Committee of Bank Internasional Indonesia (2003-2008), and Member of the Executive Board of Jakarta Water Supply Regulatory Body (2005-2012).

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga independensi, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit tanggal 6 Oktober 2010 dan sebagaimana diatur oleh POJK no. 55/2015, susunan komite audit harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) komisaris independen. Komisaris independen dan Pihak Independen adalah anggota Komite tanpa adanya hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali lainnya, atau bentuk lain dari hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit IIF adalah profesional yang memiliki latar belakang bidang keuangan dan/atau akuntansi untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan saran yang diberikan. Jadi, semua prasyarat mengenai independensi Komite Audit seperti yang tercantum dalam peraturan dan Praktek GCG telah dipenuhi.

Kegiatan Komite Audit di Tahun 2016

Kegiatan Internal

Adapun kegiatan internal yang dilaksanakan oleh Komite Audit Perusahaan sepanjang 2016 meliputi:

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan Internal Auditor untuk membahas sistem pengendalian internal, kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
2. Melakukan review dan memberikan saran pada Laporan Keuangan Triwulan-an sebelum dipresentasikan ke para pemegang saham.
3. Melakukan review terhadap kinerja, independensi dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut.
4. Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan
5. Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan Audit Internal

Kegiatan Eksternal

Sedangkan untuk kegiatan eksternal Perusahaan yang dilaksanakan sepanjang 2016 meliputi:

1. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sebelum dan setelah audit laporan keuangan Perusahaan
2. Mengadakan pertemuan dengan pihak terkait mengenai perbaikan sistem pengendalian internal

Independency of Audit Committee

In order to maintain independence, as stipulated in the Audit Committee Charter dated 6 October 2010 as regulated in POJK no. 55/2015 the composition of the Audit Committee shall consist of at least 3 (three) independent commissioner). The Independent Commissioner and Independent Parties are members of the Committee without any financial, management, shareholding and/or family relationship with other Board of Commissioners members, Board of Directors, controlling shareholders, or any other form of relationship that may impact their ability to act independently.

IIF's Audit Committee members are professionals with financial and/or accounting backgrounds to ensure the quality of its performance. Thus, all prerequisites regarding the Audit Committee's independence that are in line with the regulations and GCG practices have been fulfilled.

Audit Committee Activities in 2016

Internal Activities

The following are internal activities conducted by the Audit Committee in 2016:

1. Holding routine meeting with the Internal Auditor to discuss internal control system and the progress of follow-up status from the recommendation given by the auditor.
2. Performing review of and providing input on the Company's quarterly Financial Statements before being presented to the shareholders.
3. Reviewing the performance, independency, and objectivity of the public accountant to be recommended to the Board of Commissioners for reappointing or replacing the public accountant.
4. Reviewing and providing suggestion on the compliance management framework.
5. Reviewing and giving comments on the results of the Internal Audit's involvement in the audit activities.

External Activities

Meanwhile, the external activities conducted by the Audit Committee in 2016 are as follows:

1. Holding meeting with the External Auditor before and after the publication of the Company's financial statements.
2. Holding meeting with related parties on the improvement of internal control system.

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Persentase / Percentage
Edwin Gerungan*****	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	5	5	100%
Zulkifli Zaini*****	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	3	3	100%
M. Chatib Basri****	Anggota / Member	3	2	67%
Ekoputro Adijayanto*	Anggota / Member	2	2	100%
Robert Dolk ***	Anggota / Member	2	2	100%
Hans-Juergen Hertel**	Anggota / Member	2	2	100%
Agus Kretarto	Anggota / Member	5	5	100%

* Menjabat sampai dengan 24 Maret 2016

** Menjabat sampai dengan 20 April 2016

*** Menjabat sampai dengan 16 Juni 2016

**** Menjadi anggota Komite Audit sejak 16 Juni 2016

***** Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sampai dengan 16 Juni 2016

***** Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 16 Juni 2016

* Serving until 24 March 2016

** Serving until 20 April 2016

*** Serving until 16 June 2016

**** Serving as a member of Audit Committee from 16 June 2016

***** Serving as Head of Audit Committee until 16 June 2016

***** Serving as Head of Audit Committee from 16 June 2016

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Audit

Atas tugas-tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian, pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi dan audit, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang 2016 Komite Audit telah menjalankan tugas tersebut secara baik dan profesional dan telah dijalankan dengan mengacu pada tata aturan yang berlaku.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi ("NRC") dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi terkait remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independen serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Terkait fungsi Nominasi

- Menganalisa, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur penentuan dan pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite ini memiliki tugas untuk menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Assessment of the Board of Commissioners on the Audit Committee's Performance

The Board of Commissioners assessed that the Audit Committee has carried out their duties properly and professionally in terms of monitoring activity on the control system, financial reporting, and accounting and audit policies in 2016 in compliance with the regulations in force.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee ("NRC") was established to provide recommendations on remuneration for the Board of Directors and Independent Board of Commissioners, as well as to determine general remuneration policies for the Company's employees.

Duties and Responsibilities

Under Nomination function

- Analyzing, formulating, and giving recommendations to the Board of Commissioners concerning the systems and procedures of determination and selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. This Committee is also responsible for creating performance evaluation systems for the Board of Commissioners and Board of Directors.

- Merekendasikan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam hal pemilihan, penunjukkan, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan pemegang saham, terutama apabila diperlukan perubahan Dewan Komisaris dikarenakan perubahan kepemilikan saham IIF.
- Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemilihan pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diserahkan oleh Direksi setiap tiga bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan.
- Merekendasikan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Merekendasikan calon yang akan diangkat sebagai anggota independen dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Recommending candidates for Commissioners and/or Directors to the Board of Commissioners and recommending actions on nomination, appointment, and dismissal of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners in accordance with provisions of the Shareholders' Agreement, in particular when a change in the Board of Commissioners is required due to a change in the shareholding pattern of IIF.
- Analyzing the criteria and procedures for the selection of officers at one level below the Board of Directors, analyzing their data, and monitoring its implementation in order to create a report that shall be submitted to the Board of Directors every three months or whenever change occurs.
- Recommending the number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Recommending to the Board of Commissioners the candidates that shall be appointed as independent members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

Terkait Fungsi Kompensasi/Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan IIF yang berlaku saat ini. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas untuk mengevaluasi KPI untuk Direksi yang bersifat *ex-ante* (dalam rencana bisnis tahunan IIF) dan *ex-post* (setelah tutup tahun IIF).

Merekendasikan kepada Dewan Komisaris hal-hal berikut ini:

- Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi
- Kebijakan remunerasi yang berlaku untuk pejabat eksekutif dan seluruh karyawan IIF
- Menyiapkan aturan mengenai remunerasi yang lebih spesifik jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam kebijakan remunerasi yang telah disepakati
- Merekendasikan program pensiun bagi seluruh karyawan IIF apabila ditetapkan dan merekomendasikan sistem kompensasi dan manfaat serta mekanisme penyesuaian gaji.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM yang berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan/risiko hukum IIF.

Under the Compensation/Remuneration Function, the Nomination and Remuneration Committee is obliged to evaluate the prevailing remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of IIF. In addition, the Committee shall evaluate the KPI for the Board of Directors that is in nature (in IIF's annual business plans) and ex post in nature (after the closing of each financial year of IIF).

Recommending the following to the Board of Commissioners:

- Remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Overall remuneration policies applicable to the executive officers and employees of IIF.
- Preparing remuneration policies that are more specific to accommodate matters that are not specified in the agreed remuneration policies.
- Recommending the pension plan for IIF employees, if any, and recommending the system for compensation and other benefits as well as the mechanism for salary adjustment.
- Evaluating and providing recommendation to the Board of Commissioners on employment policies and other functions in HR management that may have a significant impact on financial/legal risks to IIF.

Kewenangan

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Komite NRC memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya dari Direksi, pejabat, karyawan, serta pihak eksternal/profesional untuk menghindari keraguan, ketika pihak eksternal/profesional diperlukan, maka Komite NRC mesti berkonsultasi dan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum menunjuk pihak eksternal/profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Ketua Komite NRC dapat mengundang Direksi, pejabat eksekutif, karyawan, atau auditor independen IIF untuk menghadiri rapat Komite.
3. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Komite ini berkoordinasi dengan Presiden Direktur (CEO).

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
M. Chatib Basri	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee	Presiden Komisaris – Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Rajeev Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Marwanto Hardjowiriyono	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Kegiatan pada tahun 2016

Sepanjang 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Maret, 6 Juni, 26 September, dan 28 November 2016. Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

1. Pengajuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penetapan nominasi dan honorarium anggota Komite Audit independen.
3. Pembaharuan terhadap struktur organisasi Komite.
4. Pengajuan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Melakukan pembaharuan kontrak kepada *Executive Vice President* Richard Michael.
6. Pembahasan mengenai berakhirnya Ketentuan masa jabatan dari beberapa anggota Dewan Komisaris & Direksi.

Authority

In performing its responsibilities, the NRC Committee has the following authority:

1. Having access to obtain all required information within its responsibilities from the Board of Directors, executive officers, employees, and from external/professional parties; for the avoidance of doubt; when the presence of external/professional parties is requested, the NRC Committee must seek consultation with and request approval of IIF's Board of Commissioners prior to appointing external/professional resources to assist the Board in implementing its duties.
2. Under acknowledgment of the Board of Commissioners, the Head of the NRC Committee may invite the Board of Directors, executive officers, employees or the independent auditor of IIF to attend the Committee's meeting.
3. In implementing the above authority, the Committee coordinates with the President Director (CEO).

Composition of Nomination and Remuneration Committee

Activities in 2016

Throughout the year, the Nomination and Remuneration Committee held 4 meetings on 15 March, 6 June, 26 September, and 28 November 2016. The agenda discussed in the Nomination and Remuneration Committee consists of the following:

1. Remuneration proposal of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Determination of nomination and honorarium of members of the independent Audit Committee.
3. Renewal of the Committee's organizational structure.
4. Nomination proposal for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Renewal of contract with the Executive Vice President, Richard Michael.
6. Discussion on the provision of termination of term of office from several members of Board of Commissioners & Board of Directors.

7. Pembahasan mengenai tunjangan dan manfaat bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2017 terkait rencana bisnis dan target imbalan kerja.
8. Rencana penyusunan staf 2017.
9. Rencana suksesi dan darurat Komite Eksekutif
10. Agenda Pembahasan Triwulanan dan kompetensi.
11. Diskusi terkait efektivitas dan evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
7. Discussion on allowance and benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2017 fiscal year related to the business plan and employment benefits targets.
8. 2017 staff development plan.
9. Succession plan and emergency program of Executive Committee.
10. Quarterly discussion and competency agenda.
11. Discussion on effectiveness and evaluation of performance of the Nomination and Remuneration Committee.

Tingkat Kehadiran Rapat

Tingkat Kehadiran Rapat		Meeting Attendance Rate		
Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Kehadiran / Attendance	Percentase / Percentage
M. Chatib Basri	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee	4	4	100%
Rajeev Kannan	Anggota / Member	4	4	100%
Richard Ranken	Anggota / Member	4	4	100%
Marwanto Hardjowiriyono	Anggota / Member	4	4	100%

Ketentuan Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait urgensi tugas-tugas yang dimiliki oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, IIF memiliki kebijakan mengenai jumlah minimum kehadiran seluruh anggota komite sebesar 51%. Jumlah kuorum tersebut sangat mempengaruhi kinerja komite terutam dalam hal pengambilan keputusan.

Provision of Attendance Rate at the Nomination and Remuneration Committee

In view of the importance of the Nomination and Remuneration Committee's duties, IIF regulates that the minimum number of committee members present shall be at least 51%. The quorum significantly affects the committee's performance, especially in the decision-making process.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang 2016 sudah berjalan dengan baik. Tugas-tugas yang meliputi pemberian rekomendasi mengenai komposisi Dewan Komisaris, sistem dan prosedur pengangkatan, penentuan, pemilihan, dan pemberhentian bagi Dewan Komisaris serta kebijakan-kebijakan terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah dijalankan dengan mengacu pada tata aturan yang berlaku di IIF.

Assessment of the Board of Commissioners of the Nomination and Remuneration Committee Performance

The Board of Commissioners assessed that the Nomination and Remuneration Committee carried out its duties properly in 2016. The Committee's duties, covering provision of recommendation on the composition of the Board of Commissioners, appointment system and procedure, determination, selection and dismissal of Commissioners, as well as other policies relevant to the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been well-implemented on the basis of the prevailing regulations at IIF.

Kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi 2016

Berikut merupakan kebijakan yang telah diputuskan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang 2016:

1. Mengangkat kembali Bapak Kretarto sebagai anggota Komite Audit untuk periode jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan jumlah honorarium yang sama.

Nomination and Remuneration Committee Policy of 2016

The following are the policies decided by the Nomination and Remuneration Committee throughout 2016:

1. Appointing Mr. Kretarto as a member of the Audit Committee for a term of office of the following 3 (three) years with the same amount of honorarium.

2. Menyetujui pembagian tim investasi menjadi 2 (dua) kelompok. Demi kepraktisan, fungsi horizontal seperti sindikasi dan transaksi hukum akan melaporkan ke salah satu CIO yaitu CIO-A (Bapak Bp. Harold Tjiptadjaja).
3. Terkait beberapa anggota Dewan Komisaris yang akan mengakhiri masa tugasnya pada saat RUPST 2016. Pemegang Saham memutuskan bahwa:
 - a. Bapak Marwanto Hardjowiryo dan Bapak Robert Pakpahan akan mewakili SMI di Dewan Komisaris,
 - b. Bapak Ekoputro Adijayanto mengakhiri jabatannya sebagai Dewan Komisaris IIF.
4. Ibu Indrawati resmi ditunjuk sebagai CFO Perusahaan dan Bapak Zulkifli Zaini resmi diangkat sebagai Komite Audit independen.
5. Melakukan perekrutan untuk posisi *Vice President S&E* paling lambat akhir 2016.
6. Memberi rekomendasi untuk mengangkat Bapak Zulkifli Zaini sebagai anggota Komite Audit IIF.
7. Komite sepakat bahwa hanya Komisaris anggota NRC yang berhak menghadiri rapat NRC.
8. Komite memutuskan untuk memperpanjang kontrak Bapak Edwin Gerungan dan Bapak Harold Tjiptadjaja untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.
9. Komite telah mengusulkan pengangkatan kembali Robert Dolk selaku Komisaris perseroan namun demikian kewenangan tetap berada di ADB selaku pemegang saham. Hal ini dimasukkan ke dalam rencana anggaran tahun 2017 untuk disetujui pemegang saham.
10. Komite menyetujui usulan penyesuaian manfaat dari Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan tetapi tidak untuk proposal untuk dana pensiun dan pesangon Direksi dan karyawan. Hal ini dimuat dalam rencana anggaran tahun 2017 untuk disetujui pemegang saham.
11. Komite memberikan rekomendasi mengenai patokan dalam membentuk rencana suksesi dan darurat untuk Komite Eksekutif Perusahaan.
12. Komite menerima dan menyetujui target pencapaian KPI 2016.
2. Approving categorization of the investment team into 2 (two) groups. For practical purposes, the horizontal function such as syndication and legal transaction team will report to one of the CIOs, namely CIO-A (Mr. Harold Tjiptadjaja).
3. In relation to several members of the Board of Commissioners whose tenure would end at the 2016 AGM, Shareholders resolved that:
 - a. Mr. Marwanto Hardjowiryo and Mr. Robert Pakpahan will represent SMI at the Board of Commissioners,
 - b. Mr. Ekoputro Adijayanto ended his tenure as IIF's Board of Commissioners.
4. Mrs. Indrawati was officially appointed as CFO of the Company and Mr. Zulkifli Zaini was officially appointed as independent Audit Committee.
5. Conducting recruitment for the position of Vice President of S&E no later than the end of 2016.
6. Providing recommendation for appointing Mr. Zulkifli Zaini as a member of IIF's Audit Committee.
7. The Committee agrees that only Commissioners who are NRC members that are authorized to attend NRC meetings.
8. The Committee decide to extend the contract of Mr. Edwin Gerungan and Mr. Harold Tjiptadjaja for a period of the following 3 (three) years.
9. The Committee has proposed to reappoint Robert Dolk as Commissioner of the Company. However the Company fully understand that ADB retain the right to nominate its representative in the Company.
10. The Committee approved the proposal to adjust the benefits of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the employees, but not the proposal for a pension fund for the Board of Directors and the employees. This is incorporated into the 2017 budget plan to be approved by the Shareholders.
11. The Committee provided recommendations on the benchmark in forming a succession plan and emergency programs for the Company's Executive Committee.
12. The Committee received and approved the targets for 2016 KPI achievements.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS

Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris (ROC) memiliki tanggung jawab utama memberikan dukungan atas pengembangan dan pengawasan program manajemen risiko IIF, atas pengenalan terhadap kecukupan pengendalian risiko atas aset dan kewajiban Perusahaan, serta atas penyediaan rekomendasi tentang mitigasi risiko.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Risk Oversight Committee (ROC) of the Board of Commissioners is primarily responsible for supporting the development and oversight of IIF's risk management program, the introduction of adequate risk controls for the Company's assets and liabilities, and the provision of recommendations on risk mitigations.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab ROC terkait pengaturan manajemen risiko antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko sosial & lingkungan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris. Secara rutin mengevaluasi dan menganalisa kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait perbaikan yang diperlukan dalam penyempurnaan fungsi manajemen risiko;
2. Mengusulkan perubahan yang dirasa perlu terkait kebijakan manajemen risiko agar sesuai dengan perubahan lingkungan usaha yang terjadi;
3. Menentukan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Direksi;
4. Memberikan masukan dan tanggapan terhadap isu-isu yang diangkat oleh Komite Manajemen Risiko Direksi;
5. Meninjau laporan pengelolaan risiko triwulan yang disajikan oleh Tim Manajemen Risiko IIF sebelum diajukan ke pemegang saham;
6. Memberikan saran dan/atau rekomendasi (apabila ada) ke Tim Manajemen Risiko IIF untuk disertakan dalam laporan pengelolaan risiko triwulan berikutnya;
7. Meninjau kerangka parameter atau register manajemen risiko dan memberikan persetujuan untuk setiap perubahan yang diusulkan terhadap parameter atau register tersebut; dan
8. Memberikan informasi tentang hal-hal lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan usaha Perusahaan.

Komposisi ROC**Susunan anggota ROC periode 1 Januari 2016 – 8 Juni 2016**

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Edwin Gerungan	Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris / Head of the Risk Oversight Committee	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Ekoputro Adijayanto*	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

*) Berakhir masa jabatan pada 24 Maret 2016

Duties and Responsibilities

The ROC's duties and responsibilities related to the risk management arrangements are, among others:

1. To evaluate the risk management policy for credit, market, operational and social & environmental risks to be approved by the Board of Commissioners. Regularly, the ROC evaluates and analyzes the adequacy of risk management policies as well as giving opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners concerning the necessary improvement to boost the risk management function;
2. To propose necessary modifications to the above-mentioned risk management policies to suit the changing business environment;
3. To define the roles and responsibilities of the Risk Management Committee of the Board of Directors;
4. To provide input and opinion on the issues raised by the Risk Management Committee of the Board of Directors;
5. To review the quarterly risk management report prepared by IIF's Risk Management Team prior to submission to IIF's Shareholders;
6. To provide suggestions and/or recommendations (if any) to IIF's Risk Management Team to be incorporated in the subsequent quarterly risk management report;
7. To review the framework of risk management parameters or registers and give approval for any proposed changes to such parameters or registers; and
8. To provide information on any other matter deemed fit by the Board of Commissioners in the normal course of business.

ROC Composition**Membership of ROC as of 1 January 2016 – 8 June 2016**

*) end of Term of service on 24 March 2016

Membership of ROC as of June 2016 – present**Susunan anggota ROC periode 9 Juni 2016 – saat ini****Membership of ROC as of June 2016 – present**

Nama / Name	Posisi / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Edwin Gerungan	Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris / Head of the Risk Oversight Committee	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Robert Pakpahan*	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

*) Diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan pada 24 Maret 2016

*) Appointed as the Company's commissioner on 24 March 2016

Tingkat Kehadiran Rapat**Meeting Attendance Rate**

Nama / Name	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Edwin Gerungan	4	4	100%
Ekoputro Adijayanto*	1	1	100%
Robert Pakpahan**	3	1	33%
Hans-Juergen Hertel	4	4	100%
Robert Olivier Dolk	4	4	100%

*) Berakhir masa jabatan pada 24 Maret 2016

*) end of Term of service on 24 March 2016

*) Diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan pada 24 Maret 2016

*) Appointed as the Company's Commissioner on 24 March 2016

KOMITE INVESTASI – DEWAN KOMISARIS

Komite Investasi – Dewan Komisaris (BOC-IC) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proposal investasi dan portofolio IIF. Komite Investasi – Dewan Komisaris Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Investasi – Dewan Komisaris tanggal 13 Juni 2012.

BOARD OF COMMISSIONERS – INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Commissioners – Investment Committee (BOC-IC) was established to carry out supervisory and consultation functions, and particularly to focus on investment proposals and IIF's business portfolio. The BOC-IC of the Company was set up based on the Circular Decision of the Company's Board of Commissioners ref. No. 001/IIF/BOC-RES/III/2013 dated March 27 2013. The Company established the Board of Commissioners – Investment Committee Charter on 13 June 2012.

Piagam Komite Investasi – Dewan Komisaris**Charter of Board of Commissioners –****Investment Committee**

BOC-IC memiliki piagam yang mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, dan kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

The BOC-IC has a charter that regulates all matters pertaining to authority, structure and qualification, responsibilities, meetings, reporting, discretion and so on.

Tugas dan Tanggung Jawab**Duties and Responsibilities**

Tugas utama BOC-IC IIF, antara lain adalah:

- Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari BOC
- Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas, dan treasury;

- To provide opinions and/or recommendations in respect of provision of credit/investment for Board of Commissioners' final approval.
- To evaluate and provide evaluation reports pertaining to the Company's investment portfolio performance, including but not limited to loans, equity and treasury investments;

- Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dan memberikan masukan terhadap perumusan/revisinya;
- Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perusahaan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BOC kepada Komite.

- To review the Company's credit and investment policies and provide input for necessary formulation and revision;
- To perform additional responsibilities relating to the Company's investment activities, policies or other matters that are mandated to the Committee by the Board of Commissioners.

Susunan Komite Investasi

Komite Investasi IIF untuk tahun buku 2016 terdiri dari:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Mohamad Chatib Basri	Ketua / Head	Presiden Komisaris - Komisaris Independen / President Commissioner – Independent Commissioner
Edwin Gerungan	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Zulkifli Zaini	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Robert Pakpahan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Marwanto Harjowiriyono	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner

Tugas dan Kegiatan Komite Investasi 2016

Sepanjang 2016, Komite Investasi Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatannya yaitu:

- Melaksanakan 5 (lima) kali rapat BoC IC yang dihadiri oleh anggota BoC dan Direksi.
- Melaksanakan 6 (enam) kali rapat teleconference yang diikuti oleh anggota BoC IC dan Direksi
- Melaksanakan 1 (satu) kali kunjungan kerja terhadap proyek yang akan dibiayai.

Composition of Investment Committee

IIF's Investment Committee for 2016 fiscal year comprises:

Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company

Duties and Activities of 2016 Investment Committee in 2016

Throughout 2016, the Investment Committee of the Board of Commissioners has conducted several duties and activities:

- Conducted 5 (five) meetings of BoC IC attended by members of BoC and BoD.
- Conducted 6 (six) meetings of teleconference meetings attended by members of BoC IC and BoD.
- Conducted 1 (one) visit to project site for project to be financed.

Tingkat Kehadiran

Sepanjang 2016, Komite Investasi Dewan Komisaris telah menyelenggarakan sebanyak 11 rapat. Berikut adalah tingkat kehadiran Ketua dan anggota Komite dalam rapat.

Meeting Attendance Rate

Throughout 2016, the Investment Committee of Board of Commissioners has conducted 11 meetings. The following is the attendance record of the Head of Investment Committee and other members of Committee.

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Mohamad Chatib Basri	Ketua / Head	11	11	100%
Edwin Gerungan	Anggota / Member	11	7	64%
Zulkifli Zaini	Anggota / Member	11	7	64%
Robert Pakpahan	Anggota / Member	11	8	73%
Marwanto Harjowiriyono	Anggota / Member	11	8	73%
Hans-Juergen Hertel	Anggota / Member	11	10	91%

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Kehadiran / Attendance	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate
Robert Olivier Dolk	Anggota / Member	11	10	91%
Rajeev Veeravalli Kannan	Anggota / Member	11	11	100%
Richard Lyon Ranken	Anggota / Member	11	10	91%

DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugasnya mencapai tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal apapun, dan memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengikat Perusahaan dan untuk melakukan setiap tindakan yang terkait dengan urusan pengelolaan Perusahaan yang baik atau kepemilikan dan pelepasan properti perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi IIF adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Umum

Direksi IIF secara kolektif maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan memimpin Perusahaan serta memelihara dan mengelola aset IIF sesuai dengan kepentingan IIF.

Spesifik

Tanggung Jawab terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan:

- Para anggota Direksi wajib setia dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Setiap anggota Direksi secara individual bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya;
- Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab terkait dengan hubungan antara Komisaris dan Pemegang Saham

- Direksi bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar;

BOARD OF DIRECTORS

As stipulated in the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for the management of the Company in order to achieve its goals. In conducting its duties, the Board of Directors shall always represent the Company, both inside and outside the court, and have the power and authority to bind the Company, and perform actions related to the proper management of the Company or related to asset ownership or asset disposal of the Company. Duties and responsibilities of IIF's Board of Directors are as follows:

Duties and Responsibilities of Board of Directors

General

Collectively or individually, the Board of Directors of IIF is responsible for coordinating, monitoring and leading the Company, as well as maintaining and managing its assets according to the Company's interests.

Specific

Responsibilities related to compliance with laws and regulations:

- Members of the Board of Directors must be loyal to the Company and be responsible for performing their duties in accordance with the prevailing regulations;
- Individually, each member of Board of Directors shall be held responsible for their own mistakes or negligence in carrying out their duties;
- Members of the Board of Directors are responsible for enforcing compliance in the Company and ensuring that all obligations have been fulfilled pursuant to the Articles of Association and Annual GMS based on the prevailing regulations.

Responsibilities related to the Relationship between Commissioners and Shareholders

- The Board of Directors is responsible for ensuring the implementation of GMS' resolutions, Board of Commissioners' advice and provisions in the Articles of Association;

2. Direksi bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;
3. Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Komisaris dan Pemegang Saham;
4. Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
5. Direksi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
6. Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham di tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik dalam IIF maupun di perusahaan lainnya;
7. Direksi bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
8. Direksi harus menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan IIF;
9. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan Perusahaan;
10. Direksi bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;
11. Direksi bertanggung jawab untuk menentukan remunerasi untuk manajemen senior dan karyawan kunci, dan menjaga konsistensi remunerasi ini agar sesuai dengan budaya, tujuan, strategi, serta tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF dan lingkungan usaha;
12. Direksi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemilik kepentingan dari IIF.
2. The Board of Directors is responsible for providing information to the Board of Commissioners and Shareholders and managing communications with the Shareholders, Board of Commissioners and other stakeholders, including information on the duties and responsibilities of each Director;
3. The Board of Directors has a responsibility to the Shareholders and gives feedback to the advice from the Board of Commissioners and Shareholders;
4. The Board of Directors is responsible for preparing periodical reports in a timely manner and in accordance with the applicable regulations, as well as other reports as required by the Shareholders;
5. The Board of Directors is obliged to convene an annual general meeting of shareholders based on the written request from one or more shareholders with valid voting rights and who represents at the very least 1/10 (one-tenths) of issued shares;
6. The Board of Directors is obliged to prepare and maintain a Shareholders Register and Special List containing share ownership of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their families, both in IIF and other companies;
7. The Board of Directors has a responsibility to consult with the Board of Commissioners regarding approval for loans above the maximum limit;
8. The Board of Directors must determine the vision, mission values and corporate culture of IIF;
9. The Board of Directors is responsible for maintaining the operations of IIF so as to be in line with its business lines and goals;
10. The Board of Directors is responsible for preparing work plan, annual budget plan and other plans relevant to IIF's business;
11. The Board of Directors is responsible for determining the remuneration amount given to the senior management and executive officers, and keeping the remuneration consistent with the Company's culture, goals strategies and responsibilities as stated in the prevailing regulations, IIF's Articles of Association and in line with the business environment;
12. The Board of Directors is responsible for keeping all interests of IIF's stakeholders in balance.

Tanggung jawab terkait Pelaporan Keuangan

1. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku;
2. Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, *monitoring* dan pengelolaan;
3. Direksi bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, dan akuntansi untuk laporan tersebut di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Tanggung Jawab terkait dengan Manajemen Risiko dan Pengendalian

Direksi bertanggung jawab untuk menjaga proses manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko;
2. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dieksekusi dalam pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan;
3. Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses manajemen dalam menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan kepatuhan;
4. Memastikan keberadaan atas sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
 - keandalan dan integritas dari informasi;
 - kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur, dan peraturan;
 - pemeliharaan aset Perusahaan;
 - penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
 - pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
5. Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perusahaan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan laporan tahunan.
 - Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan manajemen.

Responsibilities related to Financial Reporting

1. The Board of Directors is responsible for IIF's bookkeeping and its administration in line with the applicable practices;
2. The Board of Directors is responsible for developing an accounting system that is in accordance with the Indonesian Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding administration, archiving, monitoring and management activities;
3. The Board of Directors is responsible for preparing the Annual Report, including Financial Statements and accounting procedure for the reports, for the Annual General Meeting of Shareholders.

Responsibilities related to Risk Management and Control

The Board of Directors is responsible for maintaining the risk management process, namely:

1. Ensuring that the Company has a proper and systematic process to identify, measure and control risks;
2. Ensuring that the proper system and processes have been well executed in monitoring and reporting the main risk faced by the Company;
3. Monitoring and evaluating the management process and assessing the adequacy of risk management and internal control systems, financial reporting and compliance procedures;
4. Ensuring the availability of an effective control system to ensure:
 - the information reliability and integrity;
 - the compliance with prevailing policies, procedures, plans and regulations;
 - the Company's asset maintenance;
 - the economic and efficient use of resources;
 - the achievement of operational goals that have been set.
5. Conducting annual evaluation to prepare a report to the public on the Company's internal controls in order to ensure that all essential aspects of internal controls have been considered and assessed up to the date of annual report approval.
- The Board of Directors is responsible for building a clear organization structure, duties and responsibilities, including the appointment of management.

- Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan secara efektif hasil audit baik dari auditor internal maupun eksternal.

Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab fungsional untuk menjalankan bisnis IIF sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Presiden Direktur

1. Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan, dan anggaran IIF dan memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham, memberikan arah kepada IIF, Direksi dan departemen untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Membangun, menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan, yang mencakup kebijakan, prosedur dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab (*Chinese Wall*) untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku berjalan secara efektif dan efisien.
3. Mengembangkan dan mengelola bisnis dan hubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya, bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya dan media, dan membangun merek dagang IIF dalam rangka untuk membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan peraturan, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
4. Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasehat proyek strategis dan mengatur pendanaan atas nama klien, atas dasar produk *fee-based* dan jasa, dalam rangka menciptakan dan menumbuh kembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur untuk IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;
5. Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang cocok untuk kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), dan menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial, dengan mempertimbangkan perspektif investor, dalam rangka meningkatkan investasi PPP di infrastruktur Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan;

- The Board of Directors is obliged to effectively utilize the audit results from both internal and external auditors for the sake of the Company.

Each member of the Board of Directors has functional responsibilities to manage IIF's business as listed below:

President Director

1. To establish and execute IIF's vision, strategies, annual plans, goals and budgets, while ensuring alignment with and support from the Board of Commissioners and the Shareholders, and to provide direction to the Company, the Board of Directors and all departments in order to sustain short and long-term profitability;
2. To effectively establish, determine, implement and coordinate the Company's governance structure and framework, covering policies, procedures, and principles of segregation between authority and responsibility (Chinese Walls) to ensure an effective and efficient implementation of Company's strategies and annual plans, as well as compliance with policies and prevailing regulations;
3. To develop and oversee the Company's business and relationship with other stakeholders and to act as the official representative of IIF for other stakeholders and media while building IIF's brand and public image in order to establish a beneficial and strong infrastructure financing business;
4. To ensure IIF's creditworthy project portfolio grows sustainably within the parameters set by the regulatory landscape and policies in addition to managing fee-based products and advisory services and funding arrangements on behalf of IIF's clients;
5. To ensure the development of a better product that is suitable for Indonesia's financing market, to ensure access to long-term funds, and to provide fund and non-fund-based products for creditworthy infrastructure projects by considering investors' perspectives in order to enhance participation in Indonesia's PPP market in a profitable and sustainable manner;

6. Memastikan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis, untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;
7. Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta Laporan Keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien dan memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
8. Memastikan integritas, efektivitas, dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;
9. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan *monitoring* dan pelaporan infrastruktur IIF serta pengawasan, pelaporan dan menawarkan nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio, dalam rangka untuk memperoleh informasi yang benar untuk melakukan tindakan yang tepat dan memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perusahaan;
10. Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk di dalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara Penasehat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.
6. To ensure an integrated risk management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organization by taking into account risk parameters in making business decisions, in order to have a healthy portfolio of infrastructure projects and investments using the agreed risk parameters;
7. To ensure an adequate planning and control cycle and maintain the integrity of administration and accounts, treasury operations and tax planning that is effective and efficient, as well as preparing necessary interim and statutory financial statements in order to lead the organization in a financially effective and efficient manner that will provide the Board of Directors, Board of Commissioners and stakeholders with insights into the Company's financial position and performance;
8. To ensure that the Company's short and long-term business objectives are achieved in an effective and efficient manner through the supporting functions such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications and Procurement;
9. To develop and implement the Company's monitoring and reporting systems to give assistance to the management in carrying out business activities and portfolio management, and to secure access to information in order to take calculated action while remaining compliant with reporting requirements; and;
10. To develop and lead an effective team, ensure a well-structured organization, governance and processes (including any Chinese Walls required between Advisory and Investment), and develop and promote the right culture and core values to execute strategic plans and reach the Company's objectives.

Piagam Kerja Direksi

Direksi IIF memiliki piagam kerja (*charter*) yang memuat tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta aturan pola hubungan manajerial antara organ-organ terkait dalam membantu Direksi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

Board of Directors Charter

IIF's Board of Directors has a charter that contains the scope of duties and responsibilities as well as managerial relationship among the related organs to support the Board of Directors in performing operational activities of the Company.

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2016, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 29 kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarso	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO*	3	3	100%
Arisudono Soerono	Presiden Direktur & CEO / President Director & CEO**	29	29	100%
Indrawati Darmawan	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO****	29	20	68,9%
Harold Tjiptadjaja	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO	29	27	93,1%
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO***	29	26	89,6%
Wito Krisnahadi	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO	29	29	100%
Irman Boyle	Executive Vice President/ Advisory Group Executive Vice President / Advisory	29	29	100%

* Mejabat sebagai Presiden Direktur sampai dengan 24 Maret 2016

** Mejabat sebagai Presiden Direktur sejak 24 Maret 2016

*** Mejabat sebagai Direktur sejak 8 Januari 2016

**** Mejabat sebagai Direktur sejak 9 Juni 2016

Meeting Attendance Rate

During 2016, the Board of Directors held 29 meetings with the following details:

* Served as President Director until 24 March 2016

** Served as President Director since 24 March 2016

*** Served as Director since 8 January 2016

**** Served as Director since 9 June 2016

Program Pelatihan dan Pengembangan Direksi

Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Direksi dalam menghadapi dinamika dan perkembangan dunia usaha, Perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan dan kegiatan program perkembangan Direksi. Sepanjang 2016, program pelatihan dan pengembangan Direksi yang diikuti oleh masing-masing Direksi antara lain:

Board of Directors Training and Development Program

To improve the capacity and capability of the Board of Directors in dealing with the dynamics and development of the business environment, the Company has established a policy to provide facilities in the form of training and development programs for the Board of Directors. The following are the training and development programs attended by each member of the Board of Directors:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema Pelatihan / Training Subject	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat / Venue
Arisudono Soerono	Presiden Direktur President Director	<i>Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>	24 Mei 2016 - 25 Mei 2016 24 May 2016 - 25 May 2016	Indonesia
		Sosialisasi PMK No. 88 / Socialization of PMK No. 88	12 Mei 2016 12 May 2016	Indonesia (Jakarta)
		<i>Risk Management in Banking</i>	3 Oktober 2016 - 7 Oktober 2016 3 October 2016 - 7 October 2016	Perancis France
		<i>Team Building</i>	20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016 20 October 2016 - 22 October 2016	Indonesia
Harold Tjiptadjaja	Direktur Pelaksana/ CIO Managing Director/CIO	<i>Asia Pacific Energy & Infrastructure finance Forum</i>	2 Maret 2016 - 4 Maret 2016 2 March 2016 - 4 March 2016	Singapura Singapore
		<i>Project and Infrastructure Financing</i>	21 April 2016 21 April 2016	Indonesia
		<i>Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>	24 Mei 2016 - 25 Mei 2016 24 May 2016 - 25 May 2016	Indonesia
		<i>Global Challenges in Transport Series - Governance, Policy & Delivery</i>	27 Juni 2016 - 1 Juli 2016 27 June 2016 - 1 July 2016	Inggris United Kingdom

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema Pelatihan / Training Subject	Tanggal Pelatihan / Date of Training	Tempat / Venue
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana/ CIO Managing Director/CIO	<i>High Performance Communication</i>	26 Oktober 2016 26 October 2016	Indonesia
		<i>Team Building</i>	20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016 20 October 2016 - 22 October 2016	Indonesia
		<i>Renewable Energy</i>	22 Februari 2016 - 25 February 2016 22 February 2016 - 25 February 2016	Singapura Singapore
		<i>Workshop Project and Infrastructure Financing</i>	21 April 2016 21 April 2016	Indonesia
	Indrawati Darmawan	<i>Indonesia Infrastructure Finance Conference</i>	24 Mei 2016 - 25 Mei 2016 24 May 2016 - 25 May 2016	Indonesia
		<i>Team Building</i>	20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016 20 October 2016 - 22 October 2016	Indonesia
		<i>Bloomberg Nation Builders Asia</i>	1 November 2016 - 2 November 2016 1 November 2016 - 2 November 2016	Singapura Singapore
Wito Krisnahadi	Direktur Pelaksana/ CFO Managing Director/CFO	<i>Capital Market for Infrastructure Investment</i>	29 Juni 2016 - 30 Juni 2016 29 June 2016 - 29 June 2016	Filipina The Philippines
		<i>Team Building</i>	20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016 20 October 2016 - 22 October 2016	Indonesia
Indrawati Darmawan	Direktur Pelaksana/ CRO Managing Director/CRO	<i>S&E Training - IFC</i>	1 Juni 2016 - 3 Juni 2016 1 June 2016 - 3 June 2016	Hong Kong
		<i>S&E Training - ADB</i>	26 Juli 2016 26 July 2016	Indonesia
		<i>Essentials of Business Valuation</i>	6 Oktober 2016 - 7 Oktober 2016 6 October 2016 - 7 October 2016	Indonesia
		<i>RENAC Green Banking Delegation</i>	10 Oktober 2016 - 14 Oktober 2016 10 October 2016 - 14 October 2016	Jerman Germany
		<i>Team Building</i>	20 Oktober 2016 - 22 Oktober 2016 20 October 2016 - 22 October 2016	Indonesia
		<i>High Performance Communication</i>	26 Oktober 2016 26 October 26, 2016	Indonesia
		<i>Market Innovation For Sustainable Finance</i>	1 Desember 2016 - 2 Desember 2016 1 December 2016 - 2 December 2016	Indonesia

Dana yang dikeluarkan dalam rangka pelatihan dan pengembangan Direksi sepanjang 2016 sebesar Rp665.850.227 dengan rincian per masing-masing Direksi yaitu:

Presiden Direktur & CEO	: Rp265.887.150
Direktur Pelaksana & CIO	: Rp167.447.656
Direktur Pelaksana & CFO	: Rp6.665.551
Direktur pelaksana & CRO	: Rp161.412.370
Executive Vice President /Advisory	: Rp64.447.500

Fund disbursed for training and development programs of the Board of Directors throughout 2016 amounted to Rp665,850,227 with the following details:

President Director & CEO	: Rp265,887,150
Managing Director & CIO	: Rp167,447,656
Managing Director & CFO	: Rp6,665,551
Managing Director & CRO	: Rp161,412,370
Executive Vice President/Advisory	: Rp64,447,500

Program Sosialisasi Direksi Baru

Dalam hal terdapat Direksi baru dan/atau perubahan komposisi Direksi, IIF memiliki program sosialisasi berupa pemaparan mengenai ruang lingkup Perusahaan secara menyeluruh serta informasi terkait jabatan yang akan diemban. Pada 2016, program sosialisasi dilakukan kepada Bapak Arisudono Soerono selaku Presiden Direktur menggantikan Bapak Sukatmo Padmosukarso. Selain itu sosialisasi juga diberikan kepada Ibu Indrawati Darmawan dan Hilda Savitri masing-masing sebagai Direktur Pelaksana CFO dan CIO.

Selain memberikan pemaparan mengenai ruang lingkup Perusahaan, guna menguatkan koordinasi yang baik antar Direksi yang ada, pada tanggal 20 Oktober 2016 IIF mengadakan *Team Building* yang dikhususkan untuk seluruh jajaran Direksi IIF.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi IIF. Ketentuan mengenai pemberian remunerasi bagi keduanya dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Adapun besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit Perseroan tahun 2016.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel berikut memuat informasi yang menjelaskan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dengan Pemegang Saham Perusahaan:

Nama / Name	Perseroan	SMI	ADM	IFC	DEG	SMBC
Mohammad Chatib Basri	PK / KI	-	-	-	-	-
Zulkifli Zaini	KI	-	-	-	-	-
Edwin Gerungan	KI	-	-	-	-	-
Robert Pakpahan	K	-	-	-	-	-
Robert Olivier Dolk	K	-	-	-	-	-
Hans-Juergen Hertel	K	-	-	-	-	-
Marwanto Harjowiriyono	K	-	-	-	-	-
Rajeev Veeravalli Kannan	K	-	-	-	-	-
Richard Lyon Ranken	K	-	-	-	-	-
Arisudono Soerono	PD	-	-	-	-	-
Harold Jonathan Dharma Tiptadjaja	D	-	-	-	-	-
Wito Krisnahadi	D	-	-	-	-	-
Hilda Savitri	D	-	-	-	-	-
Indrawati Darmawan	D	-	-	-	-	-

Dissemination Program for New Directors

IIF has put in place an induction program for new Directors where they will be given an introduction or explanation about the complete scope of business of the Company and information related to their new position. In 2016, this induction program was conducted for Mr. Arisudono Soerono as the President Director to replace Mr. Sukatmo Padmosukarso, as well as for Mrs. Indrawati Darmawan and Hilda Savitri as the Managing Directors and CFO and CIO, respectively.

In addition to providing explanation about the Company's scope of business, IIF also held a Team Building event designated only for the Board of Directors on 20 October 2016, in order to strengthen good coordination between members of the Board of Directors.

Remuneration Policy for Board of Directors

The Company has already established a remuneration policy for IIF's Board of Commissioners and Board of Directors, the provision of which are discussed and determined at the Annual General Meeting of Shareholders. The amount of remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Audited Financial Statements of the Company in 2016.

AFFILIATION BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The following table describes information on the affiliation among the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders of the Company:

Excomm become Speaker in many events during 2016

Nama / Name	Tanggal / Date	Agenda
Sukatmo	26 Januari 2016 / 26 January 2016	Mandiri Investment Forum 2016 (Jakarta)
Padmosukarso*	10 Februari 2016 / 10 February 2016	KPPPIP Diskusi Panel Infrastruktur Outlook 2016 -2017 (Jakarta) KPPPIP – Discussion Panel on Infrastructure Outlook of 2016-2017
	22 Maret 2016 / 22 March 2016	Euromoney - Indonesia Investment Forum 2016 (Jakarta)
Arisudono Soerono	21 April 2016 / 21 April 2016	Sharing Session with Asbanda - Asbanda Workshop (Jakarta)
	24 Mei 2016 / 24 May 2016	Euromoney 2nd Annual - Indonesia Infrastructure Forum (IIF) (Jakarta)
	23 November 2016 / 23 November 2016	2nd ASEAN Insurance Summit (Yogyakarta)
	24 November 2016 / 24 November 2016	Indonesia PPP Day (Jakarta)
Indrawati Darmawan	1 November 2016 / 1 November 2016	Focus Group Discussion, OJK "Pengembangan Green Bond di Indonesia (Jakarta)
	5 Oktober 2016 / 5 October 2016	Narasumber OJK "Diskusi terkait insentif yang diperlukan dalam pengembangan Green Bond" (Jakarta) OJK Keynote Speaker "Discussion on Incentives required for Green Bond development" (Jakarta)
Harold Tjiptadjaja	3 Maret 2016 / 3 March 2016	Asia Pacific Energy & Infrastructure Finance Forum 2016 (Singapore)
	5 April 2016 / 5 April 2016	Capital Markets as an Infrastructure Funding Alternative (Hermawan Juniarto)
	14 April 2016 / 14 April 2016	AVCJ Indonesia
	21 April 2016 / 21 April 2016	ASBANDA Workshop
	24 Mei 2016 / 24 May 2016	2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Forum
	25 Mei 2016 / 25 May 2016	2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Forum
	31 Mei 2016 / 25 May 2016	Speakers' Corner
	8 September 2016 / 8 September 2016	Canada ASEAN Business Forum
	7 September 2016 / 7 September 2016	3rd Canada Asean Business Forum
	8 September 2016 / 8 September 2016	3rd Canada Asean Business Forum
	21 September 2016 / 21 September 2016	Canada Breakfast Roundtable Discussion
	19 Oktober 2016 / 19 October 2016	7th Annual Indonesia Power and Electricity Week 2016
Hilda Savitri	13 April 2016 / 13 April 2016	Power & Electricity World Asia (Jakarta)
	14 April 2016 / 14 April 2016	Power & Electricity World Asia (Jakarta)
	11 Mei 2016 / 11 April 2016	Wealth & Wisdom Bank Permata
	19 Mei 2016 / 19 April 2016	6th Indonesia Electricity & IPP Conference
	24 Mei 2016 / 24 April 2016	2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Forum
	2 November 2016 / 2 November 2016	Bloomberg Nation Builders Asia
	23 November 2016 / 23 November 2016	Asia Power & Electricity Convention 2016
	24 November 2016 / 24 November 2016	Asia Power & Electricity Convention 2016
Wito Krisnahadi	13 Mei 2016 / 13 May 2016	Bi-Monthly BARa Sharing Session
	25 Mei 2016 / 25 May 2016	2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Forum
	29 September 2016 / 29 September 2016	Workshop on Safeguards & Public Private Partnerships for Infrastructure Development in Asia

Nama / Name	Tanggal / Date	Agenda
Irman Boyle	4 April 2016 / 4 April 2016	Marcus Evans 2nd Annual Infrastructure project financing (Singapore)
	6 April 2016 / 6 April 2016	Marcus Evans 2nd Annual Infrastructure project financing (Singapore)
	21 April 2016 / 21 April 2016	Sharing Session ASBANDA (Jakarta)
	13 Mei 2016 / 13 May 2016	Sharing Session BaRA (Jakarta)
	20 April 2016 / 20 April 2016	Workshop Kemenpupera (Bandung)
	5 Oktober 2016 / 5 October 2016	3rd ALB Indonesia in-house legal Sumit (Jakarta)
	24 November 2016 / 24 November 2016	Moderator - Indonesia PPP Day (Jakarta)
	11 November 2016 / 11 November 2016	Focus Group Discussion - "Pelabuhan International HUB Kuala Tanjung (Jakarta) Focus Group Discussion - " Kuala Tanjung International HUB Port (Jakarta)

* Menjabat sebagai Presiden Direktur sampai 24 Maret 2016

* Serving as a President Director until 24 March 2016

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE INVESTASI-DIREKSI

Komite Investasi-Direksi (BOD-IC) memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi untuk Perseroan yang direkomendasikan kepada Komite Investasi Dewan Komisaris (BOC-IC).

Pedoman Kerja - BOD-IC

BOD-IC memiliki piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal terkait peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur dan kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama BOD-IC Perseroan meliputi:

1. Mengkaji, menyetujui dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan disetujui oleh BOD-IC;
2. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BOC-IC untuk tujuan pengkajian proyek oleh BOD-IC;
3. Berkoordinasi dengan Komite Aset dan kewajiban dari BOD (ALCO) untuk memastikan kecukupan pendanaan untuk kredit/investasi yang diusulkan dan bahwa dana tersebut sesuai dengan kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit dan investasi Perseroan dari waktu ke waktu jika dianggap diperlukan;
5. Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi ekuitas dan semua pinjaman setidaknya setahun

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS – INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Directors – Investment Committee (BOD-IC) was established to review, consider, and decide all recommended investment proposals to be further submitted to the BOC-IC for assessment.

Charter of Board of Directors – Investment Committee

The BOD-IC has a charter that regulates all matters concerning its role and responsibilities, authority, structure and qualification, meetings, reporting, discretion, etc.

Duties and Responsibilities

The main duties of BOD-IC are as follows:

1. To review, approve and recommend investment proposals to be submitted to the BOC-IC for further review and approval;
2. To provide information, assistance and/or clarification that can provide further insights to the BOC-IC in reviewing proposed projects;
3. To coordinate with the Assets & Liabilities Committee of the Board of Directors (ALCO) to ensure funding adequacy for proposed credits/investments based on ALCO's credit limitation;
4. To periodically review and adjust credit and investment policies at any given time if necessary;
5. To review and monitor the implementation of all investments and loans at least once per year, and to

sekali, dan meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BOC-IC.

Susunan Komite Investasi-Direksi 2016

Susunan Komite Investasi Direksi untuk tahun buku 2016, terdiri dari:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan Di Perusahaan / Position in the Company
Sukatmo Padmosukarso*	Ketua / Head	Presiden Direktur / President Director
Arisudono Soerono	Ketua / Head	Presiden Direktur / President Director
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CFO / Managing Director & CFO
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CRO / Managing Director & CRO
Hilda Savitri **	Anggota / Member	Direktur Pelaksana & CIO / Managing Director & CIO

*) Berakhir masa jabatan pada RUPS tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi Direksi Perseroan pada 8 Januari 2016

increase the frequency of such reviews when required, as well as to submit the report on reviewing and monitoring activities to the BOC-IC.

Compositon of Board of Directors – Investment Committee in 2016

Composition of the Investment Committee of Board of Directors for 2016 fiscal year is as follows:

Kegiatan Komite Investasi-Direksi 2016

Kegiatan Komite Investasi Direksi sepanjang 2016, meliputi rapat-rapat yang membahas mengenai perkembangan kegiatan investasi Perusahaan beserta permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun agenda pembahasan dalam rapat Komite Investasi Direksi sepanjang 2016 meliputi:

1. 19 Project Appraisal Memorandum
2. 42 Project Information Document
3. 49 Credit Memorandum

Board of Directors – Investment Committee Activities in 2016

Board of Directors – Investment Committee activities during 2016 includes meetings discussing the development of investment activities of the Company and its existing issues. Agenda of Board of Directors – Investment Committee's meeting throughout 2016 includes:

1. 19 Project Appraisal Memorandum
2. 42 Project Information Document
3. 49 Credit Memorandum

Tingkat Kehadiran Rapat

Berikut adalah tingkat kehadiran Ketua dan anggota Komite dalam rapat.

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarso*	Ketua / Head	10	10	100%
Arisudono Soerono	Ketua / Head	58	56	96,5%
Indrawati Darmawan***	Anggota / Member	35	33	94,3%
Harold Tjiptadaja	Anggota / Member	58	56	96,5%
Hilda Savitri **	Anggota / Member	56	55	98,2%
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	58	58	100%

*) Berakhir masa jabatan pada RUPS tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi direksi Perseroan pada 8 Januari 2016

***) Tidak wajib hadir dalam rapat tertentu

Meeting Attendance Rate

The following is the attendance record of the Head of Investment Committee and other members of Committee.

*) Term of office ended on AGMS as of 24 March 2016

**) Appointed as the Company's board of directors on 8 January 2016

***) Not required to attend several meetings

KOMITE ASET & LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dibentuk oleh Direksi Perseroan untuk memantau secara aktif pengelolaan sumber dana Perseroan, termasuk pengelolaan risiko-risiko terkait seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas dan risiko pasar.

ALCO memiliki piagam (*charter*) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komposisi komite, serta prosedur terkait seperti rapat, pelaporan, dan kerahasiaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab ALCO dalam kerangka desain manajemen risiko adalah:

1. Merumuskan strategi dan rencana tindakan dalam kaitannya dengan risiko pasar dan likuiditas;
2. Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal ini kepada BOC untuk mendapatkan persetujuan;
3. Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
4. Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan, dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk *mismatch* dan posisi devisa neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF;
5. Mengelola investasi untuk dana surplus;
6. Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam *trading book*;
7. Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai dengan *risk appetite* IIF dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BOD (atau jika limit tersebut harus disetujui oleh BOC, kemudian memberikan rekomendasi dan justifikasi untuk persetujuan lebih lanjut dari BOC), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit.
8. Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas;
9. Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perusahaan dan menyediakan input strategis kepada BOC dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BOD;
10. Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE

The Assets and Liabilities Committee (ALCO) was established by the Company's Board of Directors to actively monitor the Company's fund source management, including risk management related to liquidity, solvability, and market risks.

ALCO has a charter that regulates matters related to the responsibilities and composition of committee, as well as procedure related to meeting, reporting, and confidentiality.

Duties and Responsibilities

Within the risk management framework, ALCO's duties are as follows:

1. To formulate the strategy and action plan in respect of market and liquidity risks;
2. To provide recommendations on changes of policy, if required, and to provide recommendations to the Board of Commissioners for approval;
3. To ensure that the management of assets and liabilities is executed within the Company's policies;
4. To manage IIF's liquidity, to set interest rates, and to decide, determine and monitor application of the policies for mismatch and net open position, as well as to manage and determine IIF's financial and capital balance structures;
5. To manage investment of surplus funds;
6. To manage the market risk carried in the trading book;
7. To design and revise limit structures in line with IIF's risk appetite in coordination with the Risk Management Committee of the BOD (or if such limit shall be approved by the BOC, then to provide recommendation and justification for further approval of the BOC), and to monitor the compliance with the limit structure;
8. To approve the methodology for management of market and liquidity risks, and to establish the framework for periodical validations of the market and liquidity risk models;
9. To define (or estimate) the market and liquidity risks inherent in all activities of the Company and to provide strategic input to the BOC in coordination with the Risk Management Committee of BOD; and
10. To review the cash forecasts and to determine the investible surplus, if any.

Susunan Komite ALCO 2016

Susunan anggota ALCO periode 1 Januari 2016 – 24 Maret 2016 adalah sebagai berikut

Ketua : Sukatmo Padmosukarso*

Anggota : Arisudono Soerono (sebagai penyelenggara)

Anggota : Harold Tjiptadjaja

Anggota : Hilda Savitri**

Anggota : Wito Krisnahadi

*) Berakhir masa jabatan pada RUPS tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi direksi Perseroan pada 8 Januari 2016

Susunan anggota ALCO periode 25 Maret 2016 – 31 December 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Arisudono Soerono*

Anggota : Indrawati Darmawan** (sebagai penyelenggara)

Anggota : Harold Tjiptadjaja

Anggota : Hilda Savitri

Anggota : Wito Krisnahadi

*) Diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan 24 March 2016

**) Diangkat menjadi direksi Perseroan pada 9 Juni 2016

Tingkat Kehadiran Rapat

Anggota ALCO melaksanakan pertemuan secara berkala yang diadakan setiap bulannya. Sepanjang 2016, ALCO telah mengadakan 12 kali pertemuan. Berikut merupakan susunan anggota ALCO, jumlah rapat beserta tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat-rapat yang diadakan.

2016 ALCO Committee Composition

Composition of ALCO members period of 1 January 2016 – 24 March 2016 is as follows:

Head : Sukatmo Padmosukarso*

Member : Arisudono Soerono (convenor)

Member : Harold Tjiptadjaja

Member : Hilda Savitri**

Member : Wito Krisnahadi

*) Term of office ended on AGMS on 24 March 2016

**) Appointed as the Company's board of directors on 8 January 2016

Composition of ALCO members period of 25 March 2016 – 31 December 2016 is as follows:

Head : Arisudono Soerono*

Member : Indrawati Darmawan** (convenor)

Member : Harold Tjiptadjaja

Member : Hilda Savitri

Member : Wito Krisnahadi

*) Appointed as the Company's President directors on 24 March 2016

**) Appointed as the Company's board of directors on 9 June 2016

Meeting Attendance Rate

ALCO members hold a meeting on a monthly basis. In 2016, the ALCO held 12 meetings. The following table describes the composition of ALCO, number of meetings and attendance rate of each Committee's member in the meetings.

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Persentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarso	Ketua / Head	3	3	100%
Arisudono Soerono	Anggota / Member	12	11	92%
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	12	11	92%
Hilda Savitri	Anggota / Member	12	12	100%
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	7	7	100%
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	12	11	92%

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DIREKSI

Komite Manajemen Risiko Direksi (RMC) memiliki tanggung jawab utama untuk secara aktif memantau pengelolaan risiko kegiatan usaha IIF serta memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan strategi manajemen risiko IIF.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is mainly responsible for actively monitoring risk management of IIF's business activities as well as providing recommendations in formulating the Company's risk management policies and strategies.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab RMC terkait pengaturan manajemen risiko adalah:

1. Memberikan perumusan strategi kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk pengaturan batas kerangka dan perumusan rencana kontingensi untuk kondisi yang tidak diharapkan;
2. Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di tiap-tiap proyek serta tingkat portofolio, mengembangkan budaya manajemen risiko di semua tingkatan, serta memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko melaksanakan tugasnya secara independen;
3. Menyelidiki, menganalisa, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan isu-isu yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
4. Mengevaluasi proposal yang diajukan untuk kegiatan-kegiatan dan produk-produk baru dan menilai keinginan dan kemampuan IIF dalam melakukan kegiatan baru dan produk baru tersebut dari perspektif risiko, serta mengevaluasi usulan perubahan terkait kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang telah diidentifikasi sesuai dengan perundangan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, merumuskan amandemen yang diperlukan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada, menilai kecukupan pengendalian intern serta meninjau laporan MIS yang disajikan secara rutin;
7. Melakukan tinjauan secara berkala untuk mengevaluasi kelayakan metodologi penilaian risiko;
8. Meninjau dan menyetujui laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang disajikan oleh Departemen Manajemen Risiko; dan
9. Meninjau dan mengusulkan perubahan, bilamana diperlukan, untuk setiap parameter risiko atau indikator kepada Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

Komposisi RMC

Susunan anggota RMC periode 1 Januari 2016 – 24 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukatmo Padmosukarso*

Anggota : Arisudono Soerono

Anggota : Harold Tjiptadjaja

Duties and Responsibilities

Pertaining to the risk management arrangements in the Company, the duties of RMC are as follows:

1. To provide strategic formulation of risk management policies and framework, including the setting of framework limits and the formulation of contingency plans for adverse conditions;
2. To oversee the evaluation and management of the overall risk composition in IIF's portfolio, minimize potential risks at the project as well as the portfolio level, develop a risk management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to perform independently;
3. To investigate, analyze, and take necessary action in respect of issues related to business decisions that deviate from normal procedures;
4. To evaluate proposals related to new activities and products, measure the desirability and capacity of IIF in undertaking the new activities and products through a risk perspective, and evaluate proposals for associated changes in policies and procedures;
5. To monitor the adequacy of IIF's capital against identified risks in accordance with the prevailing regulations and the Company's risk tolerance;
6. To evaluate the effectiveness of the risk management policies and procedures, formulate the necessary amendment to the existing risk management policies and procedures, evaluate the adequacy of internal controls and review regular MIS reports;
7. To conduct regular review to evaluate the appropriateness of the risk assessment methodologies;
8. To review and agree on the Quarterly Risk Management report produced by the Risk Management Department; and
9. To review and propose any changes, if required, on any risk parameters or indicators to the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners for further approval by the Board of Commissioners.

RMC Composition

Composition of RMC members period of 1 January 2016 – 24 March 2016 is as follows:

Head : Sukatmo Padmosukarso*

Member : Arisudono Soerono

Member : Harold Tjiptadjaja

Anggota : Hilda Savitri**

Anggota : Wito Krisnahadi (sebagai penyelenggara/convenor)

*) Berakhir masa jabatan pada RUPS tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi direksi Perseroan sejak 8 Januari 2016

Susunan anggota RMC periode 25 Maret 2016 – saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Arisudono Soerono*

Anggota : Harold Tjiptadjaja

Anggota : Hilda Savitri

Anggota : Indrawati Darmawan**

Anggota : Wito Krisnahadi (sebagai penyelenggara/convenor)

*) Diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan pada RUPST tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi direksi Perseroan sejak 9 Juni 2016

Member : Hilda Savitri**

Member : Wito Krisnahadi (as the convenor)

*) Term of office ends in 2016 AGM dated 24 March 2016

**) Appointed as the Company's directors from 8 January 2016

Composition of RMC members period of 25 March 2016 – present is as follows:

Head : Arisudono Soerono*

Member : Harold Tjiptadjaja

Member : Hilda Savitri

Member : Indrawati Darmawan**

Member : Wito Krisnahadi (as the convenor)

*) Appointed as President Director of the Company in 2016 AGMS dated 24 March 2016

**) Appointed as the Company's director from 9 June 2016

Tingkat Kehadiran Rapat

Anggota RMC wajib mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam satu triwulan. Pada tahun 2016, RMC mengadakan 4 (empat) kali pertemuan. Berikut merupakan informasi terkait frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota RMC dalam rapat:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Persentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarso	Ketua / Head *	1	1	100%
Arisudono Soerono	Ketua / Head	4	3	75%
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	4	4	100%
Hilda Savitri	Anggota / Member	4	4	100%
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	3	3	100%
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	4	4	100%

*) Berakhir masa jabatan pada RUPST tanggal 24 Maret 2016

*) Term of office ends in 2016 AGMS dated 24 March 2016

KOMITE ADVISORY

Komite Advisory memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi manajerialnya, yaitu secara khusus untuk melakukan *review*, menimbang dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh proyek *advisory* Perseroan, di antaranya memutuskan apakah akan menerima suatu mandat dan memutuskan proyek sektor swasta atau public.

Tugas dan tanggung jawab Komite Advisory antara lain adalah:

- Melakukan *review*, merekomendasikan dan/atau menyetujui Dokumen Proyek *Advisory* atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait dengan proyek *advisory* Perseroan. Dokumen

ADVISORY COMMITTEE

Advisory Committee has main responsibility to assist the Board of Directors in running its managerial function, which is to specifically review, consider, and make decisions related to all advisory projects of the Company, among others, to decide whether the Company will accept a mandate and decide to have whether private or public projects.

Duties and responsibilities of Advisory Committee are among others:

- Reviewing, recommending, and/or approving Advisory Project Document or similar documents, which provides the scope and the initial structure related to the Company's advisory project. The Advisory Project document must be

Proyek *Advisory* harus dibuat secara detail atau relevan dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada saat tersebut dan harus mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: manfaat pelaksanaan proyek, implikasi terhadap sumber daya Perseroan (waktu pengerjaan, biaya/*budget*, potensi pendapatan dan lainnya), potensi benturan kepentingan dan permasalahan KYC;

2. Menerima *update* secara periodik terkait dengan proyek-proyek *advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek *pipeline*) dari *Executive Vice President advisory group*;
3. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan, untuk melakukan *review* fungsi *advisory* Perseroan;
4. Melakukan *review* dan menyesuaikan kebijakan dan/atau prosedur *advisory* Perseroan dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Komite *Advisory*; dan
5. Melakukan *review* dan memantau implementasi proyek-proyek *advisory* Perseroan paling sedikit setiap tahun dan meningkatkan frekuensi *review* apabila dianggap perlu serta menyediakan laporan hasil *review* dan pemantauan kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

Komite *Advisory* Direksi dibentuk berdasarkan Piagam Komite *Advisory* Direksi tanggal 5 Desember 2014.

Susunan Anggota Komite Advisory

Susunan keanggotaan Komite *Advisory* pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Komite *Advisory* dari 1 Januari 2016-24 Maret 2016

Ketua : Sukatmo Padmosukarno (CEO)
Anggota : Arisudono Soerono (CFO)
Anggota : Wito Krisnahadi (CRO)

Susunan Komite *Advisory* sejak 24 Maret 2016

Ketua : Arisudono Soerono (CEO)
Anggota : Indrawati Darmawan (CFO)
Anggota : Wito Krisnahadi (CRO)

prepared in detail or should be relevant with the up-to-date information available at that time, but not limited to the following matters: the benefit of project implementation, implication on the Company's resources (time of execution, budget, potential revenue, and others), potential conflict of interests and KYC issues;

2. Periodically receiving updates related to advisory projects (either ongoing projects or pipeline projects) from the Executive Vice President of group advisory;
3. Providing information, assistance, and/or making clarification to the Board of Commissioners, if necessary, to review the Company's advisory function;
4. Reviewing and adjusting advisory policy and/or procedure of the Company from time to time as deemed necessary by the Advisory Committee; and
5. Reviewing and monitoring the implementation of the Company's advisory projects at least every year and increasing review frequency if necessary, as well as providing report of review results and monitoring to the Board of Commissioners, if necessary.

Advisory committee of the Board of Directors is established based on Advisory Committee Charter of the Board of Directors on 5 December 2014.

Membership of Advisory Committee

Membership of Advisory Committee as of the publication of this Prospectus is as follows:

Composition of Advisory Committee member from 1 January 2016 – 24 March 2016

Head : Sukatmo Padmosukarno (CEO)
Member : Arisudono Soerono (CFO)
Member : Wito Krisnahadi (CRO)

Composition of Advisory Committee member since 24 March 2016

Head : Arisudono Soerono (CEO)
Member : Indrawati Darmawan (CFO)
Member : Wito Krisnahadi (CRO)

Frekuensi Pertemuan Komite Advisory 2016

Sepanjang 2016, Komite Advisory melaksanakan 5 (lima) kali rapat dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota yaitu:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarno*	Chief Executive Officer	5	2	40%
Arisudono Soerono**	Chief Executive Officer/ Chief Finance Officer	5	5	100%
Indrawati Darmawan**	Chief Finance Officer	5	3	60%
Wito Krisnahadi	Chief Risk Officer	5	5	100%

* Berakhir masa jabatan pada RUPST tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi Direksi Perseroan pada 8 Januari 2016

Meeting Frequency of Advisory Committee in 2016

Throughout 2016, the Advisory Committee conducted 5 meetings with the attendance rate of each member as follows:

*) Term of office ended on AGMS on 24 March 2016

**) Appointed as the Company's Board of Directors on 8 January 2016

Agenda Rapat Komite Advisory 2016

Materi agenda yang dibahas dalam rapat Komite Advisory sepanjang 2016 antara lain:

1. Pembahasan *Project Advisory Document ("PAD")* proyek Biogas;
2. Pembahasan PAD untuk arahan teknis proyek-proyek yang ditangani ADB;
3. Pembahasan PAD untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Angin;
4. Memo sirkuler di luar Rapat Komite Advisory (PAD untuk Proyek Bisnis Advisory, Sektor Energi & Infrastruktur; dan
5. Rapat Komite Advisory (PAD untuk proyek M&A dan satu Proyek Bisnis Advisory.

Meeting Agenda of Advisory Committee in 2016

Agenda discussed in the Advisory Committee's meeting throughout 2016 is as follows:

1. Discussion of Biogas project Project Advisory Document ("PAD");
2. Discussion of PAD for technical direction of projects handled by ADB ;
3. Discussion of PAD for Wind Power Plant ;
4. Circular memo in lieu of Advisory Committee Meeting (PAD for Advisory Business Project, Energy & Infrastructure Sector); and
5. Advisory Committee Member (PAD for M&A project and one Advisory Business Project)

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai dengan struktur organisasi Perseroan yang baru, Perseroan telah membentuk Komite Sumber Daya Manusia yang tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Kepegawaian dan Pengembangan. Memutuskan dan menyetujui seleksi, penempatan dan pemberhentian pegawai senior Perseroan (tingkat *Assistant Vice President* ke atas) sesuai dengan kriteria subjektif dan obyektif yang dapat diterima. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pertumbuhan Perseroan dan menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi serta memastikan bahwa kinerja Perseroan tidak terganggu oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja buruk;
2. Manajemen Kinerja. Membuat tujuan-tujuan perusahaan dan karyawan untuk karyawan dengan tingkat *Executive Vice President* dan staf serta menyesuaikan hasilnya di

HR COMMITTEE

In accordance with the Company's new organizational structure, the Company has established HR Committee whose duties and responsibilities include:

1. Employment and Development. To decide and approve selection, placement, and termination of the Company's senior employees (Assistant Vice President level and above) according to the acceptable subjective and objective criteria. This authority aims to ensure effective human resources planning to support the Company's growth and face challenges that might happen and ensure that the Company's performance is not significantly affected by poor performance of its human resources;
2. Performance Management. Determine objectives of the company and employees at the level of Executive Vice President, as well as staff, and review its goal achievements.

dalam perusahaan.

3. Kompensasi dan Manfaat. Menetapkan kebijakan remunerasi untuk karyawan dengan tingkat *Executive Vice President* dan staff, menyetarakan remunerasi dengan kinerja yang diukur dengan tolak ukur industri sejenis, pencapaian indikator kinerja yang penting, nilai tambah ekonomis dan faktor-faktor lainnya.
4. Menetapkan kebijakan, strategi dan keputusan terkait dengan sumber daya manusia yang bersifat umum yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan.

Dalam rangka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Sumber Daya Manusia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawabnya dari Direksi, eksekutif, karyawan dan pihak-pihak eksternal kapanpun diperlukan; dan
2. Memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, mengundang dan mengikutsertakan karyawan atau konsultan internal atau independen Perseroan untuk menghadiri rapat komite.

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Piagam Komite Sumber Daya Manusia tanggal 18 Januari 2016.

Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Ketua : Arisudono Soerono
Anggota : Harold Tjiptadjaja
Anggota : Hilda Savitri
Anggota : Wito Krisnahadi
Anggota : Indrawati Darmawan

3. Compensation and Benefit. Determine remuneration policy for the employees at the Executive Vice President and staff level, adjust the remuneration to the benchmarked performance prevailed in the similar industry, accomplishment of key performance indicators, economic added values and other factors.
4. Determine general policy, strategy, and decision related to general human resources that are pivotal to the Company's overall performance.

In order to fulfill such duties and responsibilities, the Human Resources Committee is authorized to:

1. Access any information required according to its duties from the Board of Directors, executives, employees, and external parties wherever needed; and
2. Have the authority to select, invite, and involve the employees or internal or independent consultant of the Company to attend committee meeting.

Human Resources Committee is established based on Human Resources Committee Charter dated 18 January 2016.

Membership of Human Resources Committee is as follows:

Head : Arisudono Soerono
Member : Harold Tjiptadjaja
Member : Hilda Savitri
Member : Wito Krisnahadi
Member : Indrawati Darmawan

Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang 2016, Komite SDM melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Arisudono Soerono	Ketua / Head	4	4	100%
Harold Tjiptadjaja	Anggota / Member	4	4	100%
Hilda Savitri	Anggota / Member	4	4	100%
Wito Krisnahadi	Anggota / Member	4	4	100%
Indrawati Darmawan	Anggota / Member	4	4	100%

KOMITE PENGARAH TI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) Perseroan memiliki peran dalam melaksanakan pengembangan terkait kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan.

Adapun yang menjadi rincian tugas Komite Pengarah TI adalah:

1. Memprioritaskan inisiatif dan menyelaraskan IT dengan strategi bisnis melakukan pengawasan terhadap strategi, proyek, dan keputusan arsitektur teknologi yang terkait dengan teknologi informasi;
2. Memprioritaskan inisiatif investasi di bidang IT dan memberikan persetujuan akhir dan rekomendasi tentang berlanjutnya usulan proyek TI;
3. Menyelaraskan bisnis strategis dengan investasi TI melalui perencanaan TI Strategis;
4. Meninjau dan memantau proyek-proyek utama di bidang TI dari perspektif lintas fungsional;
5. Mencapai keseimbangan antara kendala yang dihadapi di bidang TI dengan prioritas bisnis;
6. Mempromosikan Lintas Synergy Fungsional;
7. Memberikan informasi terkait TI kepada Direksi dan Dewan Manajemen (Perseroan Manajemen);
8. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara departemen TI dan unit fungsional lainnya Perseroan sebagai upaya mempromosikan perencanaan secara bersama;
9. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya dengan melakukan pengawasan terhadap manfaat yang terealisasi;
10. Memantau apakah inisiatif TI secara efektif mendukung tujuan bisnis dan strategi Perseroan;
11. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko TI;
12. Memberikan kepemimpinan Manajemen Risiko TI dengan:
 - Memahami dan mengidentifikasi risiko TI, dan mengupayakan pengelolaan yang efektif atas risiko tersebut.
 - Mengelola eksposur dan ambang batas risiko TI.
13. Menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko.
14. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara departemen TI dengan unit-unit fungsional lain sebagai upaya mempromosikan manajemen risiko secara bersama.

Profil Anggota ITSC

Anggota Komite ITS terdiri dari:

1. CEO/President – Chair dan voting member (dalam hal ini Bapak Arisudono Soerono menggantikan Bapak Sukatmo Padmosukarso).

IT STEERING COMMITTEE

The Company's IT Steering Committee (ITSC) was established to develop the capability of information technology system to support the Company's business activities.

Duties of IT Steering Committee are as follows:

1. To prioritize initiatives and align the Company's IT with business strategy, and oversee major information technology related strategies, projects and technology architecture decisions;
2. To prioritize IT investment initiatives and deliver final approvals and recommendations on the follow-up of proposed IT projects;
3. To align strategic business with IT investments through IT Strategic Planning;
4. To review and monitor major IT projects from a cross-functional perspective;
5. To find balance between IT constraints and business priorities;
6. To promote Cross Functional Synergy;
7. To inform the Board of Directors and Board of Management (The Company Management) on IT related matters;
8. To ensure open communication between the IT department and the other functional units of The Company in order to promote collaborative planning;
9. To resolve conflict related to resources by overseeing the benefits that have been realized;
10. To monitor whether IT initiatives effectively support the The Company's business objectives and strategies;
11. To oversee IT Risk Management;
12. To provide risk management leadership for IT by:
 - Understanding and identifying IT risks and making efforts to manage the risks effectively.
 - Managing IT risk exposure and thresholds.
13. To resolve resource allocation issues based on risk prioritization.
14. To ensure open communication between the IT department and other functional units to promote a collaborative risk management.

Profile of ITSC Members

Members of ITS Committee comprise:

1. CEO/President – Chair and voting members (in this case Mr. Arisudono Soerono replaced Mr. Sukatmo Padmosukarso).

2. CFO – Vice-Chair dan voting member (Dalam hal ini Ibu Indrawati Darmawan menggantikan Bapak Arisudono Soerono)
3. CRO – Vice-Chair dan voting member
4. *Head of Operations – Business Unit Head, non voting member*
5. *Operation Risk – Business Unit Head, non voting member* (Ibu Luciana Budiman)
6. *IT Head – ITSC Moderator, non voting member*
7. Anggota lainnya yang dianggap tepat oleh Presiden Direktur

Kegiatan ITSC 2016

Sepanjang 2016, ITSC mengadakan agenda kegiatan terkait tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

1. Melaporkan perkembangan implementasi *core system IT* Perusahaan.
2. Membahas migrasi data untuk melakukan input produksi secara paralel.
3. Mengajukan perencanaan IT 2016.
4. Memaparkan perkembangan terbaru terkait produksi.
5. Persentasi anggaran IT 2016.
6. Menindaklanjuti *item* pembahasan ITS sebelumnya.
7. Laporan perkembangan stabilisasi *IT Core System*.
8. Laporan perkembangan prioritas rencana utama IT 2016.
9. Pengajuan anggaran IT 2017.

Tingkat Kehadiran Rapat

Nama / Name	Jabatan dalam Komite / Position in the Committee	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Tingkat Kehadiran / Attendance Rate	Percentase / Percentage
Sukatmo Padmosukarso*	Ketua Komite Pengarah / Head of IT Steering Committee	6	2	33%
Arisudono Serono**	Ketua dan Anggota Komite Pengarah / Head and Member of Steering Committee	6	6	100%
Indrawati Darmawan***	Anggota Komite Pengarah / Member of Steering Committee	6	5	83%
Wito Krisnahadi	Anggota Komite Pengarah / Member of Steering Committee	6	6	100%
Myria Y. Ariandri	Non Voting Member	6	6	100%
Adi Setiadi Hermawan	Non Voting Member	6	5	83%
Yulia Trinita	Non Voting Member	6	4	67%
Luciana Budiman	Non Voting Member	6	3	50%

*) Berakhir masa jabatan pada RUPST tanggal 24 Maret 2016

**) Diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan pada 24 Maret 2016

***) Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak 9 Juni 2016

2. CFO – Vice-Chair and voting member (In this case Mrs. Indrawati Darmawan replaced Mr. Arisudono Soerono).
3. CRO – Vice-Chair and voting member.
4. Head of Operations – Business Unit Head, non voting member
5. Operation Risk – Business Unit Head, non voting member (Mrs. Luciana Budiman)
6. IT Head – ITSC Moderator, non voting member
7. Other members deemed qualified by the President Director.

ITSC Activities in 2016

Throughout 2016, activities conducted by ITSC pertaining to its duties and responsibilities are:

1. Reporting the development of the Company's IT core system implementation.
2. Discussing data migration to simultaneously input production data.
3. Proposing 2016 IT plans.
4. Describing the newest development related to production.
5. Presenting 2016 IT budget.
6. Following-up items of the previous ITS discussion.
7. Report of IT Core System stabilization development.
8. Progress report of prioritized 2016 IT key plans.
9. Proposing 2017 IT budget.

Meeting Attendance Rate

*) Term of office ended on AGMS on 24 March 2016

**) Appointed as the Company's President Director on 24 March 2016

***) Appointed as the Company's Director on 9 June 2016

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan fungsi kesekretariatan dan kehumasan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga dituntut untuk update terhadap berbagai aturan yang berlaku dalam dunia usaha untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak terkait di internal agar dapat diimplementasikan dengan baik. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan IIF meliputi:

- Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik;
- Mengelola hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
- Melakukan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perusahaan;
- Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas atau sesuai dengan Pedoman Operasional Perusahaan, Kesepakatan Pemegang Saham dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Nastantio W. Hadi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana termaktub dalam Surat No. S.2016.153/IV/IIF tanggal 7 April 2016.

CORPORATE SECRETARY

Duties and Responsibilities

The Corporate Secretariat is a work unit whose responsibility covers the secretarial and public relations functions of the Company. The Corporate Secretary is obliged to keep abreast of the most up-to-date business regulations which need to be disclosed to all related internal parties so as to be implemented properly in the Company. The duties and responsibilities of IIF's Corporate Secretary are:

- To ensure compliance with GCG principles;
- To professionally manage the relationship with the Shareholders and other Stakeholders;
- To perform the legal function and act as a legal consultant particularly on matters related to the Company;
- To ensure the availability of reports pertaining to Risk Management, Social and Environmental Performance and Due Diligence, in line with IIF's Operating Manual, Shareholders' Agreements, and/or applicable laws and regulations.

Profile of the Corporate Secretary

To comply with the provisions of OJK Regulation No. 35/2014, the Company's Board of Directors has appointed Nastantio W. Hadi as the Company's Corporate Secretary effective from 29 December 2011 as stated in the Letter No. S.2016.153/IV/IIF dated 7 April 2016.



NASTANTIO W. HADI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Nastantio W. Hadi, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Hukum di bidang Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993) dan gelar Lex Legibus Master (LL.M.) di bidang *International Business Law* dari Washington College of Law - the American University, Washington DC, Amerika Serikat (1996). Sebelum bergabung dengan Perseroan, Beliau pernah bekerja pada firma hukum Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) dan Pradjoto & Associates (2000-2005). Setelah berkariir di firma hukum, Beliau mengepalai divisi hukum dari suatu perusahaan penyedia jasa logistik.

Nastantio W. Hadi is an Indonesian citizen. He received his Bachelor of Law in Civil Law from the Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1993) and his Lex Legibus Master (LL.M.) in International Business Law from Washington College of Law – the American University, Washington DC in the United States (1996). Prior to joining the Company, he worked at the law firms of Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993-1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996-2000) and Pradjoto & Associates (2000-2005). After developing his career at these law firms, he supervised the legal department of a logistics services company.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan tahun 2016

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance/GCG. Sekretaris Perusahaan melakukan pencatatan dan pendokumentasian atas setiap kebijakan dan risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai pejabat penghubung dengan pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan membantu dan mendampingi Direksi pada setiap pelaksanaan kegiatan Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga membantu merumuskan pesan yang akan disampaikan oleh Direksi baik kepada internal maupun eksternal Perusahaan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Mengadakan workshop Pembiayaan Proyek Infrastruktur antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Perseroan dengan tema Meningkatkan Kompetensi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia.
2. Bekerja sama dengan Banker Association for Risk Management (BARa) mengadakan BARa Bi-monthly Sharing Session dengan topik Risks and Mitigations for Infrastructure Financing in Indonesia.
3. Bekerjasama dengan Euromoney Seminars, Perseroan menjadi Platinum Sponsor untuk 2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference di Jakarta pada 24 -25 Mei 2016.
4. Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016.
5. Mengadakan berbagai macam kegiatan diantaranya :
 - *Signing ceremony* atas berbagai macam project infrastruktur baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun institusi pemerintahan.
 - RUPS dan RUPSLB
 - Kegiatan internal perusahaan: BOC meeting yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, townhall meeting yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, outing, employee gathering, dsb
6. Donasi atas musibah Banjir Bandang Garut dan juga donasi ke berbagai yayasan anak yatim piatu dan tuna ganda.
7. Shareholders Gathering yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016.

Corporate Secretary Activities in 2016

The Corporate Secretary's activities during 2016 were conducted in accordance with its functions, duties, and responsibilities. In relation to the compliance with the applicable regulations, especially the good corporate governance/GCG principles, the Corporate Secretary records and documents every policy and minutes of the Board of Directors and the Board of Commissioners meetings.

As a liaison to the external parties, the Corporate Secretary helps and assists the Board of Directors in the implementation of the Company's activities. The Corporate Secretary also helps to formulate messages to be delivered by the Board of Directors to both internal and external parties.

Activities conducted include:

1. Holding a workshop on Infrastructure Project Financing between the Association of Regional Development Banks and the Company with the theme of Improving the Competency of Infrastructure Project Financing of Regional Development Banks in Indonesia.
2. Holding a BARa Bi-monthly Sharing Session meeting in partnership with the Bankers Association for Risk Management (BARa), with the topic of Risks and Mitigations for Infrastructure Financing in Indonesia.
3. In collaboration with Euromoney Seminars, the Company became the Platinum Sponsor for the Second Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference in Jakarta on 24 – 25 May 2016.
4. The Company conducted a Bond Offering I of Indonesia Infrastructure Finance in 2016.
5. Holding various events, among others:
 - Signing ceremonies for various infrastructure project, which involved both private sector and government bodies.
 - AGM and EGM
 - The Company's internal activities: BOC meetings (quarterly), townhall meetings (quarterly), outings, employee gatherings, etc.
6. Donation for victims of the Bandang Flood in Garut and for various orphanages and tuna ganda.
7. Shareholders Gathering held in Jakarta on 28 September 2016.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2016

Sepanjang 2016, Departemen Sekretaris Perusahaan IIF melaksanakan pelatihan yaitu:

Topik Pelatihan / Training Subject	Judul Pelatihan / Training Title	Penyelenggara / Organizer
Investor Relation	<i>Investor Relation</i>	Irindo Community
Anggaran / Budget	<i>New Budget Realization</i>	Internal IT
Bursa / Stock Exchange	Peraturan Pencatatan, Pelatihan Sistem Pelaporan dan Pengenalan Sistem Laporan Keuangan Berbasis XBRL / Listing Regulations, Training on Reporting Systems and Introduction to XBRL-Based Reporting System	IDX
Project Finance	<i>Project Finance</i>	Eduard Bodmer
Komunikasi / Communications	<i>Public Relations</i>	Prasetya Mulya
Reksadana / Mutual Funds	Reksadana penyertaan terbatas untuk insfrastucture financing / Limited participation of mutual funds in infrastructure financing	Internal Advisory
Salary Survey	<i>Salary Survey system Online</i>	Tower Watson
Manajemen / Management	<i>SLA - Improving Horizontal Alignment & Performance</i>	GML
Asuransi / Insurance	<i>Socialization of Insurance Policies</i>	Jardine Lloyd Thomphson
OJK	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 88 / Dissemination of Ministry of Finance Regulation Number 88	Sarana Multigriya Finansial
Outing	Team Building	Seta Jogjakarta
Operasional / Operations	<i>Timesheet & Procurement process</i>	Internal Operations

AUDIT INTERNAL

Satuan Internal Audit adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Sebagai layanan kepada Manajemen, Audit Internal bertindak sebagai pemberi penilaian independen, yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan dan kualitas kinerja. Fungsi penjamin pengendalian ini secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola, yang memungkinkan Manajemen menjadi lebih efektif dalam mencapai target usaha dan memenuhi kewajibankewajibannya kepada Pemegang Saham Perusahaan.

Piagam Kerja Audit Internal

Internal Audit Charter adalah sebuah dokumen formal tertulis yang menjabarkan tujuan, wewenang dan tanggung jawab Audit Internal. Charter ini menetapkan posisi Audit Internal di dalam organisasi, memberi wewenang untuk mendapatkan berbagai catatan, memasuki berbagai bangunan fisik yang relevan dengan kinerja; dan menguraikan lingkup kerja. Audit Internal IIF Charter telah diterbitkan dan ditandatangani

Trainings of 2016 Corporate Secretary

Throughout 2016, IIF's Corporate Secretary Department has participated in the following:

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Unit is an independent unit that reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. Internal Audit acts independently in performing an appraisal function by examining and evaluating the Company's internal control systems and performance quality to ensure adequacy and effectiveness. This controlling assurance function systematically evaluates and improves the effectiveness of risk management and control and governance processes, allowing the management to conduct business more effectively, attain corporate objectives and fulfill their obligations to the Shareholders.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter is an official written document with a defined purpose, authority and responsibility of the Internal Audit function. The charter affirms the Internal Audit position within the organization, authorizes access to enter premises as needed to perform its duties, and defines the scope of internal audit work. The Company's Internal Audit Charter was signed by the President Commissioner and President Director on 28

oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur tanggal 28 November 2012.

November 2012.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Satuan Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan wajib menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit. Kepala Internal Audit juga bertanggung jawab untuk pengembangan, review dan modifikasi kebijakan audit, prosedur untuk pelaksanaan audit. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus dilaporkan segera ke Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan / OJK).

Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab Internal Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Internal Audit, yaitu:

1. Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksi yang menggunakan metodologi berbasis resiko yang tepat, termasuk resiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh manajemen, dan menyampaikan rencanaitu kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbarui secara periodik.
2. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk didalamnya tugastugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh manajemen dan komite Audit;
3. Menilai efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait;
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;
6. Audit dan menginformasikan secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktik terbaik yang biasa dilakukan dalam internal audit;
7. Membantu dalam penyelidikan kasus yang signifikan yang diduga merupakan kegiatan penipuan dalam organisasi dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen;
8. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan eksternal auditor dan regulator, untuk tujuan menyediakan cakupan audit yang optimal untuk organisasi dengan biaya keseluruhan yang wajar.

Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit is chaired by the Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Board of Commissioners. The Head of Internal Audit reports directly to the President Director and is obliged to submit the internal audit report to the President Director and the Board of Commissioners through the Head of the Audit Committee. The Head of Internal Audit is also responsible for developing, reviewing, and modifying audit policies, procedures, and performance. Every appointment, replacement, and termination of the Head of the Internal Audit Unit must be immediately reported to the Financial Services Authority.

Responsibilities of Internal Audit

As stipulated in the Charter, the responsibilities of Internal Audit are as follows:

1. Developing adaptable annual audit plan using appropriate risk-based methodology, which covers any risk or control issues identified by the management, and submit the plan to the Audit Committee for further review and approval as well as periodical renewal;
2. Performing the approved annual audit plan including any other task or project upon request by the management and Audit Committee;
3. Evaluating the efficiency and effectiveness of the activities of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, etc.;
4. Performing an audit on the Company's compliance with prevailing rules and regulations;
5. Monitoring, analyzing and reporting follow-up actions based on recommendations made;
6. Working with the Audit Committee and keeping them informed of emerging trends and best practices in the area of internal auditing;
7. Providing assistance in investigations when fraudulent activities are suspected to have occurred within the Company and submitting the investigation results to the management and the Audit Committee;
8. Considering and determining the scope of audit work to be performed by the external auditors and regulators in order to give optimal auditing coverage at a reasonable cost.

Kriteria Internal Auditor

Internal Auditor harus memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dibawah ini:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
4. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
7. Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang obyektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Internal Auditor Criteria

The Internal Auditor must possess the required qualifications, as follows:

1. Having integrity and performing their duties professionally, independently, honestly, and objectively;
2. Having knowledge of and expertise in technical audit activities and other disciplines relevant to their job area.
3. Having the capacity to effectively interact and communicate, both orally and in writing;
4. Complying with professional standards issued by the association of Internal Audit;
5. Maintaining the confidentiality of information and/or corporate data related to the implementation of Internal Audit's duties and responsibilities, except if required to be disclosed by the laws and regulations or court decision;
6. Understanding good corporate governance principles and risk management;
7. Being objective in implementing duties and producing an objective evaluation based on the actual conditions.

Profil Ketua Audit Internal



YUDI ADRIAL
Ketua Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Head of Internal Audit Unit Profile

Yudi Adrial meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia. Yudi memiliki pengalaman 14 tahun di Konsultan Manajemen dan Lembaga Keuangan. Pengalaman auditnya meliputi pengalaman 6 tahun sebagai seorang konsultan di Ernst & Young, dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT. NISP Sekuritas selama 2 tahun. Beliau juga memegang sertifikat CIA yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors.

Yudi Adrial received his Bachelor's degree from the University of Indonesia. Yudi has garnered 14 years of experience in Management and Financial Institution Consulting. His audit experience includes working as a consultant in Ernst & Young for 6 years and as Head of the Compliance Unit at PT. NISP Sekuritas for 2 years. He also holds a CIA certificate issued by the Institute of Internal Auditors.

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi Audit Internal

Auditor Internal IIF memiliki latar belakang serta kualifikasi profesi yang relevan terkait dengan tugas-tugasnya di Perusahaan. IIF juga senantiasa memfasilitasi Auditor Internalnya dalam meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan pada beragam sertifikasi profesi di bidang audit internal.

Qualification and Certification of Internal Auditors

IIF's Internal Auditors come from a background and have professional qualifications relevant to their duties in the Company. IIF continuously facilitates its Internal Auditors to improve their capabilities by sending them to attend various certification programs in the internal audit field.

Berikut merupakan daftar Auditor Internal IIF dan informasi mengenai kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki.

The following table lists the Company's Internal Auditors including their qualifications and certifications.

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti / Certification and Trainings Attended
1	Yudi Adrial	Head of Internal Audit	Certified Assesor
2	Yudi Adrial	Head of Internal Audit	Certified Internal Auditor
3	Yudi Adrial	Head of Internal Audit	Forensic Auditing

Kegiatan Audit Internal 2016

Unit Internal Audit telah melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi, sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan audit atas area Pengelolaan Tresuri and Pengelolaan Pengadaan.
2. Secara berkala dan dalam batas tertentu melakukan tinjauan atas laporan keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Melakukan review atas pembaharuan *standard operating procedures* (SOP) Perusahaan untuk memastikan kesesuaian alur proses dan aktivitas kerja dimasing-masing unit kerja, serta menilai kecukupan atas desain pengendalian internal perusahaan.
4. Melakukan pedampingan untuk pihak-pihak eksternal, yakni:
 - Pendampingan untuk *World Bank Pre-Appraisal Mission*
 - Pendampingan untuk Penugasan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young).

Mekanisme Penunjukan dan Jasa yang Diberikan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini telah disetujui oleh RUPST tanggal 24 Maret 2016 Kantor Akuntan Publik ini dipilih oleh Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik, yang didasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit.

Pada tahun 2016, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young) telah memberikan jasa tidak hanya jasa audit atas laporan Keuangan, tetapi juga telah memberikan jasa review atas laporan Kinerja IIF.

Internal Audit Activities in 2016

The Internal Audit Unit has carried out audit and consulting activities during 2016 as follows:

1. Monitoring follow-up of recommendations of audit findings on Treasury Management and Procurement Management areas.
2. Reviewing financial statements to ensure compliance with the applicable regulations on a periodic basis and within a certain period of time.
3. Reviewing the renewal of standard operating procedures (SOP) of the Company to ensure the conformity of process flow and work activity at each working unit as well as evaluating the adequacy of the company's internal control design.
4. Providing assistance to external parties, namely:
 - Assistance for World Bank Pre-Appraisal Mission
 - Assistance for Assignment of Financial Statements Auditing conducted by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja.

EXTERNAL AUDITOR

The 2016 Financial Statements of PT Indonesia Infrastructure Finance were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young).

Appointment Mechanism and Services Rendered

The appointment of the Public Accounting Firm was approved by the Annual GMS on 24 March 2016. This Public Accountant is selected by the Board of Commissioners, as mandated by the Shareholders to appoint the Public Accountant, based on the recommendation from the Audit Committee.

In 2016, the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Ernst & Young) has provided not only financial statements auditing services but also the Company's performance report review services.

Informasi Auditor Eksternal

Informasi mengenai akuntan publik dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun / Year	Periode Penugasan / Period of Service	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm
2016	Audit Laporan Keuangan 2016 Audit on 2016 Financial Statements	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2015	Audit Laporan Keuangan 2015 Audit on 2015 Financial Statements	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja
2014	Audit Laporan Keuangan 2014 Audit on 2014 Financial Statements	Deloitte - Osman Bing Satrio & Eny

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

IIF telah merumuskan Kode Etik Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap saling menghargai, kejujuran, dan integritas. Kode Etik ini mendorong pelaksanaan aktivitas usaha secara legal dan beretika, perlindungan dan pengawalan terhadap aset dan reputasi IIF, serta sikap hormat terhadap sesama dan masyarakat luas pada umumnya.

Kode Etik ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai, visi, norma, bahasa dan sistem kerja IIF untuk diterapkan oleh segenap karyawan dan para pemangku kepentingan dalam berinteraksi satu sama lain.

Budaya kepatuhan dan integritas mengalir dari atas, yang secara implisit mengatakan bahwa manajemen harus menekankan pentingnya perilaku beretika dan kepatuhan serta mendukung semua itu melalui kepemimpinan dan pelatihan. IIF wajib melakukan usahanya secara legal dan beretika di semua aspek operasinya.

Isi Kode Etik

Ruang lingkup kode etik yang dimiliki IIF mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan.

• Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika

Kebijakan Etika Bisnis IIF memberikan panduan untuk melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Pernyataan yang paling penting menuntut bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, yang mencakup

Information on External Auditor

The following table describes information on the Company's public accountant in the last 3 (three) years.

CODE OF CONDUCT AND CORPORATE CULTURE

IIF has formulated a Code of Conduct as a form of compliance with laws and regulations and in adherence to human principles and values that comprise mutual respect, honesty, and integrity. This code of conduct encourages ethical and legal business operations, protection of assets and reputation, as well as respects for others, co-workers, clients, and the community at large.

The code is a summary of IIF's values, vision, norms, language and work systems that form IIF's corporate culture to be upheld by all employees and stakeholders whenever they interact with one another.

Compliance and integrity culture starts from top management and reaches down to lower layers, implicitly reinforcing the management's emphasis on the importance of ethical conduct and compliance. The Company also supports this implementation through leadership by example and training. IIF is obliged to conduct its business activities legally and ethically in all aspects of its operations.

Contents of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct governs several matters related to work procedure, internal and external relationships and commitment of the Company pertaining to environmental and health issues.

• Doing Business Legally and Ethically

IIF's Business Conduct Policies provide guidance for carrying out day-to-day business activities. IIF's fundamental values guide routine business operations with uncompromising integrity and honesty, which include fairness, concern and respect for others as well as personal accountability.

integritas, kewajaran, hormat, dan memberi perhatian pada orang lain, dan pertanggungjawaban pribadi. Semua ini merupakan panduan untuk membuat keputusan beretika sehari-hari, dan untuk mematuhi etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.

- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**

Kebijakan untuk perlindungan dan pengawalan aset dan reputasi IIF berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek dan informasi inside trader dan pengendalian internal, pelaporan keuangan serta retensi dokumen dan auditing.

- **Benturan Kepentingan**

Segenap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF harus bebas dari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh buruk pada keputusan mereka, obyektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan pelaksanaan tugas dari IIF.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Merupakan kebijakan IIF bahwa semua sumber daya elektronik digunakan hanya dengan cara yang tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segenap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian ijin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

These guidelines serve all personnel during daily business decisions and govern other aspects such as gratification issue, disclosure of personal wealth, political affiliation and donations, as well as anti-corruption and fraud prevention guidelines.

- **Information, Internal Control and Financial Reporting Policies**

The policy for protection and safeguard of IIF's assets and reputation is based on its policies regarding conflict of interest, electronic resources, data protection and security, securities trading and insider information, and internal controls, financial reporting, as well as document retention and auditing.

- **Conflict of Interest**

All of the Company's employees as well as parties acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that may influence unfavorable judgment, objectivity, or loyalty to IIF when they carry out business activities and perform their tasks.

- **Electronic Resource Policy**

Operation of Electronic Resources must adhere to IIF's Business Conduct Policies. All personnel must protect the Company's electronic resources against unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Confidentiality Policy**

All IIF's employees and other parties acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information against unauthorized disclosure, whether internal or external, deliberate or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information to which IIF has no rights to use. IIF has a policy to collect and use business and market information legally and ethically in order to better understand markets, customers and competitors. Moreover, IIF shall refrain from collecting or using another party's confidential information without permission.

• Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen, dan Kebijakan Audit

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFRS dan demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan auditor internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan advisory dan yang melakukan transaksi pendanaan.

• Menghormati Individu dan Masyarakat

Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan reward yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Ini semua diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan berikut:

a. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlakuterkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

• Internal Controls, Financial Reporting, Document Retention and Auditing Policy

IIF's management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and IFRS, and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws and regulations.

IIF adheres to the policy of all concerned parties responsible for the accuracy, thoroughness and timeliness of the Company's actual and forecast financial information, and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring mechanisms.

Information security shall also include protection of the proprietary information received from various divisions. There is also a possibility of conflict of interest between two divisions that have different tasks: for instance, when providing advisory services to as well as funding a project.

• Respect for Individuals and Communities

Our respect for others and the environment is a part of the Eight Principles the Company has adopted, which set IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain its best talent through a strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously providing rewards for its employees and representatives. This is manifested in the following policies:

a. Environment, Health and Safety

IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; thus, employees are responsible for attaining knowledge regarding applicable laws and regulations related to the Environmental, Health and Safety issues and adhere to them. The management addresses this issue by sending employees to the relevant laws and policies trainings.

b. Kebijakan mengenai Pelecehan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

• Kebijakan Privasi

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF mematuhi kebijakan tentang kepatuhan sepenuhnya pada semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

• Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukunya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi ijin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian ijin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan.

IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

Pengungkapan Pemberlakuan dan Penyebarluasan Kode Etik

Semua karyawan dan Direksi serta Dewan Komisaris, setelah bergabung dengan IIF harus membaca Kode Etik IIF dan menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya. Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik atau yang terbukti bersalah telah melakukan tindakan kriminal akan menerima tindakan disiplin internal, sampai pada dan mencakup tindakan pemberhentian

b. Harassment Policy

IIF is committed to creating a work environment that is free from any form of inappropriate behaviors and harassment based on age, disability, marital status, race, color, national/regional origins, religion, sex, sexual orientation, or gender identity. Any form of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated.

• Privacy Policy

IIF adheres to the policy of full compliance with all applicable privacy and data protection laws. IIF assigns significant importance to earning and retaining the trust of stakeholders, employees, clients, business partners and other parties who share personal information with IIF.

• Conduct with Business Partners and Third Parties

IIF complies with all applicable anti-gratification laws and accurately and diligently records all transactions. Bribery/Gratification refers to the action of offering, authorizing, or providing items of value to Government Officers, directly or indirectly, with an intention of obtaining and retaining business or gaining improper advantages, i.e. price increase approvals, awarding of contracts, grant of operating permits, product use/registration approvals, favorable court decisions, and tax dispute settlements.

IIF abides by all government contracts it has entered into and keeps its subcontracts with business partners compliant with all applicable national, state, provincial, and district laws and regulations and all contract requirements.

Disclosure, Enforcement, Dissemination of Code of Conduct

All employees of IIF, including the Board of Directors and Board of Commissioners, have to understand the code of conduct and sign a statement declaring that they have read and understood the contents of the code of conduct. Any employees violating the Code of Conduct or having been found guilty of a criminal act shall receive internal disciplinary action including termination of work contract. Other than IIF's

sebagai karyawan. Selain kebijakan IIF dan Kode Etik, semua pihak yang berkepentingan di IIF harus mematuhi baik regulasi maupun semangat hukum di Indonesia atau hukum di negara lain tempat mereka beroperasi.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Agar kode etik Perusahaan dijalankan dan ditegakkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap karyawan, IIF memberlakukan sanksi atas tindakan pelanggaran kode etik. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melanggar berupa peringatan lisan dan tertulis sampai dengan penghentian hubungan kerja.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam menjalankan bisnisnya, IIF senantiasa menegakkan prinsip anti korupsi yang harus di jalankan oleh setiap karyawannya. IIF telah menerapkan *Anti-Corruptions Guidelines* dari World Bank. IIF juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan praktik korupsi serta ketentuan mengenai sanksi yang diberikan jika terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut. aturan pencegahan dan informasi mengenai sanksi yang diberikan tertuang dalam beberapa pasal dalam kode etik Perusahaan yaitu:

- Pasal 30 tentang Kode Etik dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi
Setiap Karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan dan Pedoman Pencegahan Kecurangan dan Anti Korupsi yang merupakan bagian dari Peraturan Perusahaan ini sebagaimana terlampir.
- Pasal 31 tentang Pengawasan
 1. Manajemen atau Atasan Langsung berhak mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan ini.
 2. Setiap Atasan Langsung bertanggung jawab dan wajib memberi teladan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan ini, serta memastikan terselenggaranya tata tertib dan disiplin Karyawan yang berada di bawah tanggung jawab pengawasannya.

policies and Code of Conduct, all personnel must also adhere to the prevailing laws and regulations in Indonesia, or other countries in which they operate.

Enforcement and Sanction on the Violation of Code of Conduct

IIF established a punishment mechanism for its employees having been proven to violate the Company's Code of Conduct in order to ensure that it is implemented and enforced thoroughly. The sanctions are verbal and written warnings until the termination of the employment.

ANTI-CORRUPTION GUIDELINES

In conducting its business, IIF always uphold the anti-corruption principles that has been executed by all of the employees. IIF has implemented the Anti-Corruptions Guidelines of the World Bank. IIF has also put in place a policy related to the prevention of corrupt practices as well as provisions on sanctions to be imposed for the violating employees. Provisions on the graft prevention and information on the sanctions given are set forth in numerous articles in the Company's code of conduct, namely:

- Article 30 on Code of Conduct and Guidelines on Fraud Prevention and Anti Corruption
Every employee is obliged to comply with and perform all provisions stipulated in the Company's Code of Conduct and Guidelines on Fraud Prevential and Anti Corruption which are an inseparable part of this Company Regulation as attached.
- Article 31 on Supervision
 1. Management and Immediate Supervisor is entitled to take actions and give sanctions to the Employees who violate this Company Regulation.
 2. Every Immediate Supervisor is obliged to and responsible for being an exemplary leader that complies with this Company Regulation and ensuring that the Employees under his/her supervision obey the regulation and act with discipline.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Guna menjamin terciptanya kegiatan operasional yang bertanggung jawab serta upaya bersama dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan internal Perusahaan, IIF dengan sengaja membentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh karyawan melalui *whistleblowing system*. Mekanisme ini ditujukan guna melakukan investigasi serta mendekteksi sedini mungkin pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung di luar proses pengawasan yang dilakukan oleh unit khusus di Perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menggerakan aktivitas pengawasan serta menciptakan proteksi berlapis dalam menunjang kinerja organ-organ yang berwenang. Aturan mengenai *whistleblowing system* telah disetujui oleh manajemen yang diwakili oleh Presiden Direktur dan disahkan oleh pihak yang mewakili pemerintah setempat dan tertuang dalam buku pedoman operasional Perusahaan.

Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Pengaduan
Dalam mekanisme ini, IIF berupaya sedini mungkin melakukan pendektesian pelanggaran yang berasal dari laporan karyawan baik rekan kerja, atasan maupun bawahan pihak terlapor. Pelapor dapat menyampaikan pengaduannya kepada gugus tugas *whistleblowing* yang berasal dari Direksi, komite maupun Departemen SDM agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Dari laporan yang masuk, Unit yang diberi tugas untuk menampung pengaduan melakukan pengumpulan bukti-bukti serta melakukan koordinasi secara efektif dengan organ-organ pengawas terkait.

Setelah ditindaklanjuti dan dilakukan koordinasi secara intensif dengan organ-organ yang berwenang, investigasi atas pengaduan yang masuk segera dilakukan proses peyidikan dengan melihat sejauh mana pelanggaran dilakukan serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada. Jika pelanggaran yang dilaporkan masuk dalam pelanggaran kode etik namun tidak terkait masalah pidana maupun perdata maka penyelesaiannya dilakukan secara internal dengan memberikan sanksi-sanksi yang berlaku. Jika pelanggaran yang dilaporkan terkait masalah pidana maupun perdata maka penyelesaian dilakukan oleh pihak yang berwajib dan skala sanksi yang diberikan oleh internal Perusahaan menyesuaikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to ensure responsible operational activities and as part of our collective efforts to prevent any kind of violations in the Company's internal environment, IIF has a strong focus on establishing a supervising mechanism that engages all employees through the whistleblowing system. This mechanism aims to investigate and provide early detection of violations that occurred beyond the ongoing supervisory activities conducted by the special unit in the Company. This aims to make supervisory activities more dynamic and create a multi-layered protection defense to support the authorized organs' performance. The regulation on the whistleblowing system has been approved by the management that is represented by the President Director and has been ratified by the authorized representative of the local government and stated in the Company's operational manual.

How to Submit Reports and Complaint Handling

Through this mechanism, IIF strives for early detection of violations that are reported by the employees, either by the working partner, immediate supervisor, or the subordiante of the reported party. The whistleblower may submit his/her complaint to the whistleblowing unit officer coming from the Board of Directors, committees or HR Department, so that the complaint can be immediately followed up. Based on the incoming reports, the Unit responsible for collecting the complaints must gather the evidence relating to it and effectively coordinate with related supervisory organs.

After the follow-up procedure and intensive coordination with the supervisory organs, the Company will investigate the incoming reports by observing how far the violation has occurred while verifying the presented evidence. In case the reported complaint is categorized as a violation of the code of conduct and not related to either civil or criminal actions, then the violation will be settled internally by giving the applicable sanctions. In the event that the reported complaint relates to either civil or criminal action, then the violation will be settled by the competent authorities, and the scale of sanctions imposed by the Company's internal management will conform to the penalty given by the authorities.

Perlindungan bagi Pelapor

IIF memiliki kebijakan untuk merahasikan identitas pelapor sampai proses laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Pembukaan identitas pelapor dilakukan jika laporan tersebut masuk ke dalam ranah hukum dan proses penyelidikannya dilakukan oleh intansi hukum yang berwenang. Meski demikian, perusahaan akan mengajukan kepada instansi terkait untuk memberi perlindungan bagi pelapor.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Seperti yang telah disebutkan, pihak yang diberi kewenangan dalam melakukan pengelolaan pengaduan berasal dari Direksi, Komite-Komite, maupun Departemen SDM. Tim tersebut bersifat gugus tugas dan berlaku sementara sampai dengan penanganan diselesaikan.

Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut Sepanjang 2016

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat pengaduan serta tindak lanjut atas pengaduan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif membantu Perusahaan dalam menjaga asset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

IIF telah membangun proses, struktur dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa: Operasional Perusahaan telah dilakukan dengan efektif dan efisien; Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan Sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Sistem pengendalian internal Perusahaan dibangun dengan mengaplikasikan kerangka pengendalian internal dengan elemen-elemen utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan, dan bersama dengan unit Internal Audit memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara

Protection to the Whistleblower

IIF has established a policy to protect the identity of the whistleblower up until the reporting process is followed up and completed. The disclosure of the whistleblower's identity is made if the report is categorized as an unlawful action, thus the investigation will be performed by the competent authorities. Nevertheless, the company will propose protection for the whistleblower to the related institutions.

Parties Managing the Complaints

As mentioned earlier, the parties granted the authority to manage complaints are members of Board of Directors, Committees, or HR Department. This team is an internal unit and will handle the task temporarily until the problem is resolved.

Report on Complaints and Follow-Up throughout 2016

Within the last 2 (two) years, there were no complaints nor follow up for the complaints filed since the previous years.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of Internal Control System has effectively helped the Company maintain assets, ensure the availability of accurate information and reports, improve the Company's compliance with the applicable laws and regulations, and mitigate loss risk, deviation, and violation of prudence principles.

IIF has built the processes, structure, and internal control systems that provide the proper assurance that: the Company's Operations have been conducted effectively and efficiently; the laws and regulations in force have been obeyed; and the Financial reporting system is reliable.

The Company's internal control system is built by applying the internal control framework along with its key elements, namely controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communications, and monitoring activities.

The Board of Directors is responsible for developing and updating the internal control policy in the Company's environment and together with the Internal Audit unit, the Board of Directors monitors and oversees the implementation of the policies. Based on the monitoring and supervision

keseluruhan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan dengan efektif dan memadai.

PERKARA PENTING 2016

Sepanjang 2016, Perseroan tidak terlibat dalam perkara penting.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang 2016, tidak ada sanksi administratif yang diterima IIF antara lain.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN

Hingga tahun buku 2016, IIF belum melakukan pencatatan saham di bursa dan belum memiliki kebijakan mengenai alokasi saham yang diperuntukan bagi karyawan maupun manajemen IIF.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

IIF memiliki 4 (empat) aspek utama yang menjadi pedoman Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Keempat pedoman tersebut meliputi:

1. Prinsip pengadaan barang dan jasa
2. *High Level Process*
3. Metodologi
4. Sistem

Sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik staf perusahaan secara umum maupun pada bagian pengadaan senantiasa mengikuti prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Transparansi
Prinsip fundamental yang perlu dijunjung tinggi adalah prinsip transparansi dalam proses pengadaan. Prinsip ini meliputi penerapan proses pengadaan yang terperinci dan tersedianya sistem yang memastikan bahwa Perseroan mampu menyediakan beberapa pilihan operator/*supplier* yang kompeten dengan harga yang bersaing dalam menawarkan jasa.
2. Efektivitas
Proses pengadaan yang efektif harus dapat memberikan jaminan atas kualitas barang/ jasa yang dibutuhkan serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.
3. Efisiensi
Efisiensi waktu dan biaya mencakup biaya produk dan jasa, pemasangan, pengiriman, biaya perawatan purna jual dan lain sebagainya.

results, the overall internal control system has been performed effectively and appropriately.

LEGAL CASES IN 2016

During 2016, IIF has not been involved in any legal cases.

ADMINISTRATIVE SANCTION

No administrative sanctions were received by the Company during 2016.

EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

As of the financial year of 2016, IIF has neither listed its shares on a stock exchange nor established a policy on share allocation for employees or management.

SYSTEM AND PROCEDURE OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

IIF has 4 (four) main aspects that become the Company's guideline in implementing goods and services procurement activities. These four guidelines include:

1. Goods and service procurement principles.
2. High level of process
3. Methodology
4. Systems

Both the Company's employees in general and the procurement staff continue to comply with the following principles, covering:

1. Transparency
The fundamental principle that must be strongly upheld is the transparency principle in the procurement process. This principle covers the implementation of a detailed procurement procedure and the availability of systems that ensure that the Company is able to provide lists of competent operators/suppliers at a competitive price.
2. Effectiveness
Effective procurement process must be able to guarantee the quality of goods/services needed and the requirements needed.
3. Efficiency
Time and cost efficiency includes fees of products and services, installation, delivery, post-sales maintenance, and so on.

4. Value for Money

Barang atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan operasional, aspek kualitas dan taksiran proyek sepanjang hal tersebut sepadan dengan harga dan kualitas.

Hal yang harus diperhatikan terkait kegiatan pengadaan di Perusahaan adalah memastikan setiap pengajuan disetujui dan diketahui oleh pihak yang berwenang serta anggarannya telah disetujui oleh pihak pengguna anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi:

1. Kepala Operasional dan TI melakukan penelaahan pengajuan pembelian dari pihak user yang meliputi tipe pengadaan, metode pemilihan dan penyeleksian oleh user, dan memastikan pengajuan telah disetujui kepala departemen dari user atau pihak yang berada pada level-C dari departemen yang bersangkutan.
2. Staf pengadaan akan memulai proses pengadaan berdarkan metode yang disepakati.
3. Setelah merampungkan proses pemilihan vendor, staf pengadaan akan memilih tingkat yang paling tinggi dalam harga yang disetujui (delegasi kewenangan).
4. Petugas pengadaan akan mengumpulkan surat persetujuan dari DoA dan pemilik anggaran.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, petugas pengadaan akan melakukan finalisasi untuk mengeluarkan surat penunjukan atau penolakan kepada vendor.
6. Kepala Operasional dan IT akan menandatangani dan mengirimkan surat penunjukan maupun penolakan dan permintaan kerja.
7. Petugas pengadaan akan melakukan finalisasi surat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada vendor.

Proses pengadaan yang dilakukan oleh di Perusahaan menggunakan metodologi:

- a. Pengadaan langsung
- b. Usulan harga
- c. Tender terbatas
- d. Kontrak langsung

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

IIF memiliki beragam media informasi yang dapat diakses secara luas bagi masyarakat yaitu:

1. Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan

Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan IIF memuat beragam informasi tidak hanya terkait keuangan Perusahaan namun juga informasi-informasi terkait

4. Value for Money

Goods and services required by the Company must suit the operational needs, quality aspect, and project estimate so long as those matters are worth the price and quality.

One thing the Company should pay attention to regarding the procurement process is the need to ensure that every proposal is approved and known by the authorized party and that the budget is approved by the budget user. The goods and service procurement process includes:

1. Head of Operations and IT reviews the procurement proposal from users, which includes procurement type, methods of selection of users, and ensures the proposal has been approved by heads of department of the user or parties under the level-C of the concerned department.
2. Procurement staff will commence the procurement process based on the agreed method.
3. After completing the vendor selection process, the procurement staff will choose the select vendor within the approved price range that is deemed to have the highest quality (authority delegation).
4. The procurement staff will collect approval letter from DoA and budget owner.
5. Upon approval, the procurement staff will finalize the process to issue appointment or rejection letter to vendors.
6. Head of Operations and IT will sign and send appointment or rejection letter and purchase order.
7. The procurement staff will finalize the process to issue the required letter to be given to the vendor.

Procurement process conducted in the Company applies the following methodologies:

- a. Direct procurement
- b. Price proposal
- c. Limited tender
- d. Direct contracting

ACCESS TO COMPANY INFORMATION

IIF has several information media that are accessible to the public, namely:

1. Company Profile and Annual Report

IIF's Profile and Annual Report consists of various information related to not only the Company's financial condition but also its profile covering highlights,

lainnya seperti profil perusahaan yang meliputi kilas perusahaan, informasi produk dan jasa, event perusahaan, komposisi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Sedangkan dalam laporan tahunan tersedia informasi tidak hanya profil IIF melainkan laporan terkait implementasi GCG IIF dan laporan kegiatan tanggung jawab sosial.

information on products and services, events, shareholding composition and management composition. Furthermore, the annual report provides not only IIF's profile but also reports on GCG implementation and CSR activities carried out by the Company.

2. Sponsor

- Platinum Sponsor untuk 2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference di Jakarta pada 24 – 25 Mei 2016.
- Sponsor in the International Seminar – Soehadi Reksawardjojo yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 2016 oleh Yayasan Alumni Teknik Kimia ITB sekaligus merayakan 75 tahun pendidikan teknik kimia di Indonesia.
- Sponsor charity golf yang diselenggarakan oleh Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKKPII) - Pendidikan Teknik Kimia untuk Indonesia pada hari Minggu tanggal 21 August 2016.

3. Website

Informasi Perusahaan juga dapat diperoleh secara online dan mobile yaitu dengan mengakses alamat website www.iif.co.id.

2. Sponsorship

- Platinum Sponsor for the 2nd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference in Jakarta 24 – 25 May 2016.
- Sponsor of the International Seminar – Soehadi Reksawardjojo taking place from 27 – 28 October 2016 and organised by the Yayasan Alumni Teknik Kimia ITB to celebrate 75 years of technical chemical engineering education in Indonesia.
- Sponsor of a charity golf event organised by the Chemical Engineering Chapter of the Institution of Indonesia Engineers (BKKPII) on Chemical Engineering Education for Indonesia on Sunday 21 August 2016.

3. Website

Information on the Company can also be found online and through smartphone by accessing IIF's official website at www.iif.co.id.

SCAN ME



Tanggung Jawab Sosial
Perseroan

Corporate Social Responsibility





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Pada hakikatnya, peran infrastruktur bagi suatu kelompok masyarakat atau negara adalah untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup. Infrastruktur hadir guna memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan serta aktivitas pelayanan publik melalui sarana-sarana yang dapat diakses secara luas. Pembangunan sarana perhubungan, pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh peran penting infrastruktur bagi umat manusia dewasa ini.

Sebagai sarana publik, dalam proses pembangunan infrastruktur, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur pun harus mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan secara baik. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tetap pada koridornya dalam memberikan solusi dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Substantially, a society or a nation may benefit from infrastructure to realize their social and economic goals that specifically focus on the creation of welfare and improvement of living standards. Infrastructure exists to support the fulfillment of public service needs which are accessible through various facilities. The development of transportation facilities, power plants, telecommunication networks, and so on is one of the significant contributions of infrastructure to people's daily lives.

All parties involved need to uphold and highly respect social and environmental principles in the infrastructure development process as it is deemed as part of the public facilities. This approach is important to ensure that the development agenda remains on track and functions as a solution to current challenges, instead of triggering another problem in the future.



IIF sebagai salah satu lembaga pembiayaan infrastruktur di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang bersandar pada terpenuhinya prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang diimplementasikan dalam setiap prosedur bisnisnya.

As one of infrastructure financing companies in Indonesia, IIF plays a significant role to support infrastructure development that is based on the above-mentioned social and environmental principles which are constantly implemented in each business procedure

IIF sebagai salah satu lembaga pembiayaan infrastruktur di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang bersandar pada terpenuhinya prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang diimplementasikan dalam setiap prosedur bisnisnya. Tidak hanya sampai di sana, terkait aktivitas bisnis yang dilakukan IIF juga berkomitmen dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memuat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu *people, planet* dan *profit*.

Selain mengejar kinerja Perseroan dengan menciptakan keuntungan bisnis yang sebesar-besarnya (*Profit*), IIF juga dituntut untuk menjalankan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) serta kehidupan sosial kemasyarakatan dan ketenagakerjaan (*People*) melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Sepanjang 2016, IIF telah menjalankan program CSR yang menyasar pada 4 (empat) aspek penting seperti lingkungan dan pelestariannya, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap klien.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Tanggung jawab IIF dalam bidang lingkungan dijalankan secara terintegrasi dengan proses bisnis yang berlaku di Perseroan. IIF memiliki Unit Sosial dan Lingkungan (S&E) yang berperan dalam melakukan penilaian kepatutan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan memenuhi 8 (delapan) Prinsip Sosial dan Lingkungan yang ada. Lebih jauh, IIF tidak hanya bertindak sebagai assessor namun juga berperan dalam memberikan arahan terhadap klien bagaimana proyek-proyek yang belum memenuhi kedelapan prinsip tersebut pada akhirnya dapat terpenuhi sehingga pendanaan proyek dapat dilakukan. Ke depan, dengan standardisasi tersebut diharapkan setiap proyek infrastruktur yang ada di Indonesia terbiasa dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dasar Kebijakan

IIF memiliki kebijakan internal yang mengatur peran-peran Perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang lingkungan. Kebijakan tersebut tercantum dalam *Operation Manual Batch 2* bab 3 mengenai IIF: *Environmental and Social Safeguards Framework* (ESSF).

As one of the infrastructure financing companies in Indonesia, IIF plays a significant role to support infrastructure development that is based on the above-mentioned social and environmental principles, which are consistently implemented in each business procedure. Furthermore, IIF is also committed to carrying out business activities in accordance with the sustainable development principles consisting of the 3 (three) major dimensions, namely people, planet and profit.

In addition to improving performance by creating profitable business (**Profit**), each company, including IIF, needs to take responsibility for environmental preservation (**Planet**) as well as the welfare of the public in general and its employees (**People**) through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs.

During 2016, IIF conducted CSR programs that targeted 4 (four) main aspects, namely environmental preservation, social community, employment and responsibility to the clients.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

IIF's environmental responsibility program is integrated with the existing business process in the Company and has been consistently conducted. IIF has established a Social and Environmental Unit (SEU) that functions to assess the feasibility of financing facility provision for infrastructure projects based on the 8 (eight) Social and Environmental Principles. Furthermore, IIF does not only act as an assessor but also provides advice to clients on how to comply with the principles to help them secure financing. With the fulfillment of the S&E principles as the prevailing standard, it is expected that every infrastructure project in Indonesia can ultimately apply the S&E values as part of its compliance culture.

Policy Basis

IIF has an internal policy that stipulates its roles in carrying out its responsibility to the environment. The policy is stated in Chapter 3 of the Operation Manual Batch 2 which sets out the Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Landasan Filosofis dan Kebijakan

Keikutsertaan dalam seminar yang relevan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, di mana karyawan inti IIF ikut terjun sebagai pembicara, akan tetap menjadi salah satu agenda tahunan dari program CSR. IIF berusaha untuk tetap memberikan wawasan tentang bagaimana infrastruktur yang lebih baik memungkinkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan lebih banyak manfaat terutama di daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki sumber daya yang memadai.

Kegiatan CSR di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2016, IIF telah berhasil menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan mengenai:

1. Pembiayaan dan manajemen risiko dalam proyek infrastruktur termasuk aspek sosial dan infrastruktur pada April 2016 kepada anggota Asosiasi Bank Regional ("ASBANDA").
2. Pembiayaan dan manajemen risiko bekerja sama dengan Banker Association for Risk Management ("BARa") pada Mei 2016.
3. Berbagi pengetahuan lainnya terkait prinsip Sosial dan Lingkungan yang diselenggarakan pada April 2016 bersama PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA").

Selain menjalankan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang sejalan dengan kegiatan bisnisnya, IIF juga melaksanakan kegiatan yang bersifat filantropi dengan memberikan bantuan berupa donasi maupun *community development* bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan sepanjang 2016 antara lain:

1. Pemberian donasi kepada Wisma Tuna Ganda "Palsigunung", Jalan Raya Bogor KM. 28,5 Cimanggis – Depok – Jawa Barat. Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 27 Juni 2016.
2. Pemberian donasi kepada Yayasan Khadijah, Jl. Batan No. 12 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan yang dilaksanakan pada Selasa, 28 Juni 2016.
3. Donasi atas Banjir Bandang di Garut

Kota Garut dilanda bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 28 September 2016. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami dampak terparah dari banjir

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY FIELD

Philosophical Foundation and Policy

One of the yearly agenda items of IIF's CSR programs is the organization of relevant seminars that aim to educate the public on the importance of infrastructure with IIF's key personnel being the keynote speakers. IIF strive to continuously educate the surrounding community about how infrastructure development can open up opportunities and bring wider benefits especially in the areas with high potential of development and adequate resources.

CSR Activities in the Social Community Field

Throughout 2016, IIF has held the following knowledge sharing sessions concerning:

1. Financing and risk management in infrastructure project, including social and infrastructure aspects in April 2016 to members of Association of Regional Development Banks ("ASBANDA").
2. Financing and risk management in cooperation with Banker Association for Risk Management ("BARa") in May 2016.
3. Other knowledge sharing sessions concerning Social and Environmental principle held in April 2016 with PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA").

In addition to implementing social responsibility in the community that is in line with the Company's business, IIF carries out various philanthropic activities in the form of donations and community development programs for those in need. Activities conducted in 2016 were:

1. Donation for Wisma Tuna Ganda "Palsigunung", Jalan Raya Bogor KM. 28,5 Cimanggis – Depok – West Java. The donation was given on Monday, 27 June 2016.
2. Donation for Yayasan Khadijah, Jl. Batan No. 12 Lebak Bulus – Cilandak – South Jakarta. The donation was given on Tuesday, 28 June 2016.
3. Donation for victims of the flood in Garut.

On early Wednesday morning, 28 September 2016, Garut was struck by severe flash floods. Among the locations that were severely affected by the floods were Tarogong



bandang tersebut yaitu Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Boyongbong dan Kecamatan Banyuresmi. Sebagai bentuk CSR, IIF berkontribusi dengan memberikan donasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat. IIF melaksanakan pemberian bantuan pada Rabu, 28 September 2016.

Kidul District, Garut Kota District, Karangpawitan District, Boyongbong District and Banyuresmi District. As part of its CSR activities, IIF contributed to help the victims by providing donations to the Regional Government of Garut Regency on Wednesday, 28 September 2016.

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Dasar Kebijakan

IIF senantiasa mematuhi seluruh aturan terkait ketenagakerjaan dengan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab Perseroan terhadap karyawan-karyawannya. Untuk itu, IIF melalui jajaran pengambil keputusan menetapkan kebijakan yang mengatur hal-hal di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang tertuang dalam Peraturan Perseroan yang disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan no. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015 yang berlaku dari 2015 – 2017.

Kegiatan CSR di Bidang Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

IIF melaksanakan rekrutmen pegawai dengan mempertimbangkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hal ini, IIF secara profesional memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat untuk dapat bergabung dan bekerja di Perseroan. Komposisi pegawai IIF berdasarkan *gender* pun telah memenuhi *affirmative action*, bahkan untuk sebaran jenis kelamin pegawai sudah mencakup seluruh level yang ada. Dengan begitu, dominasi suatu level oleh *gender* tertentu dapat diminimalisasi.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Policy Basis

IIF strives to always adhere to all regulations related to manpower by fulfilling the rights of its employees. Hence, through its management, IIF establishes policies that regulate various issues in manpower and occupational health and safety fields that are stipulated in the Company Regulation that is approved by the Head of One-Stop Integrated Service Office of South Jakarta no. 259/11.25.0/31.74/-1.837/2015, valid from 2015 – 2017.

CSR Activities in Manpower Field

Gender Equality and Work Opportunity

IIF recruits employees by considering qualifications that must be met by all candidates without any prejudice to gender. In this case, IIF professionally provides the same opportunities for each candidate to join and work at the Company. Employee composition based on gender is already in line with the affirmative action spirit, and the composition is balanced across the hierarchy in order to minimize gender domination at every level of the organization.

IIF telah menetapkan kebijakan yang mengatur kesetaraan gender yang sudah disetujui dengan Keputusan manajemen No.SK.2017.004/I/IIF-HR&GA.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Dikarenakan aktivitas kerja IIF secara umum banyak dilakukan di dalam ruangan, penyediaan sarana dan keselamatan kerja sifatnya mengikuti prosedur keselamatan yang disediakan pihak pengelola bangunan gedung tempat kantor pusat IIF atau operator proyek pada saat melakukan kegiatan kunjungan lapangan. Secara berkala, seluruh karyawan IIF mengikuti kegiatan tanggap bencana yang dilaksanakan oleh pihak pengelola gedung meliputi simulasi-simulasi dengan skenario yang berbeda. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kewaspadaan pegawai IIF jika sewaktu-waktu berada dalam keadaan berbahaya saat bekerja.

Untuk sarana penunjang, area kantor IIF dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang meliputi alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau, alat pendekripsi asap serta adanya tangga darurat untuk jalur evakuasi.

Tingkat Perpindahan Karyawan (Turnover)

Tingkat *turnover* yang tinggi tentunya akan menyulitkan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pegawai secara cepat dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya tingkat *turnover* suatu Perseroan diantaranya beban kerja tinggi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang andal dan berpengalaman, karakter suatu angkatan kerja dalam memandang dunia kerja, terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar di tempat lain, interaksi sosial di tempat kerja dan lain sebagainya.

Untuk itu, IIF berusaha sebaik mungkin dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat *turnover* karyawan. IIF dibantu oleh departemen SDM berusaha sebaik mungkin mengendalikan angka tersebut dengan menyusun program-program yang tepat dan efektif. Angka *turnover key personnel* IIF sepanjang 2016 sebesar 0%.

IIF has determined its policy that regulates gender equality approved by the management decree No.SK.2017.004/I/IIF-HR&GA.

Occupational Safety Facilities

Given the nature of IIF's activities, which are mostly performed in office premises, IIF provides occupational safety facilities in accordance with the safety procedures set by the building management where IIF's head office is located, or by the project operator when a site visit takes place. IIF's employees have periodically participated in disaster response activities prepared by the building management where they will be drilled in various disaster response simulations of diverse scenarios. They will benefit from this activity, as it can improve their preparedness in anticipating emergencies during work hours.

In terms of infrastructure, the IIF office area is equipped with several fire extinguishers placed in strategic and easily accessible locations, smoke detectors, as well as emergency stairs for evacuation needs.

Employee Turnover

A high turnover rate may complicate the Company's efforts to conduct its business optimally. Among the factors that may cause such hindrance is the limited number of workers to complete urgent tasks. There are several factors contributing to the high turnover rate of a company, among others, a high workload that requires experienced and reliable workers, workers' mindset in viewing the business world, better opportunities on offer at other companies, and social interaction in the workplace and so on.

To that end, IIF considers thoroughly all factors that influence a high turnover rate. Supported by its HR department, IIF strives to manage this issue by properly developing many effective programs for its human resources. In 2016, the Company's turnover rate of key personnel reached 0%.

Remunerasi dan Manfaat

Dalam menentukan besaran remunerasi karyawan, IIF berpedoman pada regulasi mengenai pemberian upah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang serta penyesuaian nominal yang berlaku umum pada bidang usaha sejenis. Hal tersebut diperlukan agar remunerasi karyawan di IIF menjadi lebih kompetitif.

IIF memberikan manfaat yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap karyawannya.

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi, Perseroan juga memberikan fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan;
2. BPJS Kesehatan;
3. Tunjangan Hari Raya yang diberikan setahun sekali;
4. Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
5. Tunjangan keanggotaan olahraga.

Pengembangan Karyawan

Kebutuhan karyawan terhadap kesempatan pengembangan karir dalam bekerja menjadi fenomena umum dalam dunia ketenagakerjaan. Selain sebagai kebutuhan karyawan, jenjang karir juga memberi manfaat bagi Perseroan dalam hal pengaturan hierarki organisasi kerja agar lebih efektif dan efisien serta bagian dari upaya strategis untuk mengatur sistem regenerasi tenaga kerja Perseroan.

IIF membuka kesempatan yang luas bagi segenap karyawannya untuk dapat mengembangkan karier di Perseroan. IIF telah membentuk mekanisme jenjang karier yang disesuaikan dengan pola organisasi yang ada serta menghadirkan program-program pengembangan talenta untuk tenaga kerja Perseroan yang memiliki potensi pada bidang tertentu. Hal tersebut bertujuan agar dikemudian hari individu-individu terpilih dapat mengisi posisi strategis di Perseroan atau menciptakan tenaga ahli yang mendorong perbaikan kinerja bisnis IIF di masa mendatang.

Remuneration and Benefits

In determining the amount of remuneration for its employees, IIF refers to the prevailing regulations on remuneration issued by the authorities and adjusts it to the amount that is generally applicable within a similar business field. This aims to make employee remuneration more competitive.

IIF also provides various benefits that may enhance its employees' wellbeing.

In addition to basic salary, communication and transportation allowances, the Company also provides other facilities and benefits, among others:

1. BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Program);
2. BPJS Kesehatan (Healthcare Social Security Program);
3. Annual Religious Holiday Allowance (THR);
4. Reimbursement for outpatient and inpatient medication for employees and their family members; and

5. Sport Membership Allowance.

Employee Development

Career development is a common goal of every employee. Aside from fulfilling the employee's needs, career development allows the Company to manage an even more effective and efficient work organization hierarchy and is part of the Company's strategic plan to prepare succession programs.

IIF offers wide opportunities for its employees to develop their careers by establishing a career development mechanism that has been adjusted to the organization pattern and by providing talent development programs for employees who have potential in certain fields. This aims to prepare individuals that can meet strategic positions in the Company or to create experts that may improve the Company's business in the future.

Dalam proses pengembangan karier karyawan, IIF senantiasa berpedoman pada pemenuhan syarat dasar dan hasil evaluasi atas Key Performance Indicator (KPI) yang telah dicapai. Dari hasil tersebut, Perseroan akan melakukan serangkaian proses lanjutan sampai dengan tahap final bagi karyawan tersebut hingga pada akhirnya dapat menduduki jabatan yang dimaksud.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

IIF menyediakan sarana pengaduan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan. Sarana tersebut meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal* di mana didalamnya termasuk *direct coaching*, mekanisme *whistleblower* yang telah diatur di Peraturan Perusahaan. Selain itu, dalam 4 (empat) bulan sekali, manajemen mengadakan *town hall meeting* dimana dalam rapat tersebut manajemen akan membahas strategi kedepannya secara *top-down*, disamping menampung masukan-masukan dari pihak karyawan atas IIF maupun terkait pekerjaan masing-masing individu

IIF always takes into account the employees' fulfillment of basic requirements and their Key Performance Indicator (KPI) evaluation in preparing the employees' career path. Based on the results of these two parameters, the Company will perform a series of follow-up activities up until the final stage of the promotion process. The outcome is the fulfillment of the vacant position by the promoted employee.

Complaints Mechanism on Manpower Issues

IIF has provided a complaints channel for manpower issues which cover the Performance Appraisal system, including direct coaching and whistleblower mechanism that has been set out in the Company's Regulation. In addition, once every 4 (four) months, the management holds a town hall meeting to discuss a top-down strategy development. The meeting also serves to accommodate inputs from the employees regarding the Company's issues or their duties.

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP KLIEN

Penyediaan Informasi Barang dan Jasa

Dalam memberikan informasi terkait produk dan layanan yang diberikan, IIF menyediakan sarana berupa pemberian informasi mengenai korporasi yang terkini melalui website IIF: www.iif.co.id.

Selain itu, IIF senantiasa meninjau dan menetapkan Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan internal (beserta dengan penerapan sistem yang baru). IIF juga telah melakukan sosialisasi proaktif mengenai prosedur operasional bagi pelanggan internal dalam rangka memperbaiki proses yang tepat meningkatkan manajemen risiko dan memperkecil biaya.

CORPORATE RESPONSIBILITY TO CLIENTS

Provision of Information

IIF has prepared an information channel to disclose any company updates including the products and services through IIF's website: www.iif.co.id.

IIF has also reviewed and determined new Service Level Agreements with internal customers (along with the implementation of new systems). IIF has conducted a proactive socialization of the operations procedures to internal customers to improve correct processes for better results, better operational risk management and lower costs.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2017

Dewan Komisaris Board of Commissioners

M. Chatib Basri

Presiden Komisaris/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner

Edwin Gerungan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Zulkifli Zaini
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Marwanto Harjowiryo
Komisaris
Commissioner

Robert Pakpahan
Komisaris
Commissioner

Richard Ranken
Komisaris
Commissioner

Robert Olivier Dolk
Komisaris
Commissioner

Hans-Juergen Hertel
Komisaris
Commissioner

Rajeev Kannan
Komisaris
Commissioner

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2016 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance, is presented in its entirety.
We are fully responsible for the contents of this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 2017

Direksi Board of Directors

Arisudono Soerono

Presiden Direktur & Chief Executive Officer

President Director & Chief Executive Officer

Indrawati Darmawan

Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer

Managing Director & Chief Financial Officer

Harold Tjiptadjaja

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer

Hilda Savitri

Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer

Managing Director & Chief Investment Officer

Wito Krisnahadi

Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer

Managing Director & Chief Risk Officer

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORTS



The Energy Building, 30th Floor
Sudirman Central Business District, Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - Indonesia
12190

Phone : 62 21 2991 5060
Fax : 62 21 2991 5061
Email : info@iif.co.id

www.iif.co.id